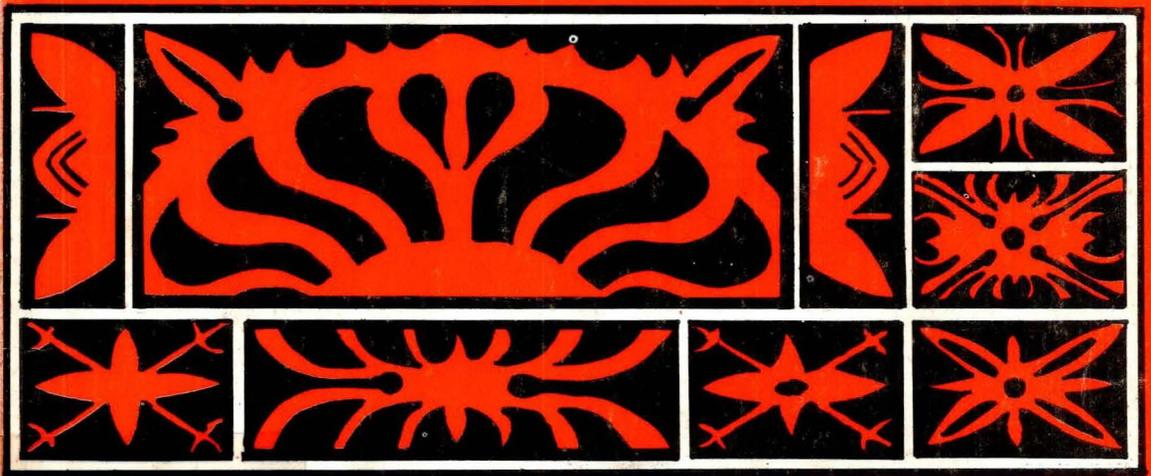


Milik Dep. DIKBUD
Tidak diperdagangkan



**SISTEM KEPEMIMPINAN
DI DALAM MASYARAKAT
PEDESAAN DI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**



Direktorat
Budayaan
22

DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

307.40822

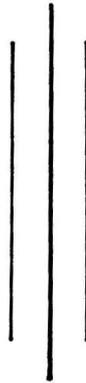
SUD

S



Penyempurna / Editor
I. RAF DARNYS

**SISTEM KEPEMIMPINAN
DI DALAM MASYARAKAT
PEDESAAN DI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**



**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
1983 / 1984**

4712
09-04-2007
304-35983

TIM PENYUSUN TERDIRI DARI :

1. Drs. S.Z. Hadisutjipto : Konsultan
2. Drs. S u d i y o : Ketua Aspek
3. Drs. Moh. Salim : Anggota
4. Drs. Marudji : Anggota

P R A K A T A

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DKI Jakarta yang sebelumnya bernama Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah DKI Jakarta telah mencetak dan menerbitkan beberapa naskah Kebudayaan Daerah.

Pada Tahun Anggaran 1986/1987 Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DKI Jakarta juga telah berhasil mencetak 4 (empat) judul naskah Kebudayaan Daerah DKI Jakarta di antaranya berjudul : "Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan DKI Jakarta".

Naskah ini adalah merupakan hasil penelitian Tim Peneliti yang diangkat oleh Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 1983/1984.

Oleh karena itu dengan telah selesai dan diterbitkannya buku ini, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan Bp. Dir. Ditjarnitra Ditjenbud; Bp. Gubernur KDKI Jakarta; Bp. Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta; Ibu Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dan seluruh Tim Peneliti serta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga berhasilnya penerbitan buku ini.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Jakarta, Nopember 1986.
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah DKI
Jakarta,



G.A. Warmansjah.

NIP.: 130253962.

KATA SAMBUTAN

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; dahulu kita kenal dengan sebutan Betawi yang sebagaimana daerah-daerah yang lainnya di Indonesia juga memiliki kisah-kisah tersendiri tentang kebiasaan ataupun tradisi yang dilakukannya yang biasa kita kenal dengan istilah Kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu cermin dan kebanggaan dari kehidupan suatu bangsa. Begitu pula kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan suatu kebanggaan dan cermin dari kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan yang senantiasa harus kita pelihara, kita bina dan kita kembangkan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional.

Oleh karena penerbitan buku berjudul : "Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan DKI Jakarta", oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 1986/1987, merupakan wujud nyata dari usaha kita melestarikan kebudayaan. Buku ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi sejarah yang sangat berharga, yang tentunya perlu diketahui dan dihayati oleh kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang berbudaya.

Akhirnya kami yakin penerbitan buku ini memberikan sepercik sumbangsih bagi Pembangunan Nasional yang sedang kita laksanakan sekarang, khususnya pembangunan dalam bidang kebudayaan.



Nopember 1986
Sala Sanwil Depdikbud DKI

Dra. L.E. COLDENHOFF

NRP. 2046/P.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan DKI Jakarta Tahun 1983/1984.

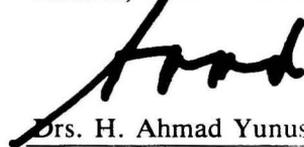
Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Oktober 1986.



Drs. H. Ahmad Yunus.

NIP.: 130146112.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. MASALAH	
1. Masalah Umum	5
2. Masalah Khusus	5
B. TUJUAN	
1. Tujuan Umum	5
2. Tujuan Khusus	5
C. RUANG LINGKUP	6
D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH	6
1. Metode	6
2. Langkah Kerja	7
BAB II : IDENTIFIKASI	11
A. LOKASI	11
1. Letak Geografis	12
2. Keadaan Alam	14
3. Pola Perkampungan	17
B. PENDUDUK	22
1. Demografi Data	26
2. Mobilitas	30
C. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA	36
1. Asal-usul	38
2. Pada Periode Penjajahan Belanda	40
3. Pada Periode Penjajahan Jepang	42
4. Pada Periode Kemerdekaan	44
D. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA	47
1. Kolektiva dan Data Desa	47
2. Sistem Kekerabatan	51
3. Sistem Ekonomi	53
4. Sistem Teknologi	55
5. Sistem Religi	57
6. Bahasa	59
7. Kesenian	61

BAB III	: GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN	65
	A. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA	
	1. Struktur	68
	2. Tugas dan Kewajiban	69
	B. SISTEM KEPEMIMPINAN	71
	1. Kepemimpinan Formal	73
	2. Kepemimpinan Formal Tradisional	76
	3. Kepemimpinan Non Formal	79
BAB IV	: POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL	83
	A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN SOSIAL	83
	1. Nama Organisasi	84
	2. Tempat dan Kegiatan	86
	3. Tujuan Yang Dicapai	86
	B. SISTEM KEPEMIMPINAN	88
	1. Syarat-syarat dan Faktor Pendukung	88
	2. Hak dan Kewajiban	90
	3. Atribut/Symbol Kepemimpinan	94
	4. Cara Pengangkatan dan Upacara	95
	C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN DI BIDANG SOSIAL DALAM MASYARAKAT	97
BAB V	: POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI	101
	A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN EKO-NOMI	101
	1. Nama Organisasi	103
	2. Tempat dan Kegiatan	104
	3. Tujuan Yang Akan Dicapai	105
	B. SISTEM KEPEMIMPINAN	107
	1. Syarat-syarat dan Faktor Pendukung	108
	2. Hak dan Kewajiban	109
	3. Atribut/Symbol Kepemimpinan	111
	4. Cara Pengangkatan dan Upacara	112
BAB VI	: POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA	117

A.	ORGANISASI DALAM KEGIATAN KE- AGAMAAN	117
1.	Nama Organisasi	118
2.	Tempat dan Kegiatan	120
3.	Tujuan Yang Akan Dicapai	121
B.	SISTEM KEPEMIMPINAN	122
1.	Syarat-syarat dan Faktor Pendukung	124
2.	Hak dan Kewajiban	125
3.	Atribut/Symbol Kepemimpinan	126
4.	Cara Pengangkatan dan Upacara	
C.	PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BI- DANG AGAMA DALAM MASYARAKAT	128
BAB VII	: POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN	131
A.	ORGANISASI DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	131
1.	Nama Organisasi	133
2.	Tempat dan Kegiatan	134
3.	Tujuan Yang Akan Dicapai	136
B.	SISTEM KEPEMIMPINAN	137
1.	Syarat-syarat dan Faktor Pendukung	137
2.	Hak dan Kewajiban	138
3.	Atribut/Symbol Kepemimpinan	139
4.	Cara Pengangkatan dan Upacara	140
C.	PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BI- DANG PENDIDIKAN DALAM MASYA- RAKAT	141
BAB VIII	: BEBERAPA ANALISA	145
A.	PENGARUH KEBUDAYAAN TERHADAP SISTEM KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN	145
B.	SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN SEHU- BUNGAN DENGAN SISTEM ADMINISTRASI PO- LITIK NASIONAL	146
C.	SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	148
BIBIOGRAFI		151
LAMPIRAN-LAMPIRAN		169
INDEKS		157

BAB I P E N D A H U L U A N

Pada hakekatnya seluruh wilayah pedesaan di Indonesia pada dewasa ini, baik secara ketat maupun secara longgar, telah berada di bawah kontrol kekuasaan administrasi pemerintah. Bahkan kelompok-kelompok komuniti kecil yang setengah mengembara, yang biasanya digolongkan sebagai kelompok-kelompok suku-suku bangsa terasing, dengan satu dan lain cara telah berada dalam kontrol administrasi pemerintah (antara lain, melalui pengaturan administrasi oleh Departemen Sosial, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, dan Lembaga-Lembaga Pendidikan/Agama).

Keaneka ragaman corak pedesaan di Indonesia (Goortz, 1967; Koen-tjaraningrat, 1967; Suparlan, 1978) terwujud dalam bentuk : (1) tingkat kebudayaannya, yaitu dari "**primitif**" sampai dengan yang sudah mengenal perbedaan "**modern**"; (2) sistem ekonominya, yaitu dari yang masih hidup berdasarkan sistem perladangan (membakar hutan belukar dan menyebar bibit tanaman dengan tugal) yang berpindah-pindah dan **meramu** sampai dengan yang bersawah dengan sistem **agri-bisnis** yang modern; (3) corak masyarakatnya, yaitu dari yang terwujud dalam bentuk komuniti-komuniti kecil, setengah mengembara dan **terisolasi**, sampai dengan yang terwujud sebagai masyarakat-masyarakat pedesaan yang besar dan padat penduduknya dengan corak struktur-struktur sosialnya yang kompleks yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau urbanisasi; (4) bersuku bangsaannya, yaitu dari yang bercorak tunggal, bersifat korporasi (**klenlineage**) dan tertutup sampai dengan yang bercorak majemuk kesuku bangsaan warga masyarakatnya dan bersifat terbuka; dan (5) prinsip-prinsip yang melandasi sistem-sistem sosial sebagaimana yang terwujud dalam hukum adat istiadat yang berlaku, yaitu yang berdasarkan ikatan kekerabatan, **teritorial**, atau kombinasi dari keduanya.

Adanya keaneka ragaman corak kebudayaan, sistem ekonomi, dan sistem sosial di pedesaan Indonesia **mengacu** kepada dan menjadi landasan dari adanya keaneka ragaman sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat desa. Walaupun secara tipologi keaneka ragaman sistem-sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat desa tersebut telah menjadi lebih sederhana karena adanya pengaruh kekuatan politik dari sistem administrasi, tetapi keaneka ragaman tersebut tetap ada karena adanya : (1) pengaruh kekuatan politik dari sistem nasional yang tidak seragam waktu mulai pengaruhnya di pedesaan Indonesia; (2)

orientasi politik dan kekuatan politik yang ada pada sistem kepemimpinan dan pemimpin di desa yang bersangkutan; (3) besarnya pengaruh kekuatan kebudayaan atas sistem politik yang berlaku setempat dan atas sistem kepemimpinan, yang secara keseluruhan di pedesaan Indonesia itu beraneka ragam, dalam menanggapi masuknya pengaruh kekuatan dari sistem nasional.

Pengaruh dari kebudayaan atas corak sistem politik dan kepemimpinan amat besar, yang kaitannya antara satu dengan lainnya dapat diumpamakan seperti kaitan hubungan antara air dengan ikan. Fried (1967) memperlihatkan bahwa masyarakat dengan kebudayaan yang sederhana mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang juga sederhana, dan sebaliknya masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang kompleks juga mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang kompleks.

Sedangkan Swarta (1968) memperlihatkan bahwa pada tingkat masyarakat setempat, yang dinamakannya dengan tingkat lokal dalam perbandingannya dengan tingkat nasional, proses-proses politik yang terwujud merupakan suatu hasil perpaduan antara hasil-hasil permainan sistem-sistem politik nasional, masyarakat setempat, sehingga secara aktual memberikan suatu corak yang tersendiri pada sistem politik dan kepemimpinan yang berlaku pada tingkat lokal tersebut. Dengan menggunakan konsep jaringan sosial (Suparlan, 1978) dan model kompetisi untuk sumber daya (Suparlan, 1977), Thamrin Hamdan memperlihatkan pula bahwa corak sistem politik dan kepemimpinan yang berlaku pada tingkat masyarakat setempat muncul sebagai hasil interaksi dan permainan antara unsur-unsur tradisional di masyarakat desa setempat dengan unsur-unsur yang datang dari kota

Untuk wilayah DKI Jakarta yang sejak jaman dahulu merupakan tempat perpaduan kebudayaan asli dengan kebudayaan yang datang dari berbagai suku bangsa di Indonesia, bahkan datang dari luar negeri, maka sifat tradisionalnya banyak mengalami perkembangan yang menuju ke arah penyempurnaannya yang lebih cepat, bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat, bahwa kebudayaan asli DKI Jakarta, yakni kebudayaan Betawi ternyata masih hidup subur dikalangan masyarakat Betawi. Tidak hanya di daerah perkotaan, bahkan sampai di daerah pedesaan atau perkampungan kebudayaan Betawi sangat digemari oleh masyarakat.

Jika kita menyinggung lebih lanjut kehidupan desa dan peranannya, maka dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk di negara kita adalah di bidang pertanian. Begitu pula penduduk di wilayah DKI Jakarta, pada mulanya sebagian besar berpenghidupan dari hasil pertanian. Akan tetapi agak berbeda dengan kebanyakan desa-desa lain di Indonesia. Kalau di daerah pedesaan di Indonesia selain DKI Jakarta hampir sebagian besar penduduknya tergantung daripada desa dengan hasil pertanian padi, maka untuk wilayah DKI Jakarta di daerah pedesaan kehidupan masyarakatnya dengan pertanian buah-buahan, sekalipun juga ada daerah persawahan, namun bukan daerah pertanian yang **potensial**, karena

daerah persawahannya sangat sempit dan hasilnya pun tidak dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di wilayah DKI Jakarta, hasil pertaniannya banyak dihasilkan oleh petani buah-buahan.

Perubahan-perubahan kebudayaan telah menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran wujud kebudayaan sebagai pengetahuan kebudayaan dari setiap **individu**. Masyarakat di daerah DKI Jakarta terdiri dari berbagai suku bangsa pendatang, namun tidak berarti bahwa kebudayaan penduduk asli akan lenyap dengan adanya suku bangsa pendatang tersebut.

Juga dengan adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta, tidak melenyapkan sama sekali sifat ketradisionalisan suku bangsa Betawi. Kedua-duanya ini dapat dilihat pada upacara-upacara adat tersebut masih nampak jelas ciri-ciri khas kebudayaan asli Betawi. Contohnya dalam upacara kematian, sunatan, perkawinan, bahkan dalam upacara memetik buah-buahan yang merupakan hasil pertanian di DKI Jakarta yang sangat potensial, yakni buah salak, rambutan dan sebagainya. Kadang-kadang upacara tersebut diadakan secara besar-besaran, dengan memotong hewan (**sapi**), sekalipun di wilayah DKI Jakarta pada saat ini sebagian besar penduduknya hidup secara **non agraris**.

Pembangunan perkampungan di DKI Jakarta, memang banyak menimbulkan perubahan-perubahan di berbagai bidang. Hubungan dan transportasi yang semakin mudah di wilayah DKI Jakarta, juga menimbulkan perubahan dalam usaha warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Bagi kaum tani di wilayah DKI Jakarta yang masih tampak kuat menggunakan, sistem ekonomi tradisional adalah terdapat di daerah **Condet** dan **Pasar Minggu**. Kemudian sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan di DKI Jakarta telah banyak dipengaruhi pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang pemerintahan. Bahkan untuk menunjukkan sistem kepemimpinan yang benar-benar masih bersifat tradisional memang sangat sulit. Karena akibat dari percepatan derap pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta sampai jauh masuk ke daerah pedalaman. Tetapi mengingat wilayah DKI Jakarta telah mengalami **pemekaran** untuk memenuhi kebutuhan wilayah perkotaan, dalam hal ini akan mengarah kepada kebutuhan sebagai Ibukota Negara yang bertaraf internasional, sehingga tentu saja mengalami perubahan-perubahan di sana-sini. Sistem kepemimpinan juga terus-menerus disempurnakan.

Proyek Mohammad Husni Thamrin, yakni untuk memberi nama proyek perbaikan kampung di DKI Jakarta, telah mempunyai akibat besar dalam sistem kepemimpinan bagi masyarakat pedesaan di wilayah DKI Jakarta. Untuk memberi nama desa di wilayah DKI Jakarta, memang pengertiannya tidak sama dengan desa di luar wilayah DKI Jakarta. Yang dimaksud desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tang-

ganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, 82; K. Wantjik Saleh, SH, 12).

Untuk di wilayah DKI Jakarta tidak terdapat pengertian desa seperti istilah tersebut di atas, dan yang ada ialah pengertian kelurahan, karena di wilayah DKI Jakarta organisasi pemerintahan terendah yang langsung di bawah Camat adalah kelurahan. Oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan penelitian dalam penulisan naskah ini, mengambil dua buah kelurahan yang dilakukan penelitian secara mendalam. Kelurahan tersebut terletak dalam satu wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Pasar Rebo. Dalam ketentuan disebutkan bahwa Kelurahan yang satu harus terletak dalam kota Kecamatan, dimana jaringan komunikasi telah terbuka dan mempunyai fasilitas perkotaan yang lengkap. Kemudian untuk Kelurahan yang satu lagi yakni kelurahan yang berada di daerah pinggiran atau pedalaman yang belum mempunyai sarana komunikasi, seperti lazimnya di daerah perkotaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk pembandingan perkembangan sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan, yang telah terkena pengaruh dari luar, dengan yang belum kena pengaruh kebudayaan dari suku bangsa lain dalam pengertian sifat ketradisionalnya masih kuat.

Dari ketentuan tersebut, maka penulis dapat memilih daerah penelitian di Kelurahan Rambutan, wilayah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, yang terletak di dalam kota Kecamatan, dan untuk kelurahan yang satu lagi adalah Kelurahan Cilangkap, yang berada di pinggiran wilayah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Dan mengenai Kelurahan Cilangkap ini di samping berada di pinggiran wilayah kecamatan juga berada di pinggiran wilayah DKI Jakarta.

Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan dalam Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, yang dikelola pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penulis Aspek Sistem Kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akan berusaha sebaik-baiknya. Pengumpulan data dan informasi tentang kebudayaan daerah yang menyangkut sistem kepemimpinan pedesaan di DKI Jakarta terus dilaksanakan secara cermat, terutama yang menyangkut kepemimpinan dihubungkan dengan masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dari hasil yang akan dicapai tersebut dan dapat pula diungkapkan dalam penulisan ini, sehingga dapat digunakan bagi peneliti-peneliti yang akan datang, terutama tentang masalah-masalah kebudayaan daerah DKI Jakarta khususnya maupun kebudayaan Indonesia pada umumnya. Mengingat Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah mempunyai pengertian luas, apalagi untuk wilayah DKI Jakarta mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, maka penulisan ini baru merupakan tahap awal.

A. M A S A L A H

1. Masalah Umum

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional belum dapat melayani data yang terjalin dalam bahasa kesejarahan nilai budaya, lingkungan budaya, sistem budaya, baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan kepentingan masyarakat.

2. Masalah Khusus

- a. Belum diketahui dengan cermat data dan informasi tentang sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan adalah merupakan masalah pertama yang mendorong dilaksanakan penelitian sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan.
- b. Belum diketahui sejauh mana peranan pengaruh kebudayaan dalam sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan, adalah merupakan masalah kedua yang mendorong dilaksanakannya penelitian sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan.
- c. Kemungkinan telah terjadi perubahan, punah atau tidak diperlukan lagi sebagian ataupun keseluruhan dari perangkat sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan, adalah merupakan pendorong dilaksanakannya penelitian sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan.

B. T U J U A N

1. Tujuan Umum

Agar Direktorat dan Nilai Tradisional mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengumpulkan dan menyusun laporan/naskah "Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta," yang mengungkapkan masalah kepemimpinan dihubungkan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Untuk melihat sejauh mana peranan dan pengaruh kebudayaan dalam sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan, yang akan dapat dipakai :
 - sebagai bahan penentuan kebijakan-kebijakan di bidang kebudayaan pada umumnya, khususnya dalam hal sistem budaya.
 - sebagai bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
 - sebagai bahan studi.

C. RUANG LINGKUP

Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah mempunyai pengertian luas. Dalam tahun 1983/1984 ini meliputi lima aspek. Salah satu diantaranya ialah aspek Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan, yang mengungkapkan bidang sistem kepemimpinan dalam jaringan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Penelitian sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan di DKI Jakarta, mengambil dua daerah lokasi yang dianggap mempunyai suatu kebulatan pengetahuan kebudayaan yang pendukungnya mempunyai latar belakang kehidupan pertanian.

Kedua daerah lokasi tersebut berada di dalam satu wilayah Kecamatan, satu diantaranya berada di dalam kota Kecamatan dan yang satu lagi berada di daerah pinggiran yang belum mempunyai jaringan komunikasi secara lengkap dan terbuka.

Adapun pendukung kebudayaan di DKI Jakarta yang termasuk kuat tradisionalnya adalah suku bangsa Betawi.

Suku bangsa tersebut pada mulanya berkehidupan dengan cara bercocok tanam, terutama dengan perkebunan buah-buahan. Pada saat ini kehidupannya sudah mulai terdesak dan banyak yang bergeser pindah ke daerah pinggiran kota. Namun demikian, tidak berarti kebudayaan Betawi ikut menjadi memudar, tetapi dalam kenyataan sampai sekarang kebudayaan Betawi tetap hidup subur di kalangan masyarakat Betawi. Oleh karena itu penelitian sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan di DKI Jakarta, mempunyai ruang lingkup dalam sistem kepemimpinan di bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, baik bagi suku bangsa Betawi maupun suku bangsa pendatang yang pada saat ini juga banyak bertempat tinggal di daerah pedesaan DKI Jakarta.

D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH

1. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode :

- a. Pengamatan biasa, yang bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan dengan menggunakan kaca mata peneliti yang telah di **filter** oleh masalah penelitiannya.
- b. Pengamatan terlihat, yang bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan yang makna keterangan tersebut sesuai dengan makna yang diberikan oleh informan terhadap keterangan yang dimaksudkan.
- c. Wawancara bebas, yang bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan yang sifatnya informal atau tidak resmi.

- d. Wawancara berstruktur, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang khusus yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan dapat berbentuk kuestioner.
- e. Studi dokumentasi (kepastakaan), yang bertujuan untuk memperoleh berbagai dokumen-dokumen dengan mempelajari surat-surat perintah, surat-surat keputusan, perjanjian-perjanjian, surat-surat kabar, buku-buku, dan lain-lain yang terwujud dalam bentuk catatan tertulis yang berhubungan dengan desa tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

2. Langkah kerja

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tahap persiapan :

Berlangsung pada bulan Mei 1983 sampai dengan Juni 1983, dalam bentuk :

- Mengikuti Pengarahan/Penataran Peneliti/Penulis Kebudayaan Daerah seluruh Indonesia di Cisarua Bogor – Jawa Barat.
- Rapat persiapan pendahuluan dengan anggota tim.
- Mengumpulkan bahan-bahan perpustakaan dan identifikasi sumber data.
- Menyusun instrumen penelitian.

Mempersiapkan perlengkapan lapangan dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk penelitian/penulisan.

- Orientasi lapangan dan pendekatan sosial.

b. Tahap pengumpulan data :

Berlangsung pada bulan Juli 1983 sampai dengan Nopember 1983, dalam bentuk :

- Studi Dokumen Kampung dan dicocokkan dengan keadaan sebenarnya (keadaan nyata).
- Mengumpulkan data kepastakaan.
- Mengumpulkan data lapangan, dengan pengamatan biasa maupun pengamatan terlihat.
- Mengumpulkan data lapangan dengan wawancara biasa maupun wawancara berstruktur.
- Mengumpulkan data dari informan maupun dari responden.
- Mengklasifikasi data dari lapangan maupun perpustakaan.
- Rapat pembahasan data lapangan dan perpustakaan

c. Tahap Pengolahan/Penyusunan data :

Berlangsung pada bulan Desember 1983 sampai dengan Januari 1984, dalam bentuk :

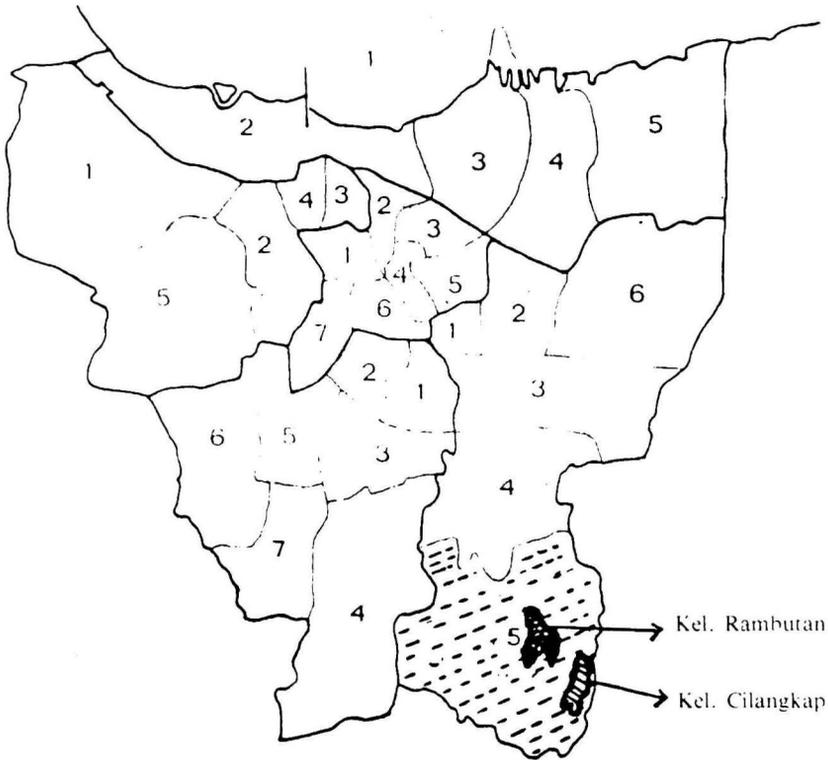
- Menstrankrip hasil/data lapangan dan perpustakaan.
- Diskusi dan menganalisa data lapangan dan kepustakaan.
- Melengkapi data lapangan dan perpustakaan dalam menyempurnakan pengolahan dan persiapan penulisan naskah.
- Penyusunan dan penulisan naskah.
- Pengetikan dan pengesitan naskah.
- Koreksi pengesitan dan penjilidan naskah.

d. Tahap akhir :

Sejak selesainya draft naskah, yang diperkirakan pada bulan Januari 1984, maka tim peneliti terus mengadakan penyempurnaan naskah tersebut, dengan cara melengkapi dan menambah data seperlunya, sehingga naskah betul-betul siap untuk dijilid dan diperbanyak sesuai yang dibutuhkan/dikehendaki oleh pimpinan proyek. Proses ini berlangsung pada bulan Februari 1984 sampai dengan Maret 1984. Setelah selesai dijilid, maka naskah diserahkan kepada Pimpinan Proyek untuk diedit dan dievaluasi, yang kemudian siap untuk diterbitkan, setelah mengalami perbaikan ataupun revisi seperlunya. Secara terperinci proses tahap akhir ini adalah sebagai berikut :

- Penyerahan naskah hasil penulisan yang telah dijilid sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar.
- Editing naskah oleh Pimpro.IDKD. DKI Jakarta.
- Melengkapi/menyempurnakan naskah.
- Evaluasi naskah oleh Tim Pusat IDKD Jakarta.
- Penerbitan naskah oleh Pimpro.IDKD DKI Jakarta, setelah mendapat persetujuan dari Tim IDKD Pusat.

PETA WILAYAH D.K.I. JAKARTA



JAKARTA PUSAT

1. Kecamatan Gambir
2. Kecamatan Sawah Besar
3. Kecamatan Kemayoran
4. Kecamatan Senen
5. Kecamatan Cempaka Putih
6. Kecamatan Menteng
7. Kecamatan Tanah Abang

JAKARTA UTARA

1. Kecamatan Pulau Seribu
2. Kecamatan Penjaringan
3. Kecamatan Tanjung Priok
4. Kecamatan Koja
5. Kecamatan Cilincing

JAKARTA BARAT

1. Kecamatan Cengkareng
2. Kecamatan Grogol Petamburan
3. Kecamatan Taman Sari
4. Kecamatan Tambora
5. Kecamatan Keb. Jeruk

JAKARTA SELATAN

1. Kecamatan Tebet
2. Kecamatan Setia Budi
3. Kecamatan Mampang Prapatan
4. Kecamatan Pasar Minggu
5. Kecamatan Kebayoran Baru
6. Kecamatan Kebayoran Lama
7. Kecamatan Cilandak



Wilayah Kec.
Pasar Rebo

JAKARTA TIMUR

1. Kecamatan Matraman
2. Kecamatan Pulo Gadung
3. Kecamatan Jatinegara
4. Kecamatan Kramat Jati
5. Kecamatan Pasar Rebo
6. Kecamatan Cakung

BAB II IDENTIFIKASI

A. LOKASI

Sesuai dengan ketentuan dalam Pola Penelitian Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan, bahwa penelitian dilakukan di dua desa secara mendalam. Telah kita singgung dibagian pendahuluan bahwa di wilayah DKI Jakarta sejak dulu sampai sekarang merupakan tempat perpaduan kebudayaan dari berbagai suku bangsa. Hal ini disebabkan memang Jakarta mempunyai peranan penting dalam percaturan **Internasional**, sejak Jakarta sebagai kota pelabuhan maupun Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Peranan Jakarta sebagai Ibukota Negara, rupanya telah mengundang masuknya suku bangsa dari berbagai pelosok Tanah Air, bahkan datang pula bangsa-bangsa dari luar negeri. Kedatangan suku bangsa dari dalam negeri maupun bangsa asing tersebut, sudah pasti membawa kebudayaan mereka, yang kemudian berpadu dengan kebudayaan Jakarta asli. Lokasi kebudayaan Jakarta asli yang biasa disebut kebudayaan Betawi, sampai saat ini memang tidak berada dalam satu wilayah. Hal ini tergantung daripada faktor pendukung kebudayaan tersebut, yakni suku bangsa Betawi yang kehidupannya mulai bergeser ke arah pingiran kota Jakarta. Mereka masih nampak hidup dengan sistem tradisional Betawi, dengan mata pencaharian rata-rata bertani, berdagang hasil buah-buahan, dan sedikit yang mau bekerja sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta. Hanya mereka yang tinggal di daerah perkotaan saja yang biasanya mau menjadi pegawai negeri maupun swasta, karena mulai kena pengaruh dengan orang-orang pendatang. Suku bangsa Betawi, terutama yang tinggal di daerah pinggiran maupun pedalaman.

Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pola Penelitian Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan, maka Kelurahan yang menjadi daerah lokasi penelitian, yakni kelurahan di mana pada mulanya latar belakang kehidupan penduduk hidup dari hasil bertani. Berhubung dua buah kelurahan yang dijadikan daerah lokasi penelitian harus berada dalam satu Kecamatan, maka tim peneliti dapat menentukan Kelurahan Rambutan wilayah Kecamatan Pasar Rebo – Jakarta Timur. Kelurahan ini terletak di Jl. Raya Bogor Km 22, masih berada di dalam kota Kecamatan. Di samping itu penduduknya masih menunjukkan ciri khas kebudayaan Betawi,

sekalipun sudah banyak orang-orang pendatang masuk ke Kelurahan Rambutan tersebut. Pada mulanya kehidupan keagamaan di wilayah Kelurahan Rambutan ini sangat **agamis** dalam arti masyarakatnya sangat panatik terhadap agama Islam sekalipun rata-rata tidak berpendidikan tinggi, bahkan banyak pula yang tidak mengikuti pendidikan umum. Penduduk di daerah Kelurahan Rambutan, pada mulanya hanya mementingkan pendidikan yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh agama Islam, berupa pengajian-pengajian, maupun madrasah-madrasah. Pendidikan umum pada mulanya tidak terdapat di daerah Kelurahan Rambutan dan baru sekitar tahun 1970 di daerah ini didirikan 1 (satu) Sekolah Dasar.

Kemudian daerah lokasi penelitian yang kedua, tim peneliti memilih Kelurahan Cilangkap wilayah Kecamatan Pasar Rebo – Jakarta Timur. Kelurahan ini terletak di Jl. Prapatan Pedak, yang lokasinya berada di daerah pinggiran Kecamatan Pasar Rebo, dan juga di pinggiran kota Jakarta. Kalau dibandingkan dengan Kelurahan Rambutan, penduduk Kelurahan Cilangkap jauh berbeda perkembangan peradabannya. Baik ditinjau dari segi agama, maupun pendidikan memang dua kelurahan tersebut, latar belakang peradabannya sangat bertolak belakang. Sampai sekarang pun masih ada tanda-tanda perbedaan tersebut. Namun dengan secara berangsur-angsur, penduduk Kelurahan Cilangkap mulai dapat mengejar ketinggalan-ketinggalan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama.

Dengan memilih dua buah kelurahan yang pada mulanya mempunyai peradaban yang sangat berbeda itu, maka akan memudahkan untuk mengetahui sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan yang terdapat di dua buah kelurahan tersebut. Akan tetapi bukan berarti bahwa di kedua kelurahan itu memiliki kebudayaan tradisional yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari cara pergaulan sehari-hari, dan tentang tata cara menerima tamu, dari kedua penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Cilangkap tetap menunjukkan sikap dan sifat yang sama. Dan juga tentang persamaan yang lain adalah kedua-duanya bertitik tolak dari cara hidup dari hasil pertanian buah-buahan.

1. Letak Geografis

a. Kelurahan Rambutan

Setelah selesai diadakan pemecahan, penggabungan dan penataan kembali batas-batas wilayah Kelurahan serta pembentukan Kelurahan baru di wilayah Kecamatan Pasar Rebo (sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta no.561/1979), maka luas wilayah Kelurahan Rambutan menjadi : 388,694 ha.

Dengan adanya perubahan luas dan penataan kembali itu, maka ber-

akibat merubah pula batas wilayah dan wilayah baru pada saat ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jl. Raya Bogor.
- Sebelah Selatan : Kel. Susukan dan Kel. Kampung Baru.
- Sebelah Timur : Jl. Jagorawi/Kel. Ceger.
- Sebelah Utara : Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati.

Mengingat letak geografis yang mempunyai hubungan dengan daerah perkotaan, bahkan berbatasan dengan Jalan Raya Bogor, maka Kelurahan Rambutan termasuk mempunyai hubungan luas dan mudah menerima masuknya kebudayaan dari luar, yang akhirnya dapat menyempurnakan kebudayaan penduduk setempat, yang sebagian besar adalah suku bangsa Betawi. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, letak Kelurahan Rambutan sangat menguntungkan, karena mudah dijangkau dengan kendaraan-kendaraan angkutan dari berbagai jenis. Disamping itu letaknya juga berdekatan dengan Pasar Induk, yang setiap harinya menjadi tempat penampungan dan tempat perbelanjaan hasil bumi yang didatangkan dari daerah Bogor dan sekitarnya.

Hal ini sudah pasti akan menimbulkan kecermatan para pemimpin formal maupun non formal, dalam menjaga atau mengatur ketertiban wilayah Kelurahan Rambutan.

Jadi ditinjau dari letak geografis, Kelurahan Rambutan sangat **strategis** dan wajar apabila dalam waktu yang relatif singkat Kelurahan Rambutan dapat menyesuaikan daerahnya sebagaimana layaknya daerah perkotaan yang termasuk maju dan lengkap fasilitas perlengkapan administrasi pemerintahannya.

b. Kelurahan Cilangkap

Seperti halnya dengan Kelurahan Rambutan, yakni setelah selesai diadakan pemecahan, penggabungan dan penataan kembali batas-batas wilayah Kecamatan Pasar Rebo, maka luas wilayah Kelurahan Cilangkap menjadi : 415, 875 ha. Batas-batas wilayah Kelurahan yang sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kelurahan Kelapadua Wetan.
- Sebelah Selatan : Kel. Pondok Ranggan.
- Sebelah Timur : Propinsi Jawa Barat.
- Sebelah Utara : Kampung Kramat Kel. Bambu Apus.

Kelurahan Cilangkap sudah mempunyai jalan yang dapat menghubungkan dengan Kelurahan-kelurahan disekitarnya, namun belum dapat menghubungkan dengan daerah pedalaman secara terbuka. Karena jalan tersebut baru satu-satunya yang membelah wilayah Kelurahan Cilangkap. Untuk memudahkan komunikasi ke daerah pedalaman masih

banyak menggunakan kendaraan sepeda, maupun sepeda motor yang jumlahnya masih terbatas. Pejalan kaki masih banyak terdapat di daerah Kelurahan Cilangkap, terutama bagi para pedagang maupun para petani. Jalan yang ada pada saat ini bukan hasil dari Proyek Mohammad Husni Thamrin dalam perbaikan kampung, melainkan hasil dari Dinas Pekerjaan Umum atas dasar Proyek Pusat, untuk komunikasi dengan Propinsi Jawa Barat.

Ditinjau dari letak geografis, sebenarnya Kelurahan Cilangkap kurang menguntungkan, karena dibandingkan dengan daerah Kelurahan lainnya termasuk sulit komunikasinya. Namun demikian berhubung adanya jalan yang menghubungkan dengan Taman Mini Indonesia Indah, sehingga mengakibatkan daerah Kelurahan Cilangkap tidak termasuk daerah yang terisolir. Apalagi pada saat ini sudah ada kendaraan Metromini (kendaraan angkutan) yang masuk ke daerah Kelurahan Cilangkap, sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Jalan lingkungan yang merupakan jalan tembus selebar 6 (enam) meter sudah dikeraskan dengan aspal, tetapi jalan orang banyak yang belum dikeraskan, dan masih merupakan jalan tanah, sehingga agak menyulitkan untuk komunikasi dengan daerah sekitarnya. Jadi letak geografis Kelurahan Cilangkap, apabila dibandingkan dengan Kelurahan Rambutan, maka kurang strategis, yang berarti kurang baik untuk kepentingan lalu-lintas perekonomian dan komunikasi dengan daerah sekitarnya. Untuk lebih jelas lihat peta Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Cilangkap berikut.

2. Keadaan Alam

a. Kelurahan Rambutan

Keadaan alam di Kelurahan Rambutan tidak jauh berbeda dengan keadaan alam di wilayah DKI Jakarta.

Yakni termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 27° C. Keadaan tanahnya termasuk tanah merah (sejenis tanah liat) yang lekat apabila kena hujan. Curah hujan di Kelurahan Rambutan setiap tahunnya sama dengan wilayah-wilayah DKI Jakarta pada umumnya, yakni jumlah maksimal terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Januari. Dan dalam bulan-bulan tersebut sering pula terjadi genangan-genangan air, sebagai akibat kurang lancarnya saluran-saluran yang ada di daerah Kelurahan Rambutan. Namun untuk Kelurahan Rambutan belum pernah terjadi peristiwa yang ditimbulkan dari bahaya banjir yang sampai memakan korban jiwa maupun harta dalam pengertian yang besar.

Untuk mengatasi genangan air yang sering terjadi setiap musim penghujan tersebut, warga masyarakat Kelurahan Rambutan mengadakan kerja bakti kebersihan kampung dan lingkungan pekarangan rumahnya

masing-masing. Pengertian masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan terus ditanamkan oleh pihak kelurahan. Tiap-tiap warga diharuskan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, yang biasanya terdiri dari potongan drum maupun sengaja dibuat bak sampah dari beton, yang dipasang di pinggir jalan. Kemudian armada pengangkut sampah tiap minggu sekali mengangkut sampah tersebut untuk dibuang pada tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yang biasanya di pinggiran kota.

Dengan curah hujan yang tertentu setiap tahunnya dan pula keadaan tanah yang **humus**, maka mengakibatkan tanahnya menjadi subur, yang sangat cocok untuk daerah perkebunan. Tumbuh-tumbuhan yang cocok dan dapat hidup subur di Kelurahan Rambutan adalah tumbuh-tumbuhan buah-buahan. Antara lain rambutan, mangga, duren, dan sebagainya. Akan tetapi mengingat makin banyaknya penambahan penduduk, tumbuh-tumbuhan tersebut banyak yang ditebang.

Kebutuhan untuk perumahan semakin mendesak dan menggeser tanah perkebunan, yang akhirnya tanah perkebunan semakin berkurang.

Keadaan alam di Kelurahan Rambutan, memang sangat cocok untuk tanaman buah-buahan, dan begitu pula untuk sayur-sayuran. Akan tetapi mengingat letak Kelurahan Rambutan yang sangat strategis untuk lalu-lintas perekonomian, dan untuk pemukiman, maka bagi orang-orang pendatang lebih mementingkan kebutuhan tanah perumahan. Akibatnya perkebunan tidak mendapat perhatian, kecuali bagi penduduk asli masih ada yang berusaha mempertahankan tanah perkebunan dengan ditanami pohon buah-buahan dan sayur-sayuran. Penduduk asli ini jumlahnya tidak banyak, karena sudah banyak yang meninggalkan tanah perkebunannya, termasuk tempat tinggalnya, dan mereka pergi ke daerah pinggiran untuk menetap disana, karena tanah tempat tinggal semula sudah dijual kepada orang-orang pendatang. Hanya penduduk asli yang termasuk tuan-tuan tanah, dan yang telah merubah cara hidupnya dari pertanian menjadi pegawai negeri maupun swasta sajalah yang masih bertahan tempat tinggal di Kelurahan Rambutan.

b. Kelurahan Cilangkap

Keadaan alam di Kelurahan Cilangkap, juga tidak jauh berbeda dengan keadaan alam di wilayah DKI Jakarta lainnya. Keadaan alam yang mencakup segi kesuburan tanah, curah hujan dan bentuk permukaan tanah, dalam tarap sedang. Beriklim tropis dengan suhu menunjukkan 27° C. Keadaan ini tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan penduduk Jakarta. Karena cara hidup penduduk Jakarta adalah non agraris yang tidak lagi menggunakan tanah sebagai faktor untuk mencukupi ke-

butuhan hidupnya. Namun untuk daerah Kelurahan Cilangkap, penduduknya masih banyak yang mengolah tanah sebagai sumber penghidupannya. Karena untuk bekerja sebagai pegawai memang tidak dipersiapkan dari kecil, terutama tentang pendidikannya. Oleh karena itu pekerjaan penduduk asli rata-rata banyak yang meneruskan usaha dari orang tuanya, yakni sebagai petani buah ataupun pedagang buah. Keadaan tanah di daerah Cilangkap masih memungkinkan untuk perkebunan, karena di samping tanahnya masih luas dan subur, juga masyarakatnya banyak yang mempunyai ketrampilan dalam bidang pertanian.

Sebenarnya daerah pertanian di Kelurahan Cilangkap, baik pula ditanami sebangsa padi-padian, namun mengingat faktor **irigasi**, yang tidak dibuat secara teratur, maka jarang sekali yang menanam padi di daerah persawahan, melainkan padi hanya ditanam sebagai selingan dengan sayur-sayuran ataupun palawija. Dan padi inipun juga sebangsa pada **huma** (ladang). Aliran kali dari Cilangkap tidak dapat dimanfaatkan sebagai sarana **irigasi** sebab airnya tidak begitu besar dan biasanya kering pada waktu musim kemarau. Kali ini tidak mempunyai mata air dari daerah pegunungan atau mata air tertentu, melainkan hanya merupakan air tampungan apabila ada hujan turun. Jadi sulit diharapkan untuk pengairan sawah maupun perkebunan. Apabila keadaan alam di Kelurahan Cilangkap dibandingkan dengan keadaan alam di Kelurahan Rambutan sebenarnya tidak jauh berbeda. Tetapi dalam penggunaan tanahnya antara kedua kelurahan ini mempunyai perbedaan yang sangat menyolok. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ialah :

- Letak geografis Kelurahan Cilangkap tidak strategis, sedangkan Kelurahan Rambutan sangat strategis.
- Kelurahan Cilangkap banyak dihuni oleh penduduk asli, sedangkan Kelurahan Rambutan banyak dihuni oleh orang-orang pendatang.
- Di Kelurahan Cilangkap tanahnya luas, penduduknya masih jarang, sedangkan di Kelurahan Rambutan tanahnya sudah sempit, penduduknya cukup padat.
- Mata pencaharian penduduk Cilangkap pertanian, sedangkan penduduk di Kelurahan Rambutan sebagian besar pegawai dan pedagang bukan hasil bumi.

Status pemilikan tanah : (Sumber Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Rambutan)

Tabel 1

Kelurahan	Tanah milik /adat	Tanah Negara /Garapan	Tanah wakaf
Cilangkap	397,451 ha	13,213 ha	5,211 ha
Rambutan	375,254 ha	6,330 ha	7,110 ha

Penggunaan Tanah : (Sumber Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Rambutan)

Tabel 2

Penggunaan tanah	Kelurahan Cilangkap	Kelurahan Rambutan
Luas wilayah	415,875 ha	388,694 ha
Luas bangunan	87,072 ha	322,361 ha
Kebun buah-buahan	182,156 ha	32,111 ha
Kebun campuran	33,224 ha	20,122 ha
Persawahan	111,152 ha	12,115 ha
Kuburan, dll	2,273 ha	1,985 ha

Dengan melihat angka-angka tersebut di atas, maka akan jelas perbedaan tingkat perkembangan daerah Cilangkap dengan Rambutan dewasa ini, dan berarti keadaan alam dan tanah di daerah Kelurahan Rambutan lebih banyak mempunyai daya tarik bagi orang-orang pendatang.

3. Pola Perkampungan

a. Kelurahan Rambutan

Dalam penelitian suatu perkampungan, kita tidak dapat terlepas akan kebiasaan atau ciri-ciri lingkungan yang ada. Dimana areal sebagai tempat tinggal yaitu bangunan rumah atau pemukiman merupakan cermin dari pada fisik bangunan yang dikaitkan pada lingkungan sekitarnya. Pencerminkan suatu lingkungan yang berbentuk seperti berdiri sendiri dan kelompok atau group. Karakter bangunan yang diambil dari penggunaan jenis atapnya. Hubungan halaman dengan bangunan atau kebun yang tercermin dengan penampilan pada pola-pola beranda dengan sifat terbuka atau tertutup. Dan kebiasaan yang menjadi ciri

dimana kebiasaan pemukiman tradisional selalu berhubungan dengan alamnya. Hal ini ditandai dengan sifat sarana seperti kamar mandi atau WC nya berada di luar bangunan.

Unsur-unsur tersebut diperoleh pula di dalam pola perkampungan bagi suku bangsa Betawi. Dan Begitu pula di daerah Kelurahan Rambutan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, maka di daerah Kelurahan Rambutan ternyata untuk jenis bangunan yang sifatnya berbaris memiliki prosentase yang lebih besar. Jenis bangunan yang bangunan polanya berbaris ini meliputi 60%. Umumnya berada pada lingkungan yang padat dan perkembangannya menurut pola jalan. Penyebarannya terjadi pada sepanjang jalan lingkungan di Kelurahan Rambutan sampai dengan tepi jalan Jago Rawi maupun tepi jalan Raya Bogor. Penggunaan jenis atap, pada umumnya menggunakan jenis atap berbentuk pelana dan yang menggunakan jenis jurai hanya sebagian kecil saja. Untuk Kelurahan Rambutan jenis pelana dikenal dengan sebutan tradisional yaitu jenis gudang atau Bapang. Jenis tersebut sampai sekarang masih banyak dipertahankan, namun bagi orang-orang pendatang sudah mulai mengadakan perpaduan dengan jenis lain, diantaranya jenis joglo atau limas. Akan tetapi jenis asli yang bersifat tradisional tersebut masih tampak ada pengaruhnya yang kuat. Bahan rangka atap yang dipergunakan adalah rangka utama untuk kuda-kuda dari bahan kayu, sedangkan untuk **kaso** digunakan bambu, dan bahan penutup atapnya adalah genteng.

Ketinggian bangunan umumnya tidak terlalu tinggi mengingat alam lingkungan, pada mulanya penuh dengan buah-buahan. Dari ketinggian bahan bangunan yang relatif tidak terlalu tinggi dan dengan teduhnya dari bayangan pohon buah-buahan seperti rambutan, duren, dan sebagainya, akan menimbulkan suasana tersendiri yang sangat nyaman. Akan tetapi pada saat ini ada kecenderungan suasana nyaman tersebut mulai berkurang, mengingat kebutuhan akan tempat perumahan sangat mendesak.

Hubungan bangunan dengan halaman atau kebun tercermin pada penampilan pada penampilan pola beranda yang sifatnya terbuka, dimana selalu terjadi kontak atau komunikasi antara penghuni rumah dengan masyarakat yang lalu lalang. Adanya bentuk bangunan dengan beranda yang terbuka pada daerah-daerah terpencar dan padat, dan daerah-daerah yang agak padat lebih memiliki beranda yang sifatnya agak tertutup.

Kamar mandi dan WC yang menjadi kebiasaan suatu pemukiman tradisional di daerah Kelurahan Rambutan adalah selalu berhubungan dengan alam. Sifat-sifat tersebut ditandai dengan kebiasaan cara mem-

banguna kamar mandi dan WC di luar bangunan. WC dan kamar mandi tersebut berada pada alam terbuka, atau kebun, biasanya selalu berdampingan dengan sumur. Bangunan kamar mandi dan WC yang bersifat tradisional di Kelurahan Rambutan ini sudah mulai berangsur-angsur hilang disebabkan adanya kecenderungan untuk mengikuti pembuatan kamar mandi dan WC dalam rumah dan tertutup. Hal ini berlebihan, apabila dihubungkan dengan kesehatan dan peradaban yang semakin berkembang dalam masyarakat dalam Kelurahan Rambutan, maka bangunan kamar mandi dan WC yang Terbuka tersebut sudah dapat dikatakan ketinggalan jaman.

Lingkungan perumahan juga menampakkan sudah banyak yang berubah dengan sifat-sifat tradisionalnya. Rumah-rumah tradisional dibangun dalam bentuk yang sederhana, jumlahnya sudah tidak begitu banyak. Karena sudah banyak yang berganti dengan perpaduan dari mana orang tersebut datang. Biasanya orang pendatang lebih senang membangun rumah dengan mengambil perpaduan dari rumah tradisional dengan rumah yang biasa terdapat dari mana mereka datang. Hanya bahannya menggunakan bahan yang lebih kuat. Sebenarnya rumah-rumah tradisional di Kelurahan Rambutan boleh dikatakan tidak dapat tergeser dengan adanya bangunan-bangunan yang modern. Karena bangunan yang modern pun juga masih menampakkan gaya lama, tetapi bahannya dan bentuk ruang di dalamnya saja yang mengalami perubahan. Perubahannya antara lain, yang mana sebelumnya menggunakan bahan **bilik** sebagai dindingnya, maka pada saat ini dindingnya diperkuat dengan betonan dari semen. Kemudian kamar yang pada mulanya besar-besar dan kosong, terus disekat-sekat dan akhirnya kelihatan sempit. Hal ini ada kemungkinan adanya faktor penambahan anggota keluarga yang semakin banyak, sedangkan kecepatan membangun rumah tempat tinggal lebih lambat bila dibandingkan dengan kecepatan penambahan anggota keluarga.

b. Kelurahan Cilangkap

Pola perkampungan di daerah Kelurahan Cilangkap tidak jauh berbeda dengan pola perkampungan di Kelurahan Cilangkap. Terutama bagi rumah-rumah yang bersifat tradisional mempunyai kesamaan dan ciri khas Betawi. Hal ini memang masuk akal karena sebenarnya orang-orang Cilangkap yang telah lama bertempat tinggal di daerah pemukiman dahulunya juga banyak yang berasal dari daerah Kelurahan Rambutan. Begitu pula orang-orang lama atau penduduk asli di Kelurahan Rambutan, juga banyak yang berasal dari daerah Kelurahan Cilangkap. Tetapi apabila dibandingkan jumlah orang-orang Kelurahan Cilangkap dengan Kelurahan Rambutan memang lebih

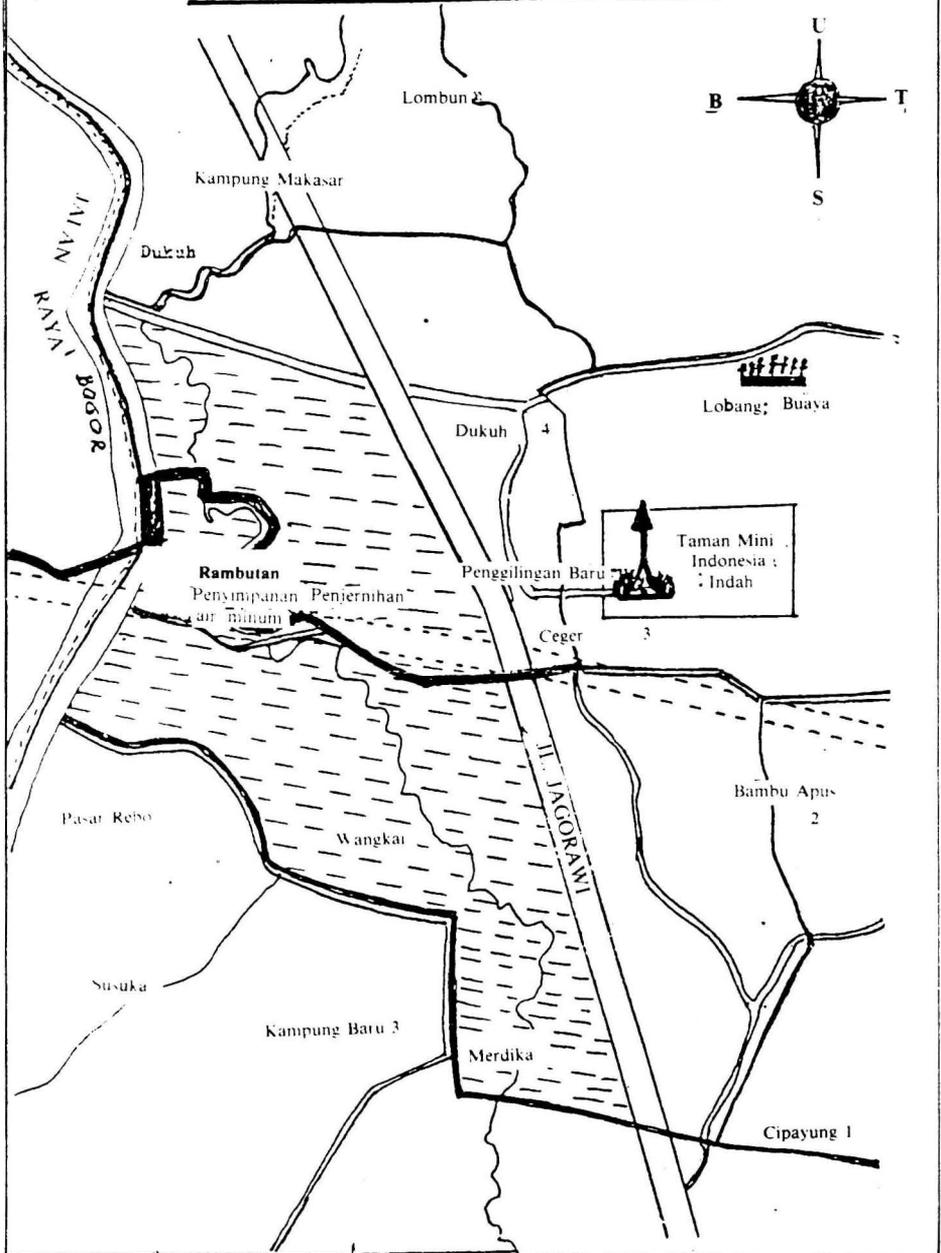
banyak orang-orang dari Kelurahan Rambutan yang bergeser pindah ke Kelurahan Cilangkap. Perpindahan orang-orang dari Kelurahan Rambutan ke Cilangkap ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :

- Terdesaknya oleh pendatang baru, yang berarti penduduk asli mau menjual tanahnya di Kelurahan Rambutan, dan membeli dengan murah di daerah pinggiran atau memang mempunyai tanah perkebunan secara turun-menurun dari nenek moyangnya di daerah Kelurahan Cilangkap.
- Atas kemauan sendiri meninggalkan daerah Kelurahan Rambutan, disebabkan karena perkawinan antara pemuda dari Kelurahan Rambutan dengan seorang gadis di Kelurahan Cilangkap. Yang kemudian pemuda tersebut pindah ke Kelurahan Cilangkap dan membangun rumah disana dengan cara tradisional Betawi.
- Karena pertambahan anggota keluarga, sehingga perlu dipecah, sedangkan mereka memiliki tanah perkebunan di daerah Kelurahan Cilangkap.

Dengan faktor-faktor tersebut di atas, maka dapat dimengerti apabila pola perkampungan di Kelurahan Cilangkap mempunyai persamaan. Hanya perbedaannya setelah banyaknya pendatang baru yang cukup besar masuk ke daerah Kelurahan Rambutan. Akibat banyaknya pendatang baru tersebut, seolah-olah ada perbedaan nyata antara pola perkampungan di Kelurahan Rambutan dengan di Kelurahan Cilangkap.

Percepatan masuknya orang-orang pendatang baru ini telah kita singgung di bagian depan, bahwa orang-orang pendatang baru jauh lebih besar jumlahnya ke Kelurahan Rambutan, bila dibandingkan dengan yang masuk ke Kelurahan Cilangkap. Dengan demikian faktor kepadatan penduduk juga dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola perkampungan. Kalau sekarang kita perhatikan memang dalam kenyataan untuk daerah Kelurahan Cilangkap termasuk masih jarang penduduknya. Pola perkampungan mengikuti pola bergaris, dan tersebar mengikuti arah jalan. Tidak ada suatu tradisi, bahwa rumah harus menghadap arah tertentu, misalnya ke arah utara atau ke selatan. Biasanya rumah menghadap ke jalan, baik jalan lingkungan maupun jalan orang yang belum dikeraskan dengan betonan atau dengan aspal. Seperti halnya di Kelurahan Rambutan, bahwa rumah-rumah tradisional memiliki beranda depan, dan kamarnya besar-besar. Bentuknya menyerupai Gudang atau Bapang dan kamar mandi serta WC nya berada pada alam terbuka. Keadaan dan bentuk semacam ini di daerah Kelurahan Cilangkap masih banyak terdapat, tetapi di daerah Kelurahan Rambutan sudah jarang kelihatan kemudian mengenai bangunan rumah, kuda-kudanya juga

PETA LOKASI KELURAHAN RAMBUTAN



dibuat dari kayu, seperti halnya di Kelurahan Rambutan, dan atapun terdiri dari genteng. Jenis atapnya berbentuk pelana seperti kebanyakan rumah tradisional Betawi.

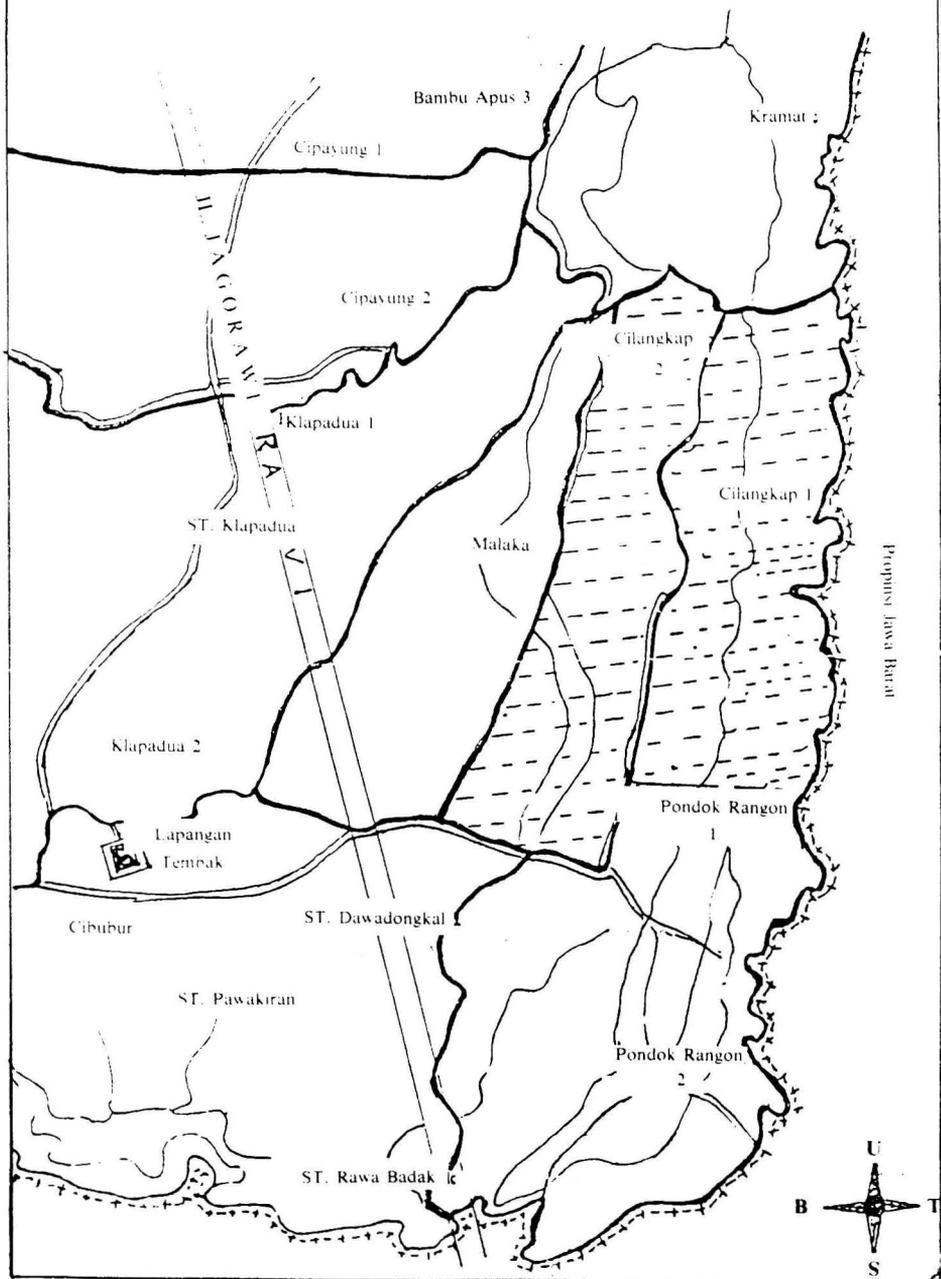
Mengenai lingkungan perumahan pada daerah Kelurahan Cilangkap masih merupakan rumah-rumah sederhana. Perkembangan rumah tinggal mengarah pada bentuk perpaduan dengan orang-orang pendatang, namun berjalan sangat lambat. Perkembangannya yang lambat ini disebabkan karena penduduk pendatang masuknya juga secara berangsur-angsur dengan jumlah yang kecil. Sampai saat inipun perbandingan penduduk asli dengan penduduk pendatang, masih jauh lebih besar penduduk aslinya. Hal ini dapat dilihat secara sepintas lalu dengan keadaan lingkungan perumahan yang tampak masih jarang-jarang. Disekitar rumah masih terdapat pekarangan cukup luas, dan masih pula terdapat empang-empang untuk memelihara ikan. Biasanya empang tersebut langsung dipergunakan untuk WC yang hanya ditutup dengan bilik, yang dimaksudkan kotoran yang ada di empang itu sekaligus sebagai makanan ikan. Tradisi semacam ini memang hampir terdapat di lingkungan perumahan di wilayah DKI Jakarta tempo dulu, terutama yang terletak di dekat empang atau di tepi laut. Keadaan sedemikian berangsur-angsur hilang, disebabkan adanya perbaikan kampung yang biasa disebut Proyek Husni Thamrin.

Mengenai Proyek Husni Thamrin ini, untuk Kelurahan Cilangkap, belum sepenuhnya berjalan, dan sebagian besar perbaikan kampung atau pembuatan jalan orang masih swadaya masyarakat dengan cara kerja bakti. Dalam kegiatan kerja bakti ini peranan pemimpin formal dan non formal benar-benar menentukan. Tetapi partisipasi masyarakat dalam kerja bakti tersebut cukup tinggi, dan menunjukkan kegotong royongan yang baik. Dalam kerja bakti ini tampak dilaksanakan dalam berbagai bidang. Terutama dalam membuat rumah, memetik hasil bumi, memanen ikan, maupun membantu orang-orang mempunyai hajat, sering pula dikerjakan dengan cara tolong menolong. Jadi sifat tradisional sebagaimana kebiasaan bagi masyarakat pedesaan benar-benar masih hidup di daerah Kelurahan Cilangkap.

B. P E N D U D U K

Dilihat dari perkembangan dan penambahan penduduk di kedua lokasi daerah penelitian, maka menunjukkan pertumbuhan yang sangat berbeda. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, sedangkan untuk di daerah Kelurahan Cilangkap menunjukkan pertumbuhan yang lamban. Baik cepat lambatnya pertumbuhan penduduk tersebut akan mempunyai pengaruh dalam kehidupan sosial budaya. bagi daerah yang

PETA LOKASI KELURAHAN CILANGKAP



pertambahan penduduknya lebih cepat tetapi dari berbagai suku bangsa pendatang akan mewarnai pula corak masyarakat yang kebudayaannya mengalami perubahan-perubahan yang tergantung dari unsur-unsur kebudayaan tersebut. Apabila unsur-unsur kebudayaan penduduk asli memiliki unsur kebudayaan yang kuat, tentu saja akan menjadi bertambah sempurna dengan masuknya unsur kebudayaan baru. Tetapi apabila unsur kebudayaan asing tidak memiliki unsur kebudayaan yang kuat, sudah pasti akan tertelan dengan masuknya kebudayaan baru tersebut. Hal ini akan tampak di dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Kalau kita meneliti lebih cermat diantara kedua kelurahan di DKI Jakarta, yakni Kelurahan Rambutan dengan Kelurahan Cilangkap akan dapat mengetahui secara jelas perbedaan tersebut. Di kedua kelurahan itu pada mulanya memiliki unsur kebudayaan yang sama yakni unsur kebudayaan Betawi. Namun demikian mengingat percepatan masuknya penduduk pendatang jauh berbeda, maka akhirnya berpengaruh pula dalam segi budaya masyarakat.

Untuk di Kelurahan Rambutan dalam waktu yang relatif singkat sudah mengalami perubahan sosial budaya yang menuju kesempurnaannya. Contohnya ialah mengenai kebudayaan Betawi asli yang memang unsur-unsurnya telah kuat, maka masih tetap bertahan sekalipun banyak orang pendatang yang masuk ke Kelurahan Rambutan. Orang-orang pendatang yang mempunyai pengaruh kuat di daerah Kelurahan Rambutan adalah orang-orang Arab yang juga turut mempercepat pengaruh Islam di daerah Kelurahan Rambutan. Bagi penduduk asli Betawi tidak merasa ada saingan dengan pengaruh Islam tersebut, karena disamping unsur kebudayaan tradisional Betawi sudah kuat dan juga ada hal-hal yang bersamaan sifatnya dengan Islam, maka bagi penduduk asli Betawi Kelurahan Rambutan mudah menerima masuknya Islam. Tetapi bagi orang-orang selain Islam memang sangat sulit untuk dapat masuk ke Kelurahan Rambutan, disebabkan orang-orang selain Islam tersebut dikhawatirkan akan merusak adat dan tata cara kehidupan masyarakat Betawi. Hal yang demikian berlangsung sampai sekitar tahun 1950-an.

Lain halnya dengan di Kelurahan Cilangkap. Bagi masyarakat di Kelurahan Cilangkap, latar belakang adat dan kebiasannya agak berlainan dengan masyarakat di Kelurahan Rambutan. Kalau masyarakat di Kelurahan Rambutan masyarakatnya bersifat **Agamis** (yang berarti orang-orangnya meskipun tidak berpendidikan tinggi tetapi terhadap agama sangat panatik), sedangkan masyarakat di Kelurahan Cilangkap bersifat **Non Agamis** (yang berarti orang-orangnya tidak panatik terhadap agama, melainkan banyak yang percaya kepada ilmu-ilmu kesaktian). Oleh karena itu dalam perkembangan kehidupan masyarakatnya, orang-orang Cilangkap tidak mudah menerima paham-paham baru, baik yang dimasukkan melalui agama Islam, Kristen, maupun Hindu. Sifat orang-orang Cilangkap tidak mau terikat dalam satu ikatan agama. Bagi mereka bahkan lebih percaya kepada tokoh-tokoh masya-

rakat yang mempunyai ilmu tinggi dalam kesaktian. Hal yang demikian di Kelurahan Cilangkap berlangsung cukup lama. Masyarakat Cilangkap menjadi kelompok-kelompok dengan mengikuti ilmu di perguruan masing-masing. Tokoh-tokoh masyarakat Cilangkap sangat menentukan. Pimpinan formal pada mulanya sulit untuk mengatur masyarakat dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah juga tidak kehilangan cara. Untuk tidak menyulitkan jalannya kepemimpinan pemerintahan di Kelurahan Cilangkap, maka biasanya tokoh masyarakat atau pemimpin non formal yang sangat disegani dan berpengaruh dalam masyarakat dipilih sebagai lurah atau paling tidak diberi kedudukan sebagai kepala lingkungan.

Sebelum banyak orang-orang pendatang masuk ke daerah Kelurahan Cilangkap, penduduknya sebagian besar masih buta huruf dan pergaulan dengan masyarakat sekitarnya masih sangat terbatas. Disamping itu daerah Kelurahan Cilangkap juga kurang mempunyai daya tarik bagi orang-orang pendatang. Oleh karena itu sangat lamban laju pertumbuhan penduduknya. Dengan kelambanan laju pertumbuhan penduduk Cilangkap, diikuti pula kelambanan perkembangan lingkungan atau pembangunan di Kelurahan Cilangkap. Masyarakatnya boleh dikatakan *statis*, dan sukar sekali menerima perubahan-perubahan yang menjurus ke arah perbaikan lingkungan. Dengan sangat hati-hati para pemimpin formal mendekati tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin non formal untuk menyadarkan dan memberi pengertian akan pentingnya perbaikan lingkungan. Apabila pengertian tersebut terlalu dipaksakan, sudah pasti ditolak dan bahkan terjadi hal-hal yang kurang baik. Pemimpin non formal tersebut dapat berbuat sebaliknya, memberi pengaruh kepada anak buah dalam perguruan, ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemimpin formal. Keadaan yang demikian ini berlangsung kira-kira sampai sekitar tahun 1950-an.

Jadi jelas sekali perbedaan perkembangan antara penduduk Kelurahan Rambutan dengan penduduk di Kelurahan Cilangkap. Pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya. Pertumbuhan penduduk dengan macam-macam latar belakang sosial budaya dalam satu masyarakat yang bersifat heterogen, cenderung melemahkan sifat-sifat tradisionalitas penduduk asli setempat. Sebaliknya pertumbuhan dalam masyarakat dengan sistem budaya homogen cenderung mengukuhkan sifat-sifat tradisional masyarakat itu. Hal tersebut terjadi pula untuk di daerah Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Cilangkap. Di Kelurahan Rambutan boleh dikatakan pengaruh pertumbuhan penduduk sangat besar, sehingga akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya sangat terasa. Tetapi di Kelurahan Cilangkap, karena pertumbuhan penduduknya lambat, maka pengaruh terhadap ling-



kungan hidup dan kehidupan sosial budaya lambat pula sebagai contoh mengenai masyarakat petani buah-buahan dan pedagangnya, pada saat ini sulit ditemukan di Kelurahan Rambutan. Sedangkan di Kelurahan Cilangkap masyarakat petani buah-buahan maupun pedagang buah-buahan masih banyak terlihat dan cara hidup mereka masih pula menunjukkan tradisi Betawi.

Untuk mempelajari masalah hubungan dan pengaruh pertumbuhan penduduk di Kelurahan Rambutan dan Cilangkap tersebut, kiranya akan lebih jelas apabila kita kaitkan dengan demografi data serta mobilitas penduduk yang ada.

1. Demografi data penduduk di Kelurahan Rambutan dan Cilangkap

Indikator yang dapat menunjukkan keterangan tentang demografi yang **relevan** dengan penelitian ialah;

- a. Komposisi penduduk asli dan pendatang baru.
- b. Mata pencaharian pokok dari setiap penduduk.

Bila kita lihat dari sudut kependudukan di lingkungan Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, maka akan terlihat komposisi penduduk asli dan pendatang baru sebagai berikut :

Tabel 3

Data penduduk Kelurahan Rambutan (1982)

No.	Golongan penduduk	Banyak		Prosentase
		Kepala Keluarga	Penduduk	
1.	A s l i	1.648 KK.	10.478 jw.	65%
2.	Pendatang	908 KK.	5.646 jw.	35%
Jumlah		2.556 KK.	16.124 jw.	100%

Sumber data : Kartu Keluarga di Kantor Kelurahan Rambutan.

Tabel 4**Data penduduk Kelurahan Cilangkap (1982)**

No.	Golongan penduduk	Banyak		Prosentase
		Kepala Keluarga	Penduduk	
1.	A s l i	668 KK.	4.268 jw.	85%
2.	Pendatang	117 KK.	843 jw.	15%
Jumlahi		785 KK.	5.011 jw.	100%

Sumber data : Kartu Keluarga di Kantor Kelurahan Cilangkap.

Dari angka-angka tersebut di atas dan dengan membandingkan data penduduk asli serta penduduk pendatang yang tertera dalam daftar di kedua kelurahan tersebut, maka jelas bahwa angka menunjukkan perkembangan yang berbalik. Untuk di Kelurahan Rambutan penduduk asli semakin sedikit jumlahnya, sedangkan di Kelurahan Cilangkap penduduk asli lebih besar. Dari pertumbuhan penduduk yang lamban di daerah Kelurahan Cilangkap, juga berpengaruh besar dalam lingkungan kehidupan sosial budaya dan pertumbuhan lingkungan perkampungan. Hal ini akan dapat pula kita lihat dalam segi mata pencaharian penduduk. Prosentase mata pencaharian penduduk di kedua kelurahan tersebut tercatat sebagai berikut :

Tabel 5**Data Penduduk berdasarkan mata pencaharian**

No.	Jenis mata pencaharian	Prosentase	
		Kel. Rambutan	Kel. Cilangkap
1.	Petani	8%	75%
2.	Pedagang/Pengrajin	40%	15%
3.	Pegawai/Buruh/Jasa	40%	6%
4.	Lain-lain	12%	4%

Tabel 6**Data penduduk menurut umur dan jenis**

U m u r	Kel. Rambutan			Kel. Cilangkap		
	Lk.	Pr.	Jml.	Lk.	Pr.	Jml
0 - 9 th.	378	365	743	175	168	393
10 - 19 th.	645	594	1.239	281	272	553
20 - 29 th.	2.587	2.368	4.955	812	778	1.590
30 - 49 th.	3.779	3.577	7.356	1.115	1.020	2.135
50 ke atas	964	867	1.831	255	235	490
Jumlah :	8.353	7.771	16.124	2.638	2.473	5.011

Sumber data : Kantor Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Cilangkap.

Apabila kita perhatikan data penduduk berdasarkan mata pencaharian dan data penduduk menurut umur dan jenis tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa Kelurahan Rambutan sudah mengalami kemajuan yang pesat dibanding dengan Kelurahan Cilangkap. Disamping itu juga derajat tradisionalitasnya dapat diketahui, bahwa masyarakat Cilangkap masih lebih kuat.

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kelurahan Rambutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7**Jumlah Penduduk menurut pendidikan (1982)**

No.	Pendidikan yang dicapai	Laki-2	Perempuan	Jml.
1.	Tidak Sekolah	1.341	1.243	2.584
2.	Tidak tamat S.D.	215	274	489
3.	Tamat S.D.	2.788	2.687	5.475
4.	Tamat SLP/SMP	1.298	1.845	3.143
5.	Tamat SLA/SMA	856	971	1.827
6.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	38	27	65

Dari jumlah penduduk menurut pendidikan seperti yang tertera di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi, bila dibandingkan dengan keadaan sebelum tahun 1970. Hal ini disebabkan motivasi pendatang yang ingin sekolah di Jakarta cukup banyak, disamping bertambahnya anak-anak usia sekolah yang terdapat di Kelurahan Rambutan sendiri.

Di Kelurahan Cilangkap perkembangan pendidikan pun juga belum menunjukkan perkembangan yang baik. Karena data yang diperoleh dalam penelitian, bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan masyarakat Cilangkap terhadap pendidikan belum tinggi, sehingga belum banyak secara sadar mengharuskan anak-anak mereka bersekolah. Anak-anak bersekolah hanya ikut-ikutan dengan teman-temannya, sehingga tidak banyak yang dapat menyelesaikan sampai tamat Sekolah Dasar maupun Tingkat Menengah. Dari data kependudukan menurut pendidikan di bawah ini, dapat dilihat tingkat perkembangan masyarakat Cilangkap.

Tabel 8

Jumlah Penduduk menurut pendidikan (1982)

No.	Pendidikan yang dicapai	Laki-2	Perempuan	JUMLAH
1.	Tidak sekolah	812	1.165	1.977
2.	Tidak tamat SD	615	514	1.129
3.	Tamat SD	867	913	1.870
4.	Tamat SLP/SMP	514	315	929
5.	Tamat SLA/SMA	87	68	155
6.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	6	4	10

Dari data jumlah penduduk Cilangkap berdasarkan pendidikan tersebut di atas, maka kelihatan sekali bahwa pendidikan masyarakat menunjukkan masih rendah, hal ini sesuai dengan tingkat kehidupan mereka, bahwa bagi masyarakat petani di Kelurahan Cilangkap tidak banyak yang berpendidikan tinggi. Bahkan banyak pula yang masih buta huruf, dan pengetahuan mereka dalam mengolah pertanian masih banyak yang menggunakan cara tradisional.

2. Mobilitas Penduduk di Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Cilangkap

Jakarta sebagai Ibukota Negara mempunyai daya tarik bagi penduduk luar Jakarta. Dorongan penduduk luar Jakarta, untuk datang ke Jakarta mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Ada yang terdorong karena mencari kerja, sekolah, pedagang, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menimbulkan pertambahan penduduk di Jakarta yang sangat pesat. Akibatnya pemerintah DKI Jakarta berusaha membatasi laju pertambahan penduduk dengan cara membendung arus urbanisasi. Sejak tahun 1968 pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan dengan no.10 tahun 1968 yang mewajibkan pendaftaran penduduk mengenai kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Kemudian untuk mengurangi para pendatang dari luar kota dan sebagai pernyataan, bahwa Jakarta sebagai kota tertutup, maka dikeluarkan instruksi Gubernur tanggal 5 Agustus 1970 No.Ib.3/1/27/1970 (Lembaran Daerah No.35 Tahun 1970), dan tanggal 30 Agustus 1970 No.A.c.2/3/39/1970. Dalam rangka melaksanakan instruksi Gubernur tersebut, terutama yang menyangkut pemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kelurahan Rambutan terlebih dahulu tiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diberikan penerangan-penerangan yang diteruskan kepada warganya masing-masing, agar setiap mengurus KTP maupun pemindahan diurus sendiri langsung ke Kantor Pendaftaran Penduduk DKI Jakarta. Pihak RT/RW harus membuat surat pengantar ke Kelurahan, dan pihak Kelurahan meneruskan atau mengganti pengantar tersebut untuk dibawa ke Kantor Urusan Penduduk DKI Jakarta. Disamping itu juga harus disertai sebagai jaminan tempat tinggal dan tempat kerja. Bagi para pendatang yang tidak dapat melengkapi surat-surat tersebut, tidak diperbolehkan tinggal di DKI Jakarta, dan termasuk pula di Kelurahan Rambutan. Pertambahan penduduk di DKI Jakarta setiap tahunnya sangat tinggi. Sebelum dilaksanakan instruksi Gubernur tahun 1970 tersebut pertambahan penduduk DKI Jakarta berkisar antara 30 – 40%. Oleh karena itu perlu dibatasi, dengan cara memperbaiki administrasi kependudukan baik di DKI Jakarta umumnya dan di kelurahan-kelurahan khususnya. Target yang akan dicapai oleh Pemerintah DKI Jakarta yakni 2,2% setiap tahunnya, dan target ini adalah merupakan target ideal dalam meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta. Pelaksanaan untuk mencapai target tersebut, kelurahan mendapat tugas yang berat dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Daerah Kelurahan Rambutan memang mempunyai daya tarik yang kuat bagi penduduk pendatang. Sistem administrasi kependudukan harus diperbaiki dan diusahakan setiap pendatang harus tercatat dalam administrasi tersebut. Ini berarti tidak memberikan kesempatan penduduk liar atau tidak mempunyai status kependudukan di DKI Jakarta, karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap seperti yang telah ditentukan. Dengan cara itu, maka di Kelurahan Rambutan mulai

berkurang arus masuknya orang-orang pendatang dari luar kota Jakarta.

Usaha untuk menekan pertumbuhan penduduk ini terus menerus digalakkan, namun semakin lama angka kenaikan penduduk masih menampilkan grafik naik. Sampai saat sekarang pun sebenarnya, belum ada pencabutan instruksi Gubernur tentang pernyataan Jakarta sebagai kota tertutup. Tetapi dalam kenyataannya orang-orang pendatang dari luar kota Jakarta semakin banyak. Memang Jakarta sebenarnya sulit untuk tidak menerima masuknya orang-orang dari luar kota Jakarta. Jadi instruksi Gubernur tersebut, tidak lain hanya untuk mengurangi laju masuknya pendatang dari luar kota. Karena untuk menutup sama sekali jelas tidak mungkin, disebabkan Jakarta selain sebagai Ibukota Negara, juga mempunyai berbagai permasalahan yang dapat melibatkan orang-orang di luar kota Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka yang tercatat di Kelurahan Rambutan tentang penduduk pendatang dari luar kota Jakarta untuk setiap tahunnya. Disamping itu angka kelahiran pun masih menunjukkan cukup tinggi. Sedangkan jumlah penduduk yang pindah dari Kelurahan Rambutan sedikit.

Adapun jumlah penduduk yang datang dan pindah, serta angka kelahiran dan kematian di Kelurahan Rambutan dapat tercatat sebagai berikut :

**DAFTAR : REKAPITULASI MUTASI, KELAHIRAN DAN KEMATIAN
PENDUDUK KELURAHAN RAMBUTAN 1982 / 1983.**

Tabel 9

No.	Bulan	L A H I R			D A T A N G			P I N D A H			M A T I		
		L	P	JUM	L	P	JUM	L	P	JUM	L	P	JUM
1.	April '82	2	2	4	11	8	19	4	2	6	—	1	1
2.	Mei '82	—	2	2	9	7	16	1	2	3	1	1	2
3.	Juni '82	3	1	3	13	8	21	4	3	7	—	—	—
4.	Juli '82	3	2	5	12	7	19	3	5	6	2	1	3
5.	Agustus '82	4	3	7	9	6	15	4	2	6	1	1	2
6.	September '82	3	4	7	10	5	15	5	3	8	2	1	2
7.	Oktober '82	4	4	8	11	9	20	3	4	7	1	2	3
8.	Nopember '82	3	5	8	8	7	15	5	3	9	—	2	2
9.	Desember '82	5	3	8	12	8	20	3	4	7	2	1	3
10.	Januari '83	4	4	8	10	7	17	4	5	9	1	2	3
11.	Pebruari '83	3	4	7	9	9	18	5	2	7	2	1	3
12.	Maret '83	4	4	8	11	6	17	3	3	6	1	1	2
J U M L A H :		38	38	76	135	88	223	44	38	82	13	14	27

Dari daftar Rekapitulasi Mutasi, Kelahiran dan Kematian tersebut, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pendatang dengan berbagai motivasi, ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang pindah. Disamping itu juga dapat diketahui perbandingan antara angka kelahiran dan kematian, jauh lebih tinggi angka kelahiran. Dengan demikian dalam setiap tahunnya, untuk Kelurahan Rambutan harus diusahakan fasilitas-fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lingkungan hidup maupun sarana-sarana penunjang lainnya yang tentu saja atas dasar swadaya maupun usaha dari pemerintah.

Di Kelurahan Cilangkap sebenarnya tanpa adanya instruksi Gubernur tentang pernyataan Jakarta sebagai kota tertutup, tidak begitu banyak penambahan penduduk luar kota yang masuk ke Kelurahan Cilangkap. Hampir tidak ada bedanya baik yang diinstruksikan maupun tidak tentang Jakarta sebagai kota tertutup bagi Kelurahan Cilangkap, karena sejak dari dulu daerah Kelurahan Cilangkap memang tidak banyak pendatang baru dari luar kota. Hal ini ada kemungkinan disebabkan letak Kelurahan Cilangkap kurang strategis. Disamping berada di daerah pinggiran kota, juga lalu-lintas perekonomian belum ada. Tempat-tempat industri besar maupun kecil juga dapat dikatakan tidak ada di daerah Kelurahan Cilangkap. Inilah yang menyebabkan kurang daya tariknya orang-orang pendatang untuk masuk ke daerah Kelurahan Cilangkap.

Dari faktor-faktor tersebut di atas, maka mobilitas penduduk yang masuk dan ke luar di daerah Cilangkap tidak banyak yang melibatkan administrasi pemerintahan desa. Namun demikian tentang instruksi Gubernur dalam menyatakan kota Jakarta sebagai kota tertutup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Antara lain untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk bagi pendatang baru harus melengkapi surat pindah jiwa, jaminan tempat tinggal dan tempat bekerja, kemudian dengan disertai surat pengantar dari kelurahan, baru dapat mengurus pendaftaran penduduk ke Kantor Urusan Penduduk DKI Jakarta. Dengan demikian terhindar adanya penghuni liar, artinya yang tidak tercatat dalam administrasi kependudukan di Kelurahan Cilangkap.

Bagi penduduk yang akan meninggalkan Kelurahan Cilangkap, juga diadakan pencatatan secara tertib.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai berapa banyak mobilitas penduduk yang masuk dan ke luar di Kelurahan Cilangkap. Dalam prakteknya sehari-hari memang tidak banyak warga masyarakat Cilangkap yang memerlukan pelayanan dari pihak kelurahan. Hal ini dapat dimengerti, karena sebagian besar penduduk Cilangkap adalah pertanian. Oleh karena itu di Kelurahan Cilangkap penambahan penduduknya dapat dikatakan stabil dalam pengertian laju pertambahannya dalam tarap kecil. Dibandingkan

dengan Kelurahan Rambutan, laju pertumbuhan penduduk Cilangkap masih jauh ketinggalan, dan terutama pertumbuhan yang datangnya dari luar kota, hampir-hampir tidak berarti.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam daftar rekapitulasi mutasi, angka kelahiran dan kematian bagi penduduk Cilangkap seperti di bawah ini :

**DAFTAR : REKAPITULASI MUTASI, KELAHIRAN DAN KEMATIAN
PENDUDUK KELURAHAN CILANGKAP 1982 / 1983.**

Tabel 10

No.	Bulan	LAHIR			DATANG			PINDAH			MATI		
		L	P	JUM	L	P	JUM	L	P	JUM	L	P	JUM
1.	April '82	-	1	1	1	2	3	1	-	1	2	-	2
2.	Mei '82	1	2	3	-	1	1	1	1	2	1	1	2
3.	Juni '82	1	2	3	1	1	2	1	-	1	-	1	1
4.	Juli '82	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
5.	Agustus '82	2	2	4	1	1	2	-	2	2	1	3	4
6.	September '82	2	1	3	2	1	3	2	-	2	1	1	2
7.	Oktober '82	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	3
8.	Nopember '82	-	1	1	2	-	2	2	1	3	1	1	2
9.	Desember '82	2	2	4	2	1	3	1	2	3	-	1	1
10.	Januari '83	2	-	2	1	1	2	1	-	1	1	1	2
11.	Pebruari '83	1	2	3	2	-	2	1	1	2	-	2	2
12.	Maret '83	2	3	5	3	1	4	2	2	4	1	1	2
J U M L A H :		16	19	35	16	11	27	14	11	25	11	13	24

Dengan mempelajari daftar Rekapitulasi Mutasi, angka kelahiran dan angka kematian tersebut, maka dapat diketahui bahwa penduduk pendatang dengan penduduk yang pindah hampir menunjukkan angka yang sama. Hal ini berarti pengaruh bagi penduduk pendatang tidak mempunyai peranan yang kuat, sebaliknya sifat masyarakat Cilangkap tradisionalnya tetap dapat bertahan. Disamping itu ditinjau dari laju pertumbuhan penduduknya tidak mengalami grafik naik yang tinggi, karena angka kelahiran dengan angka kematian ditambah angka pendatang dan angka penduduk yang pindah tidak jauh berbeda. Sehingga dengan kondisi yang demikian itu, perubahan-perubahan kehidupan masyarakat juga tidak mengalami perkembangan yang berarti.

C. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA

Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa, sedangkan Pemerintahan Kelurahan adalah Kepala Kelurahan beserta Perangkat Kelurahan. Kepala Desa dan Kelurahan merupakan pimpinan yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban umum (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979; 11). Adapun pengertian Desa, untuk di Jakarta disamakan dengan Kelurahan.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.5 Tahun 1979, 10; yang berbunyi sebagai berikut :

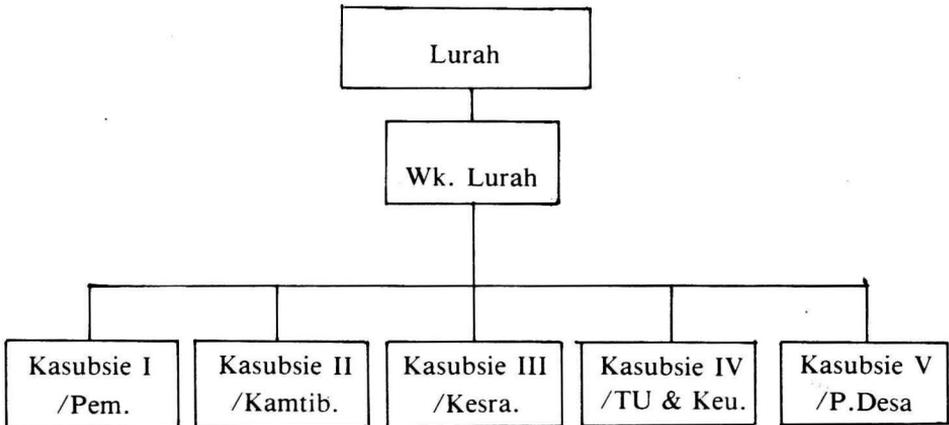
Disamping itu terdapat pula suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang disebut "Kelurahan," yang dimungkinkan dibentuk di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif.

Untuk di DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, maka dibuat Peraturan-Peraturan Daerah tentang tugas dan kewajiban Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Kelurahan. Pada tanggal 23 Desember 1966 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur no.Ib.3/2/14/1966 dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah No.6/P/I/1976 tentang tugas dan kewajiban Lurah dalam pembinaan RT/RW, untuk mencapai tujuan dari organisasi RT/RW sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, sehingga dapat kerja sama antara masyarakat melalui RT/RW dengan pemerintah setempat dalam menunjang program pemerintah dapat berjalan lancar.

Struktur Pemerintahan Desa atau Kelurahan di DKI Jakarta setelah Pelita I berlangsung, mulai diseragamkan yang meliputi 5 (lima) Sub Sie. sebagai berikut :

1. Sub Sie. I/Pemerintahan.
2. Sub Sie. II/Kamtib.
3. Sub Sie. III/Kesra.
4. Sub Sie. IV/TU dan Keuangan.
5. Sub Sie. V/Pembangunan Desa.

dengan terbentuknya Direktorat, Urusan, Seksi, dan Sub Seksi, tentang Pembangunan Desa dari tingkat Propinsi sampai dengan Kelurahan, maka organisasi masyarakat yang berada di bawah pengelolaan bidang pemerintahan ini, hanyalah Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Dengan demikian secara lengkap Aparat Pemerintahan Desa dapat disusun struktur organisasinya sebagai berikut :



Pada prinsipnya struktur organisasi hanya untuk memudahkan pembagian tugas, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan baik. Karena keberhasilan tugas dan tujuan yang dicapai adalah tanggung jawab bersama. Apabila kita perhatikan dalam struktur organisasi tersebut, ternyata tidak tercantum organisasi RT/RW. Dan organisasi RT/RW tidak secara formal dimasukkan ke dalam aparat Pemerintahan Desa, melainkan hanya membantu pelaksanaan ketertiban dalam masyarakat. Dan lebih tepatnya adalah organisasi non pemerintah yang ikut membantu memelihara ketertiban dan keamanan desanya. Para Ketua RT/RW tidak mendapat imbalan apapun, namun mendapat beban untuk membantu pelayanan masyarakat. Antara lain menerima laporan perpindahan warga maupun orang-orang pendatang baru, selain bertugas memelihara ketertiban dan keamanan desanya atau kampungnya. Jadi

organisasi RT/RW ini merupakan organisasi sosial masyarakat yang sifatnya sukarela. Untuk lebih jelasnya Sejarah Pemerintahan Desa di DKI Jakarta, kita ambilkan contoh di dua kelurahan yang dijadikan daerah penelitian. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Cilangkap.

1. Asal usul Pemerintahan Kelurahan Rambutan dan Cilangkap

Sebelum daerah Rambutan dan Cilangkap merupakan bentuk pemerintahan pedesaan, kedua-duanya masih merupakan daerah perladangan yang luas. Pemberian nama Rambutan itupun baru dikenal setelah terdapatnya pohon-pohon rambutan di daerah itu. Sedangkan nama Cilangkap berasal dari istilah kata **celakak**. Menurut cerita yang berkembang di daerah Cilangkap, bahwa pada jaman dahulu di daerah Cilangkap banyak orang-orang sakti yang menggunakan ilmu-ilmu kesaktian yang biasa disebut **teluh** (ilmu kesaktian yang digunakan untuk membuat orang tidak berdaya, bahkan dapat menimbulkan kematian seorang yang tidak disenangi). Orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian tersebut tidak sealiran, sehingga masyarakat Cilangkap dahulu berkelompok-kelompok menurut perguruan masing-masing.

Banyak orang yang lewat Kampung Cilangkap, tidak diduga-duga meninggal mendadak, disebabkan kena **teluh**.

Ada seorang **jagoan** atau **jawara** di daerah Cilangkap yang sangat disegani oleh masyarakat Cilangkap. Orang tersebut bernama **Boan**. Tetapi Boan banyak menolong masyarakat dengan ilmunya. Orang-orang yang mendapat kesulitan karena kena teluh banyak yang ditolong. Disamping itu dapat pula mengobati orang yang digigit ular, dan lain-lain. Teluh atau **Tenung** itu mulai hilang sejak tahun 1950-an. Menurut ceritera penduduk setempat teluh atau tenung yang sudah tidak mempan terus dibuang ke Kali Cilangkap. Tetapi kalau ada orang yang cuci muka di kali itu, orang langsung mati, yang berarti orang tersebut **celakak** yang akhirnya ucapannya berubah menjadi **Cilangkap**.

Lain halnya dengan ceritera di Kelurahan Rambutan. Kalau di daerah Kelurahan Rambutan dahulu terdapat perkebunan atau perladangan yang banyak tumbuh pohon rambutan. Pohon rambutan tersebut besar-besar sampai dapat untuk loncat dari pohon satu ke pohon yang lain. Perkebunan atau perladangan pada waktu itu masih luas, pemiliknya merupakan tuan-tuan tanah. Timbulnya tuan-tuan tanah ini memang sangat erat hubungannya dengan perladangan di daerah Jawa Barat.

Pada mulanya daerah Rambutan maupun Cilangkap masuk wilayah kerajaan Pajajaran. Dan Sunda Kelapa atau Jayakarta termasuk kota pelabuhan di bawah kerajaan Pajajaran. Pada waktu Falatehan merebut Sunda Kelapa dari penjajah Portugis, maka Falatehan berhasil meng-Islamkan Jayakarta dan termasuk pula daerah Rambutan dan Cilangkap.

Peristiwa perebutan Jayakarta tersebut, jadi pada tahun 1927, yang akhirnya setiap tanggal 22 Juni 1527 diperingati hari jadi kota Jakarta. Karena dalam perebutan tersebut Falatehan memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang, maka nama Sunda Kelapa diganti namanya menjadi "Jayakarta." Jaya berarti menang, dan karta berarti sempurna atau gilang-gemilang.

Pada waktu terjadi perebutan kota pelabuhan Sunda Kelapa tersebut, Pajajaran tidak ikut bertempur dan hanya mengandalkan bangsa Portugis, karena bangsa Portugis dengan Pajajaran telah terjadi kerjasama dalam soal perdagangan. Sebagai peringatan kerjasama ini telah dibuat prasasti bertulis dengan nama "**Padro.**"

Sekarang Padro ini disimpan di dalam Musium Sejarah Jakarta atau Musium Fatahilah. Untuk orang-orang Sunda Kelapa sendiri, pada waktu terjadi perebutan kota pelabuhan itu banyak yang membantu Falatehan. Masyarakat Sunda Kelapa dan sekitarnya juga berhasil di Islamkan, termasuk daerah Rambutan karena bagi masyarakat tersebut mudah menerima ajaran-ajaran Islam. Tetapi untuk daerah Cilangkap berhubung letaknya agak berjauhan dengan pusat kota pelabuhan Sunda Kelapa, maka tidak cepat memeluk agama Islam. Namun demikian, baik daerah Rambutan maupun Cilangkap pada mulanya dihuni oleh suku bangsa yang mempunyai kesamaan dalam mata pencaharian, yakni pertanian dengan sistem perladangan yang berpindah-pindah. Lama-kelamaan para petani tersebut mulai menetap dengan mengolah perkebunan buah-buahan.

Kekuasaan tanah perkebunan ini berada pada orang-orang kuat yang biasa disebut **jagoan** atau **jawara**. Jawara-jawara inilah yang menjadi tuan-tuan tanah dan seolah-olah menjadi penguasa setempat. Jawara ada yang berbuat baik, tetapi ada pula yang berbuat kejam. Seperti jawara **Boan** sangat disegani masyarakat, tetapi jawara **Saban** sangat ditakuti oleh masyarakat Cilangkap. Pernah terjadi kerjasama antara **Boan** dan **Saban**. Kerjasama ini terjadi karena hasutan dari Saban, untuk mengajak Boan merampok majikannya sendiri. Majikan tersebut bernama **Nyaum**, yakni seorang petani kaya dan tuan tanah di daerah Cilangkap. Dalam kerjasama antara Boan dan Saban tersebut ternyata berhasil mengumpulkan hasil rampokannya dengan jumlah yang cukup banyak tetapi sangat heran semua benda-benda hasil rampokan tersebut sulit untuk disimpannya, karena disimpan dimanapun selalu diketahui oleh Majikan Nyaum. Akhirnya kedua jawara tersebut menyerah, dan tunduk atas segala perintah dari Majikan Nyaum.

Selanjutnya untuk di daerah Rambutan, agak berbeda sejarah timbulnya pemerintahan pedesaan. Kalau di daerah Rambutan, yang memegang peranan adalah tuan-tuan tanah, tetapi biasanya tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama ini pernah ikut membantu perjuangan Falatehan dalam merebut Sunda Kelapa. Kemudian setelah Falatehan berhasil merebut Sunda Kelapa, terus menyerahkannya kepada Banten dan Falatehan sendiri pergi

untuk menetap di daerah Cirebon yang terkenal dengan daerah Gunung Jati. Kemudian Sunda Kelapa atau Jayakarta di bawah kekuasaan Banten dan Pangeran Wijayakrama sebagai pemegang kekuasaan. Pada waktu itu banyak orang-orang Banten yang dikirim ke Jayakarta untuk membantu Pangeran Wijayakrama. Agama Islam berkembang pesat di Jayakarta, dan banyak dibangun tempat-tempat peribadatan, seperti mesjid, langgar maupun tempat-tempat pengajian. Orang-orang Islam yang pernah berjasa dalam perebutan kota pelabuhan Sunda Kelapa dapat tempat yang baik. Tanah-tanah banyak diberikan kepada mereka untuk dijadikan daerah perkebunan. Sejak itulah daerah Rambutan mulai banyak ditanam pohon rambutan, yang hasilnya sangat memuaskan. Sebagai penguasa perkebunan rambutan tersebut adalah tokoh-tokoh agama. Selanjutnya tokoh-tokoh agama ini secara turun-temurun memberikan hak pada anak-cucunya, sehingga menjadi kebiasaan bahwa yang menjadi tuan tanah dan penguasa di daerah Rambutan adalah tuan-tuan tanah yang terdiri dari tokoh-tokoh agama. Karena tokoh-tokoh agama ini mempunyai hubungan langsung kepada kerajaan Banten maupun kepada Pangeran Wijayakrama, maka di kalangan masyarakat selalu mendapat kedudukan yang terhormat pula.

2. Pada periode penjajahan Belanda

Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Dari sedikit demi sedikit terus memperluas daerah perdagangannya dengan mendirikan kantor-kantor perdagangan yang akhirnya dari kantor-kantor perdagangan tersebut mulai menyusun kekuatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Belanda menjajah di Indonesia sejak masuknya Verenigde Oost Indische Compagne (VOC) ke Indonesia, yakni pada tahun 1602. Kemudian Belanda menginginkan Jayakarta sebagai daerah perdagangan yang dapat langsung berhubungan dengan kantor-kantor perdagangan di Eropa. Kantor perdagangan Belanda di Jayakarta dilengkapi dengan persenjataan yang kuat mempunyai fungsi sebagai perbentengan. Nama Jayakarta diganti menjadi **Batavia** yang berarti daerah milik orang-orang **Batav**. Batav ini adalah nama dari nama nenek moyang bangsa Belanda. Jadi Belanda bertujuan untuk memiliki Jayakarta atau Batavia itu untuk selama-lamanya. Kekuasaan Pangeran Wijayakrama mulai terganggu. Kemudian Pangeran Wijayakrama yang juga dikenal sebagai Pangeran Jayakarta, mulai protes yang akhirnya terjadi pertempuran. Belanda mengerahkan pasukannya yang telah dipersenjatai serba modern dibandingkan dengan pasukan Pangeran Wijayakrama. Kota Jayakarta dibakar untuk memudahkan penyerangan terhadap pasukan Wijayakrama. Dalam pertempuran pasukan Wijayakrama berjuang habis-habisan, tetapi sayang sekali dalam pertempuran Pangeran Wijayakrama gugur pada tanggal 19 Mei 1619. Selanjutnya hari gurnya Pangeran Wijayakrama tersebut dinyatakan sebagai hari **berkabung** bagi masyarakat Jakarta.

Sejak itulah kekuasaan mulai beralih ke tangan Belanda dan kota Jakarta dibangun kembali menurut kemauan Belanda. Nama Batavia tetap diabadikan sesuai dengan rencana semula, bahwa Belanda ingin memilikinya sebagaimana milik nenek moyangnya sendiri.

Belanda mulai membuat aturan-aturan yang hanya menguntungkan pihaknya saja. Tanah-tanah perkebunan dan perladangan penduduk diharuskan ditanami dengan tanaman yang dapat menghasilkan barang-barang perdagangan untuk Belanda. Penduduk gelisah, untuk mempertahankan tanah miliknya, tetapi sulit untuk menghadapi Belanda. Banyak tanah penduduk dirampas dan tidak ketinggalan pula tanah-tanah di daerah Rambutan maupun Cilangkap.

Dengan berkuasanya Belanda di Batavia (Jayakarta) itu, kekuasaan Sultan Agung di Mataram juga mengalami gangguan. Oleh karena itu Sultan Agung berusaha untuk mengusir Belanda dari Pulau Jawa. Sebelum Sultan Agung melancarkan penyerangan ke Batavia, terlebih dahulu mengadakan persiapan, yang meliputi perbekalan makanan dan perbekalan persenjataan termasuk pula cadangan pasukan. Lumbung-lumbung padi dibangun dan juga membantu orang-orang yang tanahnya dirampas oleh Belanda. Para petani didekati dan diberikan bimbingan cara bertani yang baik.

Sejak itulah para petani mulai menetap dan mengolah tanah pertaniannya secara intensif. Perladangan berpindah mulai berkurang, dan banyak pula yang mencoba menanam padi. Tetapi untuk daerah Rambutan dan Cilangkap tidak begitu cocok untuk pertanian padi. Daerahnya lebih cocok ditanami pohon buah-buahan, dan sayur-mayur. Orang-orang Betawi telah memeluk agama Islam sejak disembarkannya agama Islam oleh Falatehan. Sedangkan Sultan Agung juga menganut agama Islam , sehingga orang-orang Betawi mudah menyesuaikan diri dengan pasukan Sultan Agung. Pada waktu melancarkan penyerbuat ke Batavia Sultan Agung banyak dibantu oleh orang-orang Betawi maupun orang-orang dari Jawa Barat. Daerah Rambutan maupun Cilangkap termasuk daerah pertanian yang banyak men-**suplay** perbekalan makanan untuk Pasukan Sultan Agung. Pada waktu itu pertahanan Sultan Agung dipusatkan di daerah Matraman. Daerah Matraman dengan daerah Rambutan maupun Cilangkap tidak begitu berjauhan. Terlebih-lebih ada jalan penghubung antara Matraman dengan Rambutan yang agak lebar (masih jalan tanah). Kemudian antara Rambutan dengan Cilangkap meskipun masih merupakan daerah perkebunan, bahkan masih ada pula hutan-hutan, namun tidak begitu sulit untuk komunikasi, karena tidak ada penghalang berupa kali, maupun pegunungan yang berarti. Tetapi untuk orang-orang Cilangkap pada waktu itu, memang belum banyak masuk Islam.

Hal ini ada kemungkinan, karena letak daerah Cilangkap kurang strategis, dan masih termasuk daerah pedalaman yang belum banyak penghuninya. Maka sasaran Pasukan Sultan Agung, belum banyak mencurahkan perhatiannya ke daerah Cilangkap. Hal ini terbukti dari kepercayaan orang-orang Cilangkap masih banyak yang percaya terhadap kekuatan gaib dan Hindu, sebagaimana pada waktu masih dikuasai oleh kerajaan Pajajaran. Jadi pada periode penjajahan Belanda, baik daerah Rambutan, maupun Cilangkap belum merupakan bentuk pemerintahan pedesaan, karena dilihat dari segi penduduknya masih sangat sedikit. Adapun daerah Rambutan dan Cilangkap ini hanya merupakan daerah perkebunan dan perladangan yang statusnya dimasukkan ke dalam wilayah **Onderdistrict** Pasar Rebo. Belum merupakan status Desa atau Kelurahan seperti pengertian sekarang.

Tuan tanah ataupun tokoh-tokoh agama yang berkuasa di daerah Rambutan maupun Cilangkap belum mempunyai aparat pemerintahan yang berstruktur organisasi Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Kelurahan. Tuan tanah dalam tokoh-tokoh agama hanya semata-mata berkuasa terhadap perkebunan atau perladangan yang mempunyai tenaga-tenaga pengolah tanah pertanian. Segala perintah dan imbalannya sangat tergantung dari tuan tanah maupun tokoh agama tersebut. Tuan tanah maupun tokoh agama ini biasanya orang kuat yang disegani oleh masyarakat. Dia mempunyai **centeng** (penjaga yang setia dan kuat yang biasanya seorang **jawara**). Pada jaman penjajahan Belanda tidak sedikit orang-orang Belanda dan juga menjadi tuan tanah. Di daerah Rambutan pernah ada seorang tuan tanah orang Belanda bernama **Amen**.

Tuan Amen ini mempunyai tanah luas, dan dapat memberikan gaji kepada tenaga-tenaganya secara tetap. Setelah tuan Amen meninggal, maka tanah yang luas itu menjadi terlantar, akhirnya dibagi-bagi oleh masyarakat yang pada waktu itu masyarakatpun tidak memerlukannya, karena tanah memang masih cukup luas. Orang-orang lebih senang bekerja pada tuan rumah dengan mendapatkan gaji tetap dan tidak banyak menanggung **resiko**, daripada harus mengolah tanah sendiri dengan mengeluarkan biaya yang hasilnya belum tentu baik.

3. Pada Periode Penjajahan Jepang

Jepang dapat merebut Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Untuk kota Jakarta sebenarnya telah dapat direbut pada tanggal 5 Maret 1942 dan kemudian pada tanggal 7 Maret 1942 oleh Pembesar Bala Tentara Jepang di Jakarta dikeluarkan Undang-Undang No.1 tentang menjalankan pemerintahan Bala Tentara Jepang. Menurut pasal 3 Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Militer Jepang. Segala Undang-Undang maupun peraturan yang mereka keluarkan bertanda

Pembesar Bala Tentara Dai Nippon. Namun demikian sebagai suatu taktik secara bertahap Jepang menjalankan pemerintahan sipil yang merupakan penunjang dalam bidang militer. Pembinaan tata pemerintahan sipil dimulai dengan dikeluarkannya dengan Undang-Undang no.27 tahun 1942 yang berlaku untuk seluruh pulau Jawa dan pulau Madura, kecuali daerah Resultanan.

Pulau Jawa dan Madura terbagi atas pembagian wilayah sebagai berikut : **Syuu** (Keresidenan), **Si** (Stadsgemente), **Ken** (Kabupaten), **Gun** (Kewedanaan), **Son** (Kecamatan) dan **Ku** (Desa atau Kelurahan). Untuk masing Si dan Ken diangkat seorang Kepala yang disebut **Sityoo** dan **Kentyoo**. (The Liang Gie, 1958; 88). Mengenai pembagi wilayah ini adalah suatu perubahan penting yang dilakukan oleh pihak Jepang mengenai pemerintahan Si ialah kalau dahulu Stadsgemente hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja tanpa mengurus urusan **pangrehpraja**, maka menurut Undang-undang perubahan tata pemerintahan daerah tersebut di atas ditetapkan, bahwa Si mengerjakan segala pemerintahan dalam lingkungan daerahnya. Urusan pemerintahan atau pangrehpraja di dalam wilayah Stadsgemente yang dahulu diurus oleh **Regent** (Bupati), wedana, asisten wedana, lurah, kepala kampung, tapi kini termasuk dalam kekuasaan **Sintyoo** (Kepala Si).

Dengan pembagian wilayah seperti di atas, maka untuk daerah Rambutan dan Cilangkap dimasukkan seperti pada masa jaman penjajahan Belanda, yakni termasuk **Pasar Rebo Son** (Kecamatan Pasar Rebo). Daerah lain yang termasuk Pasar Rebo Son adalah Desa Makasar, Tanjung Oost, Cibubur, Pondok Gede, Kemandoran Cawang, Desa Cipinang Melayu, Kebon Pala dan Kramat Jati.

Jadi pengertian istilah **Desa / Kelurahan** belum begitu jelas seperti pengertian sekarang. Oleh karena itu tentang pembagian wilayah Kecamatan Pasar Rebo tidak seperti dengan keadaan sekarang. Dahulu Kecamatan Pasar Rebo wilayahnya lebih sempit, sedangkan sekarang sudah luas. Jadi nama-nama kelurahan yang sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pasar Rebo, dahulunya hanya merupakan perkebunan atau perladangan. Termasuk pula untuk daerah Rambutan dan Cilangkap yang dahulunya juga hanya merupakan daerah perkebunan dan perladangan, yang banyak ditanami pohon buah-buahan rambutan, duren, dan lain sebagainya.

Adapun sejarah timbulnya pemerintah desa di daerah Rambutan dan Cilangkap, sebenarnya merupakan kelanjutan seperti pada jaman penjajahan Belanda dahulu.

Pada mulanya pihak pemerintahan penjajahan Belanda sangat mempercayakan kepada tuan-tuan tanah maupun tokoh-tokoh agama. Begitu pula pada masa penjajahan Jepang, dimana Jepang juga mempercayakan kepada para tuan-tuan tanah dan tokoh-tokoh agama, hanya bedanya Jepang

langsung ikut campur dalam urusan hasil pertanian, sedangkan Belanda cukup mendapat setoran dari para tuan tanah dan para petani yang mengerjakan daerah pertanian. Adapun cara mengolah hasil diserahkan sepenuhnya kepada para tuan tanah maupun petani tersebut. Tetapi Jepang turut menentukan segala hasil yang harus diserahkan kepada pihak pemerintah Jepang. Untuk penyerahan hasil ini Jepang lebih **serakah** dari pada Belanda. Bahkan tidak sedikit para petani yang terpaksa tidak mendapatkan hasil dari perkebunan maupun perladangan. Banyak sekali timbul penderitaan dan korban meninggal akibat dari kelaparan. Disamping itu penduduk juga masih mendapat tekanan dari pihak penguasa setempat, yakni dari tuan-tuan tanah yang mendapat kepercayaan oleh Jepang. Pihak tuan tanah ini terpaksa ikut berbuat kejam, karena memang dia sendiri diancam oleh Jepang apabila tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Jepang. Keadaan sedemikian ini terjadi di hampir seluruh wilayah Jakarta, terutama yang terdapat hasil-hasil yang potensial untuk kepentingan Jepang. Pengawasan terhadap barang-barang perdagangan pun juga sangat ketat. Segala sesuatu diadakan tanda milik Nippon. Semua hasil bumi harus disimpan dalam gudang-gudang yang telah ditentukan oleh Jepang pada tempat **strategis** yang siap untuk diangkut ke negara Jepang. Dalam hal ini peranan kaum penguasa setempat yang terdiri dari tuan-tuan tanah dan tokoh-tokoh agama sangat besar.

Maka untuk daerah Rambutan dan Cilangkap, yang memang sejak dahulu tuan tanah telah memiliki tenaga-tenaga yang dapat digerakkan untuk mengolah tanah pertanian, dalam hal memenuhi permintaan Jepang tersebut tidak mengalami kesulitan. Akhirnya para penguasa yang biasanya terdiri dari tuan tanah, tokoh agama, maupun **jawara**, seolah-olah merupakan bentuk pemerintahan desa yang langsung mempunyai hubungan **vertikal**. Ke atas tunduk kepada Jepang dan ke bawah dapat memerintah penduduk atas nama pemerintah Jepang. Padahal sebenarnya mereka ini hanyalah penguasa daerah pertanian yang mengolah tanah dengan menggunakan tenaga-tenaga yang diberi imbalan menurut mereka sendiri.

Tetapi lama-kelamaan penguasa-penguasa seperti ini terus mendapat pengesahan oleh pemerintah. Jadi belum ada pilihan yang dilakukan oleh rakyat. Sistem pemilihan memang belum dikenal di dalam kalangan masyarakat di Indonesia pada masa penjajahan Jepang.

4. Pada Periode Kemerdekaan Indonesia

Jakarta merupakan tempat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tersebut, berarti semua yang telah dilakukan oleh pihak penjajah Belanda maupun Jepang harus ditinjau kembali. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan bangsa Indonesia harus diganti, dan diatur kembali. Hal

ini termasuk tata cara yang berlaku di pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Dalam pengaturan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan harus diciptakan situasi yang tenang. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Karena meskipun kemerdekaan telah diproklamkan, namun ancaman yang dihadapi masih cukup berat. Jepang masih **bercokol** di Tanah Air Indonesia dan pihak sekutu pasti akan datang untuk mengganti pemerintahan dari pihak Jepang.

Jadi dengan situasi yang demikian itulah pihak pemerintah Indonesia belum dapat mengatur susunan pemerintahan yang sebaik-baiknya. Untuk sementara waktu susunan pemerintahan pedesaan tetap seperti semula. Sampai pada akhir Perang Kemerdekaan I (tahun 1947) di Jakarta belum ada perubahan-perubahan tentang susunan pemerintahan pedesaan. Nama-nama bentuk pemerintahan desa, tetap seperti pada waktu pemerintahan pendudukan Jepang. Hanya kata-kata Jepang telah diganti dengan kata-kata Indonesia. Seperti Syuu menjadi Keresidenan, Si menjadi Walikota, Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan, dan Ku menjadi Desa atau Kelurahan. Tetapi untuk di Jakarta, tidak terdapat nama Kewedanaan, maupun Kabupaten. Jakarta pun juga baru merupakan daerah Walikota, belum menjadi **Daerah Khusus Ibukota**. Sebagai daerah Walikota, maka Jakarta belum dibagi menjadi 5 (lima) wilayah kota seperti sekarang. Luas wilayah Jakarta baru merupakan perkotaan saja.

Sehubungan dengan penggantian nama-nama Jepang menjadi nama Indonesia tersebut, maka mulailah sebutan yang diseragamkan untuk Pemerintahan Desa di Jakarta. Semua Kepala Desa di Jakarta disebut Lurah dan semua wilayah yang menjadi kekuasaan Lurah disebut Kelurahan. Pada saat penyeragaman seluruh penguasa-penguasa daerah pedesaan di Jakarta, maka mulailah ada pemilihan untuk lurah. Sebelumnya itu lurah-lurah di Jakarta belum ada sistem pemilihan. Yang menjadi penguasa di daerah pedesaan adalah orang-orang yang kuat yang disegani oleh masyarakat. Kuat dalam pengertian meliputi kuat ekonomi, fisik, ilmu agama, maupun kemampuan mengutarakan permasalahan dalam masyarakat. Tetapi tidak semuanya itu harus menjadi ketentuan untuk satu orang. Jadi asalkan diantara kesekian persyaratan tersebut sudah terdapat satu saja sudah dapat menduduki kepala desa atau penguasa wilayah pedesaan. Biasanya yang dapat memenuhi persyaratan semacam itu adalah tokoh agama, tuan tanah, maupun bekas jawara. Sehingga pada tahun 1947 jabatan untuk Lurah sudah mulai diatur berdasarkan pemilihan. Calon-calon yang akan menduduki jabatan Lurah, biasanya ditentukan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh agama, jagoan, dan orang kaya di desa itu. Ketentuan ini sebenarnya tidak tertulis, hanya merupakan

kesepakatan bersama dalam masyarakat pedesaan itu sendiri.

Sejak tahun 1947 mulailah terbentuk secara formal pemerintahan pedesaan di seluruh Jakarta. Di dalam mengadakan pemilihan Lurah tersebut, di daerah Rambutan tidak ketinggalan melaksanakannya. Penguasa yang lama kebetulan sudah ada, yakni seorang **jagoan** bernama **Jibun**. Dia seorang jago silat yang disegani oleh masyarakat di daerah Rambutan. Ternyata dalam pemilihan Lurah tersebut, dia juga termasuk dipilih sebagai calon Lurah. Kemudian dari tokoh agama terpilih sebagai calon adalah Haji **Sion**, sedangkan dari orang kaya di desa Rambutan adalah Haji **Sarmili**. Haji Sarmili ini juga termasuk tokoh agama dan seorang tuan tanah. Dalam pemilihan Lurah menggunakan tanda bendera tiga macam. Benderanya bukan merah putih, tetapi hanya satu warna saja ada yang merah, hijau atau kuning. Ternyata di dalam pemilihan yang diselenggarakan untuk pertama kali tersebut yang mendapat suara terbanyak adalah **Jibun** seorang **jagoan**. Lama jabatan Lurah belum ada ketentuan secara tetap. Hal ini tergantung dari situasi masing-masing daerah. Namun demikian di daerah Rambutan hampir tiap 5 sampai 7 tahun ada pergantian Lurah. Bahkan sebelum ada pemilihan secara **formal** tersebut, di Kelurahan Rambutan juga sudah ada penguasa desa yang menjabat sejak tahun 1930-an, yakni Haji Sarmili. Dan ternyata Haji Sarmili tersebut terpilih sebagai Lurah pada tahun 1947, namun tidak berhasil. Kemudian setelah ada pemilihan Lurah kembali pada tahun 1952, ternyata Haji Sarmili dapat memenangkannya dan terpilih sebagai Lurah.

Sejak itulah keadaan Kelurahan Rambutan secara teratur Pemerintahan Kelurahan berjalan secara baik. Dan persyaratan untuk menjadi calon Lurah pun juga sudah ada keharusan bagi yang dapat membaca dan menulis, sekalipun tidak tamat dari Sekolah Dasar.

Untuk daerah Cilangkap tentang Sejarah Pemerintahan Desa, pada mulanya juga tidak secara pemilihan.

Dan hanya orang-orang penguasa pedesaan setempat yang biasanya terdiri dari seorang **jawara**, tuan tanah, maupun seorang yang memiliki ilmu tinggi dalam suatu aliran kesaktian yang sedang berkembang di daerah Cilangkap. Lain halnya dengan di Kelurahan Rambutan, kalau di Kelurahan Cilangkap tidak ada persyaratan harus tokoh agama, tetapi di Kelurahan Rambutan tokoh agama menjadi persyaratan mutlak. Dan sudah berkali-kali di Kelurahan Rambutan setiap pemilihan tokoh agama memenangkan sebagai Lurah. Sedangkan di daerah Cilangkap, yang sering terpilih sebagai Lurah adalah dari tokoh ilmu kesaktian, yang biasanya juga seorang **jagoan** atau **jawara**. Pada pemilihan Lurah pertama kali tahun 1947 ternyata juga dimenangkan oleh seorang jagoan yang mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi.

Orang tersebut bernama **Kinah**. Kemudian dalam penggantian Lurah berikutnya juga dimenangkan oleh tokoh ilmu kesaktian yang bernama **Utang**. Untuk di Kelurahan Cilangkap persyaratan yang menyangkut pendidikan yakni harus dapat membaca dan menulis belum menjadi persyaratan mutlak sampai tahun 1950-an. Hal ini dapat dimengerti bahwa di daerah Kelurahan Cilangkap soal pendidikan memang mengalami kelambatan, mengingat letaknya berada di daerah pedalaman atau pada saat sekarang terletak di daerah pinggiran kota Jakarta.

D. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar belakang penduduk di Kelurahan Rambutan dan Cilangkap dari segi sosial budaya tidak sama. Hal ini dapat dilihat sepintas lalu dalam perkembangan pertambahan penduduk dan terletak daripada lokasi dari kedua kelurahan tersebut. Rambutan berada di dekat perkotaan, sedangkan Cilangkap jauh dari daerah perkotaan. Suku bangsa dari kedua kelurahan tersebut adalah memang sama yakni suku bangsa Betawi, namun mengingat daerah Cilangkap berdekatan dengan suku bangsa Sunda dari Jawa Barat, dan disamping itu lebih banyak berhubungan dengan suku bangsa Sunda tersebut, maka sosial budayanya lebih kuat pengaruhnya dari Sunda – Jawa Barat. Dari segi agama pun dapat dilihat bahwa untuk penduduk Rambutan bersifat **agamis** sejak dulu, sedangkan penduduk di Kelurahan Cilangkap tidak agamis, bahkan lebih banyak berkembang ilmu **teluh** atau **tenung** yang tidak ada hubungan dengan agama Islam. Upacara-upacara adat lebih banyak mengikuti adat Jawa Barat dibanding adat Betawi. Hal ini dapat diketahui adanya sesaji-sesaji dalam upacara memetik hasil panen misal memetik hasil panen misal memetik padi, buah-buahan dan sebagainya. Saji-sesaji dengan membakar kemenyan tidak dikenal bagi masyarakat Betawi di Kelurahan Rambutan sejak dari dulu. Teluh dan tenung juga tidak ada di daerah Kelurahan Rambutan. Dan dalam perkembangan masyarakat selanjutnya juga mengalami perkembangan yang berbeda.

1. Kolektiva dan elite-elite desa

Untuk masyarakat Kelurahan Rambutan tradisionalnya sudah mengalami perubahan, karena perpaduan dengan kebudayaan dari luar Betawi, terutama pengaruh Islam. Sifat tradisional Betawi ada persamaan dengan Islam, sehingga orang-orang Islam mudah diterima di kalangan masyarakat Kelurahan Rambutan. Terlebih-lebih terhadap orang-orang Arab yang biasanya disebut **Habib** mendapat penghormatan yang baik di masyarakat Kelurahan Rambutan. Karena sifat masyarakat yang sangat fanatik terhadap agama Islam, maka orang-orang selain Islam sangat sulit untuk masuk ke daerah Kelurahan Rambutan.

Hanya orang-orang yang mempunyai ilmu agama Islam yang tinggi akan

mudah diterima di masyarakat Kelurahan Rambutan.

Selain berilmu tinggi terhadap agama Islam, juga harus tekun dalam melaksanakan ibadah. Sebagai contoh adalah Bapak Narwoko Kadarusman, yang sekarang dianggap sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Rambutan. Dia berasal dari Pagotan Madiun – Jawa Timur. Pada tahun 1953 datang di daerah Kelurahan Rambutan. Tujuannya untuk sekolah di Jakarta. Pada mulanya selalu dicurigai oleh masyarakat Kelurahan Rambutan, terutama tentang **taqwanya** terhadap agama Islam. Dia tahu masalah itu, sehingga dia berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat. Taqwanya terhadap agama benar-benar ditingkatkan. Maka setiap malam kira-kira pukul 02.00 malam hari, dia pergi ke mesjid untuk sembahyang **tahajud**. Disamping itu, dia tidak pernah meninggalkan sembahyang lima waktu dan selalu membaca ayat-ayat suci Alqur'an dengan baik. Mengajinya tekun, sehingga oleh masyarakat mendapat tanggapan baik, dan dianggap sebagai warga masyarakat Kelurahan Rambutan. Akhirnya banyak orang-orang yang mengharapkan dia untuk menjadi menantunya. Dia juga tidak dicurigai dalam pergaulan dengan muda-mudi, bahkan diperbolehkan untuk saling berhubungan dengan seorang gadis dari keturunan penduduk asli di Kelurahan Rambutan. Istri yang sekarang adalah gadis pilihannya yang berasal dari Kelurahan Rambutan. Bahkan sekarang Narwoko Kadarusman telah berpredikat haji dan termasuk seorang yang terpandang di masyarakat Kelurahan Rambutan. Jiwa sosialnya tinggi dan sebagai bukti bahwa sekarang dia terpilih sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Al Kahfi. Di dalam kegiatan Al Kahfi ini, dia tidak mendapatkan imbalan apapun. Bahkan untuk keperluan Yayasan Al Kahfi, terutama dalam mendirikan Gedung Sekolah, pembelian tanah, dan lain-lain banyak menggunakan dana dari sumbangan lain-lain dari Haji Narwoko Kadarusman. Sifat masyarakat Kelurahan Rambutan yang **agamis** itu sampai sekarang masih terasa, namun tidak se-fanatik seperti dulu.

Sejak tahun 1970-an di daerah Kelurahan Rambutan sudah mulai banyak orang-orang pendatang yang masuk ke Kelurahan Rambutan. Terlebih-lebih setelah dibangunnya Pasar Induk pada tahun 1974. Orang-orang pendatang dari Jawa Tengah banyak yang bertempat tinggal di daerah Kelurahan Rambutan. Kalau sebelum tahun 1970-an di daerah Kelurahan Rambutan telah banyak orang-orang dari Jawa Barat masuk ke Kelurahan Rambutan, yang juga sangat tekun dalam melaksanakan ibadah menurut agama Islam. Bagi orang-orang dari Jawa Barat ini memang tidak ada kesulitan, karena memang mempunyai persamaan-persamaan pandangan terhadap agama Islam.

Tetapi orang-orang Jawa Tengah yang datang di Kelurahan Rambutan, sekalipun juga memeluk agama Islam, namun pandangannya terhadap Islam agak berbeda. Orang-orang dari Jawa Tengah banyak yang telah kena

pengaruh kebudayaan Hindu, sehingga dalam melaksanakan ibadahnya tidak se-fanatik seperti orang-orang yang berasal dari Jawa Barat maupun orang-orang Betawi. Namun demikian sifat orang-orang pendatang dari Jawa Tengah ini mudah menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, sehingga di kalangan masyarakat Kelurahan Rambutan dari orang-orang pendatang maupun anak-anak remaja.

Bahkan sebaliknya dengan adanya orang-orang pendatang tersebut masyarakat Kelurahan Rambutan menjadi dinamis. Banyak kegiatan-kegiatan yang timbul yang kolektur-kolektur antara lain dalam bidang olah-raga, kesenian, ketrampilan, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut boleh diadakan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Kelurahan Rambutan tidak pernah ada hiburan seperti Jipeng, Topeng, Lenong.

Hal ini ada kemungkinan tidak diterima oleh masyarakat Kelurahan Rambutan, karena isi ceriteranya dan cara penampilannya kurang cocok dengan ajaran Islam. Tetapi hiburan lainnya seperti film, wayang kulit Betawi wayang golek, sering juga diadakan oleh masyarakat, misalnya dalam pesta perkawinan dan lain-lain, namun penontonya sangat terbatas. Terutama mengenai wayang kulit Betawi dan wayang golek, biasanya hanya orang-orang tua saja yang menonton. Pada upacara **ruwatan** dahulu selalu **nanggap** wayang kulit Betawi. Anak yang **semata wayang** yakni anak yang di tengah-tengah karena kakaknya meninggal dan adiknya juga meninggal, jadi tinggal satu-satunya, maka anak tersebut harus diruwat dengan menanggap wayang kulit Betawi. Kalau tidak diruwat takut ada sesuatu yang akan menimpa mala petaka pada anak tersebut. Upacara ruwatan semacam itu sejak tahun 1950-an sudah tidak masyarakat lagi, artinya sudah tidak biasa lagi diadakan. Juga mengenai upacara **bebaritan**, yang dulu juga sering diadakan setiap tahun, dengan bertujuan untuk **bersih desa** (selamatan kampung untuk menghindari kutukan Tuhan), sejak tahun 1950-an tidak pernah diadakan lagi. Sebaliknya pada saat ini, untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ceramah-ceramah keagamaan, dan ibadah digalakkan. Bahkan para remaja dibina secara baik melalui karang taruna, mesjid, dan lain-lain. Didirikan organisasi **Remaja Mesjid**, yang bergerak dalam pengajian-pengajian, ketrampilan membuat janur, dan sebagainya. Remaja Mesjid tersebut dipimpin oleh Ismail Marzuki, yakni Ketua Rt.002/Rw.02 Kelurahan Rambutan.

Selanjutnya mengenai masyarakat Cilangkap, yang pada mulanya terbagi menjadi beberapa kelompok aliran perguruan kesaktian. Masing-masing kelompok mempunyai aliran perguruan sendiri-sendiri. Penduduk Cilangkap tidak fanatik terhadap agama. Mengingat daerahnya berada di daerah pedalaman, jauh dari perkotaan dan transportasi belum lancar, maka

menimbulkan sifat masyarakat yang **statis tradisional**. Penduduknya sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran. Pendidikan masyarakat masih rendah. Sarana pendidikan yang berupa gedung-gedung sekolah belum banyak. Sampai saat ini yang ada baru tingkat Sekolah Dasar. Mengenai Madrasah sudah ada cukup lama, namun keadaannya sangat sederhana. Bahkan pernah mengalami kerusakan berat. Oleh karena itu Madrasah terus dikembangkan dan membangun gedung baru atas biaya swadaya Yayasan Asyafiiyah dan bantuan masyarakat. Sebagai pesantren ataupun madrasah, maka sejak tahun 1975 terus meningkat, sehingga pada tahun itu pula pesantren Asyafiiyah telah memiliki murid-murid Tsanawiyah dan murid-murid tersebut banyak yang tinggal di asrama.

Pengajar nyapun banyak yang tinggal di daerah Cilangkap.

Pesantren Asyafiiyah berada di Rt.005/Rw.02 dan murid-muridnya ada pula yang berasal dari luar Cilangkap. Tetapi sebagian besar, muridnya terdiri dari anak-anak Cilangkap sendiri, meskipun belum begitu banyak. Kepala pesantren tersebut adalah Uztad Zasir Yusuf. Dahulu sebelum ada pesantren dan madrasah, banyak anak-anak yang tidak sekolah, karena disamping jauh dari perkotaan dan sekolahan, juga belum ada transportasi yang mudah ditempuh dari Cilangkap ke daerah perkotaan pulang pergi. Banyak orang-orang masih berjalan kaki untuk bepergian ke luar Cilangkap. Sepeda dan gerobak ditarik sapi sangat berperan besar sebagai alat transportasi ke luar masuk daerah Cilangkap. Jalan yang sekarang ini ada dibangun atas biaya Inpres dan pelaksanaan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Selesai dibangun pada tahun anggaran 1980/1981. Sejak itu transportasi mulai terbuka, namun belum banyak kendaraan angkutan yang ke luar masuk Cilangkap. Metromini masuk ke Cilangkap baru sekitar bulan Juni 1983. Sedangkan oplet baru ada satu-dua saja yang masuk ke Cilangkap. Baik Metromini dan oplet sangat sedikit penumpangnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat petani Cilangkap tidak banyak yang bepergian ke luar daerah. Disamping itu belum banyak yang bekerja sebagai pegawai, dan anak-anak sekolahpun belum banyak yang bersekolah di luar daerah Cilangkap. Oleh karena itu setiap harinya kendaraan Metromini maupun oplet **sepi** saja tidak banyak penumpangnya.

Pada saat ini di daerah Cilangkap sudah dapat 3 (tiga) gedung Sekolah Dasar Negeri. Muridnya belum begitu banyak. Gedungnya sengaja dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta, dengan tujuan pemerataan pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat Cilangkap mulai dari dasar. Tentu saja untuk mencapai tujuan pendidikan, masih memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan mengingat daerah Cilangkap termasuk baru terbuka dan masyarakatnya terdiri dari masyarakat petani yang sifat hidupnya **statis tradisional**.

Di daerah Cilangkap belum kena proyek perbaikan kampung (Proyek MHT = Mohammad Husni Thamrin). Jalan-jalan orang masih merupakan jalan setapak dan jalan tanah. Hanya jalan lingkungan yang lebarnya 6 meter dan panjangnya 3 km itulah merupakan sarana transportasi yang paling baik. Disamping itu juga telah ada alat komunikasi berupa telephone masuk ke daerah Cilangkap. Pesawat telephone ini juga belum lama dihubungkan ke daerah Cilangkap. Namun demikian sarana-sarana tersebut di atas merupakan suatu harapan baik untuk perkembangan dimasa yang akan datang. Jadi dengan adanya sarana-sarana transportasi, komunikasi, dan lain-lain yang sekarang ada di Cilangkap, boleh dikatakan dapat menghilangkan kesan, bahwa daerah Kelurahan Cilangkap **terisolir** dari daerah perkotaan.

Hal itu semua sebenarnya merupakan hasil dari seluruh aparat Pemerintah Kelurahan Cilangkap yang paling **optimal** sampai saat ini. Pada dua tahun terakhir ini terasa perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh masyarakat Cilangkap.

Kecenderungan masyarakat untuk merubah sikap hidup yang **statis tradisional** ke arah **dinamis rasional** sangat nyata.

Cilangkap mulai mempunyai daya tarik bagi orang-orang pendatang dari luar daerah. Oleh karena itu perkembangan masyarakat Cilangkap dalam beberapa tahun mendatang, dapat diperkirakan telah mengalami perubahan besar.

2. Sistem Kekerabatan

Dalam tiap masyarakat kehidupannya di organisasi atau diatur oleh adat-istiadat. Dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan mana ia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan yang paling dekat dan mesra adalah kesatuan kekerabatannya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kaum kerabat yang lain. Kemudian ada kesatuan-kesatuan di luar kaum kerabat, tetapi masih dalam lingkungan komunitas. Karena tiap masyarakat manusia, dan juga masyarakat desa terbagi-bagi ke dalam lapisan-lapisan, maka tiap orang di luar kaum kerabatnya menghadapi lingkungan orang-orang yang lebih tinggi dari padanya, tetapi juga orang-orang yang lebih rendah. Kemudian ia menghadapi orang-orang yang sama tingkatannya. Diantara golongan terakhir ini ada orang-orang yang dekat padanya dan ada pula orang-orang yang jauh padanya. Sistem kekerabatan, dalam masyarakat dimana pengaruh industrialisasi sudah masuk ke dalam, tampak bahwa fungsi kesatuan kekerabatan yang sebelumnya penting dalam banyak sektor kehidupan seseorang, biasanya mulai berkurang dan bersamaan dengan itu adat-istiadat yang mengatur kehidupan kekerabatan sebagai kesatuan mulai mengendor. (Koentjaraningrat, 1980; 381).

Dengan memperhatikan tentang pokok-pokok pengertian tersebut di atas, maka dapat kita ketahui tentang sistem kekerabatan yang sekarang masih tampak hidup dalam masyarakat di Kelurahan Rambutan maupun Kelurahan Cilangkap. Kalau dilihat dari istilah-istilah yang sampai sekarang masih dipergunakan bagi suku bangsa Betawi yang merupakan penduduk asli di kedua kelurahan tersebut, maka kita akan menemukan sistem kekerabatan yang dianutnya antara lain sebagai berikut :

Seperti lazimnya suku bangsa Betawi yang sampai saat ini banyak terdapat di daerah-daerah DKI Jakarta, bahwa masyarakat atau suku bangsa Betawi yang bertempat tinggal di Kelurahan Rambutan maupun Kelurahan Cilangkap hanya mengenal sistem kekerabatan yang berdasarkan atau prinsip keturunan bilateral, dimana prinsip patrilineal sangat menentukan dalam hubungan kekerabatan. Sedangkan prinsip matrilineal kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, dalam hal pertanggung jawaban kehidupan rumah tangga, sepenuhnya menjadi beban suami. Suku bangsa Betawi hanya mengenal bentuk masyarakat keluarga inti berdasarkan monogami, sedangkan pandangan terhadap poligami ini sebagaimana menurut ajaran Islam. Tetapi dalam prakteknya tidak banyak dilakukan oleh penduduk asli suku bangsa Betawi. Hal ini dapat dimengerti, karena adanya pengaruh agama Islam yang lebih kuat dan cocok dengan adat-istiadat Betawi.

Sistem kekerabatan yang tampak hidup di kalangan masyarakat Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, terutama bagi penduduk asli adalah sangat ditentukan oleh hubungan dari keluarga pria. Dalam soal warisan atas tanah, anak laki-laki mendapat prioritas yang pertama, dan anak perempuan hanya berdasarkan kebijaksanaan dari ayahnya. Dengan demikian anak perempuan tidak mendapatkan hak warisan secara mutlak. Tetapi cara-cara yang sedemikian itu pada saat sekarang sudah tidak berlaku lagi, karena dianggapnya tidak adil. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan aturan secara adat tersebut sudah jarang dilakukan, dan aturan yang dipakai sekarang berdasarkan hukum yang disaksikan oleh pihak kelurahan. Tetapi untuk di daerah Kelurahan Cilangkap aturan secara adat tersebut masih banyak dijumpai.

Hal ini dapat dimengerti karena untuk di daerah Kelurahan Rambutan termasuk daerah perkotaan, yang sudah banyak kena pengaruh dari masyarakat perkotaan. Sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap termasuk daerah pedalaman, dimana adat masih kuat. Sistem kekerabatan yang tradisional masih dapat berjalan. Anak-anak perempuan kebanyakan masih patuh terhadap aturan dari ayahnya. Begitu pula seorang ibu, kebanyakan masih patuh terhadap aturan adat yang berlaku di daerah Cilangkap. Aturan adat tersebut biasanya tidak dilakukan secara hukum yang berlaku di kelurahan, tetapi hanya berdasarkan persetujuan dari antara keluarga dan disaksikan oleh pihak keluarga terdekat. Bahkan warisan harta orang

tua, jarang yang berani menjualnya, karena menurut kepercayaan akan mendatangkan malapetaka, apabila berani menjualnya. Oleh karena itu harus dirawat dengan baik dan barang siapa yang merawat dengan baik akan mendapat kehidupan yang serba kecukupan. Jadi berdasarkan kepercayaan tersebut, yang dianggap dapat merawat secara baik adalah anak laki-laki. Maka anak laki-laki mendapat kepercayaan secara penuh. Anak laki-laki menjadi kebanggaan sang ayah, dan sangat dekat dengan **engkongnya** (kakeknya). Sedangkan anak perempuan kebanyakan lebih banyak tinggal di rumah, dengan banyak membantu pekerjaan urusan rumah tangga. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan, anak-anak perempuan dulunya selalu terpikat dengan adat istiadat Betawi yang fanatik terhadap agama Islam. Setiap ke luar rumah gadis-gadis Betawi selalu berpakaian muslim. Tetapi adat-istiadat semacam itu berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Hanya pada waktu akan mengaji saja pakaian muslim dipakai ke luar rumah. Sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap sejak dari dulu gadis-gadis tidak membiasakan berpakaian muslim. Karena di daerah Cilangkap masyarakatnya tidak fanatik terhadap agama.

3. Sistem Ekonomi

Sistem perekonomian masyarakat pedesaan di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekonomian masyarakat pedesaan di Wilayah DKI Jakarta pada umumnya. Pada mulanya menitik beratkan pada hasil pertanian yang menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, dan disamping itu dilakukan perdagangan keliling secara kecil-kecilan. Barang-barang yang didagangkan, terutama hasil pertanian, makanan khas Betawi, dan lain-lain. Dengan cepatnya penambahan penduduk di DKI Jakarta, maka usaha-usaha pertanian tradisional dan perdagangan keliling tersebut mulai terdesak. Hal semacam itu di daerah Kelurahan Rambutan sudah tidak dijumpai lagi, kecuali mengenai kegiatan perdagangan keliling sampai sekarang masih terdapat. Hanya barang yang didagangkan tidak lagi menitik beratkan hasil pertanian, dan makanan, melainkan sudah banyak memperdagangkan hasil-hasil perindustrian berupa pakaian, barang-barang kelontong dan sebagainya.

Apabila dihubungkan dengan **tiori tingkatan** yang dikemukakan oleh **List** yakni seorang ahli ekonomi dari Jerman yang menyelidiki tingkatan-tingkatan sistem ekonomi ditinjau dari sudut cara orang memproduksi. Tiori tingkatan itu sebagai berikut :

- a. Jaman pemburu dan penangkap ikan.
- b. Jaman pengembara, dimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat ditandai dengan produksi peternakan, dalam cara hidup nomad.

- c. Jaman petani; dimana masyarakat sudah mengenal pengolahan tanah.
- d. Jaman petani, pedagang, pengusaha, industri.

Sedangkan **Hildebrand** membuat gambaran evolusi sosial itu ditinjau dari sudut **cara tukar-menukar**. Maka diperoleh kesimpulan akan tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

- a. Tukar menukar barang dengan barang **in naturara** (*Naturawirtschaft*).
- b. Tukar menukar dengan perantaran uang (*Geldwirtschaft*).
- c. Menukar menukar dengan kredit (*Kreditwirtschaft*).

Kemudian **Karl Bucher** meninjau evolusi perkembangan sosial menurut **luas lingkup kehidupan ekonomi**. Ia memperoleh tingkatan-tingkatan perkembangan sebagai berikut :

- a. Perekonomian tertutup (*Geschlossenen Hauswirtschaft*).
- b. Perekonomian kota (*Stadswirtschaft*).
- c. Perekonomian bangsa (*Volkswirtschaft*).
- d. Perekonomian dunia (*Celtswirtschaft*). Tom Ganadi, 1981 ; 342, 343).

Dengan memperhatikan beberapa tiori tersebut di atas, maka dapatlah kita ketahui bahwa untuk daerah Rambutan pada saat sekarang ini masih berlaku pada tingkatan jaman petani, pedagang, pengusaha dan industri (**list** tingkatan terakhir). Dan tingkatan Perekonomian kota (**Karl Bucher** tingkatan kedua), sedangkan dalam tiori **Hildebrand** berlaku pada tingkatan kedua pula, yakni tukar menukar dengan perantaraan uang.

Di daerah Kelurahan Rambutan, soal pertanian memang sudah tidak lagi merupakan mata pencaharian pokok, dan hanya sebagian kecil saja yang mengolah tanah untuk pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran, namun dalam usaha perdagangan juga masih menjual barang-barang hasil bumi hanya saja ada yang didatangkan dari daerah lain.

Disamping itu sebagai pengusaha juga sudah ada, karena sudah ada perindustrian rumah tangga atau industri kecil, yang hasilnya dapat diperjual belikan, yang berarti barang telah ditukar dengan uang sebagaimana seperti yang biasa dipergunakan dalam perekonomian di daerah perkotaan.

Sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap, Sistem ekonominya saat ini perkembangannya belum merata. Tetapi kalau dihubungkan dengan tiori tingkatan seperti tersebut di atas, maka dapat kita masukkan ke dalam tingkatan di bawah satu tingkat dengan sistem ekonomi di daerah Kelurahan Rambutan. Di dalam **List**, sistem ekonomi di daerah Kelurahan Cilangkap masih berlaku tingkatan jaman petani dan pedagang. Belum kepada pengusaha ataupun industri. Dan dalam tiori **Hildebrand**, di daerah Kelurahan Cilangkap masih berlaku tingkatan tukar menukar dengan perantaraan uang. Kemudian dalam tiori Karl Bucher di daerah Kelurahan Cilangkap masih berlaku tingkatan perekonomian tertutup, karena memang

banyak barang-barang hasil pertanian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi tidak diperjual belikan sampai ke luar daerah.

Oleh karena sistem ekonomi daerah Kelurahan Rambutan, dapat dikatakan sudah banyak kena pengaruh perekonomian kota. Sedangkan sistem ekonomi di daerah Kelurahan Cilangkap belum banyak terpengaruh perekonomian kota.

4. Sistem Teknologi

Sistem yang dipergunakan oleh para petani di daerah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap pada mulanya sama, yakni menggunakan sistem tradisional yang segala sesuatunya dikerjakan dengan tenaga manusia. Cara mengolah tanah perkebunan yang akan ditanami pohon buah-buahan dan sayur-sayuran, terlebih dulu tanahnya dicangkul dan kemudian dihaluskan serta diberi aliran-aliran untuk menampung air. Kalau untuk menanam buah-buahan, terlebih dahulu dibuatkan lubang yang dalamnya kira-kira $\frac{1}{2}$ meter dan luasnya menurut kebutuhan dan jenis pohon yang ada di taman. Pohon rambutan hampir sama dengan pohon mangga. Sebelum ada penyuluhan pertanian kebanyakan pohon rambutan maupun pohon mangga tumbuh secara liar dari bijinya. Kemudian tumbuhan yang liar tersebut dipindahkan ke tempat yang masih kosong. Jadi tidak terarah sama sekali. Tetapi lama-kelamaan penduduk mengenal dengan sistem mencangkok dan ternyata buahnya lebih baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Cara menanam pun juga sudah menurut aturan tertentu. Jarak antara pohon satu ke pohon lain telah diperhitungkan. Misalnya untuk pohon rambutan diberi jarak antara 5 – 6 meter. Tetapi untuk pohon duren antara 8 – 10 meter. Kalau untuk kebun sayur-sayuran, cara menanamnya tidak begitu sulit, karena asalkan tanahnya sudah dihaluskan dengan cangkul, lalu dibuat aliran untuk memudahkan jalan pada waktu menyiramnya. Jenis sayur-sayuran yang ditanam ialah kangkung, bayam, tomat, kacang panjang, dan sebagainya.

Sistem teknologi pertanian semacam itu, untuk di daerah Kelurahan Rambutan, sejak tahun 1960-an sudah mulai ditinggalkan, karena sudah mulai banyak orang-orang pendatang yang masuk ke daerah Kelurahan Rambutan dan mempunyai mata pencaharian lain, sehingga orang-orang di Kelurahan Rambutan, banyak menggunakan daerah pertaniannya untuk membangun rumah kontrakan. Disamping itu penduduk di Kelurahan Rambutan banyak yang menitik beratkan usaha perdagangan daripada usaha pertanian.

Adapun penduduk di daerah Kelurahan Cilangkap, usaha pertanian sampai sekarang masih menjadi mata pencaharian pokok. Kebun buah-buahan masih terawat baik, terutama mengenai pohon buah-buahan yang

produktif sepertinya pohon rambutan, duku, duren, mangga, benar-benar diperhatikan. Mengenai pertanian persawahan hampir-hampir tidak berarti, karena hasilnya dan luas tanah yang tersedia tidak memadai. Dengan demikian penduduk Cilangkap lebih banyak mengolah tanah perkebunan, yang mana sejak dari jaman dahulu telah diolah secara turun-temurun. Bahkan pohon-pohon rambutan, duren, duku dan mangga, ada yang telah berumur sampai puluhan tahun. Untuk peremajaan pohon-pohon yang telah berumur puluhan tahun tersebut memang memerlukan kesabaran. Tetapi untuk lebih cepatnya, saat ini banyak dilakukan dengan cara mencangkok. Di samping dengan cangkokan, juga telah dikenal dengan **okulasi**, namun mengalami banyak kegagalan, sehingga cara okulasi ini jarang dilakukan.

Kemudian sistem memetik buah, atau hasil pertanian lain seperti sayur-sayuran, sampai sekarang belum banyak perubahan. Rupanya memetik hasil pertanian dengan cara lain ini dianggap sudah tepat, karena memang tidak memerlukan sistem yang sulit-sulit cara memetik hasil pertanian, yang dihasilkan para petani di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap. Sistem yang dipakai selama ini, misalnya memetik buah rambutan selalu menggunakan alat **catek**. Caranya pohon rambutan dipanjang, dapat menggunakan tangga ataupun langsung memanjat pohonnya, kemudian ranting pohon rambutan yang terdapat buah rambutan ditarik dengan menggunakan **catek** tersebut, barulah dipetik perlahan-lahan, cara memetikpun juga harus menggunakan cara-cara tertentu, agar buah rambutan kelihatan menarik, yakni dengan memetik tangkainya, dan dengan tangkai itulah, buah rambutan dapat dijadikan ikat-ikatan kemudian cara memetik buah yang lain sepertinya buah duku, duren, pepaya, dan sebagainya, sejak dari dulu sampai sekarang, juga belum ada perubahan. Hal ini juga dilakukan seperti di daerah-daerah Jakarta lainnya yang terkenal penghasil buah, yakni di daerah Condet.

Jadi cara-cara memetik buah dan merawat pohon buah-buahan, merupakan warisan dari nenek moyangnya, maka sulit untuk dirubah.

Sistem menanam masih dapat disempurnakan, yakni dari menanam bijinya langsung dapat dirubah dengan cara mencangkok, okulasi, dan sebagainya. Kemudian jarak menanampun dapat dirubah, menurut aturan pertanian yang modern. Sebagai contoh pada mulanya pohon buah-buahan ditanam asal tumbuh saja, dan tidak diperhitungkan jarak kanan kirinya. Di samping itu tidak dibuat lurus, melainkan tersebar antara pohon satu dengan pohon lainnya saling berimpitan. Tentu saja buahnya tidak besar-besar, dan pohonnyapun kurang ada kesempatan untuk berkembang. Cara untuk menyuburkan pohon, banyak menggunakan pupuk hijau secara alamiah. Yakni daun-daunan yang runtuh dibiarkan membusuk dan terus ditimbun dengan tanah di dekat pohon yang pantas diberi pupuk, misalnya

pohon yang kerdil atau pohon yang baru ditanam. Cara pemupukan sebagaimana yang disebutkan di atas adalah cara pemupukan zaman dahulu. Tetapi cara seperti itu sudah tidak efektif lagi, dan sekarang telah banyak menggunakan pupuk buatan dan penyemprotan hama.

5. Sistem Religi

Sistem religi di daerah Rambutan pada mulanya agak berbeda dengan di daerah Cilangkap. Kalau di daerah Rambutan sejak semula memang fanatik terhadap agama, sedangkan di daerah Cilangkap tidak fanatik. Oleh karena itu di daerah Rambutan segala sesuatu selalu dihubungkan dengan kaidah-kaidah agama. Sampai saat ini banyak upacara-upacara yang menurut tradisi Betawi, nyata sekali kena pengaruh Islam. Misalnya pada waktu upacara perkawinan, sejak dulu pihak pria yang melamar calon temanten putri. Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak, barulah pihak pria menyerahkan **tukon** atau disebut pula **srah-srahan**. Yang diserahkan ini jenis barangnya telah ditentukan. Hanya banyak dan sedikitnya tergantung sosial ekonominya masing-masing. Adapun jenis barang-barang yang ditentukan tersebut antara lain berupa hewan, alat-alat rumah tangga, dan **gotongan**. Hewan dapat berupa ayam, kambing ataupun sapi. Sedangkan berupa alat-alat rumah tangga, dapat berupa lemari, tempat tidur.

Dan yang disebut **gotongan** terdiri dari **pajangan** yang dibuat dari bambu berbentuk segitiga di dalamnya berisi **kue-kue**, **uli**, dan lain-lain. Di samping itu masih ditambah pakaian untuk calon temanten putri berupa **lawon** (bahan untuk membuat baju kebaya dan juga ditambah kain). Pernikahan temanten dilaksanakan di **pengulu** (sekarang di KUA = Kantor Urusan Agama). Pada waktu **arak-arakan** temanten (mengiringkan temanten) diiringi bunyi-bunyian **terbang** (robana) sampai pada tempat yang dituju, biasanya mengitari kampung. Tetapi hal yang demikian saat sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Perkawinan di Kelurahan Rambutan pada waktu sekarang, sudah mengikuti tata cara yang modern, tetapi tetap mengikuti cara Islam.

Perkawinan adat Betawi dengan tata cara Islam tidak jauh berbeda. Karena adat Betawi pun juga didahului dengan melamar dan srah-srahan. Sedangkan tata cara Islam juga demikian. Dan yang melamar adalah pihak pria. Kemudian pada waktu **mengarak** (mengiring) temanten juga diiringi bunyi-bunyian dengan menyanyikan lagu-lagu syukuran yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan tata cara Islam banyak membacakan ayat-ayat suci Alqur'an.

Di samping upacara-upacara perkawinan yang banyak kena pengaruh Islam, juga upacara-upacara lainnya seperti upacara sunatan, kematian, sampai dengan upacara kelahiran banyak dipengaruhi Islam. Hal ini me-

mang dapat dimengerti, karena ada persamaan unsur-unsur adat Betawi dengan Islam. Dan tidak pernah ada perselisihan antara penduduk asli Betawi dengan paham Islam.

Bahkan orang-orang Arab yang berada di Kelurahan Rambutan mendapat perlakuan sangat baik dan disamakan tokoh masyarakat yang dihormati.

Sistem religi di Kelurahan Rambutan ini, kalau dibandingkan dengan sistem religi di Kelurahan Cilangkap, pada mulanya jauh berbeda. Sistem religi di Kelurahan Rambutan banyak dipengaruhi oleh agama Islam, tetapi sistem religi di Kelurahan Cilangkap banyak dipengaruhi oleh mistik maupun hindu. Hal ini dapat dimengerti, karena letak daerah Cilangkap berada di daerah pedalaman, di samping itu sangat berdekatan dengan Jawa Barat yang dahulu pernah dikuasai oleh kerajaan Pajajaran yang memeluk agama Hindu. Maka tata cara Hindu masih banyak dilakukan di daerah Kelurahan Cilangkap.

Misalnya pada waktu akan memotong padi, terlebih dahulu diadakan upacara dengan membakar kemenyan sebagai sesaji dan mengucapkan mantra-mantra syukuran. Di samping membakar kemenyan juga menaburkan kembang, kelapa muda hijau, **rujukan** terdiri dari buah-buahan yang muda, yang kesemuanya itu dinamakan **ngrojeng**. Jadi ngrojeng termasuk upacara tradisional Betawi yang sejak dulu telah hidup di kalangan masyarakat petani di daerah Cilangkap. Pada waktu menjemur padi pun juga diberi sesaji air putih ditaruh di gelas atau mangkok dan di dalamnya dimasukkan padi dengan tangkainya. Tujuannya agar berasnya menjadi banyak, dan di samping itu jangan diganggu oleh makhluk lain. Tetapi upacara tersebut pada saat ini telah mulai hilang, karena pertanian padi telah terdesak.

Upacara-upacara tradisional Betawi yang kena pengaruh mistik atau Hindu ini tidak banyak terdapat di daerah pedesaan DKI Jakarta lainnya. Kebanyakan upacara tradisional Betawi mudah menyesuaikan dengan upacara-upacara agama Islam. Hanya di daerah Cilangkap ini yang mengalami perbedaan dan lebih mendekati dengan upacara-upacara Hindu, yang biasa dilakukan oleh kerajaan Pajajaran di Jawa Barat.

Pada zaman Jepang daerah pertanian padi masih banyak diusahakan oleh penduduk Cilangkap. Pada zaman Jepang potong padi disebut "**derepin**," yakni memotong padi secara bersama-sama dengan menggunakan **ani-ani**. Banyak orang-orang dari luar daerah Cilangkap yang ikut **derep**. Pembagiannya dengan cara seperlima atau lima dibanding satu. Artinya yang memiliki sawah lima bagian dan yang derep satu bagian. Cara yang demikian itu banyak pula dilakukan dalam waktu memetik buah-buahan.

Pada waktu akan memetik buah-buahan pun juga sering didahului dengan upacara-upacara syukuran. Caranya hampir sama dengan upacara akan

memetik padi. Yakni dengan membakar kemenyan, menaruh sesaji yang terdiri dari kembang, bubur merah dan putih, serta diiringi dengan membaca mantra-mantra syukuran. Upacara ini dilakukan di bawah pohon buah-buahan yang paling banyak buahnya. Yang memimpin upacara adalah kepala keluarga. Biasanya orang tua laki-laki (seorang ayah), atau anak laki-laki yang tertua apabila sudah dewasa. Yang diundang tidak banyak dan biasanya hanya lingkungan keluarga yang terdekat, bahkan dapat dilakukan seorang diri saja. Upacara semacam ini sejak tahun 1955, sudah mulai berkurang, dan sekalipun ada sudah tidak membakar kemenyan lagi. Jadi caranya sudah sangat sederhana.

Hal ini dapat dimengerti, karena sejak tahun 1955 tersebut pengaruh Islam telah masuk ke daerah Cilangkap dan berkembang pesat. Sebelum tahun tersebut Islam juga sudah masuk, namun belum dapat berperan secara luas di kalangan masyarakat Cilangkap. Di daerah Cilangkap masyarakatnya masih terjadi berkelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok ada aliran perguruan sendiri-sendiri. Pemimpin kelompok ini adalah seorang **jagoan** yang dianggap mempunyai kekebalan, disebabkan memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Sekarang peranan jagoan tersebut sudah tidak ada, yang ada pada saat ini adalah tokoh agama, dan ternyata di kalangan masyarakat Cilangkap sekarang telah berkembang tata cara menurut agama Islam. Dan penduduknya sebagian besar memeluk agama Islam. Sarana peribadatnya seperti mesjid, langgar, sudah banyak dibangun. Sekolah Islam sepertinya madrasah dikembangkan secara baik, bahkan berfungsi pula sebagai pesantren.

6. B a h a s a

Dalam hal bahasa, bagi penduduk asli Jakarta dari dulu sampai sekarang belum mengalami perubahan-perubahan secara nyata, perkembangannya menuju ke arah kesempurnaan, karena dasarnya menyerupai bahasa Indonesia yang sekarang banyak dipergunakan sebagai bahasa nasional.

Tampak ada perpaduan pengaruh bahasa Sunda dengan bahasa Melayu, bahkan sedikit bahasa Jawa. Bahasa yang dipergunakan penduduk Jakarta asli adalah bahasa Betawi. Hal ini sesuai dengan nama suku bangsa Jakarta asli adalah suku bangsa Betawi. Bahasa Betawi tidak mengenal tingkatan-tingkatan. Dalam pergaulan sehari-hari tampak logat bahasa yang khusus, dan cara pengucapannya, benar-benar mempunyai logat tersendiri. Sehingga dapat dikatakan ada **spesipik Betawi**.

Di daerah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, bahasa yang dipergunakan bagi penduduk asli masih sama dengan bahasa yang dipergunakan oleh suku bangsa Betawi lainnya. Tentang penggunaan bahasa tampak tidak banyak pengaruhnya yang ditimbulkan dengan masuknya

orang-orang dari luar daerah atau dari luar kota Jakarta. Bagi orang-orang pendatang sangat sulit untuk mengucapkan bahasa Betawi tersebut dan biasanya cara pengucapannya juga tidak tepat. Mudah diketahui, bahwa orang tersebut bukan orang Betawi asli. Misalnya orang dari Jawa, jelas sekali ada pengaruh dari bahasa Jawa. Begitu pula orang sunda (Jawa Barat), tentu saja banyak dipengaruhi oleh logat sunda.

Bahasa pun juga menjadi kebanggaan setiap suku bangsa.

Begitu pula orang-orang Betawi, sangat senang menggunakan bahasanya sendiri dalam pergaulan sehari-hari.

Dalam setiap upacara-upacara banyak dilakukan dengan berbagai percakapan, dengan menggunakan bahasa Betawi. Sebagai contoh percakapan antara anak dengan orang tua dengan tanya jawab, sebagai berikut :

Anak : **Nyak** (Bu), **engkong** (kakek) sedang kemane Nyak ?

Enyak : Engkong sedang **nganterin** adik **lo** (mu) ke pasar.

(Ibu) (Kakek sedang mengantarkan adikmu ke pasar).

Anak : Kalau **Babe** (ayah) **ape enggak ngikutin pegi** ke pasar Nyak ?
(Kalau ayah apa tidak mengikuti pergi ke pasar Bu ?

Enyak : **Kagak ! Babe** lo sedang pegi ke **rumahnya abang lo**.

(ibu) (Tidak ! Ayahmu sedang pergi ke rumahnya kakakmu).

Demikianlah sekelumit percakapan yang biasa terdengar sehari-sehari dari suku bangsa Betawi, yang pada saat ini masih banyak bertempat tinggal di daerah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, maupun di daerah pedesaan Jakarta lainnya. Kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh sebenarnya banyak persamaannya dengan bahasa Indonesia yang sekarang dipakai sebagai bahasa nasional.

Hanya cara pengucapannya menggunakan logat Betawi.

Sebenarnya tidak begitu sulit untuk memahami arti dari bahasa Betawi tersebut, namun karena cara mengucapkannya dengan logat Betawi, sehingga orang-orang yang diajak berbicara selain orang Betawi masih banyak yang berpikir-pikir tentang artinya. Bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya, maka bahasa Betawi lebih mudah dimengerti, daripada bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Bahasa-bahasa daerah tersebut memang sulit dipahami, karena di samping logat bahasanya sangat berbeda, dan juga unsur dasarnya tidak sama dengan bahasa Indonesia. Terlebih-lebih bahasa Jawa yang banyak tingkatan-tingkatan bahasa, maka tidak mungkin orang-orang dari pulau Jawa dapat mengerti penggunaan bahasa Jawa secara tepat.

Untuk orang-orang Betawi, rupanya telah merasa bangga dengan memiliki bahasa yang khas Betawi memang tidak ada keharusan dalam setiap pergaulan, harus menggunakan bahasa nasional. Kecuali apabila berbicara dengan orang-orang yang bukan suku bangsa Betawi, sebaiknya meng-

gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia, tetapi tidak berarti bahasa daerah dihilangkan. Bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional, oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya, hanya fungsinya tidak boleh sama seperti bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia telah menjadi bahasa Persatuan yang di cetuskan sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan bahasa daerah, hanya merupakan bahasa pergaulan di daerah setempat.

Pada saat ini orang-orang Betawi banyak bertempat tinggal di daerah pinggiran, sepertinya di daerah Cilangkap, Pondok Ronggon, Ciganjur dan sebagainya. Pembicaraan bahasa Betawi sehari-hari antara anak dan orang tua, masih terpelihara baik.

Anak-anak mereka pun telah membiasakan percakapan dengan menggunakan bahasa sehari-hari dengan teman-temannya. Sehingga sangat menentukan dalam kelestarian Bahasa Betawi tersebut. Kalau di daerah perkotaan memang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia, meskipun banyak campuran dengan bahasa Betawi, terlebih-lebih untuk di daerah perkotaan, tetapi agak masuk ke dalam **gang** atau **lorong**, maka sangat terasa bahwa bahasa Betawi sudah tidak murni lagi. Hal yang demikian itu banyak kita jumpai di daerah Kelurahan Rambutan yang penduduknya sudah banyak bercampur dengan orang-orang pendatang dan perkampungannya sudah mendekati perkampungan perkotaan.

7. K e s e n i a n

Tentang kesenian baik di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap, sejak dari dulu tidak terdapat kesenian yang khas di daerah tersebut. Organisasi kesenian yang permanen juga belum pernah ada. Ini terbukti tidak diketemukannya gedung-gedung kesenian yang berada di dua Kelurahan tersebut. Tempat hiburan terdekat adalah bioskop Caprina, kira-kira 2½ km dari Kelurahan Rambutan dan 7 km dari Kelurahan Cilangkap. Pertunjukan film paling digemari oleh masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan maupun Kelurahan Cilangkap.

Organisasi yang sekarang dapat terbina baik di daerah Kelurahan Rambutan adalah organisasi seni bela diri yakni pencak silat Macan Betawi. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Juli 1979. Bergerak di dalam bidang sosial budaya, yang bertujuan untuk memupuk persahabatan, menggali dan mengembangkan seni budaya/Kebudayaan asli bangsa Indonesia di bidang Persilatan dan untuk meningkatkan mutu persilatan. Organisasi ini mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Susunan kepengurusannya terdiri dari :

Ketua I
Ketua II
Sekretaris I
Sekretaris II
Bendahara I
Bendahara II

Seksi-seksi :

- Seksi Humas
- Seksi Pembantu Umum
- Seksi Perlengkapan
- Korps Pelatih

Di samping mempunyai pengurus tetap seperti susunan tersebut di atas masih ditambah :

Pelindung : Bapak Lurah Rambutan
Penasehat : - Kantib. Kelurahan Rambutan
- Babinsa. Kelurahan Rambutan
- Ketua-ketua Rw. Kelurahan Rambutan.

Pembina dan Dewan Pendekar : - Tenaga ahli silat.

Pengurus dipilih setiap 3 tahun sekali dan pengurus lama dapat dipilih kembali.

Perguruan silat Macan Betawi ini anggotanya terdiri dari putra dan putri dengan tingkatan umur (anak-anak, remaja, dan dewasa). Kegiatannya dibagi menjadi 2 (dua) :

a. Kegiatan Anggota dari Ban Putih sampai dengan Ban Coklat. Dengan perincian sebagai berikut :

- Ban putih : 10 jurus untuk anak-anak + 5 guna jurus.
15 jurus untuk remaja + 5 s/d 10 guna jurus.
- Ban hijau : 15 jurus + 5 jurus lainnya + 5 s/d 10 guna jurus.
Dengan perlengkapan gendang pencak, atraksi.
- Ban biru : 15 jurus + 10 jurus lain + 5 jurus lainnya + 5 s/d 10 guna jurus.
Cara menggunakan alat golok dan toya. Atraksi gendang pencak.
- Ban coklat : Bagi ban coklat sampai nanti waktunya kenaikan tingkat harus menguasai seluruhnya apa yang dimiliki oleh ban putih s/d ban biru.

b. Kegiatan Latihan Khusus Kader :

- Latihan khusus untuk kader meliputi permainan, bongkaran, bukaan dan kuncian. Diadakan pada waktu malam hari.

- Latihan khusus guna jurus, diadakan setiap hari.

Organisasi seni bela diri persilat Macan Betawi di Kelurahan Rambutan ini merupakan Cabang, dan pusatnya berada di Jakarta Pusat yang telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1972. Perguruan Macan Silat Betawi mempunyai lambang :

- Rantai terdiri dari 5 (lima) bulatan.
- Di dalamnya terdapat gambar kepala macan.

Rantai dan bulatan tersebut menunjukkan **persahabatan** dan **macan Betawi** menunjukkan **aliran**.

Di samping memiliki **Lambang**, juga memiliki **bendera** perguruan. Bendera atau **Panji** Perguruan tersebut :

- Warna Dasar : Kuning oranye dengan gambar yang telah ditetapkan.
- Ukuran panji : Panjang 80 Cm
Lebar 40 Cm dengan rumbai di sisinya.
- Ukuran Bendera : Panjang 130 Cm
Lebar 90 Cm

Setiap latihan diharuskan menggunakan pakaian seragam Perguruan Silat Macan Betawi, yakni baju kaos **kuning** dan celana **hitam**. Pada waktu latihan maupun upacara akan dimulai harus mengucapkan IKRAR SETIA Perguruan Silat. Latihan 2 (dua) kali dalam seminggu, yakni malam Kamis dan Minggu pagi. Pada saat ini masih menumpang tempat di Sekolahn Al Kahfi.

Kemudian untuk di Kelurahan Cilangkap. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Kelurahan Rambutan. Karena juga belum ada organisasi kesenian yang terbina secara mantap. Pada tahun 1945 sudah mulai masuk kesenian pencak silat, namun tidak merupakan organisasi secara teratur. Karena seni bela diri pencak silat tersebut diajarkan secara perorangan, dengan mengundang seorang guru. Ada seorang tokoh guru silat yang sekarang masih disegani oleh masyarakat yang pada satu tahun terakhir ini, sudah tidak mengajar lagi. Tokoh tersebut bernama Bapak Hamdan dan sekarang menjadi Kepala Lingkungan tersebut termasuk dalam Bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) dalam struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Cilangkap.

Pada waktu Bapak Hamdan masih aktif mengajar silat, terkenal sebagai Guru Silat **Kuntau Ujung Bandul** yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sebagai berikut :

- **Bongkat** atau **bongkep**, asal pukul terus **nangkep** (angkat). Artinya kalau didahului terus bergerak melawan.

- **Ujung**, asal pukul terus **nangkis**. Artinya tidak mau memukul lebih dahulu, tetapi kalau dipukul terus menangkis dan melawan.

Kalau Kuntau Ujung Bandul berarti kedua-duanya mau.

Nangkep mau ditangkep mau atau memukul mau dipukul pun mau. Jadi dipukul mau dan menangkis mau. **Bandul** artinya **ditangkep, nangkep. Kuntau** berasal dari bahasa China yang artinya sejenis **persilatan**. Nama kuntau ini banyak dipergunakan di daerah Tanjung Barat – Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana Bapak Hamdan dilahirkan. Silat Kuntau Ujung Bandul tidak dapat dipamerkan, karena berbahaya bagi orang-orang biasa. Jadi silat ini hanya berfungsi untuk pembelaan diri saja. Sejak Bapak Hamdan berusia 12 tahun telah mahir silat Kuntau Ujung Bandul ini. Kemudian pada waktu Bapak Hamdan pindah ke Cilangkap yakni pada waktu jaman Jepang, sudah mulai diajarkan pada masyarakat Cilangkap. Pengikutnya banyak sekali. Ada anak-anak sampai orang tua. Jurus-jurus yang diajarkan bernama : Alif, sampok, timpok, gibang. Dengan langkah-langkah : 3 s/d 9 langkah, yang nama-namanya **Patsegol, Paturin, Tuang**, dan Goreng Asem. Untuk langkah Goreng Asem ini belum sempat diajarkan/diturunkan, sebab jarang ada yang sanggup. Juga tentang langkah 3 (tuang) termasuk berat, dan jarang pula yang sanggup. Untuk mempelajari seni bela diri ini hanya memerlukan waktu kurang lebih satu bulan. Diajarkan tiap malam hari secara bergantian atau perorangan.

Baik di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap tidak terdapat organisasi kesenian Topeng, Jipeng, Lenong, sekalipun tidak ada larangan. Tetapi saat ini sudah mulai dirintis kesenian yang bernaifaskan Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN

A. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.

Keadaan yang terdapat di lingkungan wilayah kota besar/kecil, desa/kelurahan sebagai wilayah administratif masih jelas nama dan batas-batasnya. Demikian juga tugas kewajiban Kepala /Pamong Desanya tiada berbeda, walaupun dengan kekecualian berhubung adanya beberapa urusan yang tak terdapat di wilayah kota. Mereka ini sudah sejak lama, merupakan pegawai administratif dari pemerintah Balai Kota, Kota Madya atau Kota Raya. (Dra. Sumber Suparin, 1977; 42).

Jakarta sejak jaman Belanda, Jepang maupun Kemerdekaan Indonesia telah berfungsi sebagai Ibukota Negara, dengan demikian masyarakat pedesaan di Jakarta diatur menurut pasal (1) huruf b (Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa). Kedudukan Lurah-Lurah di Jakarta sejak tahun 1969 telah berstatus sebagai pegawai pemerintah termasuk pula aparat-aparat kelurahannya. Untuk pengaturan status Lurah dan Aparatnya tersebut berlaku Undang-Undang No.5 Tahun 1969. Sebelumnya itu Lurah-Lurah di Jakarta dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi setelah ada ketentuan tersebut, semua Lurah-Lurah di Jakarta diangkat oleh Gubernur, berdasarkan kedinasan dan kepangkatannya sebagai pegawai.

Untuk di daerah Kelurahan Rambutan, mengingat di daerah ini termasuk berada di daerah perkotaan yang dahulu merupakan daerah pertanian buah-buahan, sayur-sayuran, dan palawija, sekarang merupakan daerah pemukiman yang teratur dan banyak perumahan yang permanent. Dalam hal ini peranan aparat pemerintahan desa sangat besar untuk terus membina masyarakat dengan pembangunan fisik maupun mental spiritual. Ternyata di dalam pembinaan masyarakat pedesaan di daerah Kelurahan Rambutan tidak mengalami kesulitan. Keadaan masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan dari dulu sampai sekarang, hidup dalam suasana tertib. Dibanding dengan keadaan masyarakat di daerah pedesaan lainnya, masyarakat di Kelurahan Rambutan termasuk yang paling aman, teratur, dan kehidupan sosial budayanya mantap. Hal ini terbukti di daerah Kelurahan Rambutan tidak pernah terjadi keributan-keributan antar warga, antar remaja, maupun

antar golongan. Masyarakatnya adalah masyarakat agamis yang sangat mementingkan kehidupan ajaran-ajaran agama. Dalam melaksanakan delapan tertib hukum, seperti yang diharapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, maka di Kelurahan Rambutan dapat terlaksana dengan baik. Delapan tertib hukum tersebut meliputi :

- Tertib bangunan.
- Tertib Kaki Lima.
- Tertib Lalu Lintas / Angkutan.
- Tertib Tuna Wisma / tuna karya.
- Tertib perkereta apian.
- Tertib perlistrikan.
- Tertib banjir.
- Tertib Sosial Politik.

Memang di dalam melaksanakan/menjaga delapan tertib hukum tersebut tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Kelurahan saja, namun menjadi tugas seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kelurahan adalah memberikan pengertian dan kesadaran warganya untuk mematuhi ketertiban-ketertiban terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak Pemerintah Kelurahan sering mengadakan ceramah-ceramah maupun pertemuan tersebut ditekankan pentingnya delapan tertib tersebut. Di samping itu juga dijelaskan untung-ruginya setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Kemudian usaha-usaha, pemerintah tersebut diteruskan oleh pemuka-pemuka masyarakat, baik tokoh agama, tokoh politik, tokoh sosial budaya, dan lain sebagainya. Terutama yang melalui tokoh agama, dapat dilaksanakan dalam masjid yang dikaitkan dengan khotbah-khotbah pada sembahyang Jum'at ataupun pada kesempatan lain, sehingga tidak saja didengar oleh masyarakat Kelurahan Rambutan sendiri, melainkan dapat didengar pula oleh masyarakat yang pada waktu itu ikut sembahyang di masjid. Jadi dalam hal ini tokoh agama, mempunyai peranan menyebarluaskan anjuran pemerintah dalam menggalakkan delapan tertib tersebut. Di dalam masyarakat Kelurahan Rambutan, tokoh agama mempunyai peranan penting. Sehingga di dalam menyampaikan penerangan agama maupun kehidupan sosial budaya sangat dipercaya oleh masyarakat.

Jadi apabila dibandingkan dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Cilangkap, maka masyarakat di Kelurahan Rambutan jauh lebih maju. Kesadaran warga masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya sangat tinggi. Tetapi untuk di daerah Cilangkap, sebenarnya juga tidak boleh dikatakan warga masyarakatnya statis tradisional. Karena memang situasi dan kondisi daerah Kelurahan Rambutan dengan Cilangkap jauh berbeda. Ditinjau dari segi sosial ekonominya, jelas masyarakat Kelurahan Rambutan lebih baik. Kemudian tentang fasilitas daerah perkotaan seperti listrik,

air minum, transportasi, dan lain-lain di Kelurahan Rambutan lebih lengkap. Namun demikian kesadaran warga masyarakat Kelurahan Cilangkap terhadap tertib hukum cukup tinggi. Hal ini terbukti tidak terdapatnya tempat-tempat yang rawan ditinjau dari segi kriminalitas, maupun dari segi tata susila. Masyarakat Kelurahan Cilangkap cepat dapat menerima ajaran agama, sekalipun pada mulanya masyarakatnya bukan masyarakat agamis, melainkan masyarakat yang cara berfikirnya diliputi oleh sifat-sifat mistik maupun ilmu-ilmu kesaktian dan banyak yang menggunakan **teluh** maupun **tenung**. Dalam kenyataan pada saat ini warga masyarakat Cilangkap telah memeluk agama Islam dengan baik dan tekun. Hanya sebagian kecil saja warga masyarakat Cilangkap yang memeluk agama selain Islam.

Oleh karena ini organisasi pemerintahan kelurahan Rambutan dan Cilangkap pada saat ini telah sama dengan organisasi pemerintahan kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta. Dimana selalu mengikut sertakan peran sertanya masyarakat di dalam menjaga dan mengatur keamanan dan ketertiban wilayahnya. Peranserta masyarakat tersebut atas dasar sukarela dan sosial, namun demikian ada keterikatan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Kelurahan. Organisasi masyarakat yang bersifat sosial dan atas dasar sukarela tersebut adalah Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Pertahanan Sipil (Hansip). Organisasi ini secara struktural memang tidak termasuk dalam struktur organisasi Pemerintah Kelurahan. Dan di samping itu juga tidak diangkat sebagai pegawai pemerintah, namun mempunyai tugas untuk membantu administrasi dan menjaga keamanan wilayah kelurahan. Karena ternyata Rt/RW, juga dibebani untuk membantu kelancaran tentang pencatatan warga masyarakat dalam urusan kelahiran, pemindahan, serta kematian. Di samping itu juga dibebani untuk menjaga ketertiban wilayah setempat. Misalnya dalam penyelesaian perselisihan warganya, serta gerakan kerja bakti, RW/Rt, selalu dituntut untuk dapat mengatasinya secara baik dan kekeluargaan. Sedangkan Hansip, di samping dituntut untuk membantu keamanan wilayah kelurahan, juga diberi tugas untuk membantu pelaksanaan tertib hukum. Dengan demikian Hansip mempunyai tugas ganda, yakni satu pihak membantu pemerintah kelurahan dan yang kedua membantu pihak kepolisian di dalam mengamankan dan ketertiban masyarakat.

Organisasi Pemerintah Kelurahan yang telah diseragamkan diseluruh wilayah DKI Jakarta, sebenarnya telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.Ib.3/2/14/1966 tanggal 23 Desember 1966 dan berpedoman pada Peraturan Daerah No.6/P/I/1976 tentang tugas dan kewajiban Lurah dalam pembinaan RT/RW. Untuk mencapai tujuan dari organisasi RT/RW sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga dapat bekerja sama antara masyarakat melalui RT/RW dengan Pemerintah setempat, dalam menunjang program pemerintah, agar dapat berjalan lancar.

1. Struktur

Pada prinsipnya struktur organisasi hanya untuk mengadakan pembagian tugas, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar. Karena sebenarnya keberhasilan dalam suatu pekerjaan/pelaksanaan tugas adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Lurah dan Aparat Kelurahan. Agar fungsi pokok Pemerintah Kelurahan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pelayanan masyarakat serta program pembangunan, maka perlu ada pembagian tugas dan wewenang dalam pemerintahan kelurahan. Pembagian tugas tersebut diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Ab.15/46/1971 tanggal 25 April 1971 (Lembaran Daerah No.44 Tahun 1971), tentang struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan di DKI Jakarta. Kemudian Surat Keputusan Gubernur tersebut diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.367 Tahun 1977, tanggal 9 Juni 1977. Sehingga struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan diseluruh Wilayah DKI Jakarta, sebagai berikut :

- a. Lurah.
- b. Wakil Lurah.
- c. Sub Sie I/Pemerintahan.
- d. Sub Sie II/Kamtib.
- e. Sub Sie III/Kesra.
- f. Sub Sie IV/Tata Usaha.
- g. Sub Sie V/Pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaannya, untuk pelayanan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, masih melibatkan petugas-petugas yang tidak termasuk dalam struktur organisasi tersebut. Para petugas yang tidak termasuk dalam struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara lain :

- Babinsa dari Militer 1 (satu) orang.
- Binmas dari Kepolisian 1 (satu) orang.
- Petugas Kependudukan dari Dinas Kependudukan DKI Jakarta 1 (satu) orang.
- RT/RW sebanyak yang diperlukan menurut besar kecilnya jumlah penduduk dan sebagai patokan yakni setiap 40 – 50 Kepala Keluarga harus ada 1 (satu) wilayah RT. Dan diantara 10 – 12 RT harus ada 1 (satu) RW. Kemudian untu 1 (satu) Kelurahan kurang lebih ada 3 – 5 RW.
- Tenaga Hansip sebanyak yang diperlukan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kelurahan.

Di Kelurahan Rambutan, organisasi RT/RW merupakan organisasi masyarakat non Pemerintah (non Struktural) yang mempunyai kedudukan penting di dalam kalangan masyarakat dan diberikan jangka waktu jabatan

antara 3 – 4 tahun. Hubungan RT/RW dengan pemerintahan Kelurahan sangat erat dan pembinaan masyarakat berjalan baik. Peranan RT/RW dalam kalangan masyarakat di Kelurahan Rambutan dianggap sebagai pemimpin masyarakat yang paling dekat. Karena semua masalah yang timbul dalam masyarakat, RT/RW selalu diikuti sertakan untuk memecahkannya. Di samping adanya RT/RW yang banyak berperanan dalam kalangan masyarakat di Kelurahan Rambutan, juga tidak kecil pula peranan LKMDK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Karya). Dalam LKMD ini melibatkan berbagai pihak, yakni organisasi struktural dan non struktural, namun hubungan terhadap masyarakat sudah harus melalui prosedur dengan Lembaga ini juga harus melalui prosedur dan harus ada permasalahan yang jelas yang tidak dapat diselesaikan oleh RT/RW mengingat tugas dan wewenangnya.

Mengenai organisasi pemerintahan Kelurahan Rambutan, tidak jauh berbeda dengan organisasi pemerintahan Kelurahan Cilangkap. Karena memang sudah diseragamkan Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 1969. Hanya perbedaan **volume** kegiatan saja, yang terdapat di kedua Kelurahan tersebut. Untuk di Kelurahan Rambutan tentu saja lebih banyak kesibukan dalam pelayanan masyarakat, sedangkan di Kelurahan Cilangkap tidak begitu banyak memberikan pelayanan masyarakat, mengingat mobilitas penduduk tidak besar, di samping itu masyarakat petani memang tidak banyak berhubungan administrasi kepada pihak Kelurahan. Hanya secara musiman, pihak Kelurahan Cilangkap sibuk memberikan pelayanan masyarakat.

2. Tugas dan kewajiban

Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan di DKI Jakarta, adalah sebagai berikut :

Kepala Kelurahan (Lurah) adalah alat Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur KDKI Jakarta melalui Camat dan Walikota.

Lurah mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya;
- c. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan;
- d. melaksanakan tugas menjadi tanggung jawabnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan;

e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Di DKI Jakarta tidak terdapat Sekretaris Kelurahan, tetapi jabatan itu ditangani oleh Wakil Lurah. Oleh karena itu Wakil Lurah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

Wakil Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan Staf kepada Lurah.

Wakil Lurah juga berfungsi untuk :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan urusan Kemasyarakatan.

Wakil Lurah melaksanakan tugas dan fungsi Lurah apabila Lurah berhalangan melaksanakan tugasnya.

Kemudian tugas dan fungsi Kepala Urusan (Sub Seksi) adalah sebagai berikut :

Sub Sie I/Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan Kelurahan dan berfungsi pelayanan Staf pemerintahan Kelurahan.

Sub Sie II/Kamtib mempunyai tugas melaksanakan administrasi Kamtib pemerintahan Kelurahan dan berfungsi pelayanan Staf pemerintahan Kelurahan.

Sub Si III/Kesra mempunyai tugas melaksanakan administrasi Kesra pemerintahan Kelurahan dan berfungsi pelayanan Staf pemerintahan Kelurahan.

Sub Si IV/Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Tata Usaha pemerintahan Kelurahan dan berfungsi pelayanan Staf pemerintahan Kelurahan.

Sub Sie V/Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pembangunan Desa dan berfungsi pelayanan Staf pemerintahan Kelurahan.

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Lurah dalam wilayah kerjanya dan berfungsi membantu pelaksanaan tugas Lurah.

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintahan Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Pertanggung jawaban tugas :

- Wakil Lurah bertanggung jawab kepada Lurah;
- Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Lurah;
- Kepala Sub Seksi bertanggung jawab kepada Wakil Lurah.

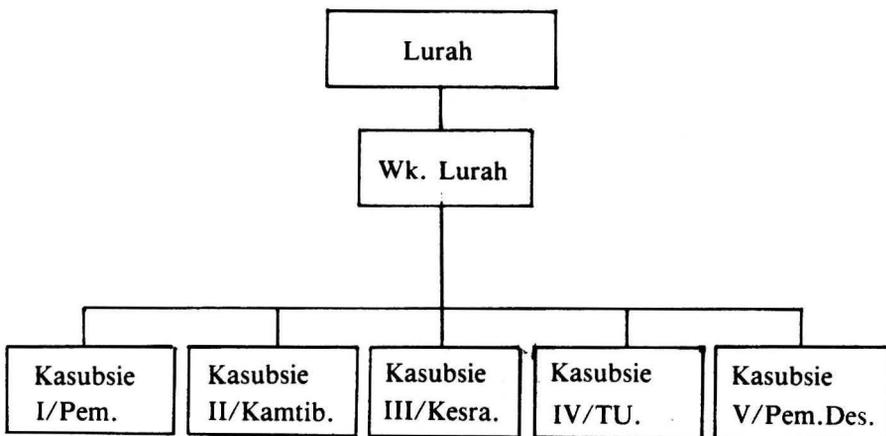
Dalam prakteknya di DKI Jakarta untuk Kepala Lingkungan, banyak yang dirangkap atau digabungkan ke dalam Sub Sie II/Kamtib atau Sub Sie III/Kesra. Hal ini terjadi mengingat jumlah personil pemerintahan Kelu-

rahan belum lengkap atau memang tidak perlu diadakan, dan tugas-tugas Kepala Lingkungan dapat dibebankan kepada RT/RW yang langsung mengawasi terhadap warganya.

Memang dalam kenyataan bahwa tugas RT/RW sekalipun tidak termasuk dalam struktur organisasi pemerintahan, ternyata mendapat beban yang cukup berat dalam membantu tugas-tugas pemerintahan Kelurahan. RT/RW di DKI Jakarta banyak membantu mempercepat proses pelayanan masyarakat. Oleh karena itu seolah-olah sudah merupakan organisasi pemerintahan Kelurahan, ditinjau dari kegiatan dan tugas-tugas yang ditanganinya.

Tugas-tugas seperti tersebut di atas telah berjalan baik di kedua Kelurahan, yakni Kelurahan Rambutan maupun Kelurahan Cilangkap.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan DKI Jakarta



Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan seperti tersebut di atas berlaku untuk seluruh Kelurahan-Kelurahan di DKI Jakarta sejak tahun 1969 sampai sekarang.

B. Sistem Kepemimpinan

Dalam kehidupan kemasyarakatan terdapat perbedaan-perbedaan pandangan tentang kepercayaan maupun keagamaan diantara berbagai aliran. Perbedaan-perbedaan tersebut ternyata telah mempengaruhi peranan kepemimpinan. Perkataan-perkataan kolot dan maju merupakan salah satu pencerminan dari perbedaan itu. Bila segi kepemimpinan itu dilihat dari sudut politis maka

perbedaan konsep-konsep aliran telah mempengaruhinya. **Karena** masalah politis menyangkut masalah kemasyarakatan, maka perlu diketahui sampai sejauh mana pengaruh konsep-konsep tiap aliran mendorong atau menghalangi tindak-tanduk para pemimpin masing-masing aliran dalam memperjuangkan kepemimpinannya. Kata-kata agama dan **drigama** (drigama berarti bahaya) mungkin dapat dipergunakan untuk menerangkan pola-pola kepemimpinan dari berbagai aliran tersebut dan kedua kata itu dapat dianggap pula sebagai suatu kepentingan dari setiap aliran yang ada. Agama yang mencerminkan berlakunya norma-norma kepercayaan merupakan dasar **drigama** yang menggambarkan norma-norma kemasyarakatan dalam rangka tertib sosial. (Buddy Prasadja, 1982; 93, 94).

Bagi masyarakat pedesaan kedua hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupannya. Suatu aliran yang menerima konsep-konsep keagamaan secara menyeluruh, mungkin akan kaku dalam pergaulan politik dengan kelompok aliran lain. Sebaliknya suatu kelompok sosial seperti kelompok yang terlalu menekankan norma-norma sosial dan kurang menyelami norma kepercayaan akan sukar menumbuhkan diri sebagai suatu kekuatan sosial yang mempunyai ajaran atau pegangan untuk mengarahkan diri demi perjuangan kepentingannya. Kesetiaan yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dimana adat istiadat sangat mempengaruhi pergaulan mereka, sehingga mereka memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan naluri kemasyarakatannya. Kepala Desa atau tokoh masyarakat dan orang tua di desa yang dihormati bukanlah sebagai pewenang melainkan sebagai penasehat menurut adat istiadat. Di bidang kepercayaan mereka dikacaukan oleh dukun-dukun yang mempunyai penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Dalam hal yang demikian kelompok sosial menjaga keseimbangan perasaan mereka dimana pertentangan-pertentangan atau perbedaan-perbedaan yang tajam harus distabilkan. Dengan terganggunya kestabilan politik desa, maka pengaruh orang-orang tua di desa semakin berkurang, lebih-lebih setelah masa penjajahan dimana tradisi-tradisi menjadi kacau. Dan pada waktu itu pola aliran melakukan perembesan terhadap struktur pedesaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat adanya perbedaan-perbedaan pandangan dari kelompok-kelompok sosial yang ada terhadap tata kehidupan yang diinginkan. Beberapa perbedaan yang penting diantaranya ialah adanya kelompok-kelompok yang memandang agama sebagai ukuran kehidupan yang paling penting. Sedangkan kelompok yang lain melihat kepada suatu pencapaian tujuan politik merupakan keberhasilan dalam pergaulan kemasyarakatan. Beberapa pengertian menekankan bahwa pembangunan itu tergantung pada **dinamika** kehidupan masyarakat, yaitu suatu usaha **men-dinamisir** yang kemudian mendukungnya, akan sukar untuk melepaskan dari aneka nilai-nilai atau ukuran-ukuran dengan penekanan yang berbeda-beda.

Salah satu kenyataan yang tidak dapat diingkari ialah bagaimanapun juga pola pembangunan suatu desa masih tergantung kepada peran pemerintahnya. Sehingga keberhasilan pembangunan erat dengan struktur pemerintahan desa tersebut. (Buddy Prasadja, 1982; 115).

Kalau dihubungkan dengan keadaan daerah pedesaan yang terdapat di Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, maka akan lebih jelas perbedaan-perbedaan pandangan tentang fungsi keagamaan diantara berbagai aliran itu. Bagi masyarakat di Kelurahan Rambutan, yang mempunyai kefanatikan terhadap kehidupan agama, maka sudah pasti sistem kepemimpinan selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama. Sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap, yang masyarakatnya tidak fanatik terhadap agama, melainkan dipengaruhi dengan ilmu-ilmu kesaktian, **teluh** atau **tenung**, maka sistem kepemimpinan yang berkembang selalu dikaitkan dengan kehidupan ilmu-ilmu kesaktian ataupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat Cilangkap.

Pada mulanya di kedua wilayah Kelurahan tersebut hidup dengan masyarakat komunal, dimana penduduknya menitik beratkan dari hasil pertanian buah-buahan, sayur-sayuran, dan palawija. Tetapi latar belakang sosial budayanya ada perbedaan. Sehingga dalam perkembangan kehidupan masyarakat tidak sama. Masyarakat Kelurahan Rambutan kehidupan masyarakatnya menuju ke arah terciptanya kehidupan keagamaan yang dinamis, sedangkan masyarakat di Cilangkap tidak dapat mempertahankan kehidupan masyarakat yang berkelompok-kelompok menurut aliran ilmu kesaktian masing-masing, bahkan dapat berubah secara cepat sejak masuknya pengaruh keagamaan yang teratur. Pada saat ini sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan di Cilangkap, sepenuhnya dipegang oleh kepemimpinan formal. Namun demikian tidak berarti bahwa kepemimpinan non formal tidak dapat berfungsi di dalam kalangan masyarakat Cilangkap.

1. Kepemimpinan formal

Adanya keaneka ragaman corak kebudayaan, sistem ekonomi dan sistem sosial di pedesaan Indonesia **mengacu** kepada dan menjadi landasan dari adanya keaneka ragaman sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat desa. Walaupun secara tipologi keaneka ragaman sistem politik yang berlaku di masing-masing desa tersebut telah menjadi lebih sederhana karena adanya pengaruh kekuatan politik dari sistem administrasi nasional. Namun demikian keaneka ragaman tersebut tetap ada, karena adanya :

- pengaruh kekuatan politik dari sistem nasional yang tidak seragam waktu mulai pengaruhnya di pedesaan di Indonesia;
- orientasi politik dan kekuatan politik yang ada pada sistem kepemimpinan dan pemimpin di desa yang bersangkutan;
- besarnya pengaruh kekuatan kebudayaan atas sistem politik yang berlaku

setempat dan atas sistem kepemimpinan, yang secara keseluruhan di pedesaan Indonesia itu beraneka ragam, dalam menanggapi masuknya pengaruh kekuatan dari sistem nasional.

Dengan memperhatikan hal-hal seperti tersebut di atas, maka kita dapat mengerti apabila dalam perkembangan kepemimpinan daerah pedesaan di Kelurahan Rambutan dan Cilangkap tidak sama. Kondisi tradisional di Kelurahan Rambutan, lebih cepat berpadu dengan pengaruh dari luar, dan dapat berkembang secara baik, sehingga tidak terjadi pergeseran-pergeseran nilai budaya yang bersifat negatif. Bahkan yang terjadi di Kelurahan Rambutan perkembangan nilai budaya secara mantap dengan berpegang kepada keagamaan yang memang sesuai dengan sifat masyarakat Kelurahan Rambutan yang bersifat **agamis**. Hal ini terbukti dari kehidupan masyarakat, dimana tokoh-tokoh agama selalu mendapat tempat yang terhormat. Sehingga di dalam memilih pemimpin formal yakni **Lurah**, sebelum adanya sistem pengangkatan dari Gubernur, maka dari pihak tokoh agamalah yang banyak memenangkannya. Kemudian secara berturut-turut, ternyata dalam sistem pengangkatan tokoh-tokoh agama yang selalu mendapat tempat.

Apakah hal demikian terjadi karena kebetulan atau memang menurut daftar urutan tokoh-tokoh agama tersebut mendapat ranking yang paling tinggi. Menurut catatan yang diperoleh dari hasil wawancara dalam rangka penelitian, maka baru satu kali seorang Lurah yang bukan dari tokoh agama, melainkan dari tokoh sosial yakni seorang **jagoan** atau **jawara**. Hal ini terjadi pada tahun 1947-an, dan yang terpilih sebagai Lurah adalah Bapak **Jibun** (seorang jagoan silat, tetapi buta huruf). Pada sekitar tahun tersebut memang dapat dimengerti bahwa keadaan masyarakat belum **stabil**. Karena negara Indonesia baru mengalami masa-masa pergolakan, yakni **Perang Kemerdekaan**. Dalam situasi revolusi fisik memang sangat ditutamakan orang-orang kuat dan berani. Pemimpin masyarakat harus seorang yang berjiwa patriot dan nasionalisme yang disegani masyarakat. Jadi pantaslah seorang guru silat dianggap memenuhi persyaratan tersebut, dan dialah yang terpilih sebagai seorang Lurah. Namun demikian setelah keadaan masyarakat mulai stabil, maka pada waktu diadakan pemilihan Lurah pada tahun 1954, yang terpilih adalah tokoh agama kembali, yakni **Haji Sion** yang dulu juga pernah menjabat Lurah pada tahun 1930-an. Situasi pada tahun tersebut jauh lebih stabil dibandingkan dengan tahun 1947-an. Kemudian secara terus-menerus, setelah tahun 1954 Lurah-Lurah di Kelurahan Rambutan selalu dari tokoh agama. Hal ini kita dapat mencatat, yakni pengganti Haji Sion adalah **Haji Ridwan** yang menjabat Lurah sampai tahun 1976 dan diganti oleh **Haji Mohammad Natsir** (Lurah Rambutan yang sekarang).

Kepemimpinan formal di Kelurahan Rambutan berjalan lancar sejak tahun 1954. Karena mulai tahun tersebut sistem administrasi nasional dapat ditrapkan secara baik dalam mengatur tata kehidupan masyarakat desa di Kelurahan Rambutan. Pada waktu itu Perangkat Pemerintah Kelurahan memang belum tersusun seperti sekarang, namun jabatan Lurah, Wakil Lurah dan dibantu oleh beberapa Stafnya yang belum terperinci secara Struktural telah dapat berfungsi sebagai pemerintahan di daerah pedesaan atau kelurahan. Peranan Lurah betul-betul sangat menentukan. Segala sesuatu masih banyak melibatkan secara langsung oleh Lurahnya. Aparat Kelurahan belum ada keharusan sebagai pegawai pemerintah, termasuk pula Lurah-nya sendiri, tidak ada keharusan sebagai seorang pegawai pemerintah.

Juga persyaratan pendidikan belum ada standar yang dapat dijadikan pedoman. Yang penting bahwa seorang Lurah pada waktu itu adalah seorang yang terpandang dan disegani oleh masyarakat. Hal ini diharapkan, apabila nanti seorang telah terpilih sebagai Lurah ada kewibawaan, sehingga segala perintah dan peraturan yang ada dapat dipatuhi oleh aparat kelurahan dan warga masyarakat Kelurahan Rambutan.

Ternyata di daerah Kelurahan Rambutan sejak tahun 1954 peranan Lurah sangat menentukan. Hubungan antara Pemerintah Kelurahan dengan warga masyarakat sangat baik. Sosial ekonomi, sosial budaya, maupun sosial politik mengalami kemajuan pesat. Banyak sarana dan prasarana sosial ekonomi, budaya, dan politik dikembangkan, meskipun belum mencapai seperti apa yang diharapkan. Tetapi paling tidak antara pihak Pemerintah dengan warga masyarakat ada saling pengertian untuk bertanggung jawab atas perkembangan wilayahnya. Karena ada pendekatan timbal-balik antara Pemerintah Kelurahan dengan warganya, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan wilayah dapat berjalan lancar dan selalu mendapat dukungan oleh warga masyarakat. Azas Pancasila yang mengenai musyawarah untuk mufakat selalu ditrapkan oleh pihak Pemerintah Kelurahan, sebelum pelaksanaan kegiatan yang melibatkan warga masyarakat dimulai. Pemuka-pemuka masyarakat non pemerintah selalu diajak bicara dalam masalah yang menyangkut kepentingan umum, seperti perbaikan kampung, pembuatan jalan setapak atau jalan lingkungan, pembangunan sarana peribadatan, sarana pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu keberhasilan Pemerintah Kelurahan juga keberhasilan dari seluruh warga masyarakat.

Kemudian untuk di Kelurahan Cilangkap, mengenai sistem Kepemimpinan formal mulai dapat berjalan secara baik baru sekitar 1969, yakni sejak adanya keseragaman tentang Struktur Pemerintahan Kelurahan dari Pemerintah DKI Jakarta. Sebelum tahun tersebut Pemerintahan Kelurahan Cilangkap, belum menggunakan Struktur organisasi secara tegas,

dan peranan Lurah sangat menentukan di segala bidang. Lurah benar-benar dituntut kemampuannya baik di bidang administratif pemerintahan maupun administrasi dalam kegiatan di lapangan.

Oleh karena itu Lurah harus seorang yang berwibawa baik fisik maupun mentalnya. Karena yang terpilih sebagai Lurah di daerah Cilangkap bukan dari seorang tokoh agama, melainkan dari tokoh sosial, antara lain seorang jagoan atau jawara, dan juga seorang tuan tanah yang disegani di daerah itu. Berbeda dengan di daerah Kelurahan Rambutan, dimana tokoh agama sejak semula memegang peranan penting dan disegani oleh masyarakat. Sedangkan di Kelurahan Cilangkap tokoh agama tidak banyak berfungsi. Memang sejak tahun 1955 agama Islam dapat berkembang pesat di daerah Cilangkap.

Tetapi bukan berarti sejak tahun itu pula tokoh agama mulai tampil sebagai pemimpin formal. Karena dalam kepemimpinan formal masih dipegang oleh tokoh-tokoh sosial yang kuat fisik dan mental, tetapi dalam bidang agama tidak banyak mengetahui. Sekalipun demikian sistem yang dipergunakan para pemimpin formal, yakni Lurah dan aparat-aparat pemerintahan Kelurahan adalah mengadakan pendekatan dengan pemuka-pemuka agama, dan mulai memikirkan terhadap peningkatan pendidikan masyarakat, baik secara formal maupun non formal. Sarana pendidikan mulai dibangun, sekalipun masih sangat sederhana, dan begitu pula sarana peribadatan mulai mendapat perhatian. Dari pihak pemerintah Kelurahan memang belum dapat menyediakan atau membangun, namun pihak masyarakat secara swadaya diberi kesempatan untuk mendirikan tempat-tempat peribadatan seperti musholla, langgar, maupun mesjid. Pengajian-pengajian mulai berkembang dengan baik, dengan cara kelompok maupun perorangan. Sehingga wajarlah bahwa dalam waktu singkat agama Islam dapat berkembang pesat di daerah Kelurahan Cilangkap. Sistem kepemimpinan formal dengan melalui pendekatan seperti tersebut di atas, juga mulai memperhatikan segi-segi perkenomian, sosial dan budaya. Dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Cilangkap, dibangun jalan penghubung ke daerah-daerah pusat perekonomian, seperti jalan-jalan yang menuju pasar, daerah perkotaan, dan lain sebagainya dengan cara swadaya pula dan masih sangat sederhana.

2. Kepemimpinan formal tradisional

Di daerah Kelurahan Rambutan maupun Kelurahan Cilangkap sangat terasa adanya pengaruh tokoh-tokoh masyarakat terhadap Pemerintah Kelurahan. Hal ini terjadi karena memang ada unsur kesengajaan dari pihak pemerintah yang merupakan pemimpin formal, selalu mengajak dan mendengarkan pendapat-pendapat maupun saran-saran dari pemuka masyarakat itu. Kalau pemuka-pemuka masyarakat yang terdapat di daerah Kelurahan Rambutan adalah terdiri dari tokoh-tokoh agama, sedangkan

di daerah Kelurahan Cilangkap terdiri dari tokoh-tokoh sosial. Tetapi yang jelas bahwa baik tokoh agama maupun tokoh sosial mempunyai pengaruh besar di daerah Kelurahan tersebut. Oleh karena itu sistem kepemimpinan yang dipergunakan di daerah tersebut termasuk sistem pendekatan yang sudah menggunakan musyawarah dan mufakat. Azas demokrasi dapat ditrapkan di kedua kelurahan tersebut.

Secara tradisional memang sejak dari dulu Lurah di Kelurahan Rambutan adalah dari tokoh agama. Sedangkan Lurah di daerah Kelurahan Cilangkap tidak harus dari tokoh agama, melainkan tokoh sosial yakni seorang **jawara** atau **jagoan**. Siapapun yang jadi Lurah di Kelurahan Rambutan, tidak akan berhasil baik kalau tidak melibatkan atau kerjasama dengan tokoh-tokoh agama. Hal ini telah terbukti, bahwa waktu menjelang akan diadakan Pemilu tahun 1955, hampir seluruh komando atau perintah dari pihak Pemerintah Kelurahan selalu disalurkan melalui jalur pemuka-pemuka masyarakat yang berperanan waktu itu adalah tokoh-tokoh agama. Para tokoh agama lebih mudah menggerakkan kegiatan masyarakat daripada langsung dikoordinasi oleh Pemerintah. Tetapi Pemerintah Kelurahan tidak melepaskan para pemuka-pemuka masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh agama tersebut, bahkan dijadikan partner dalam pembinaan masyarakat. Cara-cara yang demikian itu ternyata dipakai terus bagi Lurah-Lurah di Kelurahan Rambutan sampai sekarang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengertian tradisional yang terdapat di daerah Kelurahan Rambutan, bukan berarti kolot maupun ketinggalan jaman, akan tetapi berarti kebiasaan yang telah terjadi di kalangan masyarakat Kelurahan Rambutan, bahwa ternyata tradisi keagamaan yang terdapat pada Islam dapat ditrapkan secara baik. Tidak ada unsur paksaan, namun memang dengan kesadaran para pemimpin formal menganggap bahwa segala sesuatu harus dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam. Ternyata di dalam kehidupan politik di daerah Kelurahan Rambutan, juga menunjukkan kehidupan demokrasi yang baik. Hal ini dibuktikan sejak Pemilu tahun 1955, yang pada mulanya golongan agama Islam mendapat kemenangan mutlak, kemudian pada Pemilu tahun 1971 NU masih menduduki urutan yang paling atas, tetapi golongan yang lainnya tidak begitu jauh ketinggalan, dan kemudian pada Pemilu tahun 1977 perolehan suara dari tiap-tiap **kontestan** seimbang, dan yang terakhir pada Pemilu tahun 1982 benar-benar menunjukkan kehidupan demokrasi yang baik, bahwa hasil yang diperoleh dari tiap-tiap kontestan tetap seimbang. Di dalam **kampanye** Pemilu pun berjalan baik, tidak terjadi keributan antar warga masyarakat. Masing-masing kontestan mengikuti peraturan-peraturan Pemilu yang ada.

Kemudian untuk di daerah Kelurahan Cilangkap. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem kepemimpinan formal tradisional yang terdapat di Kelurahan Rambutan.

Seperti tadi telah disinggung di atas bahwa kepemimpinan yang bersifat tradisional di daerah Rambutan adalah terdiri dari tokoh-tokoh agama, sedangkan di Kelurahan Cilangkap terdiri dari tokoh-tokoh sosial yakni **jawara** atau **jagoan**. Di samping itu sistem kepemimpinan formal yang terdapat di kedua daerah Kelurahan tersebut juga ada persamaan yaitu dengan menggunakan sistem pendekatan terhadap pemuka-pemuka masyarakat. Jadi dalam pendekatan tersebut untuk para pemimpin formal di Kelurahan Cilangkap banyak mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh sosial yang terdiri dari **jawara** atau **jagoan** tersebut. Hal yang demikian terjadi dengan baik sejak tahun 1971, yakni sejak adanya penyeragaman tentang struktur organisasi Pemerintah Kelurahan-Kelurahan di seluruh DKI Jakarta (SK. Gubernur KDKI. Jakarta No.Ab.15/46/1971 tanggal 25 April 1971 (LD. No.44 Tahun 1971). Sebelum ada penyeragaman Struktur Pemerintah Kelurahan tersebut, memang sulit dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintah Kelurahan. Tetapi dengan adanya penyeragaman tersebut maka memudahkan cara pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan di Cilangkap.

Sebagai contoh di dalam pengerahan untuk kerja bakti. Dalam kerja bakti ini dari pihak Pemerintah Kelurahan banyak menggunakan jalur pemuka-pemuka masyarakat dalam menggerakkan masyarakat. Memang pada masa itu keadaan masyarakat di Kelurahan Cilangkap masih terbagi menjadi kelompok-kelompok aliran perguruan ilmu kesaktian. Namun dari pihak Pemerintah tidak berusaha memperuncing perbedaan aliran tersebut. Pemerintah Kelurahan menunjukkan sikap netral. Masing-masing perguruan-perguruan didekatinya, untuk diajak membantu program pemerintah. Dan meminta dengan penuh pengertian dan kesadaran agar dari pihak perguruan dapat menggerakkan atau mengajak anggota-anggotanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan umum. Sepertinya kerja bakti, memelihara keamanan dan ketertiban, dan lain-lain. Ajakan Pemerintah Kelurahan yang demikian itu, ternyata disambut baik oleh para tokoh perguruan, sehingga masing-masing dapat menjaga diri dan saling memelihara persatuan dan kesatuan, serta mempunyai loyalitas terhadap Pemerintah yang tinggi. Mulai saat itulah secara berangsur-angsur hilanglah **teluh** ataupun **tenung** yang sudah sejak lama terdapat di daerah Cilangkap. Kehidupan masyarakat mulai ada ketenangan, dan tidak ada saling curiga-mencurigai serta tidak ada lagi berebut unggul dalam ilmu kesaktian. Kepercayaan terhadap agama benar-benar tertanam baik, seolah-olah di daerah Cilangkap ada pergantian situasi dalam masyarakat, yakni dari masyarakat yang diliputi dengan kehidupan ilmu-ilmu kesaktian yang tidak berdasarkan pada ajaran agama, akhirnya berubah secara cepat dengan masyarakat yang diliputi dengan kehidupan beragama Islam secara baik dan mantap. Loyalitas masyarakat terhadap Pemerintah Kelurahan

sangat baik, terbukti keamanan dan ketertiban dapat terpelihara mantap, tidak pernah terjadi keributan antar warga, antar remaja, maupun antar golongan. Sarana pendidikan mendapat perhatian, dan juga sarana peribadatan mulai disempurnakan serta membangun musholla maupun mesjid yang baru. Yayasan Asyafiiyah mempunyai fungsi ganda, yakni pada mulanya hanya berfungsi sebagai **Madrasah** saja, tetapi sejak tahun 1975 berfungsi pula sebagai **Pesantren**.

3. Kepemimpinan non formal

Telah menjadi kebiasaan di seluruh Wilayah DKI Jakarta bahwa setiap Pemerintah Kelurahan selalu mengikut sertakan para pemimpin non formal dalam kegiatan administrasi maupun kegiatan lapangan di Pemerintahan Kelurahan setempat. Kegiatan administrasi dalam pengertian tidak secara langsung, karena para pemimpin non formal tersebut hanyalah sebagai sumber data saja dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemimpin non formal itu dalam masyarakat. Misalnya jumlah anggota yang Terlibat dalam kegiatan kerja bakti, usia anggota keluarga, anak-anak yang lahir, dalam sebulan dan sebagainya. Hal semacam itu yang mengadakan pencatatan sementara adalah pihak pemimpin non formal seperti Ketua-Ketua RT/RW. Kemudian di dalam kegiatan lapangan seperti untuk keamanan wilayah Kelurahan, maka peranan pemimpin non formal sangat menentukan. Kegiatan Hansip dapat dikerahkan oleh RT/RW dan diadakan pembagian wilayah menurut wilayah RT/RW serta dikoordinir oleh Ketua-Ketua RT/RW. Para petugas Hansip sangat patuh terhadap perintah-perintah atau komando dari para Ketua-Ketua RT/RW tersebut. Biasanya kalau ada permasalahan keamanan yang timbul di dalam masyarakat para Ketua-Ketua RT/RW yang dijadikan sumber data. Kalau para Ketua-Ketua RT/RW tidak dapat menunjukkan data yang lengkap, maka dianggap permasalahan tersebut belum jelas sebab-sebabnya, sekalipun ada informasi yang langsung disampaikan oleh masyarakat. Jadi seorang RT/RW harus peka dan cepat tanggap tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayahnya.

Di daerah Kelurahan Rambutan pemimpin non formal yang sekarang mempunyai pengaruh kepada masyarakat selain RT/RW, adalah dari tokoh agama dan perguruan persilatan. Kalau RT/RW sudah jelas banyak melakukan kegiatan tentang program-program Pemerintah Kelurahan. Tetapi dari tokoh agama banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masalah keagamaan, pendidikan, dan sosial. Dalam kegiatan keagamaan sering mengadakan pengajian-pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, pembinaan remaja mesjid dan khotbah yang berisi pembinaan rokhani. Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal. Un-

tuk mewujudkan program ini, maka dari tokoh-tokoh agama dengan secara sukarela berhasil mendirikan sebuah sekolah dari Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Tingkat Tsanawiah. Sekolah tersebut berdiri pada tahun 1972 dengan nama **Al Kahfi**. Nama Al Kahfi ini juga dipakai untuk nama Yayasannya bernama Al Kahfi pula. Jadi sebenarnya sekolah yang didirikan itu merupakan salah satu program dari Yayasan Al Kahfi tersebut. Sebelum Pendidikan Al Kahfi berdiri, sebenarnya sudah ada sebuah Madrasah bernama Fatulillah, tetapi tidak dapat berkembang. Sehingga Madrasah Fatulillah tersebut diganti namanya bernama Pendidikan Al Kahfi yang dibina oleh tokoh-tokoh Islam pendiri Yayasan Al Kahfi. Pada saat ini Yayasan Al Kahfi di Ketuai oleh **Haji Narwoko Kadarusman**.

Untuk pemimpin non formal yang bergerak dalam bidang sosial, yakni Perguruan Silat Macan Betawi yang sampai saat ini masih banyak berpengaruh dalam masyarakat. Perguruan Silat Macan Betawi ini merupakan Cabang, tetapi pusatnya berada di Jakarta Pusat. Perguruan ini mempunyai anggota yang cukup besar dan telah mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara teratur.

Peranan pemimpin non formal, baik dalam bidang agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi di daerah Kelurahan Rambutan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan pihak Pemerintah Kelurahan. Hal ini terlihat dalam susunan Kepengurusan Organisasi selalu menempatkan Lurah Kelurahan Rambutan sebagai Pelindung, dan juga ada beberapa Aparat Kelurahan didudukkan sebagai anggota pengurus. Di samping itu para Ketua-Ketua RT/RW didudukkan pula sebagai Dewan Pembina atau Dewan Pengarah.

Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Al Kahfi maupun Perguruan Silat Macan Betawi tetap ada kaitan dengan program-program Pemerintah Kelurahan.

Di Daerah Kelurahan Cilangkap agak berbeda dengan di daerah Kelurahan Rambutan. Masyarakat Cilangkap adalah masyarakat petani tradisional dan terletak di daerah pedalaman atau pinggiran kota. Transportasi masih terbatas dan mobilitas penduduk juga tidak begitu besar. Hal-hal yang demikian mengakibatkan sifat tradisionalnya agak dapat bertahan kemurniannya. Pemimpin non formal pada mulanya sangat menentukan dalam kehidupan sosial masyarakat di Cilangkap. Situasi yang demikian itu sudah berjalan sangat lama, tetapi mulai berkurang sejak jaman penjajahan Jepang. Seperti yang pernah dikemukakan di bagian depan, bahwa masyarakat di Cilangkap pada mulanya berkelompok-kelompok menurut aliran perguruan. Tentang aliran perguruan ilmu kesaktian yang ada di Cilangkap, tidak pernah menggunakan nama tertentu. Nama yang biasa digunakan adalah nama orang yang menjadi guru atau kepala dari perguruan masing-masing. **Guru** atau **Kepala** Perguruan tersebut sangat disegani oleh

masyarakat. Mempunyai anak buah atau **asuhan** Perguruan yang diajar ilmu-ilmu kesaktian. Asuhannya dan boleh juga disebut **murid-muridnya** sangat patuh terhadap gurunya. Apa saja yang diperintahkan oleh gurunya, selalu dilaksanakan oleh muridnya. Siapa saja yang dianggap sebagai musuh, maka harus dibinasakan. Cara membinasakan tidak secara phisisk, melainkan dengan secara halus yakni dengan **teluh** atau **tenung**. Situasi sebelum jaman Jepang di daerah Cilangkap memang sangat menakutkan. Banyak orang-orang meninggal tanpa diketahui sebab-sebabnya. Tetapi orang sudah dapat menduga pasti kena teluh atau tenung. Oleh karena itu para guru atau kepala Perguruan tersebut diperlakukan oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin yang juga harus dituruti kemauannya. Sebab kalau tidak dituruti pasti akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Namun demikian tidak semua **guru** bersikap seperti tersebut. Karena juga ada seorang guru berbuat sosial bahkan mau menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang timbul dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah Guru **Boan** dan Guru **Nyaum** (kedua-duanya adalah seorang **jawara** atau **jagoan**, Nyaum sebagai tuan tanah terkaya di Cilangkap, sedangkan Boan sebagai jawara yang sering pula mengobati orang sakit). Kedua orang ini dianggap sebagai pemimpin masyarakat dan banyak membantu kesulitan-kesulitan yang timbul di masyarakat. Maka Guru Nyaum, pernah terpilih sebagai Lurah di daerah Cilangkap karena jiwa sosialnya di kalangan masyarakat. Sedangkan Guru Boan pernah menentang Jepang dengan menggunakan kesaktiannya, sehingga jarang berani Jepang masuk ke daerah Cilangkap seorang diri.

Jadi peranan pemimpin non formal di daerah Cilangkap sebelum Kemerdekaan Indonesia benar-benar sangat menentukan. Sampai sulit membedakan, siapa yang sebenarnya yang berkuasa di daerah tersebut. Sebab para pemimpin non formal sudah pasti akan tidak mudah diatur begitu saja oleh para pemimpin formal atau **Lurah** dan Aparatnya. Tetapi ternyata hal demikian itu ternyata dapat diatasi dengan baik, karena Lurah yang terpilih di Kelurahan Cilangkap adalah benar-benar seorang yang disegani oleh masyarakat, baik masyarakat pada umumnya dan masyarakat perguruan pada khususnya. Lurah terpilih adalah seorang **jawara** atau **jagoan** yang benar-benar dapat diandalkan. Oleh karena itu tidak ada yang berani ingin coba-coba mengganggunya dan apabila diganggu sudah pasti tidak akan terjadi apa-apa, karena sudah mempunyai daya penolak atau **kebal**. Hal yang demikian memang tidak berjalan untuk seterusnya. Sejak tahun 1955 sudah mulai berkurang, dan lenyap sama sekali pada tahun 1975. **Teluh** dan **tenung** seolah-olah terdesak dengan masuknya ajaran Islam.

BAB IV

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN SOSIAL

Kepemimpinan di desa yang berasal dari berbagai kelompok mempunyai katagori tersendiri. Hanya beberapa kelompok yang mempunyai pengaruh yang luas di kalangan masyarakat, yaitu mereka yang tergolong mempunyai pengaruh yang sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku umum dan menyeluruh dan pengaruh ini berlaku secara terus-menerus. Naik turunnya pengaruh tersebut sangat ditentukan oleh kondisi serta situasi setempat, dalam hal ini perubahan norma-norma sosial turut menentukan. Dengan demikian proses pencapaian kedudukan kepemimpinan di desa yang dihubungkan dengan perkembangan desa perlu diketahui. (Buddy Prasadja, 1982; 52). Kegiatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok telah secara nyata mewarnai hasil-hasil dalam bidang sosial baik yang berupa fisik maupun non fisik. Tumbuhnya berbagai sarana sosial, yayasan-yayasan, di samping sarana hidup lainnya seperti sarana keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, rekreasi, perumahan dan lain-lain, serta makin mantapnya sistem sosial menyebabkan baik secara individu maupun kelompok kemampuan-kemampuan berprestasi makin menonjol. Prestasi ini nampak dalam setiap kegiatan perlombaan, pertandingan untuk persahabatan antar warga maupun antar Kelurahan, yang diselenggarakan pada setiap peringatan-peringatan hari-hari besar bersejarah nasional maupun hari bersejarah Islam. Di dalam hal kegiatan semacam itu, tampak pengaruh kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan di Kelurahan Rambutan maupun di Kelurahan Cilangkap. Kalau di daerah Kelurahan Rambutan kepemimpinan masyarakat pedesaan yang paling menonjol adalah dalam bidang keagamaan dan olah raga bela diri pencak silat. Sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap yang paling menonjol adalah dalam bidang sosial yakni perlombaan kebersihan kampung dan perlombaan olah raga permainan. Organisasi dalam kegiatan sosial memang tidak banyak yang menonjol, namun secara kolektif di kedua Kelurahan tersebut masyarakatnya sangat kompak dalam membina persatuan dan kesatuan warga. Oleh karena itu tidak pernah ada keributan-keributan yang terjadi di kalangan masyarakat. Kewibawaan para pemimpin formal maupun non formal dapat terjaga dan begitu pula sifat kepemimpinan dari para pemimpin masyarakat yang selama ini dapat menun-

jukkan keteladanan yang baik. Tidak ada diantara warga masyarakat yang merasa ditekan maupun diperintah, karena segala sesuatu yang dilaksanakan dalam kegiatan sosial untuk kepentingan bersama. Kesadaran masyarakat untuk beramal dan berbuat sosial sangat tinggi. Tidak ada penonjolan adanya perbedaan golongan maupun kelompok, sehingga masyarakatnya tumbuh dan berkembang secara wajar, aman dan tentram. Hanya pada saat-saat menjelang adanya Pemilu, memang ada sedikit ketegangan kehidupan politik, namun dapat dikendalikan, berkat adanya rasa kesadaran sebagai warga masyarakat yang saling menjaga keutuhan dan kebulatan wilayah, apabila dipandang dari segi sosial dan tertib hukum. Maka norma-norma sosial yang menyangkut hukum, dimana desa merupakan kesatuan sosial perlu ditegakkan dan dijaga sifat-sifat masyarakat pedesaan yang murni, yakni **kolektifa** maupun kegotongroyongan.

1. Nama organisasi

Untuk di daerah Kelurahan Rambutan, organisasi sosial yang paling menonjol hanyalah dalam bidang olah raga. Sedangkan organisasi sosial lainnya meskipun juga sering dibentuk, tetapi ternyata untuk pengembangan mengalami kesulitan. Organisasi sosial selain olah raga yang pernah dibentuk, seperti kerukunan kampung, yang bergerak dalam pengumpulan dana kematian, dana fakir miskin, dan lain sebagainya, ternyata tidak dapat berkembang. Tetapi bukannya kegiatan tersebut terus mati sama sekali, melainkan ditempuh dengan cara lain, yakni pada tiap-tiap ada warga yang meninggal, maka diadakan edaran **lis** (sumbangan sukarela) yang dikordinir oleh Ketua-ketua RT/RW. Hasil daripada lis ini terus diserahkan kepada keluarga yang sedang **sungkawa** (kesusahan). Jadi secara tidak langsung warga masyarakat, sudah ikut meringankan beban bagi yang sedang sungkawa tersebut, dan warga masyarakat ikut **bela sungkawa**. Kemudian untuk dana fakir miskin, juga tidak dapat berkembang, namun juga dapat ditempuh jalan lain, yakni dengan cara mengedarkan lis pula pada setiap mau mengadakan peringatan hari-hari besar bersejarah Islam. Misalnya Hari Idul Adha (Hari Idul Korban), Maulid Nabi, Idul Fitri, dan sebagainya. Ternyata dengan cara yang demikian itu, tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Tentang kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam bidang olah raga, ternyata banyak pula yang telah mencoba untuk membentuk organisasinya. Seperti olah raga sepak bola, dengan nama PSBP (Persatuan Sepak Bola Beruang Putih). Dari kesebelasan ini dapat menyalurkan anggota menjadi pegawai perusahaan yang membutuhkan tenaga. Ternyata bagi pemain yang disiplin dan berprestasi mudah dikenal oleh masyarakat, sehingga mudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, seperti Gobel (Pabrik Besar yang bergerak dalam bidang Elektronik). Di samping itu juga telah ada yang dikirimkan ke Medan, untuk bergabung dengan kese-

belasan terkenal disana. Sampai saat ini organisasi sepak bola PSBP masih berdiri, namun kurang berkembang seperti yang diharapkan. Organisasi sepak bola PSBP didirikan atas inisiatif para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Kemudian ada lagi organisasi olah raga yang juga dikordinir oleh Karang Taruna yang kerjasama dengan Pencinta Alam. Organisasi tersebut bernama **Guapala**, yang bergerak dalam pelacakan route-route perjuangan. Berdiri pada tahun 1976, dan sekarang dipimpin oleh **Lukman Hakim**. Pernah mengadakan pelacakan route perjuangan Rengasdengklok – Jakarta. Organisasi ini banyak pula melibatkan kegiatan dalam bidang sosial, terutama sebagai wadah pemuda untuk menyalurkan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga. Inipun juga diambilkan pemuda yang disiplin dan berprestasi. Dalam menyalurkan tenaga ini, tidak ada **imbalan** apapun yang dibebankan kepada tenaga yang disalurkan. Jadi benar-benar hanya berbuat sosial.

Untuk organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, yang sampai saat ini masih sangat berperanan dan berfungsi secara baik adalah Perguruan Silat **Macan Betawi**. Seperti yang telah disinggung di bagian depan, bahwa organisasi ini, mempunyai banyak hubungan dengan pihak Pemerintah Kelurahan dan Aparat-Aparatnya. Berdiri pada tanggal 27 Juni 1979. Tempat didirikan di Kampung Rambutan Pasar Rebo Jakarta Timur. Status Perguruan adalah Cabang Jakarta Timur. Mempunyai Anggaran Dasar Rumah Tangga secara baik. Kepengurusannya tersusun teratur dan telah ditentukan batas dan wewenang kepengurusannya secara terperinci. Perguruan Silat Macan Betawi ini menggunakan **motto** sebagai berikut :

- Beragama harus berilmu;
Beragama tanpa ilmu akan menjadi Fanatisme;
Berilmu tanpa agama akan menjadi Ganas.

Motto tersebut selalu dijadikan pegangan bagi anggota-anggota perguruan, agar jangan **takabur**. Perguruan ini mendapat pengesahan dari pusat dengan No.076/MB/IV/Pend./81, tanggal 7 April 1981 dan ditetapkan terhitung tanggal 30 April 1981. Perguruan Silat Macan Betawi bersifat Perguruan, dengan dasar Kekeluargaan, Persaudaraan, dan Kemasyarakatan yang tidak **berafiliasi** Politik. Perguruan Silat Macan Betawi beraliran "**Betawi**."

Di daerah Kelurahan Cilangkap organisasi yang bergerak dalam kegiatan sosial dapat dikatakan belum ada yang terkenal. Kegiatan sosial yang sering dilaksanakan di daerah Cilangkap adalah gerakan kerja bakti, tolong-menolong dalam membantu orang hajatan, mendirikan rumah, dan lain sebagainya. Kemudian gerakan sosial yang menyangkut keagamaan dan pendidikan adalah Yayasan Asyafiiyah, yang juga mendirikan Madrasah bernama Asyafiiyah. Untuk Madrasah Asyafiiyah ini akan diuraikan tersendiri di bagian belakang.

2. Tempat dan Kegiatan

Organisasi yang bergerak dalam kegiatan sosial di daerah Kelurahan Rambutan yang mempunyai pengaruh dalam kalangan masyarakat saat ini hanyalah Perguruan Silat Macan Betawi. Tempat dan kegiatan Perguruan ini berada di Kampung Rambutan Rt.007/01 Rumah No.23 Kecamatan Pasar Rebo – Jakarta Timur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Kegiatan Latihan Anggota diadakan tiap minggu 2 kali yaitu malam Kamis dan Minggu pagi.
- b. Kegiatan Latihan Kader diadakan 1 kali dalam tiap Minggu. Untuk latihan Kader ini dapat diselenggarakan di luar Kampung Rambutan serta dapat pula diajarkan aliran persilatan lain untuk menambah ketrampilan dan kemampuan.
- c. Kegiatan kenaikan Tingkat diadakan tiap-tiap 6 bulan sekali yang diselenggarakan di luar daerah Kampung Rambutan.
- d. Kegiatan Sosial diadakan dalam rangka menghadapi hari-hari besar bersejarah Nasional. Kegiatan ini meliputi jaga malam, pertandingan-pertandingan, yang hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan anggota dan pengisian kas perguruan.
- e. Kegiatan ke luar kota dengan gerak jalan, dalam pelantikan anggota baru. Gerak Jalan ini dimulai atau Start dari luar kota dan berakhir di Gudang Air Kampung Rambutan.

Untuk organisasi yang bergerak dalam kegiatan sosial di daerah Kelurahan Cilangkap sebenarnya sampai saat ini tidak menggunakan nama dan identitas tertentu. Hanya Yayasan Asyafiih itulah yang boleh juga dapat dikatakan organisasi sosial. Tetapi Yayasan ini lebih banyak menitik beratkan dalam kegiatan pendidikan formal. Tempat dan kegiatan Yayasan Asyafiih berada di RT.005/02 Kampung Cilangkap Kecamatan Pasar Rebo – Jakarta Timur. Saat ini di bawah pimpinan Uztat Zasir Yusuf. Yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial. Dalam pendidikan dapat mendirikan Madrasah, yang juga dapat digunakan untuk memberikan pelajaran agama. Dari pihak Yayasan berusaha mencari dana, yang digunakan untuk membantu para murid yang tidak mampu membiayai sekolahnya. Murid-murid ini ada yang ditampung di dalam Pondok Pesantren Asyafiih. Jadi melalui Pondok Pesantren inilah kegiatan sosial dapat dilakukan dengan baik.

3. Tujuan yang akan dicapai

Organisasi Perguruan Silat Macan Betawi di daerah Kelurahan Rambutan telah mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara jelas dan teratur. Oleh karena itu arah dan tujuan yang akan dicapai telah dirumuskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk persahabatan, menggali dan mengembangkan budaya/kebudayaan asli bangsa Indonesia di bidang Persilatan dan untuk meningkatkan mutu persilatan;
- b. Melakukan kegiatan sosial, apabila ada salah seorang anggota/pengurus kawin, meninggal, dan lain-lain yang harus dibantu, dan bantuan atau sumbangan tersebut diberikan kepada anggota/pengurus sekurang-kurangnya yang sudah enam bulan masa jabatannya. Sumbangan tersebut yang berhak menerimanya adalah diri sendiri, istri, anak, dan orang tua yang bersangkutan.

Cara pencarian dana, pihak pengurus dapat menempuh dengan cara mengedarkan **lis**, pertandingan-pertandingan, uang pangkal, uang iuran, dan sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan Perguruan Silat Macan Betawi, para pengurus selalu berkonsultasi dengan pihak Pemerintah Kelurahan. Dari pihak Pemerintah Kelurahan banyak memberikan dukungan untuk memajukan perguruan. Dalam pembinaan remaja terutama untuk kegiatan olah raga sangat besar manfaatnya di kalangan masyarakat, disamping untuk kepentingan olah raga sendiri juga untuk menanggulangi kenakalan remaja. Di Kelurahan Rambutan, dengan adanya kegiatan olah raga yang diselenggarakan oleh Perguruan Silat Macan Betawi, kegiatan sosialnya juga dapat berjalan baik, seperti memberikan bantuan bagi anak-anak remaja yang tidak mampu melanjutkan sekolah, maka dapat disalurkan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang memerlukannya, asalkan disiplin dan berprestasi. Pengurus sendiri tidak menawarkan tenaga, tetapi dari perusahaan ada yang memintanya. Ada yang dikerjakan sebagai penjaga malam dan ada pula yang terus dibina oleh perusahaan untuk memperkuat persatuan olah raga di perusahaan tersebut.

Kemudian disamping untuk kepentingan para anggota perguruan sendiri, juga pihak Kelurahan mendapat keuntungan, dapat memanfaatkan para remaja tersebut untuk menjaga ketertiban dan keamanan kampung di wilayah Kelurahan Rambutan. Kegiatan kerja bakti dapat berjalan baik dan mudah dikendalikan apabila ada keributan-keributan antar remaja. Di daerah Kelurahan Cilangkap kegiatan masyarakat di bidang sosial belum terkoordinir secara teratur, tetapi peran serta masyarakat dalam bidang sosial menunjukkan sikap yang positif, untuk memajukan wilayah Kelurahan Cilangkap. Kegiatan masyarakat dalam bidang sosial, terutama masih bersifat tradisional masyarakat pedesaan, yakni berupa kolektivitas warga masyarakat dalam membantu atau tolong-menolong bagi warga yang mendapat kesulitan. Tolong-menolong tersebut dalam bentuk kerja bakti atau-

pun gotong-royong untuk menanggulangi kesulitan antar warga, misalnya mengenai mendirikan rumah, perlengkapan untuk perkawinan, ataupun hajatan lainnya, maka warga masyarakat tidak usah diundang maupun diminta, tetapi dengan secara sukarela sudah ikut membantu apa yang mereka dapat.

Dan untuk bantuan ini tanpa ada harapan meminta imbalan apapun, bahkan bantuan tersebut dapat berupa barang untuk keperluan warga masyarakat yang sedang mendapat kesulitan ataupun yang sedang hajatan. Jadi perhitungan untung dan rugi tidak terdapat dalam masyarakat Cilangkap. Segala sesuatu ditujukan untuk kepentingan bersama, atas dasar senasip sepenanggungan. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk ketentraman dan kebahagiaan bagi seluruh warga masyarakat di Kelurahan Cilangkap.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang sosial di DKI Jakarta, sudah banyak dipengaruhi oleh masyarakat perkotaan. Hal ini terjadi, mengingat Jakarta sejak jaman penjajahan Belanda telah menjadi pusat pemerintahan. Kemudian pada jaman penjajahan Jepang kota Jakarta juga telah memainkan peranan sebagai kota perjuangan untuk menghadapi tentara **Sekutu**, dan pada jaman kemerdekaan Jakarta berperanan sebagai Ibukota Negara, Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Perdagangan, dan sekarang diarahkan menuju Kota Metropolitan. Untuk menjaga agar Jakarta tetap dapat berperanan seperti tersebut di atas, maka kondisi sosial masyarakat ditingkatkan, termasuk pula masyarakat di daerah pedesaan. Masyarakat sudah mulai menyadari tentang arti dan hakekat pembangunan desa bahwa tugas tersebut merupakan pembangunan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, yang pelaksanaannya dilandaskan pada kondisi Kelurahan dan kemampuan masyarakat setempat dengan bersendikan prinsip-prinsip gotong-royong, toleransi dan musyawarah dimana hal tersebut merupakan sikap budaya bangsa Indonesia. (Buku I, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga, 1979; 135). Dalam Surat Keputusan Gubernur No.Ib.3/1/13/1968 ditetapkan garis kebijaksanaan pembinaan wilayah dan pembangunan desa khusus. Ini dimaksud sekaligus merupakan dasar program kerja, agar masyarakat desa/Kelurahan secara bertahap dapat mengatasi dan mengembangkan masalah-masalah kehidupan sosial, ekonomi dan budaya secara swadaya. (Buku I, 134).

1. Syarat-syarat dan faktor pendukung

Yang menjadi syarat-syarat kepemimpinan dan faktor pendukungnya bagi seseorang yang akan diangkat sebagai pemimpin dalam kegiatan sosial adalah dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Kalau kita perhatikan bahwa diantara kedua Kelurahan di Jakarta yang kita jadikan sebagai daerah penelitian, yakni Kelurahan Rambutan dan Kelurahan

Cilangkap terdapat perbedaan persyaratan tersebut, dan begitu pula faktor pendukungnya.

Untuk di Kelurahan Rambutan syarat pemimpin masyarakat dalam bidang sosial, harus memiliki jiwa sosial, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini harus beragama Islam, dan didukung oleh masyarakat serta berpendidikan umum minimal Sekolah Dasar. Persyaratan seperti tersebut memang tidak secara tertulis, namun dalam kenyataan setiap pemimpin masyarakat yang terpilih selalu orang-orang yang memiliki persyaratan seperti itu. Tidak pernah ada seseorang pemimpin masyarakat di Kelurahan Rambutan yang tidak beragama Islam, tidak berpendidikan SD, ataupun yang tidak didukung oleh masyarakat. Sebagai contoh jabatan Ketua RT/RW, Ketua Perguruan Silat Macan Betawi, dan juga seorang Lurah. Untuk Lurah-lurah di Jakarta, tidak dipilih oleh masyarakat, tetapi ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan ranking teratas sebagai pegawai Pemerintah. Kalau Lurah tersebut diambilkan dari bukan pegawai negeri, melainkan dari ABRI, paling sedikit sudah berpangkat Letnan. Tetapi untuk di Kelurahan Rambutan, belum pernah seorang Lurah dari seorang ABRI. Untuk Ketua RT/RW di Kelurahan Rambutan sampai saat ini juga dari warga masyarakat Kelurahan Rambutan dan bukan ABRI. Sedangkan Ketua Perguruan Silat Macan Betawi sejak berdirinya (1979) sampai sekarang belum pernah dijabat oleh lain orang, karena setiap diadakan pemilihan Ketua lama selalu terpilih kembali. Dan kebetulan Ketua lama tersebut adalah seorang Sarjana Muda, mempunyai jiwa sosial, beragama Islam, dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Untuk di Kelurahan Cilangkap, yang dijadikan persyaratan sebagai pemimpin dalam bidang sosial adalah orang yang disegani oleh masyarakat, dalam pengertian disegani secara fisik dan mental. Bahkan sebelum tahun 1955, tidak ada persyaratan harus orang yang beragama, karena masyarakat Kelurahan Cilangkap tidak fanatik terhadap agama, tetapi sejak tahun tersebut faktor agama mendapat perhatian besar. Kalau dahulu seorang pemimpin harus orang yang kuat ekonomi maupun fisik, tetapi sekarang seorang pemimpin dalam bidang sosial harus mempunyai jiwa sosial, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yakni terhadap agama Islam, dan juga berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar. Ketentuan seperti tersebut tidak secara tertulis, namun sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Cilangkap, bahwa orang-orang yang memiliki persyaratan seperti itulah yang biasanya terpilih sebagai seorang pemimpin dalam kegiatan sosial. Seperti halnya di Kelurahan Rambutan, untuk Ketua RT (Rukun Tetangga) harus dipilih langsung oleh warga masyarakat, tetapi untuk Ketua RW (Rukun Warga) dipilih oleh Ketua RT., dengan mempertimbangkan beberapa calon yang diusulkan oleh Ketua-Ketua RT. Untuk Ketua RW, biasanya terpilih 3 (tiga) calon terlebih dahulu dan dari ke-

tiga calon tersebut diadakan pilihan oleh Ketua-Ketua RT., kemudian yang mendapat suara terbanyak baru disahkan oleh Lurah, sebagai Ketua RW. Baik Ketua RT maupun Ketua RW bukan sebagai pegawai negeri dan juga tidak mendapatkan imbalan apapun. Jadi mereka benar-benar sebagai tenaga sukarela dan bersifat sosial. Di dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan, tidak termasuk sebagai pejabat. Di daerah Kelurahan Cilangkap sampai saat ini belum terdapat seorang pemimpin yang benar-benar berjiwa sosial, berwibawa, dan disegani masyarakat. Karena kegiatan sosial dilaksanakan bersama, yang digerakkan oleh para Ketua-Ketua RT/RW. Belum ada suatu Yayasan maupun Perguruan yang mengkhususkan kegiatan dalam bidang sosial. Oleh karena itu segala sesuatu yang meliputi kegiatan sosial seolah-olah hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kelurahan Cilangkap, yang disalurkan lewat RT/RW. Faktor pendukung untuk menjadi Ketua RT maupun Ketua RW adalah mempunyai pengalaman sebagai seorang guru ilmu-ilmu kesaktian, tetapi harus beragama. Dan juga seorang yang dilahirkan di daerah Kelurahan Cilangkap.

2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban para pemimpin masyarakat pedesaan di bidang sosial di Kelurahan-Kelurahan di Wilayah DKI Jakarta, sebenarnya belum ada peraturan secara khusus. Yang telah diatur hanyalah hak dan kewajiban Pemerintah Kelurahan, yang berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian mengenai hak dan kewajiban RT/RW sebenarnya belum ada pengaturan secara khusus, tetapi berdasarkan Peraturan Daerah No.6/P/I/1976 tentang tugas dan kewajiban Lurah dalam pembinaan RT/RW, telah ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya organisasi RT/RW seperti tercantum dalam **Anggaran Dasar** dan **Anggaran Rumah Tangga** adalah untuk menunjang dan melancarkan program Pemerintah Kelurahan setempat, sehingga diperlukan kerjasama antara masyarakat melalui RT/RW dengan Pemerintah Kelurahan. Karena keberhasilan program Pemerintah Kelurahan, akan berarti pula ikut mempercepat tercapainya Program Pemerintah yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional. Melalui masyarakat pedesaan inilah, titik tolak pembangunan nasional dimulai, karena sebagian besar masyarakat Indonesia berdiam di daerah pedesaan. Jadi untuk hak dan kewajiban RT/RW di Kelurahan-Kelurahan di Wilayah DKI Jakarta, kiranya sudah jelas, yakni berkewajiban membantu Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan program-program Pemerintah. Sedangkan RT/RW hanya mempunyai hak sebagai penghubung antara masyarakat, dan membina warganya sesuai petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Kelurahan.

Di daerah Kelurahan Rambutan selain organisasi sosial RT/RW tersebut,

juga masih ada organisasi sosial lainnya yang tumbuh atas swadaya masyarakat. Organisasi sosial yang lain, yang juga mempunyai pengaruh di lingkungan Kelurahan Rambutan adalah Perguruan Silat Macan Betawi. Batas dan wewenang Para Pengurus Perguruan Silat Macan Betawi telah dirumuskan secara terperinci. Batas dan wewenang tersebut merupakan hak dan kewajiban yang perlu dijadikan pegangan dalam setiap kegiatan. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

– **Pelindung :**

- a. Berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi jalannya perguruan Macan Betawi, baik ke luar dan ke dalam terhadap pengurus menggerakkan tertib administrasi;
- b. Memberikan saran-saran dan petunjuk-petunjuk, pandangan yang dianggap perlu guna pemikiran bagi Ketua sebagai bahan pemikiran selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan;
- c. Dalam beberapa hal selalu berkonsultasi dengan pengurus dalam memberikan bimbingan ataupun petunjuk-petunjuk;
- d. Diangkat menjadi anggota kehormatan dan luar biasa.

– **Penasehat :**

- a. Berkewajiban memberikan nasehat, pandangan-pandangan bilamana Organisasi atau anggota pengurus terdapat kekeliruan atau kesalahan yang akan mengakibatkan perpecahan atau kemunduran atau merugikan nama baik perguruan Macan Betawi;
- b. Memberikan saran-saran, petunjuk-petunjuk, pandangan-pandangan, bilamana dianggap perlu guna pemikiran selanjutnya bagi Ketua sebagai bahan pemikiran selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan;
- c. Dalam beberapa hal selalu berkonsultasi dengan pengurus dalam memberikan bimbingan ataupun petunjuk-petunjuk;
- d. Diangkat menjadi anggota luar biasa dan kehormatan dalam perguruan.

– **Ketua I :**

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap anggota, pengurus, ke luar maupun ke dalam;
- b. Memutuskan segala sesuatu masalah (hal) yang tidak dapat diputuskan oleh pengurus dalam pertemuan-pertemuan (musyawarah);
- c. Menanda tangani semua kertas-kertas dan surat-surat berharga;
- d. Mengangkat seseorang untuk memimpin salah satu bidang yang

khusus ditugaskan dan Ketua bidang khusus ini langsung bertanggung jawab kepada Ketua I;

- e. Berhak menunjuk dan mengangkat stafnya;
- f. Merupakan pimpinan tertinggi dari Perguruan Silat Macan Betawi yang didampingi beberapa orang pengurus lainnya;
- g. Melaksanakan kerja sehari-hari didampingi Sekretaris.

– **Ketua II :**

- a. Berkewajiban mewakili Ketua I, bilamana Ketua I berhalangan;
- b. Mengkoordinir salah satu bidang;
- c. Bertindak sebagai penghubung dari bawah ke atas, ke dalam maupun ke luar.
(Yang dimaksud penghubung disini ialah, mewakili Ketua I untuk mengetahui persoalan-persoalan, atau hal-hal langsung maupun tidak langsung).

– **Sekretaris :**

- a. Bertindak sebagai juru bicara Ketua ke dalam maupun ke luar;
- b. Mendampingi Ketua dalam segala hal;
- c. Menerbitkan seluruh administrasi, dokumentasi, personalia dan komunikasi;
- d. Bertindak sebagai Ketua apabila Ketua berhalangan;
- e. Menghimpun dan menyebar luaskan segala keputusan-keputusan rapat;
- f. Tidak dibenarkan mengeluarkan surat apapun yang sehubungan dengan Organisasi tanpa setahu Ketua.

– **Bendahara :**

- a. Berkewajiban menertibkan segala ke luar masuknya keuangan (uang pangkal, iuran, dan dana-dana yang tidak mengikat);
- b. Usaha mencari dana yang dianggap syah tidak terikat;
- c. Segala sesuatu pengeluaran yang cukup ditanda tangani oleh Bendahara dan disetujui oleh Ketua.

– **Seksi Komisi Teknik/Pelatih/Ass. Pelatih (Kader) :**

- a. Merencanakan, melaksanakan, menentukan, keseragaman peragaan dalam bidang latihan-latihan, mengawasi siswa dan Assisten Pelatih/ Kader;
- b. Memberikan bimbingan, Petunjuk-petunjuk kepada Tim, Assisten Pelatih atau Kader guna diterapkan dalam latihan;

- c. Menentukan kader-kader yang akan dikirim untuk melatih ranting-ranting cabang, atas persetujuan Ketua;
 - d. Bertanggung jawab atas Assisten Pelatih/Kader yang melanggar aturan atau melalaikan kewajiban yang akan mengakibatkan merugikan nama baik Perguruan Silat Macan Betawi;
 - e. Selalu mencari acara baru dalam keahliannya agar persilatan itu tambah hidup;
 - f. Mengajukan kepada Pengurus/Ketua agar sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dapat mengadakan kegiatan gerak jalan, latihan di luar (tempat lain selain tempat latihan rutin) yang dianggap perlu atau berfaedah.
- **Seksi Humas :**
- a. Bertugas membantu Sekretaris dalam menyebar luaskan surat-surat undangan dan hasil-hasil rapat;
 - b. Berusaha untuk mendapatkan anggota-anggota baru dan berhubungan dengan masyarakat.
- **Seksi Pembantu Umum :**
- a. Bertugas membantu Sekretaris dalam menyebar luaskan surat-surat undangan dan hasil-hasil rapat;
 - b. Berusaha untuk mendapatkan anggota-anggota baru dan berhubungan dengan masyarakat.
- (**catatan :** Tugas Seksi Humas sama dengan Tugas Seksi Pembantu Umum, oleh karena itu sering dirangkap oleh satu orang dan dibantu beberapa Staf).

Dengan memperhatikan hak dan kewajiban para Pengurus Perguruan Silat Macan Betawi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Organisasi ini benar-benar dapat berfungsi. Berhubung para Pengurus, mendukung beberapa unsur Pemerintah Kelurahan, diantaranya adalah Lurah sebagai Pelindung, Ketua RW dan Kamtib sebagai Penasehat, dan beberapa orang lagi Aparat Pemerintahan Kelurahan, maka dalam segala kegiatannya selalu mendapat restu oleh Pemerintah Kelurahan. Dari perguruan ini banyak dilakukan perbuatan sosial dan pembinaan generasi muda. Ketua dan Pengurus mempunyai pengaruh di masyarakat, dan seolah-olah merupakan bagian dari unsur Pemerintah Kelurahan. Tetapi mengingat kerjasama yang baik antara pihak perguruan dengan RT/RW dan Unsur Keamanan/Ketertiban, dalam membantu program Pemerintah Kelurahan, maka Perguruan ini mendapat dukungan dan tanggapan dari masyarakat secara positif.

Organisasi semacam ini dan juga organisasi dalam kegiatan sosial lainnya di daerah Kelurahan Cilangkap belum terbentuk. Di daerah Kelu-

rahan Cilangkap sifat masyarakatnya masih **pasif tradisional** yang hidup secara **agraris**. Pada saat ini sedang mengalami perubahan-perubahan dengan terbukanya jaringan komunikasi, dan dibangunnya jalan lingkungan dengan dana bantuan Inpres. Para Pemimpin masyarakat dalam bidang sosial, masih bersifat perorangan atas dasar sukarela. Jadi hak dan kewajibannya tidak ada ketentuan-ketentuan yang tersusun secara teratur. Para tokoh masyarakat berbuat sosial didorong oleh rasa senang-senangan dan seolah-olah mereka hidup dalam satu ikatan kekeluargaan, dimana harus ditumbuhkan kolektivitas masyarakat dengan tolong-menolong sesama warga. Hal yang demikian telah menjadi sifat masyarakat petani tradisional, seperti yang dialami oleh masyarakat Cilangkap secara turun-temurun. Jadi tidak ada yang merasa diperintah. Lain halnya pada waktu jaman Belanda atau pada waktu jaman Jepang dahulu, bahwa orang-orang tuan tanah dan orang-orang **jawara** atau **jagoan** yang selalu dapat menguasai masyarakat di daerah Cilangkap. Tetapi sejak tahun 1955 kekuasaan orang-orang tuan tanah dan jawara itu telah hilang sama sekali. Pada waktu sekarang masyarakat telah hidup dengan tentram, aman dan damai. Pemerintah yang dianggap syah hanya Pemerintah Kelurahan. Peranan RT/RW sangat menentukan, dan dari RT/RW inilah kegiatan sosial dapat digerakkan. Tetapi hak dan kewajiban RT/RW hanya semata-mata sebagai penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan, dalam menunjang dan melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kelurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional.

3. Atribut/Symbol Kepemimpinan

Para pemimpin di bidang sosial untuk wilayah Kelurahan Rambutan, terutama yang telah di organisasi seperti Perguruan Silat Macan Betawi. Para pemimpin maupun anggota-anggotanya telah diatur baik pakaian seragamnya maupun tanda tingkatannya, antara lain sebagai berikut :

– Tanda Tingkatan :

Pendekar Pembina	: memakai sabuk merah tua.
Pendekar Muda	: memakai sabuk kuning.
Penata	: memakai sabuk merah muda/jambon.
Dewasa	: memakai sabuk ungu.
Madya	: memakai sabuk coklat.
Remaja	: memakai sabuk biru.
Taruna	: memakai sabuk hijau.
Pemula	: memakai sabuk putih.

(Sabuk dibuat panjang 2 m dan lebar 30 cm).

– Pakaian Seragam :

Untuk Pelatih	: a. Baju berwarna hitam dengan bentuk model
----------------------	--

Koko pakai saku kanan-kiri dengan belahan terusan;

b. Celana berwarna hitam dengan bentuk model pangsi pakai kolor.

Untuk Siswa

a. Baju berwarna kuning oranye dengan bentuk model Koko tanpa saku, belahan tidak terusan;

b. Celana berwarna hitam dengan bentuk model pangsi pakai kolor.

(Semua Pengurus dan Anggota Perguruan Silat Macan Betawi diwajibkan memakai **lambang (Badge) Perguruan** di dada sebelah kiri dan **lambang (Badge) IPSI (Ikatan Perguruan Silat Indonesia)** di dada sebelah kanan).

Kemudian untuk para pemimpin masyarakat di bidang sosial di daerah Kelurahan Cilangkap, karena tidak merupakan suatu organisasi, maka tanda-tanda maupun atribut/symbol kepemimpinan tidak ada. Dahulu para guru silat, yang pernah dirintis oleh Bapak Hamdan dengan nama **Kuntau Ujung Bandul**, hanyalah merupakan perorangan, maka pemimpinnya juga tidak menggunakan tanda apapun.

4. Cara pengangkatan dan upacara

Telah menjadi suatu ketentuan, bahwa jabatan Ketua RT/RW hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun, tetapi untuk jabatan RT/RW harus berdasarkan pemilihan langsung dari warga masyarakat. Kalau untuk Ketua RT (Rukun Tetangga) dipilih langsung oleh warga masyarakat setempat, dengan mengajukan beberapa orang calon (biasanya tiga orang). Pemilihan ini disaksikan dari Unsur Kelurahan dan Ketua RW. Setelah pemilihan selesai, maka langsung disahkan dan dilantik oleh Petugas Kelurahan. Ketua-Ketua RT yang telah terpilih pada Kelurahan, terus diajak pertemuan oleh pihak Kelurahan, untuk memilih calon-calon Ketua-Ketua RW (Rukun Warga) yang jumlahnya tergantung berapa banyaknya wilayah RW yang akan dibentuk. Maka setiap satu wilayah RW ditentukan 3 (tiga) calon Ketua RW. Dari ketiga calon tersebut diadakan pemilihan, yang memilih adalah Ketua-Ketua RT dan pemuka masyarakat setempat. Setelah Ketua RW yang terpilih dalam pemilihan itu, maka terus disahkan dan dilantik oleh Camat setempat. Jabatan Ketua RW., menurut ketentuan juga hanya 3 (tiga) tahun. Tetapi ketentuan 3 (tiga) tahun ini, biasanya tidak tepat benar, karena dalam kenyataan setelah 3 (tiga) tahun banyak pula Ketua RT/RW masih tetap menjabat.

Jadi sebenarnya ketentuan 3 (tiga) tahun tersebut tidak mutlak, dalam hal ini tergantung dari Pemerintah Kelurahan setempat. Terlebih-lebih apabila pihak masyarakat masih menghendaknya, maka tidak perlu lagi

untuk segera diadakan pemilihan, karena dianggapnya hanya akan menghabiskan biaya saja. Memang para Ketua RT/RW yang lama masih berhak untuk dipilih kembali, namun untuk mengadakan pemilihan kembali harus diperhitungkan secara matang, karena akan memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Kalau yang akan terpilih tetap yang lama, maka lebih baik tidak usah diadakan. Di samping menghemat biaya, hasilnya pun juga sesuai yang dikehendaki oleh warga masyarakat. Namun demikian hal seperti itu dari pihak Ketua RW maupun Kelurahan lalu mendengarkan keluhan-keluhan atau suara-suara dari warga masyarakat. Dalam prinsipnya Ketua RT/RW harus diadakan pemilihan secara langsung dari warga masyarakat setempat. Hanya waktunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat setempat.

Hal yang demikian terjadi hampir di seluruh Wilayah Kelurahan-Kelurahan di DKI Jakarta, termasuk pula di daerah Rambutan dan Cilangkap.

Lain halnya dengan organisasi sosial yang tergabung dalam Perguruan Silat Macan Betawi. Organisasi ini tumbuh atas inisiatif dari warga masyarakat, sehingga pada setiap tiga tahun sekali diadakan pemilihan pengurus baru. Pengurus lama dapat dipilih kembali apabila anggota menghendakinya. Musyawarah dapat dianggap sah atau berlangsung apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah anggota. Kalau kurang dari separuh, musyawarah dapat ditunda. Musyawarah/rapat Pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, sedangkan musyawarah/rapat anggota diselenggarakan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu.

Susunan Pengurus yang terpilih, baru sah apabila sudah ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Umum dari Ikatan Pencak Silat Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Kemudian untuk Ketua Cabang Perguruan Silat Macan Betawi, mendapat surat tugas dari Ketua Umum, dengan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memimpin dan membina PS. Macan Betawi Cabang Jakarta Timur dengan sebaik-baiknya;
 - b. Mengadakan hubungan/pendekatan selalu dengan Pengurus IPSI Wilayah Jakarta Timur;
 - c. Mengusahakan kerjasama dengan badan-badan/organisasi-organisasi yang mengembangkan pencak silat di wilayah Jakarta Timur;
 - d. Membantu dan berhubungan dengan instansi-instansi Pemerintah baik sipil maupun Militer dalam wilayah Jakarta Timur;
 - e. Melaporkan segala kejadian kepada PS. Macan Betawi Pusat di Jakarta.
- Dalam pelantikan/upacara pengesahan Pengurus tersebut diadakan pertemuan antara Anggota dan mengundang Pengurus Pusat dan Ranting se-

bagai saksi. Dalam pertemuan/upacara pelantikan tersebut, diadakan atraksi demonstrasi silat secara perorangan maupun kelompok. Atraksi tersebut dimaksudkan untuk penghormatan kepada Pengurus Baru yang terpilih. Sampai saat ini Perguruan Silat Macan Betawi di Kelurahan Rambutan sudah diadakan penggantian Pengurus sebanyak 2 (dua) kali. Jadi Kepengurusan PS. Macan Betawi Cabang Jakarta Timur yang berkedudukan di Kelurahan Rambutan itu telah mengalami 3 (tiga) periode. Periode yang Pertama yakni 1979 – 1980, Periode Kedua 1980 – 1983, dan Periode Ketiga 1983 – 1985. Dalam Periode Kedua dan Ketiga terpilih sebagai Ketua Cabang adalah : M. Yusuf BBA.

Untuk pengangkatan para pemimpin masyarakat pedesaan di bidang sosial di Kelurahan Cilangkap, tidak secara formal. Karena para pemimpin ini hanyalah dianggap oleh masyarakat, mengingat perbuatan dalam praktek sehari-hari yang selalu menunjukkan sikap sosial terhadap warga masyarakat yang pantas diberikan pertolongan materi maupun nasehat-nasehat. Kecuali untuk Ketua-Ketua RT/RW., cara pengangkatannya sudah diatur oleh Pemerintah Kelurahan, seperti yang terdapat di Kelurahan-Kelurahan di wilayah DKI Jakarta pada umumnya. Hal ini telah diuraikan seperti di bagian depan.

Tetapi untuk para pemimpin sosial yang tumbuh atas inisiatif masyarakat tidak ada pengangkatan dan upacara secara formal. Namun demikian secara umum masyarakat mengakui atas kepemimpinan seseorang pemimpin di bidang sosial tersebut. Di dalam suatu pertemuan-pertemuan seorang pemimpin di bidang sosial selalu diperlakukan orang yang mempunyai kelebihan ilmu maupun pengalamannya, sehingga segala nasehat-nasehatnya senantiasa menjadi perhatian masyarakat. Orang yang dianggap pemimpin dalam bidang sosial ini, mempunyai sifat-sifat ramah, tidak membedakan golongan kaya maupun miskin. Dan biasa yang terjadi di Kelurahan Cilangkap ini adalah terdiri daripada orang kaya yang pernah memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Oleh karena ini pulalah yang biasanya dapat terpilih menjadi Ketua RT/RW maupun Kepala Lingkungan di daerah Kelurahan Cilangkap. Tetapi pada waktu sekarang seorang Lurah sudah diangkat berdasarkan penunjukkan dari Gubernur dan mendapat beslit (Surat Pengangkatan) seperti seorang pegawai negeri.

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Dengan terbentuknya organisasi-organisasi di bidang sosial secara formal maupun non formal, maka akan membawa pengaruh langsung maupun tidak langsung di kalangan masyarakat. Organisasi sosial yang formal seperti RT/RW, sudah jelas pengaruhnya terhadap masyarakat, yakni berkurangnya kejahatan-kejahatan maupun perbedaan-perbedaan pendapat di-

antara warga masyarakat dapat dicegah. Terciptanya rasa saling harga-menghargai hak seseorang, karena merasa hidup bermasyarakat yang mempunyai wadah bersama yakni Pemerintah Kelurahan, dengan penghubung terdekat adalah RT/RW. Sehingga RT/RW mempunyai fungsi ganda, satu diantaranya adalah sebagai jalur Pemerintah Kelurahan untuk menyampaikan tujuan pembangunan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program pembangunan tersebut. Kemudian fungsi yang lainnya adalah RT/RW merupakan tempat penyampaian pengaduan yang terdekat dari masyarakat, tentang masalah-masalah yang timbul baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Keluhan-keluhan dari masyarakat lebih cepat didengar dan cepat pula disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan. Pengaruh dan fungsi RT/RW seperti tersebut di atas sangat terasa di daerah Kelurahan Rambutan maupun Kelurahan Cilangkap. Dan memang tujuan Pemerintah Daerah DKI Jakarta membentuk organisasi sosial RT/RW adalah untuk menunjang dan melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kelurahan, dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional, melalui masyarakat pedesaan. RT/RW merupakan penghubung terdekat antara masyarakat dengan Pemerintah Formal secara struktural yang terendah adalah Pemerintah Kelurahan.

Kalau organisasi sosial RT/RW sengaja dibentuk oleh Pemerintah secara formal, tetapi ada pula organisasi sosial yang tumbuh atas swadaya masyarakat atau organisasi sosial non formal. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan, organisasi sosial yang tumbuh atas swadaya masyarakat dan mempunyai pengaruh luas adalah Perguruan Silat Macan Betawi. Organisasi ini bergerak dalam bidang olah raga dan sosial, yang banyak melibatkan para generasi muda. Pengaruh kepemimpinan dari Perguruan Silat Macan Betawi ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya Perguruan Silat ini, kenakalan remaja mudah diatasi. Keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Rambutan dapat dijaga, bahkan tidak sedikit andilnya para pemimpin Perguruan Silat Macan Betawi terhadap Pemerintah Kelurahan, karena dapat mengerahkan para siswanya untuk membantu jaga malam di wilayah Kelurahan Rambutan.

Dalam jaga malam tersebut pihak Pemerintah Kelurahan tidak mengeluarkan biaya apapun, karena gerakan jaga malam itu sudah termasuk program dari Perguruan. Program jaga malam ini tidak saja untuk wilayah Kelurahan Rambutan, tetapi juga meliputi daerah Kecamatan Pasar Rebo. Di samping untuk menjaga daerah lingkungan Kelurahan dan Kecamatan, sering pula membantu menjaga Keamanan dan Ketertiban pada Peringatan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam peringatan tersebut anggota-anggota Perguruan Silat Macan Betawi pernah mendapat tugas jaga di Senayan, Cibubur, dan juga pada waktu Pemilu tahun 1982 ikut menjaga lingkungan di daerah Kelurahan khususnya dan Jakarta pada umumnya. Anggota-anggota

Perguruan Silat Macan Betawi banyak dikenal oleh masyarakat, terutama tentang kedisiplinannya, ketegasannya, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut tidak pernah mengecewakan. Kalau ada salah satu anggota tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik cepat diambil tindakan, agar tidak merembet pada anggota yang lain. Tindakan tersebut disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Tidak semua pelanggaran ditindak dengan hukuman yang sama. Jenis-jenis tindakan atau hukuman tersebut antara lain berupa lari mengitari lingkungan, penambahan jaga malam, ataupun latihan yang diperketat dengan diawasi oleh pelatih/Ketua Perguruan. Semuanya itu untuk pembinaan dan kesadaran anggota terhadap tugas maupun kewajiban yang dibebankan. Sebab kedisiplinan salah satu anggota mencerminkan untuk seluruh Perguruan. Kalau ada anggota yang tidak disiplin dan sering melanggar peraturan, maka nama baik dari Perguruan dan dicemarkan. Oleh karena itu lebih baik anggota yang tidak disiplin atau melanggar itulah yang ditindak secara tegas. Tetapi menurut catatan dari Pengurus, belum pernah ada salah satu anggota yang berbuat tidak disiplin, bahkan setiap anggota dapat menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik dan terpuji. Kedisiplinan setiap anggota cukup tinggi, dan senantiasa menjunjung tinggi perguruan.

Demikianlah pengaruh dan fungsi organisasi Perguruan Silat Macan Betawi di daerah Kelurahan Rambutan. Sedangkan untuk organisasi sosial lainnya, kiranya belum banyak yang berpengaruh di kalangan masyarakat secara luas, karena organisasi sosial yang lain itu baru dalam tarap perintisan. Sepertinya organisasi Remaja Mesjid yang dibina oleh Karang Taruna dan saat ini di Ketua oleh Ismail Marzuki. Juga PKW dan PS. ASGO (Persatuan Sepak Bola Asem Gerowong), belum banyak pengaruhnya, karena sedang dalam perintisan.

Kemudian untuk di daerah Kelurahan Cilangkap. Di daerah ini bila dibandingkan dengan di daerah Kelurahan Rambutan, mempunyai perbedaan sosial budayanya. Untuk daerah Cilangkap masih bersifat tradisional, sedangkan di daerah Rambutan sudah banyak kena pengaruh kebudayaan dari luar. Sifat kepemimpinan di daerah ini masih sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu kesaktian yang pernah berkembang secara luas di kalangan masyarakat. Sekalipun sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, namun bagi para pemimpinnya masih banyak yang percaya terhadap kekuatan ilmu-ilmu yang dahulu pernah dipelajarinya. Maka kepemimpinan dalam bidang sosial, banyak dipengaruhi oleh pribadi-pribadi para pemimpin tersebut. Ada pemimpin yang jiwa sosialnya tinggi, tetapi ada pula pemimpin yang hanya senang dihormati saja.

Pemimpin yang jiwa sosialnya tinggi ternyata cukup banyak. Sedangkan pemimpin yang hanya senang dihormati dalam jumlah yang relatif kecil. Pemimpin yang senang dihormati ini banyak pula menolong dan berbuat baik kepada masyarakat. Tetapi pertolongan dan perbuatan baik itu mempunyai pamrih

untuk mendapatkan penghormatan, bahwa ia dapat menolong dan mempunyai banyak kekayaan. Memang pemimpin yang demikian itu dahulunya pernah menjadi tuan tanah dan orang kaya di daerah Cilangkap. Sampai saat ini masih pula mempunyai pengaruh dan juga disegani oleh masyarakat. Tetapi karena jumlahnya tinggal sedikit, sehingga tidak begitu terasa pengaruh tersebut. Apabila dibandingkan dengan para pemimpin di bidang sosial, yang benar-benar berbuat sosial, maka pengaruh dari para pemimpin yang punya pamrih tersebut tidak ada artinya. Terlebih-lebih ditunjang dengan adanya para pemimpin formal, seperti RT/RW, maka para pemimpin sosial yang tidak punya pamrih ini dapat memainkan peranan yang positif. Dengan secara pribadi para pemimpin ini dapat menggerakkan aksi sosial, misalnya dalam pengumpulan dana untuk kematian, kerja bakti dan sebagainya. Para pemimpin ini sangat dipercaya oleh masyarakat. Dia sendiri selalu menjadi contoh dalam usaha aksi sosial, dan mau ikut secara langsung dalam setiap gerakan sosial. Gerakan sosial yang pernah dilakukan antara lain mendirikan rumah secara gotong-royong untuk warga yang dipandang tidak mampu. Kemudian kerja bakti, menolong orang sakit, perkawinan, kematian dan sebagainya, dimana para pemimpin sosial yang tanpa pamrih tersebut selalu ada. Nama-nama pemimpin sosial yang sekarang masih banyak berperan di daerah Cilangkap antara lain : Bapak Usman (seorang Pensiunan) yang sekarang banyak menggerakkan kegiatan olah raga, Bapak Hamdan (bekas guru Silat, sekarang masih aktif sebagai pegawai Kelurahan Cilangkap) banyak menggerakkan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan, Ustazah Nani menggerakkan dalam bidang kesenian, dan Bapak Saring menggerakkan dalam bidang sosial politik. Tetapi sayang sekali bahwa semua kegiatan sosial tersebut belum terorganisir secara baik, dan belum mempunyai nama apapun. Hal ini memang wajar dan dapat dimengerti, karena daerah Kelurahan Cilangkap baru terbuka belum lama ini, yakni sejak adanya jalan lingkungan yang menembus daerah pedesaan di daerah Kelurahan Cilangkap.

Pengaruh dan fungsi para pemimpin di bidang sosial ini sangat besar, karena dengan munculnya beberapa macam kegiatan seperti tersebut di atas, keadaan Kampung Cilangkap menjadi hidup, tidak banyak terjadi keributan dan kenakalan remaja. Ketertiban dan keamanan dapat dikendalikan. Tidak ada kejahatan-kejahatan yang berarti, serta tidak pernah ada perbuatan amoral, asusila, dan lain sebagainya. Hal ini berkat adanya saling pengertian antar warga masyarakat.

BAB V

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI

A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN EKONOMI

Wewenang otonom sebenarnya ialah merupakan wewenang asli warga masyarakat untuk berpartisipasi secara sadar dengan Pemerintah dalam memelihara dan menjaga kepentingan yang bersifat vital. Terutama merupakan wewenang seluruh warga masyarakat hukum untuk menentukan norma-norma yang wajib ditaati sendiri baik oleh seluruh warga desa yang bersangkutan maupun oleh Pemerintah dan Pamong Desanya. Dalam hubungan ini salah satu faktor yang penting guna menciptakan suasana yang menguntungkan bagi tercapainya tujuan pembangunan dengan berlandaskan partisipasi warga masyarakat antara lain :

- mengembangkan partisipasi warga masyarakat desa dalam arti formal dan material, sehingga merupakan kekuatan otoaktifitas yang berdaya guna dalam memecahkan kepentingan bersama warga desa yang bersangkutan, ialah pengorganisasian dan institusionalisasi kepentingan rakyat dalam organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial dan lain-lain;
- pembentukan dana masyarakat secara gotong-royong, mengingat bahwa pembangunan tidak selalu harus dibiayai oleh Pemerintah, tetapi harus pula berdasarkan pada kesediaan warga masyarakat yang bersangkutan untuk menyediakan dana-dana yang diperlukan;
- pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai suatu bentuk kerjasama dan sistem untuk menggalang partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan bersama di bidang sosial dan ekonomi, seperti RT/RW, Koperasi, PKK, dan sebagainya. (Sumber Saparin, 1977; 44, 45).

Di Wilayah DKI Jakarta organisasi dalam kegiatan ekonomi di dalam masyarakat pedesaan, sudah mulai dirintis sejak tahun 1965, dimana RT/RW dapat berfungsi sebagai penyalur bahan-bahan pokok untuk kepentingan sehari-hari. Tetapi fungsi RT/RW tersebut banyak disalah gunakan oleh salah satu golongan politik, sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak tercapai. Kemudian mulai digalakkan lagi Lembaga Sosial Desa, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.81 Tahun 1971, dan Instruksi Men-

dagri No.5 Tahun 1972, serta Surat Menteri Dalam Negeri No.DD 136/PMD/V-2/72, maka Kelurahan-Kelurahan di DKI Jakarta dianjurkan untuk melaksanakan program pembangunan dari Pemerintah, terutama pembangunan masyarakat pedesaan. Untuk melaksanakan program tersebut, dimulailah pembinaan :

- Pelaksanaan PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga);
- Pelaksanaan program pembangunan masyarakat pedesaan di bidang BUUD/KUD, KB, Pramuka dan pembangunan prasarana ekonomi/pertanian/pendidikan/kesehatan dan lain-lain baik swadaya atau dengan bantuan Pemerintah.

Dalam kaitan tersebut di atas, maka di Kelurahan Rambutan berusaha menghidupkan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perekonomian bagi masyarakat pedesaan. Sistem pertanian diintensifkan, yakni dengan cara menanam pohon buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain pada pekarangan rumahnya masing-masing. Bagi yang mempunyai pekarangan yang agak luas, dianjurkan agar mengusahakan tanah tersebut sebagai perkebunan **hortikultura**, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di samping mengintensifkan tanah pekarangan yang ada, juga dibentuk Koperasi Unit Desa, untuk membantu permodalan bagi pedagang kecil. Untuk usaha ini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, tetapi tetap harus diusahakan. Hambatan yang timbul adalah kurangnya permodalan, dan juga sistem administrasi yang belum teratur. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi juga masih rendah. Oleh karena itu dari pihak Pemerintah Kelurahan terus-menerus mengadakan pembinaan masyarakat, untuk membangkitkan rasa kerjasama melalui kehidupan masyarakat, sesuai dengan cita-cita nasional dalam program pembangunan.

Untuk di daerah Kelurahan Cilangkap, kegiatan yang bergerak dalam bidang perekonomian masih banyak dilaksanakan dengan cara tradisional. Tanah pertanian adalah sebagai sumber kehidupan yang sangat potensial. Oleh karena itu dari tanah pertanian inilah Pemerintah Kelurahan dapat membentuk suatu wadah yang dapat menghimpun kegiatan warga masyarakat yang dapat meningkatkan tarap kehidupan. Dalam menggerakkan kegiatan di bidang perekonomian ini tidak sedikit peranan suatu organisasi formal maupun non formal. Organisasi RT/RW yang langsung dapat berhubungan dengan Pemerintah Kelurahan, dapat menggerakkan kegiatan di bidang perekonomian itu. Kemudian ditunjang dengan adanya kegiatan Berkoperasi Unit Desa, maka mempermudah para petani untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kepentingan pertanian.

Dengan demikian sistem pertanian di daerah Cilangkap, berangsur-angsur dapat berubah dari sifat **statis tradisional** menjadi **modernisasi** dalam pemakaian bibit maupun pemupukan.

Pengertian modernisasi ini bukan berarti penggantian secara total dalam pemakaian alat-alat pertanian. Karena alat-alat pertanian masih menggunakan alat-alat tradisional dengan banyak menggunakan tenaga manusia. Hanya sistemnya saja yang berubah. Namun demikian dari sedikit demi sedikit para petani di daerah Cilangkap dapat mengenal sistem pertanian yang modern.

1. Nama Organisasi

Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi di daerah Kelurahan Rambutan belum banyak dibentuk. Adanya Koperasi Unit Desa, juga baru dalam tarap perintisan yang belum banyak menghasilkan perubahan-perubahan di kalangan masyarakat. Kegiatan di bidang ekonomi di daerah Kelurahan Rambutan masih banyak bersifat **individu** (perorangan), dalam bentuk perdagangan dengan modal kecil. Para pedagang kecil ini, masih enggan untuk menambah modalnya dengan meminjam kepada Koperasi, karena takut tidak dapat mengembalikannya tepat pada waktunya. Terlebih-lebih masyarakat Kelurahan Rambutan yang termasuk masih fanatik itu, dalam soal pinjam-meminjam selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Sebab pinjam-meminjam berarti membuat suatu perjanjian dan setiap perjanjian harus ditepati. Kalau tidak dapat tepat pada waktunya berarti membuat dosa. Sehingga untuk tidak banyak membuat dosa, maka soal pinjam-meminjam ini sedapat mungkin dihindari. Oleh karena itu pada saat ini gerakan perkoperasian belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada saat ini para pedagang di daerah Kelurahan Rambutan, belum terorganisir secara teratur. Sebagian besar masih bergerak sendiri-sendiri, ada yang membuka warung makanan, perbengkelan, maupun pedagang buah-buahan. Untuk mendapatkan modal tambahan, para pedagang biasanya melakukan sistem **arisan** baik antara pedagang maupun antar warga masyarakat. Dalam arisan ini ada yang secara mingguan, tengah bulanan, dan bulanan. Untuk arisan ini biasanya dikoordinir oleh Ketua RT/RW ataupun tokoh agama yang banyak melakukan kegiatan perdagangan. Dengan sistem arisan tersebut, akhirnya dapat dibina rasa kekeluargaan, persahabatan, maupun gotong-royong.

Cara-cara yang terdapat di daerah Rambutan ini, hampir mirip dengan cara-cara yang ditempuh oleh warga masyarakat di daerah Kelurahan Cilangkap. Hanya bedanya bahwa masyarakat di Kelurahan Rambutan masih fanatik terhadap agama, sedangkan masyarakat di daerah Kelurahan Cilangkap tidak fanatik terhadap agama. Gairah untuk berkoperasi di daerah Cilangkap sudah mulai timbul, dan hasilnya pun sudah dapat dirasakan oleh masyarakat petani di Cilangkap. Misalnya dalam mendapatkan tambahan modal dan bahan untuk kebutuhan pertanian, banyak diperoleh dari Koperasi Unit Desa. Dan cara pengembaliannya pun juga

tidak mengalami hambatan-hambatan karena ternyata para petani di daerah Cilangkap mempunyai kedisiplinan yang tinggi dalam pengembalian kredit atau pinjaman koperasi. Oleh karena itu perkoperasian akan mudah dikembalikan di daerah Cilangkap daripada di daerah Rambutan.

Kemudian bagi masyarakat pedagang di daerah Cilangkap, tidak begitu jauh berbeda dengan masyarakat petaninya. Yakni di dalam menambah permodalan juga banyak yang mengambil dari Koperasi. Cara pengembalian-nyapun juga tidak mengalami hambatan-hambatan, karena sebagian para pedagang itu terdiri dari para petani. Jadi para petani di daerah Cilangkap, biasa disebut petani dan juga pedagang. Barang-barang yang didagangkan kebanyakan hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain dari hasil pertanian. Tetapi untuk lumbung Desa, sampai saat ini belum terbentuk. Sistem arisan juga sudah berjalan secara baik. Bahkan dahulu pernah diadakan arisan hasil bumi atau hasil pertanian. Tetapi pada saat ini sudah tidak ada lagi arisan hasil bumi tersebut dan yang ada adalah arisan uang atau barang-barang perabotan rumah tangga. Jadi pada saat ini organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi, sama dengan yang ada di daerah Kelurahan Rambutan, yakni Koperasi Unit Desa (KUD), dan Arisan Kampung.

2. Tempat dan kegiatan

Tempat dan kegiatan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi di daerah Kelurahan Rambutan maupun di daerah Cilangkap, masih banyak dikoordinir oleh Pemerintah Kelurahan. Sepertinya Koperasi Unit Desa sekalipun permodalannya banyak melibatkan dari berbagai pihak, tetapi tentang administrasinya masih banyak ditangani oleh Aparat Pemerintah Kelurahan. Cara operasional kegiatan perkoperasian ini, terutama kemasyarakatan pedesaan, para petani, dan pedagang kecil yang banyak menggunakan identitas Kartu Penduduk dan wilayah RT/RW. Dengan demikian akan memudahkan untuk penagihan maupun pemanggilan bagi yang tidak sempat datang sendiri ke kantor Koperasi. Memang dari pihak Koperasi Unit Desa ada petugas keliling, di samping bertugas untuk mencari nasabah, juga bertugas untuk menagih bagi yang tidak sempat ke Kantor. Tetapi para petugas keliling ini menggunakan identitas yang jelas dan sudah dipercaya oleh masyarakat. Sehingga tidak perlu diragukan lagi tentang kejujurannya. Sebab apabila petugas keliling tersebut tidak berbuat jujur, akan menyulitkan dirinya sendiri. Sanksinya adalah dipecat dari Koperasi, dan selamanya tidak akan mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Oleh karena itu para petugas tersebut jarang sekali yang berani melakukan penyelewengan. Untuk membina para petugas ini sering diadakan di Balai Desa. Di Kelurahan Rambutan pada saat ini ada dua buah Balai Desa. Satu diantaranya terletak di RW.01 dan yang satu lagi berdampingan dengan kantor Kelurahan Rambutan. Sedangkan untuk di daerah Kelurahan Cilangkap,

pada saat ini sedang direncanakan Pembangunan Balai Desa. Selama ini untuk pembinaan warga masyarakat dan para petugas Koperasi banyak dilakukan di rumah penduduk maupun di kantor Kelurahan Cilangkap. Kantor Kelurahan Cilangkap yang permanent sedang dalam penyelesaian pembangunannya. Saat ini juga masih menempati rumah milik penduduk.

Mengenai kegiatan ekonomi yang digalakkan melalui **arisan** kampung di Kelurahan Rambutan maupun di Kelurahan Cilangkap, menggunakan tempat secara pindah-pindah, saling bergantian di rumah peserta arisan. Di samping itu sering pula diadakan di kantor-kantor RW maupun Ketua RT yang sekiranya dapat menampung sebanyak peserta arisan. Biasanya di dalam arisan tersebut juga diselingi acara lain yang bersifat kekeluargaan. Sepertinya ceramah agama, ceramah Keluarga Berencana, pengajian, dan sebagainya, yang kesemuanya ditujukan untuk menjalin rasa kekeluargaan antar warga masyarakat.

3. Tujuan yang akan dicapai

Arah dan tujuan pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah digariskan dalam Pola Dasar Repelita DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Arah pembangunan kota Jakarta jangka panjang, ditujukan menjadikan Jakarta sebagai kota Pusat Pemerintahan, dengan pengembangan kehidupannya diarahkan pada kota dengan kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, pariwisata dan kebudayaan;
- b. Tujuan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta :
 - Menerapkan dan mewujudkan tujuan pembangunan Nasional di Daerah;
 - Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui usaha-usaha dan langkah-langkah yang berencana, terarah dan terpadu dalam memecahkan masalah-masalah pokok yang relevan dihadapi oleh rakyat dan masyarakat Jakarta dalam proses pembangunan;
 - Meningkatkan pemanfaatan modal dasar Pembangunan di Daerah;
 - Membina dan mengembangkan terus-menerus nilai-nilai kemasyarakatan yang menunjang proses pembangunan dan norma-norma kehidupan yang positif;
 - Meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan. (Buku I, Pemerintah DKI Jakarta, REPELITA III, 2 – 6).

Langkah pembangunan yang pertama kali bertitik tolak untuk meningkatkan sebagai usaha mengurangi adanya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan sebagainya, maka diusahakan terciptanya iklim yang baik yang dapat dimulai dari daerah pedesaan. Karena sebagian besar kelompok penduduk di daerah pedesaan Jakarta masih tergolong sangat miskin,

bodoh dan terbelakang, dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mereka adalah penganggur atau setengah penganggur.
Kalaupun ada pekerjaan maka sifatnya tidaklah memberi pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang wajar, mereka ini banyak terdapat di daerah Jakarta;
- b. Mereka berusaha sendiri, seringkali denan menyewa peralatan dari orang lain. Sifat usaha yang kecil dan terbatas karena ketiadaan modal, mereka inipun banyak terdapat di Jakarta;
- c. Untuk sebagian besar di Jakarta kelompok miskin, dan terbelakang ini terdapat di daerah pedesaan/perkampungan dan pinggiran kota.

Hal-hal tersebut di atas tidak mudah diberantas, karena sangat terikat dengan kehidupan sehari-hari, adat kebiasaan dan telah berjalan sangat lama. Oleh karena itu cara memberantasnya harus dengan bertahap yang dapat dimulai dengan adanya penyediaan sarana pembangunan disegala bidang. Di bidang perekonomian masyarakat pedesaan, terutama meningkatkan tarap hidup masyarakat dari sifat statis tradisional menuju ke arah dinamis rasionalistis.

Untuk di daerah Kelurahan Rambutan, pada saat ini kehidupan masyarakatnya boleh dikatakan telah hidup dalam keadaan ekonomi yang baik, bersifat dinamis rasionalistis. Organisasi kemasyarakatan daerah pedesaan di Kelurahan Rambutan, tampak mengalami modernisasi mengikuti daerah perkotaan. Sepertinya adanya Balai Desa, yang sering dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan warga masyarakat, yang banyak membicarakan masalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Perkoperasian, arisan, industri rumah tangga, dan perdagangan, banyak menjadi bahan pembicaraan dalam pertemuan di Balai Desa tersebut. Tujuan daripada kegiatan tersebut adalah untuk menjalin rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, adalah melalui organisasi sosial ekonomi yang tidak membedakan suku bangsa maupun agama. Dan untuk agama, memang sejak semula masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan mempunyai kefanatikan terhadap agama. Namun bukan berarti bahwa dalam bidang ekonomi, selalu mengkaitkan dengan keagamaan tersebut. Dalam kenyataan di daerah Kelurahan Rambutan masyarakatnya, terdiri dari berbagai suku bangsa dan ada juga yang saling harga menghargai. Hal ini disebabkan, oleh karena daerah Kelurahan Rambutan termasuk daerah perkotaan dan fasilitas prasarana dan sarana perekonomian telah lengkap.

Berbeda dengan di daerah Kelurahan Cilangkap, sekalipun pada saat ini sudah mulai masuk jaringan komunikasi, sebagai sarana daerah perkotaan, namun masyarakatnya masih belum dapat merubah cara-cara hidup seperti daerah pedesaan. Adat kebiasaan dan sifat statis tradisional, yang

telah lama merupakan ciri-ciri khas dari kehidupan masyarakat di Kelurahan Cilangkap masih banyak terlihat disana-sini. Kegiatan yang menyangkut dalam bidang ekonomi banyak dilaksanakan masih bersifat tradisional, yakni mengolah tanah yang ada untuk usaha pertanian. Oleh karena itu organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi masih sangat terbatas dengan sifat hidup mereka. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan rasa kegotong-royongan, solidaritas, dan rasa persaudaraan, kekeluargaan antar warga masyarakat. Cara hidup kolektif memang telah terjalin sejak lama, dan merupakan ciri khas daripada masyarakat pedesaan pada umumnya. Hidup secara demikian memang berkembang baik di daerah Kelurahan Cilangkap. Dengan demikian untuk mencapai tujuan seperti tersebut di atas, kiranya tidak mengalami hambatan. Namun untuk meningkatkan tarap hidup seperti layaknya perekonomian bagi masyarakat perkotaan masih memerlukan waktu yang cukup lama.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

Hubungan antara pemimpin masyarakat non formal dengan Pemerintah Kelurahan di tiap-tiap Kelurahan di DKI Jakarta tidak selalu sama. Hal ini tergantung pendekatan Aparat Pemerintah tersebut kepada masyarakat. Hubungan Aparat Pemerintah dengan pemimpin masyarakat non formal tersebut akan lebih akrab apabila Aparat Pemerintah dapat menunjukkan sikap yang dapat diterima oleh masyarakat.

Memang tidak mudah untuk berbuat demikian, bahkan salah-salah Aparat Pemerintah tersebut akan dijauhi oleh para pemimpin masyarakat non formal, apabila tidak dapat menunjukkan sikap yang positif dalam kalangan masyarakat. Dalam hal ini faktor keteladaan sangat menentukan. Oleh karena itu Aparat Pemerintah Kelurahan harus tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Dan segera mengambil sikap ataupun tindakan yang tepat. Sikap yang demikian inilah yang akan selalu didukung oleh masyarakat dan kemudian pemimpin masyarakat non formal akan memberikan bantuan pemikiran maupun tenaga dengan ikhlas.

Di daerah Kelurahan Rambutan, sudah sejak lama terdapat hubungan yang baik antara Aparat Pemerintah Kelurahan dengan tokoh-tokoh masyarakat, maupun penduduknya. Hal ini memudahkan lancarnya tugas-tugas Pemerintah Kelurahan, dan sebaliknya masyarakat akan mendapat pelayanan dari Pemerintah Kelurahan secara baik dan cepat. Di bidang perekonomian Pemerintah Kelurahan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan, yakni dengan jalan mengadakan penataran-penataran tentang gerakan berkoperasi. Dalam penataran tersebut ditekankan pentingnya berkoperasi, dan cara-cara administrasi koperasi. Yang diundang hadir dalam penataran tersebut adalah para tokoh masyarakat, Ketua-Ketua RT/RW dan

warga masyarakat yang diatur per wilayah RT/RW.

Di dalam pelaksanaannya sangat dianjurkan, bahwa untuk tiap Wilayah RW dapat mendirikan satu buah Koperasi, dan juga digerakkan perkumpulan-perkumpulan arisan, serta kegiatan-kegiatan ketrampilan yang dapat digunakan untuk menambah kesejahteraan warga masyarakat maupun keluarga masing-masing. Sistem kepemimpinan Pemerintah Kelurahan lebih banyak memberikan pembinaan, sedangkan para pemimpin masyarakat banyak yang memberikan contoh dan penggerak langsung ke lapangan. Bagi warga masyarakat yang ekonominya kuat sangat diharapkan kesadarannya untuk hidup bergotong-royong melalui perkoperasian, pertemuan-pertemuan antar warga, dan ikut berperanserta dalam kegiatan arisan. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan permodalan bagi yang kehidupannya berdagang, tetapi dengan modal kecil. Jadi orang yang ekonominya lemah mendapat bantuan tidak secara langsung dari orang ekonominya kuat, Di samping itu rasa kekeluargaan dapat ditumbuhkan, dan dalam satu wadah masyarakat dalam bentuk organisasi koperasi atau organisasi lainnya.

Di daerah Kelurahan Cilangkap sistem seperti tersebut di atas belum dapat berjalan baik, karena secara organisasi sedang dalam perintisan. Kesadaran masyarakat untuk berorganisasi belum tumbuh dan pengertian akan arti, fungsi dan peranan organisasi masih sangat rendah. kehidupan bermasyarakat secara kolektif tumbuh dengan alamiah, tanpa digerakkan oleh pemimpin formal maupun non formal. Oleh karena itu seakan-akan kehidupan mereka telah menggunakan suatu sistem organisasi di dalam masyarakat pedesaan. Cara-cara hidup bergotong-royong telah lama berjalan secara alamiah, dan tokoh masyarakat secara non formal telah dianggap sebagai penggeraknya. Segala sesuatu yang diperintahkan selalu diturut oleh warga masyarakat. Karena tokoh masyarakat tersebut sudah terjalin hubungan secara baik dengan pihak Pemerintah Kelurahan. Maka tidak disanksikan lagi sifat dan perbuatannya, bahkan mendapat sambutan baik oleh warga masyarakat. Pemerintah Kelurahan dapat melalui jalur pemimpin non formal ini dalam menggalakkan kegiatan di bidang ekonomi.

1. Syarat-syarat dan faktor pendukung

Pemimpin formal seperti Lurah dan Aparatnya, telah diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Pemerintahan Di Daerah berdasarkan perundang-undangan, tetapi untuk memimpin non formal tidak ada ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman secara **mutlak**. Persyaratan untuk menjadi Lurah di DKI Jakarta harus seorang pegawai pemerintah, dan begitu pula Aparat Kelurahan, juga telah diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Oleh karena itu segala sesuatu yang datangnya dari pihak Pemerintah Kelurahan, merupakan program-program yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. Faktor pendukung untuk

menjadi Lurah, biasanya diambilkan dari orang yang bersuku bangsa Betawi, meskipun tidak menjadi persyaratan mutlak. Kalau jaman dahulu, sebelum dengan sistem penunjukan oleh Gubernur berdasarkan ranking kepegawaian, seorang yang dapat dicalonkan adalah dari tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya, dengan persyaratan harus orang terpandang dan kaya. Tetapi pada saat ini persyaratan yang demikian itu sudah tidak berlaku lagi. Seorang Lurah pada saat ini adalah sudah berstatus pegawai pemerintah dan di Kelurahan Rambutan telah beberapa kali selalu dari pegawai yang beragama Islam. Hal ini ada kemungkinan hanya secara kebetulan saja. Karena tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa Lurah di Kelurahan yang masyarakatnya fanatik Islam Lurahnya juga harus beragama Islam. Tetapi seandainya ranking tertinggi dari Aparat Kelurahan tersebut beragama lain, maka tidak ada salahnya orang tersebut dapat diangkat sebagai Lurah.

Hal yang seperti tersebut di atas, juga terjadi di daerah Cilangkap. Sejak tidak adanya sistem pemilihan Lurah secara langsung dari warga masyarakat, maka syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Lurah adalah sistem penunjukan berdasarkan ranking kepegawaian di dalam Pemerintah Kelurahan di Cilangkap. Biasanya Wakil Lurah merupakan ranking yang tertinggi di Kelurahan tersebut, maka seandainya ada penggantian Lurah, Wakil Lurah itulah yang mendapat penunjukan dari Gubernur untuk diangkat menjadi Lurah.

Untuk menjadi pemimpin masyarakat pedesaan non formal, sebenarnya seperti halnya di Kelurahan Rambutan yakni tidak ada ketentuan-ketentuan yang mutlak. Biasanya seorang pemimpin masyarakat dalam bidang ekonomi, hanya berdasarkan kenyataan sehari-hari bahwa mereka atau seseorang dapat menunjukkan kemampuan memimpin dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Faktor pendukung untuk dianggap sebagai pemimpin non formal, juga tidak ada ketentuan-ketentuan secara mutlak. Namun telah menjadi kebiasaan, bahwa orang yang kaya dan berjiwa sosial akan mudah dianggap sebagai pemimpin masyarakat. Segala perkataan dan perbuatannya selalu diikuti oleh masyarakat. Gerakan untuk meningkatkan hasil pertanian, sudah digerakkan melalui jalur pemimpin non formal ini, sekalipun dari Pemerintah Kelurahan tidak kecil peranannya dalam mengadakan pembinaan warga masyarakat. Namun di dalam praktek pelaksanaannya para pemimpin non formal, lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat.

2. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban bagi para pemimpin non formal dalam bidang ekonomi, sangat tergantung dari keadaan Kelurahan setempat. Untuk di Kelurahan Rambutan para pengurus Koperasi, mempunyai hak mendapat-

kan keuntungan dan imbalan yang telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Namun demikian tidak secara mutlak hak tersebut, dapat dinikmati oleh para pengurus, bahkan para pengurus dibebani tanggung jawab mencari permodalan, apabila masih dianggap perlu. Sedangkan hak mendapatkan keuntungan sama dengan anggota-anggota lainnya. Kemudian juga dijelaskan bahwa perkoperasian maju dan mundurnya tergantung daripada para anggota-anggotanya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Sepertinya kewajiban membayar iuran, jasa, dan lain sebagainya, di samping kesadaran bagi anggota-anggotanya yang harus memenuhi pembayaran simpan-pinjam tepat pada waktunya.

Gerakan perkoperasian ini memang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena masih banyak diantara anggota-anggota yang belum dapat memenuhi kewajiban-kewajiban seperti yang telah ditentukan. Namun demikian gerakan koperasi ini sudah dapat dikatakan telah hidup di kalangan masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan.

Tentang kemajuan **arisan** kampung seperti yang telah disinggung di bagian depan, ternyata sudah dapat berjalan secara baik. Di tiap-tiap wilayah RW telah dapat didirikan kegiatan arisan tersebut. Arisan ini berbentuk uang, sekalipun jumlahnya tidak banyak. Yang penting bahwa setiap waktu yang sudah ditentukan ada pertemuan antar warga. Kesadaran untuk membayar arisan dari tiap-tiap peserta telah ada. Oleh karena itu tujuan yang akan dicapai, yakni sebagai suatu cara untuk menjalin persaudaraan dan kekeluargaan dapat diharapkan. Hak dan kewajiban setiap peserta tidak ada perbedaan. Besarnya uang arisan telah ditentukan, dan sistem penarikan telah diatur dengan sebaik-baiknya.

Sistem penarikannya diatur dengan sistem **kocokan** yang setiap peserta dituliskan nama atau tanda-tanda lain sebanyak peserta yang ada. Jadi diatur dengan seadil-adilnya, tidak ada perbedaan diantara peserta arisan. Cara arisan inilah yang paling mudah untuk menjalin persaudaraan dan kekeluargaan antar warga masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan. Bila dibandingkan dengan di daerah Kelurahan Cilangkap, maka cara pengaturan hak dan kewajiban para pemimpin dan anggota peserta koperasi maupun arisan jauh lebih baik di daerah Kelurahan Rambutan. Untuk di Kelurahan Cilangkap Koperasi baru dalam tarap perintisan. Oleh karena itu hak dan kewajiban para pengurus dan anggota-anggotanya belum dirumuskan secara terperinci. Hanya para pengurusnya ada usaha dan kemauan karena untuk menegakkan berdirinya sebuah koperasi. Sedangkan anggota-anggotanya masih belum melaksanakan kewajiban secara baik. Hal ini dapat dimengerti karena masyarakat Cilangkap telah lama hidup dalam keadaan statis.

Jadi untuk membangkitkan hidup secara organisasi, banyak mengalami

hambatan-hambatan. Apabila hak dan kewajiban ditentukan secara tegas, maka mereka belum dapat mengerti. Dengan demikian para pemimpin formal maupun non formal, masih terus-menerus mengadakan pembinaan dan memberikan pengertian-pengertian tentang perkoperasian. Hal ini masih memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan cara pendekatan kepada warga masyarakat, adalah satu-satunya langkah yang paling tepat untuk memperkenalkan pengertian dan tujuan koperasi tersebut. Hak dan kewajiban para pemimpin dalam bidang ekonomi adalah untuk mengatur dan mempersiapkan sistem administrasi perkoperasian secara baik. Dengan cara mengadakan pembinaan secara terus-menerus, maka masyarakat akan mengerti pentingnya berkoperasi maupun berorganisasi. Setiap organisasi mempunyai pembagian tugas masing-masing. Kemudian para pengurus dan anggota-anggotanya ada hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Tetapi untuk di daerah Kelurahan Cilangkap, pembagian secara tegas tersebut baru akan disusun, sehingga pada saat ini yang dipergunakan untuk menggerakkan koperasi masih menggunakan rasa gotong-royong secara tradisional, yang berazaskan kekeluargaan hidup bermasyarakat.

Adapun mengenai kegiatan di bidang ekonomi yang lain dapat ditempuh melalui **arisan** kampung. Pada saat ini arisan kampung belum dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Tidak setiap wilayah RW terdapat arisan kampung itu. Maka melalui para pemimpin formal maupun non formal, banyak yang memberikan contoh untuk mengikuti arisan dan cara penarikannya dengan sistem kocokan. Seperti halnya dengan di Kelurahan Rambutan. Setiap peserta arisan nama-namanya di daftar atau ditulis dengan kertas, kemudian kertas digulung dan dimasukkan ke dalam gelas atau kaleng yang diberi lubang untuk ke luar kertas gulungan itu. Bagi siapa yang namanya ke luar dalam kertas gulungan tersebut, maka dialah yang mendapat giliran menarik arisan. Setiap peserta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Waktu arisan diharapkan semua peserta dapat hadir dan penarikan dilakukan di depan para peserta. Yang mengocok ditunjuk orang lain yang **netral** (yang tidak ikut arisan atau yang sudah mendapat giliran menarik), agar tidak terjadi kecurangan. Arisan biasanya berupa uang atau hasil bumi, yang besarnya arisan setiap peserta sama banyak.

3. Atribut / Simbol kepemimpinan

Baik pemimpin formal maupun non formal masyarakat pedesaan dalam bidang ekonomi, di Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap tidak pernah menggunakan **atribut/Simbol-simbol** tertentu. Kalau Lurah dan Aparat Pemerintah Kelurahan, telah diseragamkan pakaian kedinasannya, seperti pegawai pemerintah di DKI Jakarta lainnya. Yakni menggunakan seragam **drill kuning** dengan lambang DKI Jaya. Tetapi para pemimpin non

formal, tidak ada keharusan berpakaian seragam, sebab mereka bukan berstatus pegawai pemerintah, melainkan hanya atas dasar mendapat pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat. Surat-surat piagam pun tidak ada, tetapi dalam praktek sehari-hari telah dikenal oleh masyarakat. Kalau para petugas Koperasi Unit Desa sudah ada rencana untuk diseragamkan, namun sampai saat ini masih belum dapat terlaksana, dengan pertimbangan, bahwa dana yang ada masih difokuskan untuk permodalan.

4. Cara pengangkatan dan upacara

Para pemimpin masyarakat pedesaan di bidang ekonomi, baik pemimpin formal maupun non formal di Kelurahan Rambutan dan Cilangkap ada kesamaannya. Kalau Lurah dan Aparat Pemerintah Kelurahan diangkat oleh Gubernur dan mendapat Surat Keputusan pengangkatan secara formal. Lurah terlebih dulu dilantik oleh Walikota atas nama Gubernur, sedangkan Aparat Pemerintah Kelurahan tidak ada pelantikan atau upacara. Cara yang demikian ini sudah diatur oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Untuk pemimpin non formal, tidak ada pengangkatan dan upacara secara formal. Pemimpin non formal dianggap sebagai pemimpin berdasarkan praktek sehari-hari yang banyak melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi. Hal ini dilihat dari kemampuan cara mengemukakan pendapat dan kewibawaannya. Para pemimpin non formal di Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap sangat dekat dengan Pemerintah Kelurahan. Oleh karena itu tidak ada hal-hal yang diragukan terhadap mereka. Para pemimpin non formal ini banyak pula terpilih sebagai Ketua-Ketua RT/RW. Dan untuk Ketua-Ketua RT/RW ini masih menggunakan sistem pemilihan langsung dari warga masyarakat. Setelah Ketua RT/RW terpilih oleh warga masyarakat, maka dilantik oleh Lurah atau Aparat Kelurahan atas nama Lurah. Meskipun secara struktural dalam Pemerintah Kelurahan organisasi RT/RW tidak termasuk dalam Struktur Organisasi, namun secara formal diadakan pelantikan, karena dalam praktek banyak membantu dalam tugas-tugas Pemerintah Kelurahan. Sedangkan pemimpin non formal lainnya tidak secara langsung dan terus menerus membantu Pemerintah Kelurahan.

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG EKONOMI DALAM MASYARAKAT

Di daerah DKI Jakarta para pemimpin formal maupun non formal sangat menentukan dalam kehidupan di kalangan masyarakat. Perkembangan masyarakat di wilayah DKI Jakarta sangat pesat mengikuti gerak dinamika perkembangan kota yang dipersiapkan sebagai kota Metropolitan. Akan tetapi dengan percepatan perkembangan daerah perkotaan, melalui pembangunan di segala bidang itu, ternyata untuk di daerah pedesaan masih banyak **ketim-**

pangan-ketimpangan yang harus dicarikan jalan pemecahan secara khusus. Ketimpangan-ketimpangan tersebut antara lain, belum siapnya masyarakat di daerah pedesaan pedalaman atau pinggiran kota untuk berpikir secara dinamis rasional. Cara pemikiran mereka masih banyak diliputi berpikir statis tradisional. Pada mulanya mereka dibayang-bayangi rasa khawatir dengan adanya Proyek Perbaikan Kampung yang terkenal dengan nama Proyek Mohammad Husni Thamrin. Karena dalam pelaksanaa proyek tersebut sudah pasti akan menggusur daripada sebagian dari tanah milik penduduk. Dan akibat adanya penggusuran itu, ada kemungkinan diantara warga masyarakat, terpaksa ada yang kehilangan tempat tinggal. Sekalipun masih ada sangat dikawatirkan tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat tinggal, karena sangat sempit bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Hal-hal yang demikian itulah bayangan yang timbul dalam pemikiran masyarakat pedesaan pada umumnya, terutama bagi penduduk aslinya yakni suku bangsa Betawi. Tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Daerah DKI Jakarta cukup bijaksana.

Segala sesuatu telah diperhitungkan, sehingga hanya sebagian kecil warga masyarakat Jakarta yang merasa dirugikan. Ternyata akibat adanya Proyek Perbaikan Kampung mempunyai pengaruh yang cukup luas. Bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat menuju kepada kehidupan yang lebih baik.

Di daerah Kelurahan Rambutan yang sebagian besar masyarakatnya terdiri dari suku bangsa Betawi menerima dengan baik adanya Proyek Perbaikan Kampung itu. Hal ini disebabkan karena pemimpin masyarakat baik formal maupun non formal mempunyai pengaruh dan berfungsi secara baik di kalangan masyarakat. Di samping para pemimpin formal dan non formal mempunyai pengaruh dan berfungsi secara baik, dari pihak masyarakat sendiri telah timbul kesadaran akan pentingnya program perbaikan kampung tersebut. Kesadaran masyarakat ini timbul, mengingat letak daerah Kelurahan Rambutan yang sangat berdekatan dengan daerah perkotaan, sehingga dari hubungan yang cepat melalui jalur lalu lintas perekonomian membawa pengaruh yang sangat positif dalam perkembangan perkotaan. Pada saat ini untuk daerah Kelurahan Rambutan boleh dikatakan sudah sejajar dengan daerah perkotaan di Jakarta pada umumnya. Sarana dan prasarana untuk daerah perkotaan sudah terdapat di daerah Kelurahan Rambutan. Tetapi kesemuanya itu tidak dapat ditinggalkan adanya pengaruh dan fungsi daripada para pemimpin formal dan non formal yang ada di daerah Kelurahan Rambutan. Pemimpin formal yang terdiri dari Pemerintah Kelurahan bersifat sebagai pembina masyarakat secara langsung, banyak memberikan pengertian-pengertian kepada warga masyarakat sebelum adanya pelaksanaan Proyek Perbaikan Kampung. Para tokoh masyarakat yang merupakan pemimpin non formal

banyak membantu proses pembinaan warga masyarakat, sehingga pihak masyarakat cepat menerima program Perbaikan Kampung itu. Karena di dalam pembinaan warga masyarakat tersebut selalu ditekankan, bahwa adanya perbaikan kampung bertujuan untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, maka sudah dimengerti oleh masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan. Jadi program perbaikan kampung hasilnya untuk kepentingan masyarakat banyak, dan memang masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan sangat memerlukan adanya sarana dan prasarana perekonomian yang lebih baik, antara lain jalan dan alat angkut yang sesuai dengan daerah perkotaan. Dengan adanya jaringan komunikasi yang lancar dan alat angkut yang memadai, maka membawa pengaruh yang lebih luas di kalangan masyarakat di segala bidang. Mobilitas penduduk semakin ramai, yang memerlukan penambahan tempat pemukiman atau perumahan di daerah Kelurahan Rambutan. Kepentingan untuk individu mulai tampak bersaing, yang akan melemahkan struktur kehidupan masyarakat pedesaan. Azas gotong-royong yang merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat pedesaan mulai luntur.

Kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam bidang ekonomi yang biasanya ditanggulangi melalui azas solidaritas, kini dihadapkan kepada perhitungan-perhitungan secara rasional serta pemecahan secara individual. Gejala-gejala yang demikian praktis akan menjurus ke arah kehidupan masyarakat di daerah perkotaan.

Oleh karena itu melihat gejala yang semakin jauh untuk meninggalkan azas kegotong-royongan itu, pihak Pemerintah Kelurahan dengan cepat-cepat mengadakan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dalam bidang ekonomi. Pendekatan tersebut ditujukan untuk mendinamiskan kembali kehidupan kegotong-royongan atas dasar kekeluargaan. Hal ini untuk menjalankan program pemerintah dengan menggalakkan perkoperasian. Dengan cara berkoperasi itulah akan timbul saling bantu-membantu antara yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya. Bantuan tersebut tidak secara langsung, sebab bagi yang lemah ekonomi akan dapat tertolong dengan meminjam permodalan atau barang-barang yang ada di koperasi. Pemerintah Pusat memang memberikan bantuan modal terhadap koperasi yang telah mempunyai badan hukum. Koperasi Unit Desa merupakan koperasi yang dibina oleh Pemerintah Kelurahan yang dapat digunakan untuk menggerakkan timbulnya kegiatan lain yang dapat menunjang kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Di daerah Kelurahan Rambutan, bagi yang mempunyai perekonomian kuat, ternyata tidak segan-segan untuk membantu mempercepat tercapainya program pemerintah itu. Dengan cara menjadi anggota koperasi, ternyata bagi yang berekonomi kuat lebih banyak menjadi sponsor dan dapat dicontoh. Misalnya kedisiplinan memenuhi kewajiban sebagai anggota, kepatuhan cara mengembalikan pinjaman-pinjaman barang-barang koperasi dan lain-sebagainya. Oleh

karena itu warga masyarakat yang berekonomi kuat seperti itu dapat dianggap sebagai pemimpin masyarakat non formal dan banyak melakukan kegiatan sosial di kalangan masyarakat.

Jumlah warga masyarakat yang demikian memang tidak banyak, namun pengaruhnya terhadap masyarakat cukup besar. Pengerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), banyak pula ditumbuhkan oleh golongan masyarakat yang berekonomi kuat. Dan begitu pula tentang kegiatan arisan, tidak sedikit peranan pemimpin non formal itu. Terlebih-lebih dengan adanya pendekatan secara baik dari pihak Pemerintah Kelurahan kepada mereka-mereka ini, maka akan lebih mantapnya pembinaan terhadap warga masyarakat di bidang ekonomi di daerah Kelurahan Rambutan.

Keadaan seperti tersebut di atas, agak berbeda dengan keadaan yang ada di daerah Kelurahan Cilangkap. Di daerah Kelurahan Cilangkap masyarakatnya sebagian besar masih berpikir secara statis tradisional. Kehidupan masyarakatnya masih banyak yang menitik beratkan dari hasil pertanian. Perubahan-perubahan yang menyangkut dalam sarana perkotaan belum lama. Sekalipun pada saat ini telah ada alat angkut seperti Metro Mini, melalui jalan lingkungan, namun mobilitas penduduk belum ramai. Sehingga praktis belum banyak perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Perekonomian masyarakat masih didukung oleh azas solidaritas antar warga masyarakat.

Sistem gotong-royong tampak masih kuat dalam kehidupan masyarakat di Cilangkap. Sehingga dalam penggalakan berkoperasi, tidak begitu banyak membawa pengaruh di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan, oleh karena bagi masyarakat petani tidak banyak memerlukan penambahan permodalan dan tidak banyak memerlukan tuntutan kebutuhan hidup. Maka koperasi tidak banyak menyediakan permodalan dalam bentuk uang, melainkan banyak menyediakan bahan-bahan untuk keperluan pertanian. Sepertinya alat-alat pertanian, pupuk, bibit dan sebagainya. Mengingat Koperasi Unit Desa di daerah Kelurahan Cilangkap masih dalam tarap perintisan, maka hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Pengaruh dan fungsi para pemimpin formal maupun non formal belum begitu banyak menimbulkan perubahan-perubahan di kalangan masyarakat. Di dalam bidang ekonomi, masyarakat di daerah Kelurahan Cilangkap masih banyak mengikuti pola lama, yakni bertani dengan banyak mengandalkan tenaga manusia. Hasil yang diperoleh hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum banyak menggunakan organisasi dalam mengolah hasil pertanian. Tetapi para tokoh masyarakat, yang biasanya terdiri dari orang yang kuat ekonomi dan berjiwa sosial, banyak menjadi contoh di kalangan masyarakat. Orang-orang yang demikian jumlahnya tidak banyak, namun dari sedikit demi sedikit bertambah, dan dapat membawa kemajuan cara berpikir warga masyarakat dari berpikir statis tradisional ke arah dinamis rasional. Sebagai contoh adalah pada waktu akan dilaksanakan program pembuatan jalan lingkungan, pada mulanya pihak masyarakat tidak

mau menerima program tersebut. Kuatir akan kehilangan tanah hak miliknya yang sebagian. Jadi tidak mendukung program tersebut. Tetapi setelah dari pihak Pemerintah Kelurahan banyak mengadakan pendekatan kepada para pemimpin non formal dan para pemimpin non formal tersebut meneruskan kepada masyarakat, dengan memberikan pentingnya jalan lingkungan tersebut, maka barulah pihak masyarakat dapat menerima program pembuatan jalan itu. Jadi pengaruh dan fungsi para pemimpin formal maupun non formal di daerah Kelurahan Cilangkap sampai akhir Pelita III masih bersifat dalam perintisan dan pembinaan. Hal ini berlaku dalam kegiatan di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu untuk kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti arisan kampung, PKK, dan kesenian belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

BAB VI

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA

A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN

Guna mencukupi kebutuhan keagamaan lazimnya di tiap-tiap lingkungan desa ada sebuah langgar untuk pedukuhan atau sebuah mesjid untuk desa-desa yang agak besar. Langgar atau mesjid digunakan sebagai pusat melakukan ibadah agama Islam. Di daerah Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Cilangkap sekalipun warga masyarakatnya terdiri dari suku bangsa yang sama, yakni suku bangsa Betawi, namun pada mulanya terdapat perbedaan cara melakukan ibadah keagamaan. Hal ini disebabkan, bahwa faktor dari kedua kelurahan tersebut. Untuk daerah Kelurahan Rambutan lebih berdekatan dengan pusat Ibukota Pemerintahan sejak jaman Pemerintahan Pangeran Wijayakrama yang beragama Islam, tetapi daerah Kelurahan Cilangkap terletak di daerah pedalaman atau pinggiran kota dan banyak berhubungan dengan daerah Kerajaan Pajajaran yang memeluk agama Hindu. Dengan demikian di kedua daerah Kelurahan tersebut wajar kalau terdapat perbedaan dalam melakukan ibadah keagamaan.

Sebagai ciri khas pola budaya bangsa Indonesia ialah adanya pandangan **agis religius** yang dapat mencakup berbagai pandangan keagamaan dan menghilangkan adanya pertentangan keyakinan satu sama lain. (Sumber Saparin, 1977; 123). Hal ini dapat dibuktikan di kedua kelurahan tersebut, di samping ada keyakinan agama yang resmi yakni Islam, sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap pada mulanya banyak dipengaruhi berpikir secara **magis religius**, tetapi untuk perkembangan selanjutnya terdapat kesamaan ke dalam agama yang satu faham, yakni agama Islam. Hanya kadar keyakinannya terdapat perbedaan, dimana untuk daerah Kelurahan Rambutan lebih fanatik terhadap agama Islam, sedangkan untuk masyarakat di Kelurahan Cilangkap tidak fanatik terhadap agama. Sampai saat ini perbedaan kadar keyakinan terhadap agama masih terasa dalam kehidupan masyarakat di kedua kelurahan tersebut. Sikap hidup yang bersifat **magis religius** mendapat kenyataan dalam kegiatan-kegiatan berupa upacara-upacara selamatan yang berhubungan dengan peristiwa kematian, kelahiran, perkawinan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut upacara-upacara **crisisriten** lainnya yang bersifat perseorangan mau-

pun bersifat kemasyarakatan. Misalnya pada peristiwa permulaan bertanam padi, memetik buah, bersih desa, dan lain-lain. Upacara-upacara seperti tersebut di atas sampai saat ini masih sering dilakukan oleh warga masyarakat di daerah Kelurahan Cilangkap. Sesaji-sesaji yang didahului dengan doa-doa membaca ayat-ayat suci Al Qur'an banyak dilakukan oleh warga masyarakat di Cilangkap, tetapi di daerah Kelurahan Rambutan upacara-upacara semacam itu tidak terdapat. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Kemudian dalam organisasi keagamaan, tampak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kedua kelurahan tersebut mengalami kemajuan yang berbeda. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan tampak lebih mantap, sedangkan di Kelurahan Cilangkap baru dalam tarap perintisan. Hal ini dapat diperhatikan dalam berbagai kegiatan, antara lain pada waktu menjelang Pemilu maupun pada waktu kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan hari-hari Besar Islam. Pada waktu Pemilu kegiatan politik yang berdasarkan keagamaan Islam lebih nyata, seperti halnya NU, PPP, dan lain-lain. Kemudian dalam kegiatan hari-hari Besar Islam, seperti halnya Idhul Adha (Hari Raya Korban), Idhul Fitri, Maulid Nabi, dan lain-lain tampak di daerah Kelurahan Rambutan diselenggarakan lebih meriah. Sedangkan untuk di daerah Kelurahan Cilangkap diselenggarakan biasa-biasa saja. Oleh karena itu ditinjau dari kadar keyakinan terhadap agama ini, tampak untuk warga masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan mempunyai kefanatikan yang mendalam bila dibandingkan dengan warga masyarakat di daerah Cilangkap. Kemudian mengenai tempat-tempat peribadatan-pun di daerah Kelurahan Rambutan lebih banyak dan mesjidnya pun juga lebih tua, seperti halnya mesjid **Auwabin** telah berdiri sejak 1907. Sedangkan langgar-langgar atau mesjid di daerah Kelurahan Cilangkap baru dibangun sejak tahun 1955. Memang untuk di dua kelurahan, yakni Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Cilangkap, boleh dikatakan tidak terdapat **makam kramat**. Tokoh yang dianggap tua dan bergerak dalam bidang agama di daerah Kelurahan Rambutan adalah Haji Mantji (meninggal tahun 1900-an), Haji Goleng (meninggal tahun 1900-an), Haji Mohammad (meninggal tahun 1919-an) dan Haji Sarmili (meninggal tahun 1930-an). Tetapi untuk tokoh-tokoh agama seperti tersebut di atas, makamnya tidak dapat diketahui secara pasti, dan hanya terdapat satu tokoh agama yang secara jelas dapat diketahui makamnya adalah Haji Muhayang, yakni banyak berjasa dalam Yayasan Pendidikan Alkahfi. Haji Muhayang meninggal belum lama ini dan dimakamkan di wilayah RW.01 Kelurahan Rambutan.

Kemudian untuk Haji Mohammad dimakamkan di daerah Cawang karena berasal dari daerah tersebut.

1. Nama organisasi

Kegiatan keagamaan di daerah Kelurahan Rambutan, sekalipun

warga masyarakatnya fanatik terhadap agama Islam, namun tidak banyak organisasi-organisasi yang timbul di kalangan masyarakat. Organisasi dalam kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan politik, kebanyakan tergabung dalam NU, kemudian PPP. Pada tahun 1971 dalam Pemilu, Partai NU mendapat suara terbanyak.

Kemudian pada Pemilu tahun 1977, PPP juga masih menunjukkan Partai yang terkuat. Tetapi pada Pemilu tahun 1982 antara Golkar dengan PPP menunjukkan suara berimbang. Sedangkan PDI termasuk partai yang tidak begitu banyak pendukungnya di daerah Kelurahan Rambutan.

Dari hasil Pemilu tersebut, tampak bahwa golongan agama masih menunjukkan gerakan dinamis, dan memang dalam kampanye Pemilu golongan agama dapat menunjukkan kekompakan. Namun demikian tidak terdapat perpecahan antara golongan yang menjadi kontestan Pemilu itu. Kegiatan dalam bidang agama, setelah selesai Pemilu menunjukkan kerukunan sebagai warga masyarakat secara baik. Bahkan diantara kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, saat ini yang paling menonjol adalah kegiatan dalam bidang keagamaan. Pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan atau majelis taklim, sering diadakan di rumah-rumah warga masyarakat dan juga di mesjids-mesjid. Untuk kaum ibu pengajian diadakan pada waktu siang hari, dan untuk kaum pria (bapak-bapak) diadakan pada waktu malam hari. Tiap-tiap wilayah RW telah mempunyai mesjid atau langgar yang dibangun secara swadaya masyarakat. Mesjid yang tertua adalah mesjid Auwabin, terletak di wilayah RW.02. Kemudian di mesjid tersebut juga telah didirikan Remaja Mesjid atas usaha Karang Taruna yang di Ketuai oleh Ismail Marzuki (Ketua RW.02). Kegiatan Remaja Mesjid masih terbatas, yakni baru bergerak dalam pengajian-pengajian, membuat janur, dan ketrampilan lainnya.

Kemudian untuk kegiatan keagamaan di daerah Kelurahan Cilangkap, sampai saat ini belum banyak organisasi keagamaan yang timbul. Nama-nama organisasi secara khusus belum ada. Yang ada saat ini baru pertemuan-pertemuan antar warga yang sering juga membicarakan masalah agama. Pengajian-pengajian sering dilakukan, terutama oleh kaum ibu, yang penyelenggaraannya satu minggu sekali di rumah warga masyarakat secara pindah-pindah. Untuk kaum pria (bapak-bapak) sering juga mengadakan pertemuan antara warga dalam bentuk pengajian-pengajian. Ada yang diselenggarakan oleh tiap-tiap wilayah RW, dan ada pula antar warga yang berdiam di sekitar mesjid atau langgar. Sampai saat ini di daerah Kelurahan Cilangkap baru terdapat 1 (satu) buah mesjid dan 12 (dua belas) langgar. Mesjid dan langgar tersebut kebanyakan dibangun oleh swadaya masyarakat. Tempat peribadatan yang lain, seperti untuk umat Kristen, Hindu, dan Budha, sampai saat ini belum ada. Dan memang penganut untuk agama selain Islam, belum ada. Dalam hal ini bukan berarti dilarang, tetapi

memang tidak terdapat pemeluk agama selain Islam. Bagi orang-orang pendatang, yang kebanyakan dari Jawa Tengah ternyata dapat menyesuaikan dengan keadaan di Cilangkap.

Mereka ini juga pemeluk agama Islam. Pendatang yang lain adalah dari Jawa Barat, juga pemeluk agama Islam. Pendatang bangsa China masih dalam jumlah yang kecil yakni hanya 1 (satu) keluarga, ternyata juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di Cilangkap. Pada saat ini dianggap sebagai tokoh agama adalah Haji Abdullah berdiam di RT.006 RW.02, kemudian Ustajah Nani, bertempat tinggal di RT.004 RW.01. Masyarakat di daerah Kelurahan Cilangkap tidak fanatik, namun dalam melaksanakan ibadah telah menunjukkan ketekunan. Oleh karena itu tidak terdapat warga masyarakat yang tidak melakukan ibadah. Pada waktu peringatan-peringatan hari-hari Besar Islam, warga masyarakat juga melaksanakan secara baik, tetapi tidak ada unsur paksaan. Sekalipun belum ada ikatan dalam bentuk organisasi, tetapi dalam pengumpulan dana untuk keperluan peringatan-peringatan hari-hari Besar Islam tidak mengalami kesulitan. Ketua-ketua RT/RW sangat dipercaya oleh warga masyarakat. Dari golongan agama pada mulanya mendapat suara berimbang dengan Golkar. Dan pada Pemilu terakhir, keadaan berimbang tersebut dapat bertahan, tetapi golongan atau Partai Persatuan Pembangunan meninggalkan jauh lebih banyak, bila dibandingkan dengan Partai Demokrasi Indonesia. Keadaan masyarakat setelah Pemilu menunjukkan kerukunan yang baik dan Pemerintah Kelurahan sangat dekat dengan warga masyarakatnya.

2. Tempat dan kegiatan

Sebagaimana telah disinggung di bagian depan, bahwa kegiatan-kegiatan dalam bidang keagamaan di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap masih sangat terbatas. Kegiatan tersebut baru dalam bentuk pengajian-pengajian, arisan, maupun pertemuan-pertemuan yang banyak mem b i c a r a -

kan tentang agama. Kegiatan-kegiatan tersebut banyak menggunakan tempat di mesjid, langgar, maupun di rumah penduduk. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan sering pula menggunakan di Balai Desa. Saat ini di daerah Kelurahan Rambutan sudah terdapat 2 (dua) Balai Desa. Balai Desa ini dibangun atas bantuan Pemerintah (Bang Des). Pengaruhnya sangat positif terhadap warga masyarakat. Penggunaan Balai Desa tersebut tidak saja untuk keperluan dalam bidang agama, tetapi juga boleh digunakan untuk pertemuan antar warga dalam membicarakan sosial, budaya, rapat-rapat dalam peringatan hari-hari Besar Bersejarah/Nasional, perkawinan, olah raga, dan lain sebagainya. Kegiatan dalam bidang keagamaan mendapat prioritas pertama. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut selalu mengundang pihak pemerintah. Baik Pemerintah Kelurahan maupun

instansi-instansi yang relevan dengan permasalahannya. Sepertinya untuk kegiatan dalam bidang agama, Lurah dan Kepala Kantor Urusan Agama selalu diundang. Bahkan pihak Pemerintah Kelurahan sangat diharapkan untuk memimpin dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kalau masalah perkawinan selalu pihak Kantor Urusan Agama diharapkan dapat memberikan pengarahan. Jadi fungsi Balai Desa tersebut dapat pula digunakan untuk tempat penataran-penataran, atau diskusi-diskusi. Pengajian-pengajian bagi kaum pria (bapak-bapak) sering diadakan di Balai Desa pada waktu malam hari, tetapi tidak secara rutin. Karena tempat pun juga harus diatur secara bergiliran. Hanya pengajian di Mesjid, seolah-olah sudah permanent karena memang sudah berjalan sejalan lama. Kegiatan-kegiatan yang merupakan organisasi keagamaan, belum banyak dilakukan. Yang selama ini dilakukan dalam bentuk pengajian, sebenarnya atas kemauan dari perorangan. Hanya para remaja yang tergabung dalam Remaja Mesjid itulah kegiatan dalam bentuk organisasi. Tetapi kegiatan Remaja Mesjid ini belum banyak, karena baru dalam tarap perintisan.

Jadi kalau dibandingkan diantara kedua daerah kelurahan, yakni Kelurahan Rambutan dengan Kelurahan Cilangkap, maka sarana kegiatan keagamaan lebih banyak terdapat di daerah Kelurahan Rambutan. Kemudian jenis kegiatannya pun juga lebih banyak terdapat di daerah Kelurahan Rambutan. Di daerah Kelurahan Cilangkap masih banyak mendatangkan para guru-guru agama dari luar wilayah Kelurahan Cilangkap. Diantaranya juga banyak yang didatangkan dari Kelurahan Rambutan. Hal ini dilakukan, karena perkembangan keagamaan di daerah Cilangkap belum lama berkembang. Tempat-tempat peribadatan, juga masih sangat sederhana, sedangkan di daerah Kelurahan Rambutan sudah mantap. Mesjid **Al Khahir** adalah mesjid satu-satunya yang terdapat di daerah Kelurahan Cilangkap, sedangkan peribadatan lainnya masih dalam bentuk langgar.

3. Tujuan yang akan dicapai

Kegiatan dalam bidang keagamaan yang diselenggarakan di daerah Kelurahan Rambutan, mempunyai tujuan yang jelas, yakni :

- meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara memperdalam ayat-ayat suci dalam Al Qur'an.
- membentuk kerukunan antar warga masyarakat, dengan melalui pertemuan-pertemuan, dan peringatan-peringatan hari-hari Besar Islam.
- menghindarkan kenakalan remaja, maka diadakan organisasi Remaja Mesjid ;
- membina jiwa mental spiritual, dengan cara terus-menerus mengisi kerokhanian pada diri sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, memerlukan suatu pengertian,

kesadaran, dan kemauan dari setiap warga masyarakat. Karena hal tersebut adalah menyangkut kepentingan bersama maupun kepentingan individu. Ketenangan, ketentrangan, kedamaian lahir dan batin, akan diperoleh, apabila pada dirinya masing-masing terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani tersebut adalah, harus ada usaha-usaha yang timbul dari setiap warga masyarakat dengan cara menjalin persaudaraan, persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Untuk itu maka pertemuan-pertemuan atau musyawarah untuk mufakat selalu diadakan.

Hasil yang telah nyata diperoleh saat ini adalah :

- tidak adanya perselisihan antar warga masyarakat, bahkan menunjukkan keakraban antar warga ;
- tidak adanya kenakalan remaja ;
- ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meningkat, hal ini terbukti semakin banyaknya warga masyarakat tua dan muda bersembahyang Jum'at tiap-tiap mesjid di wilayah RT/RW Kelurahan Rambutan.

Hal tersebut, bila dibandingkan dengan di daerah Kelurahan Cilangkap agak berbeda. Adapun yang menjadi tujuan kegiatan dalam bidang keagamaan, diantara kedua kelurahan tersebut tidak jauh berbeda. Hanya cara pengorganisasiannya, terdapat perbedaan. Di daerah Kelurahan Cilangkap, belum terbentuk organisasi yang teratur secara khusus, sepertinya organisasi Remaja Mesjid, pengajian-pengajian secara tetap, dan Balai Desa untuk pertemuan organisasi. Hal-hal tersebut menunjukkan, belum mantapnya pembinaan kerokhaniaan di daerah Kelurahan Cilangkap. Namun demikian, apabila ditinjau dari perkembangan agama Islam di kalangan masyarakat, maka daerah Cilangkap cukup berhasil. Karena dari masyarakat yang tidak fanatik terhadap agama, dan banyak dipengaruhi dengan cara berpikir magis dan ilmu-ilmu kesaktian, ternyata dalam waktu singkat dapat berubah menjadi masyarakat agamis. Walaupun tidak seperti masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan. Hasil yang sangat nyata adalah berubahnya cara berpikir masyarakat Cilangkap dari pandangan magis ke arah pandangan agama yang resmi, yakni Islam.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

Dalam kepemimpinan **legal**, yang memiliki dasar-dasar kewenangan ("authority"). Kekuasaan mempunyai sanksi-sanksi yang nyata. Tokoh-tokoh pemimpin yang bersatatus formal yaitu Kepala Desa atau Lurah, Lurah yang oleh kewenangan pemerintahan menguasai lebih banyak aktivitas-aktivitas desa sehingga ia lebih banyak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pembangunan. Sedangkan kepemimpinan non formal seperti tokoh-tokoh agama yang secara **hirarkhis** mempunyai kewenangan atas organisasi masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan. (Buddy Prasadja, 1982 ; 8).

Untuk di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah Kelurahan banyak melibatkan peranan RT/RW yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Di daerah Kelurahan Rambutan Ketua RT/RW banyak diambilkan dari Tokoh-tokoh Agama. Hal ini bukan karena suatu keharusan, melainkan setiap diadakan pemilihan para Ketua RT/RW, tokoh agamalah yang banyak memenangkannya. Jadi peranan para tokoh agama ini mempunyai fungsi ganda. Di samping banyak melakukan pekerjaan pembantu Pemerintah Kelurahan, dan dipihak lain banyak melakukan pembinaan rokhani pada masyarakat. Bapak Haji Harun adalah tokoh agama yang sejak tahun 1970-an telah menjadi Uztad di daerah Kelurahan Rambutan. Terkenal sebagai Uztad (guru Agama), karena sering **bertindak** selaku **Khatib** di mesjid. Ada kemungkinan atas penilaian dari masyarakat, maka banyak yang mengundang ke rumah-rumah atau dalam pertemuan-pertemuan, untuk mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Jadi diangkat sebagai **Uztad** (guru Agama) tidak secara formal. Lurah Susukan waktu itu masih dijabat oleh Haji Natsir (Lurah Rambutan sekarang) dan juga menjabat sebagai Kepala Mesjid Al Barkah, memanggil pertama kali Haji Harun sebagai Uztad. Sejak itu Haji Harun diperlakukan oleh masyarakat sebagai tokoh agama, karena banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Misalnya untuk menggerakkan Peringatan Hari-Hari Besar Islam, tokoh agama dan juga Ketua-Ketua RT/RW selalu dijadikan sebagai Ketua Panitia. Dalam melaksanakan Peringatan Idhul Korban, biasanya atas swadaya masyarakat yang dikoordinir oleh Ketua-Ketua RT/RW, dengan mengundang **amil**, **kyai**, **ketua mesjid**, **uztad**, dan lain-lain. Setiap wilayah RT cukup banyak yang **korban** berupa binatang **sapi** atau **kambing**. Dalam hal ini peranan pemimpin formal, biasanya hanya sebagai pelindung atau sebagai penasehat. Tetapi Lurah pun dapat mengkoordinir dalam kegiatan-kegiatan pembinaan rokhani, dengan cara mengundang para Uztad. Pembinaan ini biasanya diadakan di Balai Desa yang telah berhasil didirikan oleh Pemerintah Kelurahan atas bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Bangdes.

Sistem kepemimpinan dalam bidang keagamaan di daerah Kelurahan Rambutan tersebut di atas, agak berbeda dengan sistem kepemimpinan dalam bidang keagamaan di daerah Kelurahan Cilangkap. Di daerah Kelurahan Rambutan sistem kepemimpinan di bidang agama, lebih banyak dilakukan oleh para pemimpin non formal, sedangkan pemimpin formal hanya merupakan koordinasi. Tetapi sebaliknya di daerah Kelurahan Cilangkap, kepemimpinan formal lebih banyak menentukan. Karena pandangan masyarakat Cilangkap, yang pada mulanya berpandangan non agamis, dengan sangat cepat dapat berubah menjadi masyarakat yang agamis. Cara merubah pandangan masyarakat tersebut, ternyata melalui para pemimpin formal. Kemudian para pemimpin formal terus mengadakan pembinaan warga masyarakat yang non agamis

itu, sehingga dari sedikit demi sedikit masyarakat menghilangkan cara berpikir magis menuju ke arah berpikir berdasarkan ajaran agama. Oleh karena itu sifat masyarakat di Cilangkap tidak fanatik. Tokoh agama belum banyak berpengaruh secara langsung, tetapi tetap melalui jalur kepemimpinan formal.

1. Syarat-syarat dan faktor pendukung

Untuk di daerah Kelurahan Rambutan para pemimpin agama, tidak secara formal diangkat oleh Pemerintah. Ketokohan mereka tumbuh secara alamiah yang berkembang di kalangan masyarakat. Masyarakat akan menganggap seseorang sebagai pemimpin agama, terutama dilihat pada hubungan orang tersebut dengan masyarakat. Hal ini akan tampak jelas dalam kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari Besar Islam. Inisiatif seseorang akan mendapat penilaian oleh masyarakat. Kalau sebelum tahun 1950-an, dimana masyarakat Kelurahan Rambutan selalu menilai seseorang, dengan ukuran ketekunan dan ketabahan dalam melaksanakan ibadah, tetapi sejak tahun 1950 ukuran tersebut masih harus dibuktikan dengan kemampuan seseorang dalam mengemukakan pendapat dan pelaksanaannya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu para pemimpin agama ini biasanya juga orang-orang yang berilmu tinggi dan menguasai ajaran-ajaran agama. Di samping itu masih didukung pula dengan faktor kekayaan untuk berbuat sosial berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Rasa belas kasihan terhadap fakir miskin, dapat digerakkan oleh para tokoh agama, dengan dihubungkan rukun Islam. Segala dana ataupun zakat fitrah, akan mudah terkumpul apabila para tokoh agama telah mengamanatkan melalui **khotbah** di mesjid maupun di tempat-tempat pertemuan antar warga masyarakat. Jadi para pemimpin agama di daerah Kelurahan Rambutan, harus selalu dekat dengan masyarakat, dan dekat pula dengan Pemerintah Kelurahan. Karena dukungan yang utama untuk dianggap sebagai pemimpin, adalah dukungan yang datang dari masyarakat. Kemudian dukungan yang lain adalah faktor kekayaan dan perbuatan sosial.

Hal seperti tersebut, sebenarnya juga berlaku di daerah Cilangkap. Hanya di daerah Cilangkap belum begitu banyak orang-orang yang memiliki ilmu tinggi dalam bidang agama. Oleh karena itu masih banyak ditentukan dari para pemimpin formal. Dan pemimpin formal inilah yang terlebih dulu mendapatkan ilmu-ilmu tentang agama. Kalau sebelum tahun 1955, para pemimpin formal masih banyak dikuasai oleh tokoh-tokoh **jagoan** atau **jawara**, tetapi sejak tahun 1955 tokoh agama sudah banyak yang ambil peranan. Maka faktor pendukung para pemimpin agama adalah faktor kekayaan dan juga faktor ilmu kemasyarakatan. Orang Cilangkap yang memiliki ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah atau pendidikan formal, sampai tahun 1955 belum begitu banyak. Maka pendidikan agama sangat menentukan, untuk mengisi kekosongan ilmu kemasyarakatan yang

diperlukan dalam kepemimpinan formal atau Pemerintah Kelurahan. Jadi yang menjadi persyaratan dalam kepemimpinan dalam bidang agama, adalah hubungan seseorang dengan masyarakat terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Hal ini dapat dilihat pada setiap peringatan hari-hari Besar Islam.

Uztadjah Nani, Haji Abdullah, dan Uztad Zafir Yusuf pada saat ini termasuk sebagai tokoh agama, karena banyak berhubungan dengan masyarakat, untuk memberikan pembinaan rohani atau keagamaan.

2. Hak dan kewajiban

Secara material para pemimpin non formal yang bergerak di bidang agama, tidak mendapatkan imbalan berupa apapun. Baik di daerah Kelurahan Rambutan maupun di Cilangkap, pemimpin di bidang agama banyak berbuat atas dasar sosial dan sukarela. Hanya yang bekerja di tempat pendidikan formal, secara resmi mendapat imbalan dari Madrasah dimana mereka bekerja. Di daerah Kelurahan Rambutan terdapat 3 (tiga) buah Madrasah, yakni :

- Madrasah Fatulillah (Sekarang Madrasah Al Kahfi), berada di RT.001/RW.01 ;
- Madrasah Al Istiqomah, berada di RT.008/RW.02 ;
- Madrasah Muhajidin, berada di RT.006/RW.02.

Para pemimpin agama yang dipekerjakan di Madrasah-Madrasah seperti tersebut di atas, tidak merupakan suatu ikatan, tetapi hanya berfungsi membantu untuk mengisi kekosongan guru. Biasanya para pendiri Yayasan Al Kahfi sendiri yang bertindak sebagai pembina Madrasah dengan terpaksa mengisi kekosongan tersebut. Para pendiri Yayasan Pendidikan Al Kahfi sampai saat ini masih lengkap, yakni :

- **Dewan Pendiri** : Haji Narwoko Kadarusman - Ketua ;
Haji R.A. Sukandar, BSc. - Anggota ;
Haji Imron Jayadi - Anggota ;
Haji Drs. Agus Tabrani - Anggota.
- **Dewan Harian** : Haji Narwoko Kadarusman - Ketua ;
Haji R.A. Sukandar, BSc. - Bendahara ;
Haji Imron Jayadi - Sekretaris.

Diantara ketiga Madrasah tersebut di atas, hanya Madrasah yang dibina oleh Yayasan Pendidikan Al Kahfi yang lebih banyak berkembang. Sedangkan Madrasah lainnya, boleh dikatakan baru dalam tarap persiapan atau perintisan.

Kalau dibandingkan dengan di daerah Kelurahan Cilangkap maka hak dan kewajiban para pemimpin non formal di bidang agama, lebih

banyak berperan di daerah Kelurahan Rambutan. Untuk di Kelurahan Rambutan masyarakatnya telah lama bersifat agamis, maka penganut atau yang menjadi murid Madrasah cukup besar. Di samping itu bagi yang sudah dewasa, juga terus dibina, melalui mesjid atau pertemuan-pertemuan. Sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap para pengikut atau murid Madrasah belum begitu banyak. Pembinaan secara rutin bagi warga masyarakat, belum dapat terlaksana dengan baik. Hak dan kewajiban untuk para pemimpin non formal di bidang agama, secara resmi tidak ada. Kecuali bagi para Uztad yang bertugas di Madrasah Asyafiiyah, mendapat imbalan sekadarnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa para pemimpin agama lebih banyak bekerja atas dasar sosial dan sukarela. Sekalipun pembinaan secara langsung lebih banyak dilakukan oleh pihak pemimpin formal dari unsur Pemerintah Kelurahan, namun peranan pemimpin non formal di bidang agama juga tidak kecil. Oleh karena itu secara moral para pemimpin agama juga mendapat beban membina masyarakat. Hasil yang telah dicapai atas kerjasama para pemimpin formal dan non formal selama ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat dari berpikir secara statis tradisional menuju ke arah dinamis rasional.

3. Atribut / Simbol Kepemimpinan

Baik pemimpin formal dan non formal di bidang agama di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap, tidak menggunakan **atribut / simbol** kepemimpinan tertentu. Lurah dan Aparat Pemerintah Kelurahan yang bertugas mengadakan pembinaan rokhani, menggunakan pakaian seragam dinas yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sama dengan pakaian pegawai DKI Jakarta lainnya. Pakaian seragam pegawai DKI Jakarta adalah berwarna **drill kuning** dengan menggunakan lambang daerah DKI Jakarta di lengan bagian kiri. Jadi para petugas DKI Jakarta mudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian untuk para pemimpin non formal di bidang agama, pada waktu menjalankan tugas atau membina warga masyarakat, hanya memakai pakaian secara muslim, yakni memakai **sorban** putih, **peci** (kopyah), kain sarung, dan **piama**. Kalau di daerah Kelurahan Rambutan pembinaan warga masyarakat banyak dilakukan di mesjid-mesjid. Tiap-tiap wilayah RT/RW di daerah Kelurahan Rambutan telah memiliki mesjid dan paling tidak terdapat langgar atau musholla pada wilayah RT. Jadi untuk pembinaan warga tidak mengalami kesulitan. Di samping itu tenaga pembina pun juga cukup banyak, sehingga para pemimpin formal banyak yang mengandalkan pada pemimpin non formal di bidang agama.

Untuk di daerah Kelurahan Cilangkap, para pemimpin formal lebih banyak terjun secara langsung kemasyarakat, untuk membina warga. Pakaian yang dipergunakan oleh para pemimpin formal adalah pakaian dinas pegawai DKI Jakarta. Tidak menggunakan **atribut / simbol** ke-

pemimpinan lainnya. Begitu pula bagi para pemimpin non formal, pakaian yang dipergunakan juga pakaian muslim seperti yang terdapat di daerah Kelurahan Rambutan. Tempat pembinaan warga dalam bidang kerokhanian, tidak selalu di mesjid. Karena di daerah Kelurahan Cilangkap belum banyak mesjid yang telah didirikan. Maka untuk pembinaan warga, banyak dilakukan di langgar atau di kantor Kelurahan. Namun demikian dari sedikit demi sedikit, telah memperoleh kemajuan yang dapat dibanggakan. Pada saat ini telah banyak terlihat di kalangan masyarakat Cilangkap, banyak menggunakan pakaian muslim, baik wanita maupun prianya. Apabila dibandingkan dengan sebelum tahun 1955, jauh berbeda. Dulu orang berpakaian muslim, akan mendapat ejekan atau bahan ketawaan oleh masyarakat. Dapat dikatakan kuno, ketinggalan jaman, fanatik dan sebagainya, tetapi ternyata sekarang sebaliknya. Orang berpakaian muslim, lebih disegani, dihormati, dan dianggap mempunyai ilmu tinggi di bidang agama. Akhirnya banyak orang yang ikut-ikutan berpakaian muslim tersebut, sekalipun dia tidak mempunyai ilmu agama yang cukup tinggi. Asalkan orang sudah belajar mengaji, maka orang tersebut sudah berani menggunakan pakaian muslim. Terlebih-lebih dengan adanya Pesantren Asyafiiyah, maka masyarakat Cilangkap akan lebih mantap dimasa yang akan datang tentang ketaqwaan terhadap ajaran agama Islam.

4. Cara pengangkatan dan upacara

Pengangkatan secara formal bagi pemimpin di bidang agama di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap tidak ada. Masyarakat menganggap seseorang sebagai tokoh agama, karena dalam praktek sehari-hari dapat menunjukkan suatu kegiatan yang berhubungan dengan agama. Sepertinya dalam pengajian, sembahyang di mesjid, atau di tempat-tempat pertemuan khusus antar warga, maka masyarakat dapat menilai seseorang ahli agama. Di samping itu ada anggota masyarakat yang dengan sengaja, mengundang seseorang untuk mengajarkan tentang agama. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan seperti itulah masyarakat dapat menentukan secara tidak langsung kepada seseorang ahli dalam bidang agama atau bidang lainnya. Di Kelurahan Rambutan Bapak Haji Harun termasuk seorang tokoh di bidang agama, yang mengisahkan pengalamannya sewaktu menjadi Uztad keliling. Sejak tahun 1970 sampai sekarang masih aktif sebagai Uztad. Pada mulanya banyak bertindak sebagai **khatib** dalam sembahyang di mesjid-mesjid di daerah Kelurahan Rambutan. Dari pengalaman sebagai khatib inilah, akhirnya dikenal oleh masyarakat. Banyak warga masyarakat yang mengundang Bapak Haji Harun untuk memberikan pelajaran agama Islam. Yang diajar tidak ada batasan umur. Dari cara membaca Al Qur'an sampai dengan terjemahan ayat-ayat suci Al Qur'an. Baik **tajuit** maupun **tasawub**. Pelajaran tersebut tidak ada tamatnya, asalkan seseorang ataupun

masyarakat masih mau. Dari pengalaman sebagai Ustaz inilah Haji Harun terkenal sebagai pemimpin agama yang disegani oleh masyarakat. Dengan demikian dalam pengangkatan sebagai pemimpin agama tidak diadakan secara formal pengangkatan maupun upacara apapun. Karena pengangkatan sebagai pemimpin agama tersebut datangnya dari masyarakat. Cara-cara seperti di daerah Kelurahan Rambutan tersebut, tidak jauh berbeda dengan yang ada di daerah Cilangkap. Para pemimpin di bidang agama di daerah Cilangkap, memang kebanyakan datang dari luar daerah Cilangkap, tetapi lama kelamaan banyak yang menetap di daerah Cilangkap. Kedatangan di daerah Cilangkap ada yang sengaja diundang, tetapi juga ada yang sengaja untuk menyebarkan ilmunya ke daerah Cilangkap. Ini terjadi pada tahun 1955-an, menjelang akan diadakan Pemilu. Pada waktu itu masyarakat di daerah Cilangkap banyak dihasut dari berbagai golongan politik. Rupanya diantara golongan politik itulah, dari pihak agama mendapatkan dukungan yang lebih banyak. Akhirnya setelah Pemilu, banyak warga masyarakat yang terus menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Tokoh-tokoh politik yang berpandangan Islam inilah yang akhirnya dianggap oleh warga masyarakat sebagai tokoh-tokoh atau pemimpin di bidang agama. Jadi cara pengangkatannya juga tidak formal dan tidak ada upacara apapun. Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain Haji Abdullah, Uztad Zasir Yusuf, dan lain-lain.

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN DI BIDANG AGAMA DALAM MASYARAKAT

Bila dilihat pengaruh kepercayaan terhadap struktur kehidupan masyarakat, maka pengertian akan ilmu agama menunjukkan semacam pola hubungan yang **vertikal**. Ciri-ciri demikian terlihat pada masing-masing pemilik ilmu tersebut, yaitu pada para penguasa, pemimpin-pemimpin agama, baik pemimpin formal maupun non formal. Akan selalu terlihat suatu ikatan kesetiaan hirarkhi yang mendalam yang mengandung tuntutan kepatuhan terhadap garis-garis kebijaksanaan dari yang bersangkutan. Sehingga ilmu agama menunjukkan pula ikatan-ikatan pengaruh seorang pemimpin, pemuka atau penguasa yang memilikinya. Dan bila dilihat dari sudut kepercayaan yang terkandung di dalamnya, maka agama merupakan faktor yang berpengaruh dalam mendapatkan atau memenangkan suatu dukungan kesetiaan. (Budy Prasadja, 1982 ; 64, 65).

Para pemimpin agama di daerah Kelurahan Rambutan, telah lama hidup dalam disiplin agama yang telah mempunyai pengaruh dan berfungsi sebagai penguasa atau pemimpin non formal. Karena di samping menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam yang telah dimilikinya, juga berfungsi sebagai pembina dalam bidang kerokhaniaan. Para pemimpin agama dengan mudah mengadakan

pembinaan masyarakat, melalui lembaga-lembaga yang telah ada, seperti Remaja Mesjid, Karang Taruna, maupun RT/RW. Pengaruh di bidang agama akan mudah tercermin dalam kedua ciri yang menandai hubungan antar individu serta antar kelompok. Efektivitas kedua macam hubungan tersebut akan menentukan kedudukan para pemimpin agama, sebagai orang yang dapat dipercaya dan disegani. Oleh karena itu segala kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, akan mudah digerakkan oleh para pemimpin agama tersebut. Pemimpin formal di daerah Kelurahan Rambutan, sangat dekat hubungannya dengan para pemimpin agama, sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kelurahan. Sebaliknya bagi para pemimpin agama, juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan fungsinya untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama dan norma-norma yang terkandung di dalam ajaran agama. **Fasilitas** keagamaan yang di daerah Kelurahan Rambutan, seperti Balai Desa, Mesjid, ataupun Langgar, akan mendapat perhatian secara baik dari pihak Pemerintah Kelurahan dan dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin agama.

Keadaan atau hubungan antara para pemimpin agama di daerah Kelurahan Rambutan tersebut, agak berbeda dengan keadaan atau hubungan antara para pemimpin agama yang ada di daerah Cilangkap. Kalau di daerah Cilangkap **inisiatif** sepenuhnya ditentukan dari atas, sedangkan di daerah Rambutan kadang-kadang **inisiatif** datang dari bawah. Pihak Pemerintah Kelurahan Rambutan tinggal mengadakan koordinasi, sedangkan di daerah Cilangkap Pemerintah Kelurahan juga bertindak sebagai pelaksana langsung. Hal ini dapat kita lihat pada setiap gerakan peringatan-peringatan hari-hari Besar Islam atau hari-hari Besar Nasional. Di daerah Cilangkap masih harus digerakkan dari pihak Pemerintah Kelurahan, sedangkan di daerah Kelurahan Rambutan masalah tersebut banyak diserahkan pada setiap wilayah RT/RW yang kebanyakan para Ketua RT/RW juga termasuk tokoh-tokoh dalam bidang agama.

Sampai saat ini di daerah Kelurahan Cilangkap, masih terasa adanya pengaruh-pengaruh magis tersebut telah dipadukan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Sehingga dalam melaksanakan ibadah Islam, seolah-olah pengaruh magis tersebut juga termasuk dalam ajaran-ajaran Islam. Hal ini terjadi, karena sudah sangat lamanya kehidupan masyarakat di daerah Cilangkap dipengaruhi dengan kehidupan atau kepercayaan terhadap magis tersebut. Jadi sampai saat ini belum dapat lenyap sepenuhnya. Pengaruh magis tersebut antara lain, upacara-upacara perkawinan, kematian, kelahiran, dan lain-lain, masih tampak adanya pembakaran kemenyan atau selamatan-selamatan yang diatur semacam kenduri. Sekalipun seluruh doa-doa yang dibacakan adalah dengan cara-cara Islam, tetapi ada selingan-selingan yang menunjukkan sifat magis atau kepercayaan pada kebudayaan yang lampau, yakni Hindu atau **dinamisme**. Jadi pengaruh dan fungsi para pemimpin di bidang agama di

daerah Cilangkap, belum sepenuhnya dapat merubah pandangan hidup masyarakat secara mutlak.

Dan memang sifat agama Islam tidak ada unsur paksaan, sedangkan dari pihak Pemerintah Kelurahan tidak ada pembinaan kerokhanian yang menuju ke salah satu agama, yang penting masyarakat harus beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak musti harus agama Islam.

BAB VII

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dengan menggunakan aturan-aturan tertentu, dengan tujuan yang telah diprogramkan. Semua perlengkapan pendidikan dan waktu yang dipergunakan telah ditentukan secara teratur. Sedangkan pendidikan non formal cara penyelenggaraannya tidak ada aturan-aturan yang diseragamkan atau ditentukan, dan pendidikan non formal ini hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung daripada pendidikan formal.

Dengan pengertian seperti tersebut di atas, maka di daerah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, kedua jenis pendidikan itu terdapat di dalamnya. Hanya dari segi perbandingan jumlah pendidikan formal lebih banyak daripada pendidikan non formal. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan sampai saat ini sudah terdapat pendidikan formal dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Tingkat Menengah Pertama.

Sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap yang ada baru tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Tingkat Sekolah Dasar.

Tetapi untuk Madrasah Asyafiiyah di Cilangkap sudah ada tingkat Tsyanaawiah (SMTP), sekalipun muridnya belum banyak. Di daerah Kelurahan Rambutan, mengingat letaknya sangat berdekatan dengan daerah perkotaan dan berada di tepi jalan besar, maka perkembangan di bidang pendidikan lebih cepat. Semua jenis transportasi telah ada, sehingga memudahkan hubungan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Tidak ada sekolah di daerah Kelurahan Rambutan yang kekurangan murid, bahkan setiap tahunnya masih tidak dapat menampung anak-anak usia sekolah di daerah Kelurahan Rambutan dan sekitarnya. Sedangkan di daerah Kelurahan Cilangkap masih ada yang kekurangan murid, bukan disebabkan kurangnya anak usia sekolah, melainkan belum bersedianya anak untuk disekolahkan. Di samping itu anak-anak yang datang dari luar daerah Cilangkap jumlahnya sangat kecil, sehingga belum dapat memenuhi jumlah minimal dalam satu kelas atau tiap sekolah muridnya sudah sangat sedikit.

Pengorganisasian kegiatan dalam pendidikan formal telah ada ketentuan-ketentuan yang diatur dari Kanwil Depdikbud DKI Jakarta untuk tingkat SMTP, sedangkan untuk tingkat SD pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta. Untuk tingkat SMTP dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan Staf Pengajarnya terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang diajarkan. Pada saat ini masih terdapat beberapa mata pelajaran yang terpaksa dirangkap oleh satu orang guru. Misalnya seorang Guru Prakarya masih merangkap Olah Raga, Guru Agama merangkap pula mata pelajaran Kesenian dan sebagainya. Di samping itu terdapat Wali Kelas untuk tiap-tiap kelas. Kemudian diantara Staf Pengajar ada yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Sekolah.

Mengenai pendidikan formal untuk tingkat SD pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta, yang susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

- Tiap sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan dibantu oleh Staf Pengajar sebanyak kelas yang ada.
- Tiap Guru Kelas langsung menjadi Wali Kelas, dimana mereka bertugas mengajar.

Kalau di tingkat SD tidak ada Staf Tata Usaha, biasanya administrasi sekolah langsung dipegang oleh Kepala Sekolah.

Tetapi untuk tingkat SMTP, sudah terdapat Staf Tata Usaha yang jumlahnya paling banyak 3 (tiga) orang. Pengaturan seperti tersebut di atas berlaku di tiap-tiap sekolah di DKI Jakarta, termasuk di daerah Kelurahan Rambutan maupun di daerah Cilangkap.

Aturan yang demikian itu juga diharuskan kepada sekolah-sekolah swasta. Dengan demikian untuk Madrasah pun juga harus mengikuti peraturan tersebut. Di daerah Kelurahan Rambutan saat ini terdapat sekolah-sekolah sebagai berikut :

- Taman Kanak-Kanak : 3 buah
- Sekolah Dasar Negeri : 6 buah
- SMP Negeri : 2 buah
- SMA Negeri/Swasta : - buah
- Madrasah : 3 buah

Di daerah Kelurahan Cilangkap saat ini terdapat sekolah-sekolah sebagai berikut :

- Taman Kanak-Kanak : 1 buah
- Sekolah Dasar Negeri : 3 buah
- Madrasah : 1 buah

Dari jumlah sekolah yang terdapat di dua Kelurahan tersebut dapat dibandingkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah itu.

Kemudian tentang pendidikan non formal, di kedua Kelurahan, yakni Kelurahan Rambutan dan Cilangkap masih terbatas dalam pendidikan agama. Terutama dalam pengajian-pengajian, yang biasanya diselenggarakan oleh masing-masing keluarga. Pengajian ini ada yang sengaja mendatangkan guru mengaji, atau sebaliknya si murid yang mendatangi ke rumah guru mengaji. Waktu pengajian tidak tertentu waktunya, hal ini sangat tergantung dari kesempatan tiap-tiap murid atau guru mengaji tersebut. Biasanya diselenggarakan pada waktu malam hari.

1. Nama organisasi

Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan di daerah Kelurahan Rambutan bernama Yayasan Pendidikan Al Kahfi. Selain itu terdapat pendidikan formal yang dibina langsung oleh Pemerintah. Sekolah yang dibina langsung oleh Pemerintah meliputi sekolah tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Jumlah Sekolah Negeri telah disebutkan di bagian atas, tetapi untuk Sekolah yang dibina oleh pihak swasta, yakni Madrasah yang jumlahnya juga sudah disebutkan di bagian depan. Diantara Madrasah yang terdapat di daerah Kelurahan Rambutan yang paling terkenal adalah Madrasah yang dibina oleh Yayasan Pendidikan Al Kahfi. Madrasah ini mempunyai 3 (tiga) tingkatan, yakni :

- Tingkat Taman Kanak-Kanak (dibagi dua group : nol besar dan nol kecil : ± 100 anak
- Tingkat Iftidaiah : ± 230 anak
- Sekolah Dasar Islam : ± 230 anak

Jumlah guru yang bertugas :

- Iftidaiah : 6 orang (1 orang Guru Negeri sebagai Kepala Sekolah, mendapat SK. dari Departemen Agama).
- SDI : 7 orang (1 orang Guru Negeri sebagai Kepala Sekolah, mendapat SK. Dep. Agama).
- TK : 4 orang (2 Guru Negeri dan 2 lagi Guru Honorer).

Yayasan **Al Kahfi** ini berdiri sejak tahun 1972, sebagai pengganti dari Madrasah Fatulillah yang sudah berdiri kurang lebih 10 tahun yang lalu, tetapi tidak dapat berkembang bahan ada tanda-tanda akan bubar. Oleh karena itu perlu segera dibenahi, dengan merubah nama dan Dewan Pendidiknya. Kalau Madrasah Fatulillah tidak jelas pendirinya, sehingga perlu dirombak secara keseluruhan. Nama Al Kahfi diberikan atas usul dari Haji Imron Jayadi. Nama ini diambilkan dari nama surat Al Kahfi, yang menurut ceritanya, bahwa dahulu ada seorang anak muda, yang mungkin sudah ada **Fasolnya** tetapi tidak jelas namanya, untuk menghadapi seorang

raja yang masih musrik menyembah berhala. Anak muda tersebut berjuang dengan seekor anjing bernama Al Kahfi. Karena raja sangat perkasa, maka anak muda itu tidak berdaya dan akhirnya dibuat tertidur nyenyak kurang lebih 350 tahun lamanya. Setelah bangun, ternyata keadaan telah berubah dan rakyatnya telah memeluk agama Islam. Hal ini sangat erat dengan keadaan di Indonesia, bahwa rakyat Indonesia mengalami penjajahan kurang lebih 350 tahun. Dan anak-anak muda atau pemuda selalu tampil pertama dalam perjuangan kemerdekaan. Maka nama Al Kahfi tersebut dipakai nama Yayasan Pendidikan di daerah Kelurahan Rambutan.

Tujuan Yayasan Pendidikan Al Kahfi, terutama ingin memajukan pendidikan anak-anak, sekaligus ingin mencerdaskan bangsa. Untuk Kepengurusan Yayasan Al Kahfi, berdasarkan musyawarah. Sampai saat ini tidak dibuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebab bermaksud agar tidak ada ikatan bagi pengurusnya. Semua pengurus mendapat pengesahan dari Dewan Pendiri.

Untuk di daerah Kelurahan Cilangkap, organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, selain dari Pemerintah, terdapat Madrasah Asyafiiyah. Madrasah ini juga bertindak atau berperan sebagai Pondok Pesantren.

Sebelumnya juga sudah ada Madrasah, tetapi tidak dapat berkembang bahkan mengalami kerusakan yang sangat berat. Maka sekitar tahun 1955 mulai dirintis untuk mendirikan sebuah Madrasah Asyafiiyah. Kemudian pada tahun 1975, Madrasah dapat berkembang secara baik, dan pada tahun itu pula dapat menampung murid-murid tingkat Tsanawiah tinggal di dalam Asrama. Murid Madrasah tiap tahun meningkat sangat cepat. Para Pengajarnya ada yang berasal dari luar daerah Cilangkap, tetapi pada saat sekarang sudah banyak yang tinggal di daerah Cilangkap. Madrasah Asyafiiyah adalah merupakan Madrasah satu-satunya yang terdapat di daerah Cilangkap. Setiap tahunnya peminat yang akan masuk sebagai murid terus meningkat. Sehingga sampai saat ini sangat dirasakan sudah mulai kekurangan tempat untuk menampung murid tinggal di asrama.

2. Tempat dan kegiatan

Yayasan Pendidikan Al Kahfi pada mulanya meminjam tanah kepada Haji Syukur (dahulu bernama Pak Niong), yakni bertempat di RT.0011/RW.01 Kelurahan Rambutan.

Makin lama berkembang, dan membeli tanah di sebelahnya milik Haji Nasim. Yayasan mempunyai Akte Notaris Mr. Atmadirdja. Akhirnya tanah dari Haji Syukur tersebut dibeli juga. Pembeliannya dengan sangat murah, dengan harga Rp.500, - /per meter. Sekarang luas tanah seluruhnya sudah mencapai kurang lebih 1.700 meter. Pembangunannya atas dasar **swadaya**. Pada prinsipnya Yayasan Pendidikan Al Kahfi masih menerima

bantuan dari berbagai pihak. Dari pihak Pemerintah pun masih sangat diharapkan. Pendapatan yang diperoleh dari Sekolah masih jauh mencukupi. Untuk membayar Honorarium atau Gaji Guru masih rendah. Namun demikian Yayasan Al Kahfi dapat berjalan terus, karena ada **donatur** tetap, terutama dari para anggota yang jumlahnya 50 orang. Donatur tetap tidak ditentukan jumlahnya sumbangan. Hal ini tergantung tentang masalah yang dihadapi oleh Yayasan. Kalau untuk kebutuhan yang penting seperti pembelian tanah, perbaikan gedung, ulang tahun, dan sebagainya, maka para donatur dapat memberikan sumbangan secukupnya. Pada saat ini Yayasan Al Kahfi masih menitik beratkan pada kegiatan di bidang pendidikan saja. Kalau dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri yang ada di daerah Kelurahan Rambutan sebenarnya Yayasan Pendidikan Al Kahfi tidak kalah kemajuannya. Hanya masalahnya, kalau SD Negeri segala kebutuhan sekolah sudah disediakan oleh pihak Pemerintah, sehingga kelihatan **stabil**, sedangkan Madrasah yang dibina oleh Yayasan Al Kahfi, harus dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Tanggapan Pemerintah Kelurahan terhadap Yayasan Pendidikan Al Kahfi cukup baik. Pendekatan antar pimpinan Yayasan dengan pihak Pemerintah Kelurahan berjalan sangat akrab. Pihak Pemerintah Kelurahan merasa bangga dengan adanya Yayasan Pendidikan Al Kahfi, karena atas usaha sendiri dapat ikut serta menyelenggarakan pendidikan secara baik, untuk tujuan mencerdaskan bangsa, terutama anak-anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Rambutan dan sekitarnya. Kalau dari pihak Kelurahan Rambutan dapat berhasil untuk memperjuangkan berdirinya sekolah-sekolah, tingkat Dasar sampai tingkat Menengah Pertama, maka juga diharapkan dari Yayasan Al Kahfi dapat meningkatkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini mengingat untuk setiap tahunnya, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kelurahan Rambutan, tidak dapat menampung peminat murid yang ingin masuk ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama. Untuk di daerah Kelurahan Cilangkap, dari sedikit demi sedikit telah ada kemajuan di bidang pendidikan, hal tersebut adalah berkat usaha dari berbagai pihak. Pihak Pemerintah Kelurahan, lebih banyak berhasil memperjuangkan berdirinya Sekolah Dasar Negeri yang sampai saat ini telah ada 3 (tiga) buah. Sedangkan dari pihak swasta dapat berhasil menyelenggarakan Madrasah sampai tingkat Tsanawiah. Tetapi kalau ditinjau dari jumlah anak usia sekolah yang ada di daerah Kelurahan Cilangkap, dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada, maka masih jauh kekurangan sekolah.

Untuk itu dari pihak masyarakat, juga mendapat beban moral, untuk memikirkannya, dan bagaimana agar anak-anak kita dapat sekolah dengan baik. Tidak terlalu padat dan tenaga guru dapat terpenuhi. Meskipun di daerah Kelurahan Cilangkap sampai saat ini belum terdapat sekolah tingkat

SMTP, akan tetapi hal ini selalu dipikirkan oleh pihak pemerintah untuk mendirikan SMTP. Begitu pula untuk penambahan Sekolah Dasar Negeri, juga sudah mulai dipikirkan. Hal ini mengingat pada setiap tahunnya jumlah anak usia sekolah semakin meningkat.

Sampai saat ini Madrasah Asyafiiyah adalah satu-satunya pihak swasta yang dapat menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, sekalipun hasilnya belum begitu menggembirakan. Namun usaha dari pihak swasta tersebut, sudah sangat membantu pihak pemerintah secara nyata.

3. Tujuan yang akan dicapai

Usaha di bidang pendidikan formal maupun non formal oleh pihak swasta maupun Pemerintah, sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk mencerdaskan bangsa, dan khususnya mendidik anak-anak ke arah kemajuan, pembentukan watak dan pikirannya sesuai dengan cita-cita yang terkandung di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Hal ini tampak di dalam pendidikan yang dibina oleh Pihak Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Al Kahfi.

Di samping itu, apabila dilihat dengan kenyataan yang ada di masyarakat Rambutan dan Cilangkap, maka kalau tidak segera diadakan usaha-usaha di bidang pendidikan, sudah pasti akan terjadi kenakalan remaja yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, usaha yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan hasilnya sangat positif.

Sebelum berkembangnya sekolah-sekolah tingkat Dasar di DKI Jakarta, maka untuk daerah pinggiran kota seperti daerah Cilangkap, banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Tarap kehidupan mereka masih rendah. Sekolah masih dianggap asing baginya. Boleh dikatakan masyarakat di daerah Cilangkap ketinggalan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut terjadi sebelum tahun 1965. Tetapi sejak dimulainya Pelita I, maka untuk daerah Kelurahan Cilangkap dapat mengejar ketinggalan-ketinggalan tersebut. Pembangunan sarana perkotaan terus dilaksanakan, termasuk sarana pendidikan. Gedung Sekolah Dasar mulai dipersiapkan, sekalipun belum banyak muridnya. Madrasah Asyafiiyah mulai berfungsi sebagai tempat pendidikan agama yang juga diajarkan pendidikan umum. Madrasah Asyafiiyah ini merupakan penggerak pertama di dalam mempercepat pelaksanaan program pendidikan di daerah Cilangkap. Madrasah ini sampai sekarang dapat berfungsi secara baik, yang merupakan pendamping dalam pelaksanaan pendidikan formal, selain Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang ada. Jadi tujuan utama pelaksanaan pendidikan di daerah Cilangkap adalah untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan selama ini, dan selanjutnya meningkatkan kecerdasan masyarakat di daerah Cilangkap agar setingkat dengan daerah-daerah lainnya di DKI Jakarta.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

Sistem kepemimpinan masyarakat di bidang pendidikan di daerah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap tidak ada perbedaan. Kedua Kelurahan tersebut menggunakan sistem pendekatan secara **horizontal** maupun **vertikal**. Pendekatan secara horizontal artinya berorientasi langsung kepada masyarakat termasuk pula pada tokoh-tokoh pendidik yang menjadi pelaksana di bidang pendidikan itu. Sedangkan pendekatan secara vertikal artinya banyak mengadakan pendekatan atau konsultasi kepada pihak-pihak Pemerintah Kelurahan maupun pihak Penyelenggara Pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran maupun Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta. Dengan cara itulah, dimaksudkan dapat mengetahui secara pasti tentang langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Terutama untuk kepentingan anak didik sangat diutamakan.

1. Syarat-syarat dan faktor pendukung

Yang menjadi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pemimpin di bidang pendidikan di daerah Kelurahan Rambutan adalah :

- Sebagai orang yang disegani oleh masyarakat, karena telah banyak berbuat sosial dan juga berilmu agama serta dianggap banyak pengalaman dalam bidang pendidikan ;
- Orang yang tekun terhadap agama, serta pandai bergaul dengan masyarakat, dan telah cukup dewasa.

Persyaratan seperti tersebut di atas sebenarnya tidak tertulis, namun dalam kenyataan pada Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Al Kahfi, sifat-sifat sedemikian itu dimiliki padanya.

Adapun yang menjadi persyaratan pada pendidikan formal yang dibina oleh pemerintah, harus memiliki pendidikan guru yang setingkat dengan bidang studinya. Misalnya untuk mengajar di SD, paling sedikit berijazah Sekolah Guru (SPG). sedangkan yang dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah SD adalah harus sudah mempunyai pengalaman kerja yang cukup di samping harus berpendidikan Guru yang diperlukan.

Untuk di Madrasah yang dibina oleh Yayasan Pendidikan Al Kahfi, bagi Kepala Sekolah telah ditentukan dari Departemen Agama. Sedangkan Guru lainnya hanyalah merupakan Guru Honorer saja. Kesemuanya itu harus didukung dengan pendidikan formal Guru, bagi yang bertugas di Sekolah Negeri, tetapi yang di Madrasah tidak menjadi keharusan pendidikan formal Guru, yang penting ada kemauan dan berpengalaman dalam bidang pendidikan. Jadi faktor pendukung untuk menjadi pemimpin di bidang pendidikan adalah **loyalitas** terhadap pemerintah dan juga terhadap masyarakat, dalam memajukan bangsa.

Lain halnya dengan di daerah Kelurahan Cilangkap. Untuk di daerah

Cilangkap, yang dianggap sebagai pemimpin di bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- Berpendidikan Guru (SPG), untuk mengajar di Sekolah Dasar Negeri, dan untuk Kepala Sekolah mempunyai pengalaman kerja yang cukup, di samping pendidikan formal sebagai Guru ;
- Untuk yang mengajar di Madrasah Asyafiiyah, tidak harus dari SPG, melainkan diutamakan dari PGA, dan apabila persyaratan tersebut tidak ada, dapat pula diangkat sebagai tenaga Guru Honorer asalkan ada kemauan menjadi Guru (Uztad) dan masih ditambah berpengalaman di bidang pendidikan.

Untuk persyaratan seperti tersebut, terutama di Madrasah memang tidak ada peraturan secara tertulis, namun tenaga-tenaga yang sekarang ada telah memenuhi persyaratan seperti tersebut. Kemudian yang menjadi faktor pendukung untuk menjadi pemimpin di bidang pendidikan adalah loyalitas terhadap pemerintah dan juga masyarakat, seperti halnya yang terdapat di daerah Kelurahan.

2. Hak dan kewajiban

Kalau seorang Kepala Sekolah SD Negeri dan Guru-Guru nya sudah jelas hak dan kewajibannya, karena sudah ada ketentuan-ketentuan yang diseragamkan oleh Pemerintah. Tetapi untuk para pendiri Yayasan Pendidikan Al Kahfi, dan Guru-Guru Madrasah di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap, belum ada ketentuan hak dan kewajiban secara tegas. Tetapi dengan tidak secara tertulis, bahwa hak dan kewajiban pendiri Yayasan Pendidikan Al Kahfi, adalah sebagai berikut :

- Berhak memeriksa seluruh administrasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Yayasan ;
- Berhak menentukan langkah-langkah kegiatan Yayasan untuk kemajuan Pendidikan ;
- Berhak memikirkan, mencari, dan mengawasi jalannya administrasi keuangan yang diperoleh dari donatur, iuran anggota, maupun uang sekolah, baik digunakan untuk keperluan sekolah maupun untuk usaha-usaha lain dalam mengembangkan Yayasan Pendidikan Al Kahfi ;
- Berkewajiban memberikan tegoran, nasehat, dan pembinaan Anggota Pengurus, maupun Pimpinan Sekolah, demi menjaga nama baik atau lancarnya tugas-tugas yang dibebankan kepada Pengurus maupun Pimpinan Sekolah ;
- Berkewajiban mengikuti jalannya kegiatan-kegiatan Yayasan baik langsung maupun tidak langsung ;
- Berhak menerima imbalan materi atau penghargaan lain yang diberikan

oleh pengurus Yayasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau musyawarah anggota pengurus.

Dari berbagai hak dan kewajiban seperti tersebut di atas, ternyata Dewan Pendiri mendapat kewajiban yang sangat menentukan. Sampai pada pembangunan gedung, pembelian tanah untuk bangunan, dan kegiatan-kegiatan ulang tahun pun selalu dipikirkan oleh Dewan Pendiri. Sedangkan imbalan yang seharusnya diterima, bahkan sama sekali tidak diharapkan oleh Dewan Pendiri, dan biasanya dimasukkan saja dalam kas Yayasan, untuk keperluan-keperluan kegiatan-kegiatan yang sifatnya **insidental**. Jadi pada prinsipnya, bahwa Dewan Pendiri tetap berbuat sosial, melalui Yayasan Pendidikan Al Kahfi.

Kemudian untuk para pemimpin di bidang pendidikan di daerah Kelurahan Cilangkap, sebenarnya tidak lebih seperti tugas pendidikan formal. Yakni seorang Kepala Sekolah atau Pimpinan Madrasah, mendapat hak dan kewajiban sebagai berikut :

- Berhak menentukan jalannya pendidikan, baik pengaturan jam belajar maupun jam mengajar ;
- Berhak menentukan besarnya imbalan kepada tenaga Guru atau Uztad untuk setiap bulannya ;
- Berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, dan petunjuk pelaksanaan jalannya pelajaran ;
- Berkewajiban mengadakan pengawasan, pemeriksaan dan pengurangan, terhadap Guru maupun Staf, yang sekiranya dipandang tidak menepati atau mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan ;
- Berkewajiban memberikan pertanggung jawaban keuangan setiap bulan, kepada seluruh Staf Pengajar dihadapan rapat Sekolah ;
- Berkewajiban menerima bantuan atau sumbangan berupa apapun yang dapat dipergunakan untuk memajukan Madrasah.

3. Atribut / Simbol kepemimpinan

Para pemimpin di bidang pendidikan di daerah Kelurahan Rambutan maupun Cilangkap, tidak terdapat **atribut/simbol** kepemimpinan berupa apapun. Di Yayasan Pendidikan Al Kahfi, sedang dipikirkan untuk pembuatan Lambang Yayasan, dan begitu pula tentang pakaian seragam untuk Pengurus, Guru maupun anak didik. Kalau pakaian untuk Dewan Pendiri adalah berpakaian muslim.

Kemudian untuk para pemimpin di bidang pendidikan di daerah Cilangkap, juga belum ada **atribut/simbol** yang digunakan secara khusus. Untuk para Uztad (Guru Agama) berpakaian biasa, tetapi diharuskan memakai **peci** berwarna hitam. Begitu pula untuk Kepala Sekolah pun juga belum ada pakaian secara khusus. Untuk Kepala Sekolah sama dengan para Guru,

yakni berpakaian biasa dan berpeci hitam.

Sedangkan untuk para pemimpin non formal di bidang pendidikan, kebanyakan hanya berpakaian biasa dan tidak ada atribut/symbol kepemimpinan. Karena pengangkatan mereka sebagai pemimpin hanya berdasarkan anggapan dari masyarakat.

4. Cara pengangkatan dan upacara

Pengangkatan untuk pemimpin pendidikan formal di Sekolah-sekolah Dasar Negeri diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta. Tetapi untuk Guru SMTP dari Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta. Kesemuanya itu berdasarkan lulus testing dan persyaratan pendidikan yang diperoleh. Untuk SD sekurang-kurangnya berijazah SPG, dan untuk Guru SMTP sekurang-kurangnya berijazah Sarjana Muda Pendidikan. Sedangkan untuk jabatan Kepala Sekolah SD maupun SMTP, di samping harus berijazah seperti tersebut di atas, masih harus mempunyai pengalaman yang cukup.

Untuk cara pengangkatan pemimpin di bidang Pendidikan di Yayasan Al Kahfi, ditentukan dari Departemen Agama. Kepala Sekolah yang diangkat dari Departemen Agama, mendapat Surat Pengangkatan secara resmi. Tetapi dari pihak Yayasan, terutama Ketua Pengurus Yayasan berhak menolak, kalau memang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. Setelah ditolak, Dewan Pendi, berhak mengajukan usul sebagai calon pengganti. Hal tersebut menjadi hak Dewan Pengurus, namun masalah tersebut belum pernah terjadi. Kalau untuk Staf pengajar, kebanyakan hanya Guru-Guru Honorer dan untuk menentukan pengangkatannya cukup oleh Pimpinan Sekolah, dan pertimbangan dengan Dewan Pengurus. Seluruh pengangkatan untuk Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar tidak diadakan upacara secara formal.

Cara pengangkatan untuk para pemimpin di bidang pendidikan di daerah Kelurahan Rambutan tersebut, berbeda dengan yang ada di daerah Cilangkap. Kalau untuk pendidikan di Sekolah-Sekolah Negeri, tidak terdapat perbedaan, tetapi untuk di Madrasah ada perbedaan.

Penunjukan untuk Kepala Sekolah tidak harus dari Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, melainkan cukup dari hasil musyawarah seluruh Staf Pengajar. Kemudian dari hasil musyawarah tersebut terus diperkuat dengan kesediaan dari yang bersangkutan (Calon Kepala Sekolah). Setelah ada kesediaan, barulah dibuat Surat Keputusan bersama, yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Sidang atas nama seluruh Staf Pengajar. Karena Madrasah Asyafiiyah juga berfungsi sebagai Pondok Pesantren, maka seorang Kepala Sekolah juga dapat bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga Asyafiiyah. Tugasnya mengadakan pengawasan dan mengurus kesejahteraan anak-anak yang tinggal di dalam asrama.

Baik sebagai Kepala Sekolah maupun sebagai Kepala Rumah tangga, tidak diadakan upacara-upacara peresmian.

Jadi cukup dengan musyawarah Staf Pengajar dan Pengurus Madrasah atau Pesantren itulah, jabatan Kepala Sekolah maupun Kepala Rumah Tangga secara resmi diakui.

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT

Para pemimpin masyarakat di bidang pendidikan, sangat berpengaruh dan berfungsi di kalangan masyarakat, baik di daerah Kelurahan Rambutan maupun di daerah Kelurahan Cilangkap. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan, para pemimpin di bidang pendidikan banyak menguasai tentang ilmu-ilmu agama. Dan tokoh-tokoh dalam bidang agama inilah yang juga menggerakkan di bidang pendidikan. Sepertinya berdirinya Yayasan Pendidikan Al Kahfi, semua Dewan Pendiri terdiri dari tokoh-tokoh agama. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang berkembang di daerah Kelurahan Rambutan, sangat dipengaruhi oleh perkembangan agama Islam. Sampai saat ini sifat masyarakat masih bersifat agamis. Dan kehidupan agama mendapat perhatian utama oleh Pemerintah Kelurahan. Karena tanpa memperhatikan kehidupan agama, sudah pasti Lurah dan Aparat Pemerintah Kelurahan, akan mendapat kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Oleh karena itu para pemimpin di bidang pendidikan, muncul dari orang-orang yang memiliki ilmu agama yang kuat. Orang-orang yang memiliki ilmu agama yang kuat inilah, yang disegani oleh masyarakat. Dengan demikian usaha untuk memajukan masyarakat melalui bidang pendidikan cepat mendapat dukungan oleh warga masyarakat di Kelurahan Rambutan. Para pemimpin di bidang pendidikan ini, sebenarnya juga pemimpin di bidang agama atau juga dapat disebut sebagai pemimpin di bidang sosial. Karena dalam kenyataan, memang, tokoh-tokoh agama di daerah Kelurahan Rambutan sejak dari dahulu selalu memegang peranan.

Pendidikan merupakan suatu syarat mutlak untuk memajukan bangsa, dan khususnya masyarakat di Kelurahan Rambutan. Oleh karena itu, bagi pemimpin di bidang agama yang mempunyai pendidikan umum, cepat mengalihkan pandangan ke bidang pendidikan ini. Pengaruh mereka yang bergerak di bidang pendidikan sangat positif, untuk merubah sikap hidup yang fanatik Islam ke arah keseimbangan dengan kehidupan kemasyarakatan. Faktor keseimbangan antara kehidupan beragama dengan kehidupan bermasyarakat inilah, akhirnya mudah untuk menerima program-program Pemerintah. Jadi fungsi dari para pemimpin agar memahami dan ikut berperanserta dalam melaksanakan pembangunan. Syarat yang utama dalam pembangunan adalah pendidikan masyarakat harus ditingkatkan. Pendidikan dapat membentuk watak dan sikap daripada manusia. Oleh karena itu, pembentukan watak dan

sikap harus diusahakan sebaik-baiknya, tidak hanya dari segi agama, tetapi juga dari segi ilmiah. Kecerdasan yang dilandasi dengan ilmu-ilmu agama, tidak akan menyimpang dari cita-cita pembangunan nasional. Pembangunan nasional sangat diutamakan pembangunan masyarakat pedesaan. Karena hampir sebagian besar penduduk di Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian langkah yang ditempuh para pemimpin di bidang pendidikan sangat tepat sekali. Pendidikan akan menghasilkan kecerdasan bangsa. Dan pembangunan nasional akan menuju pada masyarakat yang adil dan makmur, dengan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Berarti pembangunan juga menyalurkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan bermasyarakat. Yang selama ini nampaknya, keadaan masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan lebih mengutamakan kehidupan beragama, sedangkan kehidupan bermasyarakat agak dikesampingkan.

Tetapi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, maka para pemimpin di bidang pendidikan cepat-cepat membentuk suatu wadah yang bergerak di bidang pendidikan, yakni Yayasan Pendidikan Al Kahfi. Dengan Yayasan inilah diharapkan masyarakat Kelurahan Rambutan dapat berperan serta secara aktif membangun bangsa.

Agak berbeda dengan yang ada di Kelurahan Rambutan, tentang pengaruh dan fungsi para pemimpin di bidang pendidikan di daerah Cilangkap, lebih banyak memulai dari dasar.

Selama ini, yakni sebelum tahun 1955 masyarakat di Kelurahan Cilangkap sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan para **jagoan** atau **jawara** saja. Tetapi sejak berkembangnya agama Islam di daerah Kelurahan Cilangkap dari sedikit demi sedikit dapat menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Keadaan tersebut mulai berubah secara besar-besaran, sejak pelaksanaan Pelita I. Karena dalam Pelita I tersebut, di daerah Kelurahan Cilangkap mulai diarahkan terciptanya sarana-sarana pendidikan, dan sarana ekonomi termasuk fasilitas jalan lingkungan. Dengan adanya program pembangunan masyarakat pedesaan, seperti tersebut, maka untuk masyarakat Kelurahan Cilangkap langkah pertama harus dipersiapkan cara berpikir dari non agamis ke agamis yang dilandasi pengetahuan kemasyarakatan. Untuk hal tersebut faktor pendidikan formal sangat menentukan. Sebelum pelaksanaan Pelita I, boleh dikatakan masyarakat di daerah Cilangkap masih banyak yang buta huruf. Dengan demikian untuk merubah sikap dan kehidupan yang **statis tradisional**, perlu secepatnya adanya pendidikan formal. Sejak itulah mulai timbul pemikiran mendirikan sekolah-sekolah tingkat dasar, yang disponsori oleh pihak Pemerintah Kelurahan. Para tokoh masyarakat mulai didekati dan diajak untuk membantu program-program pemerintah. Pada mulanya agak mengalami kesulitan, tetapi berkat kegigihan dan keuletan para petugas Pemerintah Kelurahan, yang dengan terus-menerus mengadakan pendekatan dengan tokoh-

tokoh masyarakat. Dengan hati-hati para petugas untuk menyadarkan para tokoh masyarakat yang masih banyak dipengaruhi cara berpikir **magis** dan banyak yang menggunakan ilmu **teluh** dan **tenung**. Tetapi ternyata pendekatan dari pihak pemerintah tersebut, dengan mudah dapat diterima oleh para tokoh masyarakat. Bahkan para tokoh masyarakat banyak yang ikut membantu sepenuhnya dalam kegiatan pendidikan. Pembangunan gedung sekolah, pembuatan jalan lingkungan, sampai pada gerakan untuk memasukkan anak ke sekolah mendapat bantuan sepenuhnya. Hal seperti itu terjadi sekitar tahun 1975. Maka dalam waktu singkat anak-anak mulai banyak yang berminat masuk sekolah, dan pada saat ini tinggal sebagian kecil anak-anak usia sekolah yang tidak masuk sekolah. Hal ini terjadi bukannya anak tidak ingin masuk sekolah, tetapi disebabkan daya tampung Sekolah Dasar yang ada sangat terbatas. Jadi dapat diketahui bahwa pengaruh dan fungsi para pemimpin di bidang pendidikan benar-benar sangat menentukan, dalam memajukan masyarakat di daerah Kelurahan Cilangkap. Hasil yang nyata pada saat ini adalah :

- Berubahnya cara berpikir masyarakat dari statis tradisional menuju ke arah dinamis rasionalistis ;
- Hilangnya cara berpikir yang dipengaruhi ilmu **teluh** dan **tenung**, menuju berpikir yang berdasarkan norma-norma keagamaan ;
- Makin berkembangnya organisasi kemasyarakatan, sehingga dapat diharapkan dalam waktu yang relatif singkat masyarakat di daerah Cilangkap dapat setarap kehidupannya, seperti di daerah perkotaan atau Kelurahan-Kelurahan di DKI Jakarta lainnya.

BAB VIII

BEBERAPA ANALISA

A. PENGARUH KEBUDAYAAN TERHADAP SISTEM KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN

Setelah mengemukakan pola-pola kepemimpinan serta gejala-gejala kemasyarakatan yang meliputi sikap mental yang menjadi kekhususan pola masyarakat pedesaan sebagai keseluruhan, seperti yang telah diuraikan di muka, seolah-olah cara berpikir masyarakat pedesaan yang bersifat statis tradisional, merupakan penghambat besar dalam mencapai program pembangunan nasional. Sebenarnya dari ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan, tidak semuanya bersifat negatif, bahkan banyak yang kita dapat mengambil contoh dari sikap hidup masyarakat pedesaan, untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Memang cara-cara berpikir statis tradisional, akan menimbulkan kelambatan-kelambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Tetapi sifat kegotong-royongan bagi masyarakat pedesaan mempunyai arti yang positif dalam pelaksanaan pembangunan. Sikap toleransi dan peranserta masyarakat pedesaan, akan mempunyai pengaruh besar dalam mempercepat keberhasilan cita-cita nasional. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus ditempuh adalah untuk mengadakan pembinaan secara terus-menerus terhadap pemuka-pemuka masyarakat pedesaan. Pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan di pedesaan, mempunyai beberapa kemungkinan. Ada yang bersifat positif, tetapi ada pula yang bersifat negatif. Yang bersifat positif, berarti dapat mengembangkan terhadap sistem kepemimpinan di pedesaan ke arah penyempurnaan. Dalam hal ini kebudayaan yang mempunyai unsur-unsur sesuai dengan kondisi masyarakat di pedesaan. Antara lain tentang kegotong-royongan, adat-istiadat, kesenian tradisional, dan lain sebagainya. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan, ada kesenian rakyat yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, karena tidak mencerminkan kebudayaan Islam. Sepertinya kesenian lenong, jipeng, topeng, dianggapnya tidak sesuai dengan sistem kepemimpinan di masyarakat Kelurahan Rambutan. Tetapi sebaliknya, kesenian lenong, jipeng, topeng tersebut di daerah Cilangkap dapat hidup subur di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak musti suatu daerah yang mempunyai warga masyarakat yang terdiri dari satu suku bangsa, akan sama pula sistem kepemimpinannya. Sepertinya di daerah Kelurahan Rambutan dengan

daerah Cilangkap, dimana kedua daerah tersebut terdiri dari satu suku bangsa, yakni suku bangsa Betawi. Tetapi ternyata kondisi kehidupan masyarakatnya berbeda. Sebenarnya yang lebih menentukan adalah letak daerah tersebut. Kalau suatu daerah terletak pada daerah perkotaan dan jaringan komunikasi sudah lengkap, maka sistem kepemimpinan di daerah tersebut sedikit banyak akan mengikuti perkembangan yang terjadi di daerah sekitarnya. Kebudayaan yang masuk ke daerah itu, tentu mempunyai pengaruh yang positif maupun negatif. Kalau kondisi masyarakat sudah terdapat landasan kebudayaan yang lebih kuat, maka tidak akan mempengaruhi sistem kepemimpinan yang ada di daerah tersebut.

Sebagai contoh di daerah Kelurahan Rambutan, tampak bahwa kondisi kehidupan masyarakatnya sudah kuat dan agamis, maka pengaruh kebudayaan yang masuk tidak merubah sistem kepemimpinan di daerah Kelurahan Rambutan. Sebaliknya yang terjadi di daerah Kelurahan Cilangkap, dimana kondisi kehidupan masyarakat belum mempunyai landasan yang kuat terhadap kebudayaan maupun agama, sehingga begitu ada unsur kebudayaan baru yang masuk, yakni unsur Islam, maka dengan cepat dapat berpengaruh pada sistem kepemimpinan di daerah Cilangkap.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN SEHUBUNGAN DENGAN SISTEM ADMINISTRASI POLITIK NASIONAL

Sistem kepemimpinan pedesaan di DKI Jakarta, merupakan bagian daripada sistem kepemimpinan Pemerintah Daerah merupakan bagian daripada sistem kepemimpinan Pemerintah Pusat. Kesemuanya itu berpedoman kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pembangunan Lima Tahun sebagai program Pemerintah mempunyai dimensi waktu dan sebagai sarana untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang ditargetkan di dalam Program Nasional. Pembangunan masyarakat pedesaan ialah merupakan bagian daripada Program Pembangunan dalam Pelita. Administrasi Pembangunan Pedesaan ialah menyangkut pengelolaan pembangunan pedesaan baik mengenai perencanaan pembangunan pedesaan maupun mengenai pelaksanaan operasionalnya, sesuai dengan pola yang tercantum di dalam Pelita maupun berdasarkan inisiatif masyarakat yang bersangkutan. Yang menjadi perhatian kita ialah terutama pengembangan daripada Administrasi Pedesaan sebagai sistem keilmuan dan sumbangannya terhadap pembangunan. Dalam hal ini otomatis menyangkut Desa sebagai unit kesatuan kolektiva. (Sumber Saparin, 1977 ; 201).

Sistem kepemimpinan pedesaan di daerah Kelurahan Rambutan, bila dihubungkan dengan sistem administrasi politik nasional, sebenarnya telah mempunyai hubungan yang sejalan.

Karena dalam pelaksanaan sistem kepemimpinan di daerah Kelurahan Rambutan selalu berorientasi kepada peningkatan kecerdasan bangsa, dan tercapainya kehidupan yang aman, tertib demi kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya untuk menuju ke arah itu, memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu harus diprogramkan secara bertahap. Tetapi pada saat ini masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan telah terdapat saling pengertian untuk bersama-sama memperjuangkan cita-cita nasional, yang dimulai dari daerah pedesaan. Ketertiban dan keamanan dapat ditegakkan dan usaha untuk membangun masyarakat yang sejahtera terus digalakkan. Program pemerintah untuk membentuk Keluarga hidup sejahtera, mulai dapat dilaksanakan, sekalipun belum secara keseluruhan. Tetapi yang penting, bahwa usaha menuju ke arah itu telah dapat dilakukan oleh warga masyarakat.

Masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan, telah banyak yang mengikuti program Keluarga Berencana. Di samping itu kesadaran masyarakat untuk mengikuti sebagai anggota koperasi cukup tinggi. Hal seperti itu, akan memudahkan tercapainya sistem administrasi politik nasional, dalam mengatur jalannya administrasi pemerintahan. Cita-cita nasional akan mudah tercapai, apabila sistem kepemimpinan pedesaan telah dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Hal ini sangat tergantung daripada pembinaan Pemerintah Pusat maupun Daerah, kepada tiap-tiap warga masyarakat di daerah pedesaan. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan, hubungan antara Pemerintah Kelurahan dengan pemuka-pemuka masyarakat sangat erat, sehingga dapat diharapkan bahwa segala program Pemerintah Kelurahan Rambutan senantiasa mendapat dukungan dari masyarakat. Dan akhirnya cita-cita nasional segera dapat tercapai, melalui masyarakat pedesaan.

Di daerah Kelurahan Cilangkap, sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan, masih jauh dari sempurna. Namun apabila dilihat dari segi sejarahnya, memang untuk di daerah Kelurahan Cilangkap wajar mengalami kelambatan. Karena pada mulanya orientasi Pemerintah Kelurahan, belum sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat. Pemerintah Kelurahan Cilangkap pada mulanya banyak disibukkan untuk mengatur masalah-masalah intern, yang banyak permasalahan menyangkut kepentingan warga masyarakat. Sepertinya timbul saling berlomba tentang ilmu-ilmu kesaktian yang sulit untuk diselesaikan. Masyarakat yang terjadi berkelompok-kelompok menurut perguruan masing-masing, tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama untuk disatukan. Orientasi masyarakat tidak pada Pemerintah Kelurahan, melainkan kepada guru-guru perguruan masing-masing. Keadaan yang demikian sudah berjalan sangat lama, maka langkah Pemerintah Kelurahan yang pertama mengadakan pendekatan kepada guru-guru perguruan tersebut. Langkah ini dimulai baru pada awal Pelita I. Sistem kepemimpinan

pemerintah Kelurahan Cilangkap tersendat-sendat. Menjelang Pemilu tahun 1971 keadaan masyarakat mulai ada kekacauan kembali, karena masyarakat Cilangkap dijadikan rebutan dari partai politik yang menjadi kontestan Pemilu. Akibat yang ditimbulkan agak berat, karena masyarakat menjadi berkelompok-kelompok lagi menurut pengaruh partai politik yang kuat dan sehabis Pemilu pun masih terasa ada perpecahan. Kemudian langkah yang diambil dari pihak pemerintah Kelurahan adalah mengadakan pendekatan kepada tokoh-tokoh politik yang terdapat di daerah Cilangkap. Ternyata sistem pendekatan ini adalah sistem yang paling baik, untuk memecahkan permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. Di dalam pendekatan itu terdapat saling pengertian antara pihak pemerintah, partai politik, dan golongan karya (Golkar). Sampai tahun 1976 atau menjelang Pemilu tahun 1977, keadaan masyarakat di daerah Kelurahan Cilangkap cukup dapat dikendalikan. Pada menjelang Pemilu tahun 1982, sekalipun ada usaha dari pihak tertentu, untuk menghasut masyarakat, tetapi masyarakat tidak terpancing, sehingga keadaan masyarakat di Cilangkap sehabis Pemilu sampai sekarang cukup tertib dan aman. Sistem pemerintah Kelurahan berjalan baik, pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan program-program pemerintah. Sebagai contoh pembangunan jalan lingkungan dapat berjalan tepat pada waktunya, bahkan sejak awal tahun 1983, telah masuk alat transportasi berupa kendaraan Metromini dan Oplet ke wilayah Kelurahan Cilangkap.

Jadi kaitannya sistem kepemimpinan pemerintah Kelurahan dengan sistem administrasi politik nasional, kiranya dapat diketahui dengan jelas, bahwa apa yang dihasilkan oleh pemerintah Kelurahan tersebut merupakan bagian dari hasil sistem administrasi politik nasional. Kemudian cara yang dipakai oleh Pemerintah Kelurahan Cilangkap untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat itu pun, sudah menunjukkan sikap yang dilandasi oleh norma-norma yang terkandung dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Sehingga sistem kepemimpinan pedesaan di daerah Cilangkap, hubungan dengan sistem administrasi politik nasional sangat erat, yakni segala yang dilakukan oleh Pemimpin Kelurahan maupun masyarakat, sebenarnya merupakan bagian daripada sistem administrasi politik nasional. Karena **Desa** atau **Kelurahan**, merupakan satuan sosial masyarakat, yang perlu terus-menerus dibina dan dikembangkan dengan menggunakan sistem administrasi politik nasional, yang juga ditrapkan pada sistem kepemimpinan masyarakat di daerah pedesaan.

C. SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Telah diuraikan di bagian depan, bahwa program pemerintah dalam Pembangunan Nasional akan membentuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kiranya cukup jelas

arah dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut.

Jadi sistem kepemimpinan pedesaan selalu berorientasi kepada program-program Pembangunan Nasional itu. Untuk di daerah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, baik pemimpin formal maupun non formal, sejak dimulainya Pelita I telah mengarah kepada tercapainya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan mental spiritual maupun pembangunan fisik, yang menuju kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan bersama pemimpin masyarakat.

Kalau di daerah Kelurahan Rambutan tokoh-tokoh agama lebih banyak berperan, tetapi di daerah Kelurahan Cilangkap tokoh-tokoh sosialnya yang lebih banyak berperan. Sistem kepemimpinan para tokoh-tokoh tersebut, menggunakan sistem musyawarah dan mufakat di dalam memecahkan segala permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut menyangkut pula dalam program Pembangunan Nasional. Di dalam program pemerataan hasil-hasil pembangunan, sangat ditekankan sasarannya akan menjangkau ke daerah-daerah pedesaan. Sepertinya program listrik masuk desa, koran masuk desa, tentu saja para pemimpin masyarakat pedesaan harus mempersiapkan ke arah itu. Sistem kepemimpinan Pemerintah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, ternyata sudah mempersiapkan baik mental maupun fisik, yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, apabila program tersebut akan dilaksanakan. Hal ini terlihat bahwa program Pembangunan Lima Tahun, yang dilaksanakan dalam Inpres Jalan lingkungan di daerah tersebut dapat berjalan baik. Kemudian juga program listrik masuk desa, yang sekarang juga sudah masuk ke daerah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, secara positif manfaatnya, karena dapat merubah sistem kehidupan bagi masyarakat pedesaan, menjadi masyarakat yang dapat menggunakan dengan teknologi modern. Maka akibat yang ditimbulkan sangat luas, yang dapat menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat di daerah Kelurahan Rambutan dan Cilangkap, dapat diharapkan dalam waktu yang relatif singkat, tidak merasa ada perbedaan cara berpikinya. Kalau selama ini bagi masyarakat di daerah Rambutan selalu berpikir yang bersifat agamis, ada kemungkinan dalam waktu yang tidak lama akan dapat menyelaraskan, menyeimbangkan dalam kehidupan beragama akan seimbang dengan kehidupan duniawi. Masing-masing tidak ada saling menonjol, yang akhirnya cita-cita untuk membentuk membangun manusia Indonesia seutuhnya terwujud. Begitu pula di daerah Cilangkap, sistem kepemimpinan Pemerintah Kelurahan dan para pemimpin masyarakat, telah berhasil mempersiapkan mental dan fisik masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa mengalami hambatan yang berarti. Tingkat kecerdasan masyarakat di daerah Kelurahan Cilangkap, sedikit

demi sedikit dapat mengejar ketinggalan-ketinggalan, bila dibandingkan dengan daerah-daerah di Kelurahan-Kelurahan DKI Jakarta. Masyarakat Cilangkap tidak merasa hidup di daerah pinggiran kota lagi, karena segala fasilitas daerah perkotaan hampir terpenuhi.

B I B L I O G R A F I

- Gunadi, Tom., **"Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD '45,"** Angkasa, Bandung, 1981.
- Koentjaraningrat, **"Pengantar Ilmu Antropologi,"** Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Koentjaraningrat, Prof., Dr., **"Manusia dan Kebudayaan di Indonesia,"** Djambatan, Jakarta, 1983.
- Kantor Sensus dan Statistik DKI Jakarta, **"Direktori RT/RW DKI Jakarta Timur,"** 1977.
- Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi U.I., **"Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah,"** Jakarta, 1976.
- Nas, Peter J.M., **"Kelurahan-Kelurahan di Jakarta suatu penilaian statistik mengenai perbedaan Sosial,"** Jakarta, Bratara Karya Angkasa, Jakarta, 1979.
- Pemerintah DKI Jakarta, **"Buku I, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga, " 1979/1980 – 1983/1984.**
- _____, **"Buku II, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga," 1979/1980 – 1983/1984.**
- _____, **"Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah Kelurahan Rambutan,"** Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, 1980 – 1981.
- _____, **"Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah Kelurahan Cilangkap,"** Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, 1980 – 1981.
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, **"Tentang Pemerintahan Desa dilengkapi dengan Proses Pembahasan di DPR,"** BP. Dharma Bhakti, Jakarta, 1982.

**ANGGARAN DASAR
IKATAN PENCAK SILAT SELURUH INDONESIA
MACAN BETAWI JAKARTA TIMUR**

Pasal I

- Nama : IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA "MACAN BETAWI."
Kedudukan : Berkedudukan di Wilayah Jakarta Timur Kelurahan Rambutan Kecamatan Pasar Rebo.
Waktu : Didirikan pada tanggal 27 Juli 1979.

Pasal II

- Azas : Berdasarkan pada Landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar R.I. 1945.
Tujuan : Memupuk persahabatan, menggali dan mengembangkan seni budaya/Kebudayaan Asli bangsa Indonesia di bidang Persilatan dan untuk meningkatkan mutu persilatan.
Usaha : Membimbing Anggota ke arah kesadaran dan keinsyafan akan pentingnya Olah Raga Silat.

Pasal III

- Keanggotaan : 1. Yang dapat diterima menjadi anggota ialah :
– Yang berminat olah raga silat dengan tidak memandang dan membedakan bangsa, suku, agama, dan kedudukan.
2. Yang tidak terikat keanggotaan/perkumpulan lain yang sejenisnya.

Pasal IV

- Pengurus : A. Pengurus terdiri dari :
1. Ketua I
2. Ketua II
3. Sekretaris I & II

4. Bendahara I & II
 5. Seksi-seksi : a. Sie Humas
b. Sie Pembantu Umum
 6. Dewan Pendekar
 7. Korps Pelatih/Ass. Pelatih (Kader)
- B. Pelindung
 - C. Penasehat
 - D. Pembina

Pasal V

- Perbendaharaan : Keuangan didapat dari :
1. Uang pangkal
 2. Uang iuran
 3. Usaha-usaha lain yang tidak terikat dan dianggap sah.

Pasal VI

- Permusyawarahan : 1. Musyawarah Pengurus
2. Musyawarah Anggota

Pasal VII

- Perubahan : Perubahan hanya dapat dilaksanakan oleh keputusan Musyawarah Pengurus/Anggota.

Pasal VIII

- Pembubaran : Pembubaran hanya dapat dilakukan oleh keputusan Musyawarah pengurus/anggota luar biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu.

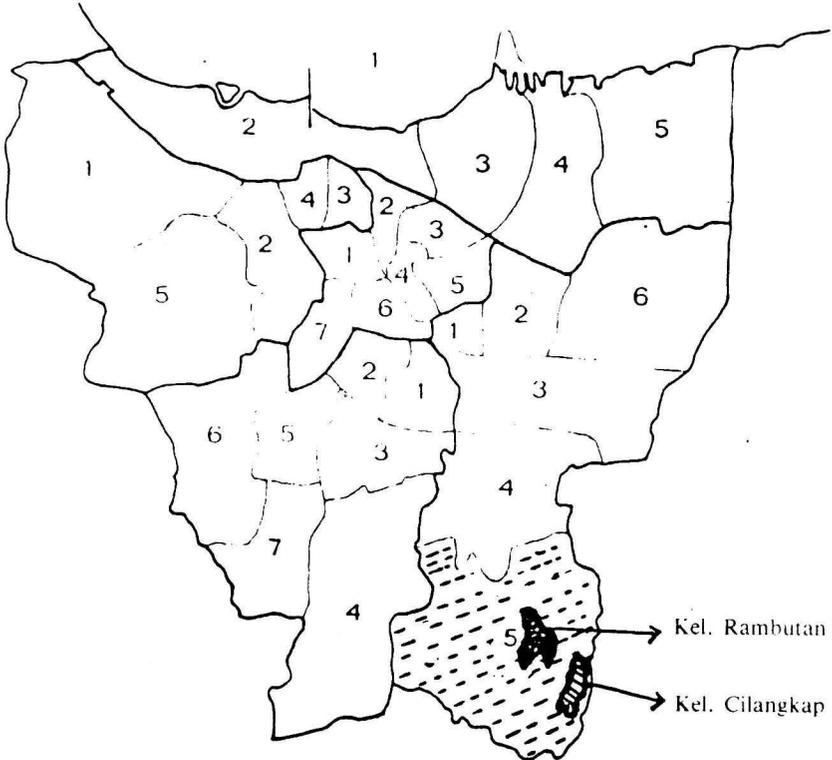
Pasal IX

- Tambahan : Hal-hal lain yang belum atau tidak tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dengan Anggaran Rumah Tangga.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PETA LOKASI.
2. PHOTO SITUASI DAN KEGIATAN
3. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH RUMAH TANGGA.
4. ORGANISASI SILAT MACAN BETAWI.
5. DAFTAR INFORMAN.

PETA WILAYAH D.K.I. JAKARTA



JAKARTA PUSAT

- 1 Kecamatan Sawah Besar
- 2 Kecamatan Sunan Besar
- 3 Kecamatan Kemayoran
- 4 Kecamatan Senen
- 5 Kecamatan Cempaka Putih
- 6 Kecamatan Menteng
- 7 Kecamatan Lontar Arjuna

JAKARTA UTARA

- 1 Kecamatan Pulo Setu
- 2 Kecamatan Perintis
- 3 Kecamatan Taman Prasik
- 4 Kecamatan Karet
- 5 Kecamatan Cengkareng

JAKARTA BARAT

- 1 Kecamatan Cengkareng
- 2 Kecamatan Grogol Petamburan
- 3 Kecamatan Taman Sari
- 4 Kecamatan Tambora
- 5 Kecamatan Keb. Jeruk

JAKARTA SELATAN

- 1 Kecamatan Tebet
- 2 Kecamatan Setia Budi
- 3 Kecamatan Mampang Prapatan
- 4 Kecamatan Pasar Minggu
- 5 Kecamatan Kebayoran Baru
- 6 Kecamatan Kebayoran Lama
- 7 Kecamatan Cilandak

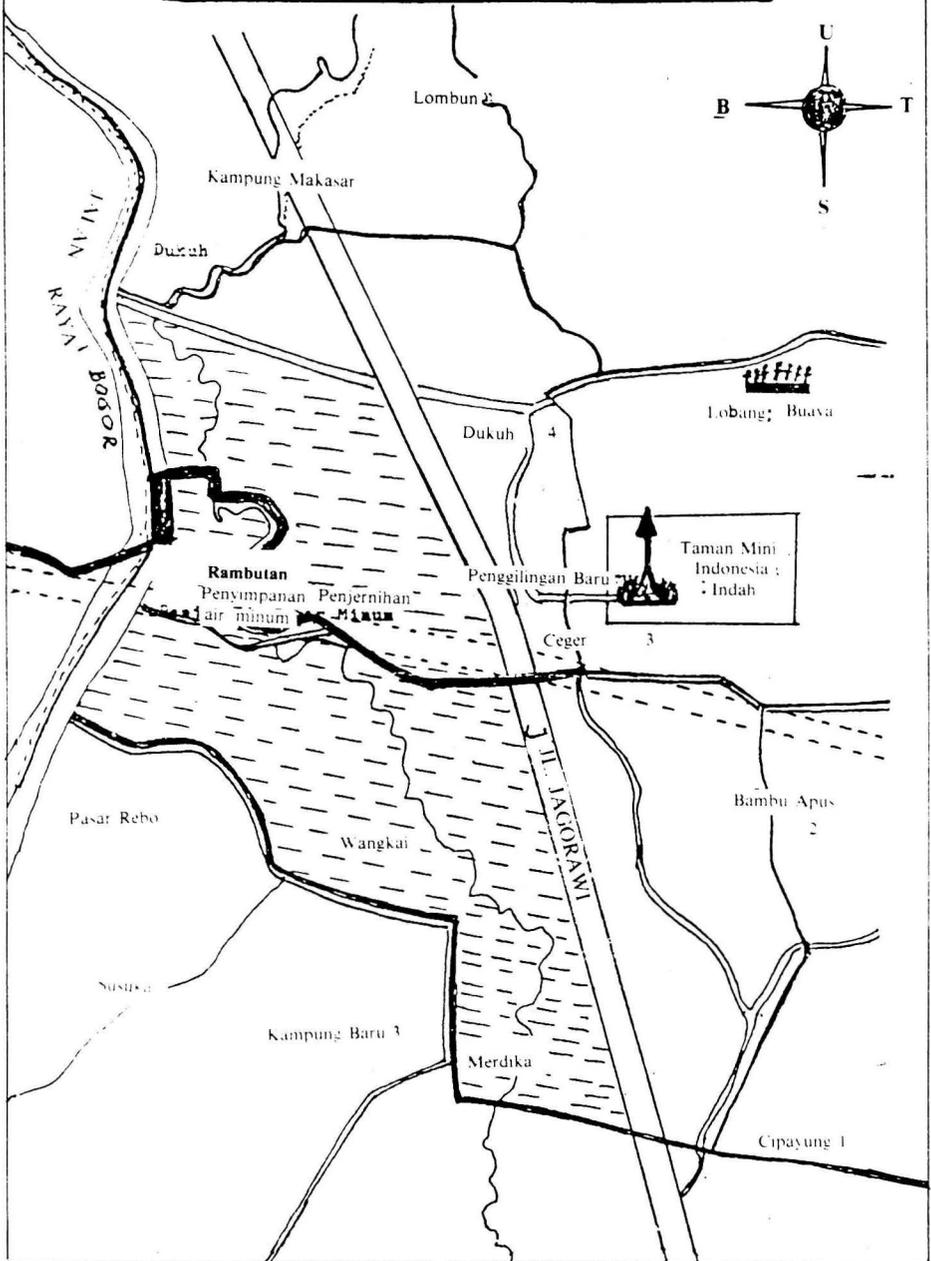


Wilayah Kec.
Pasar Rebo

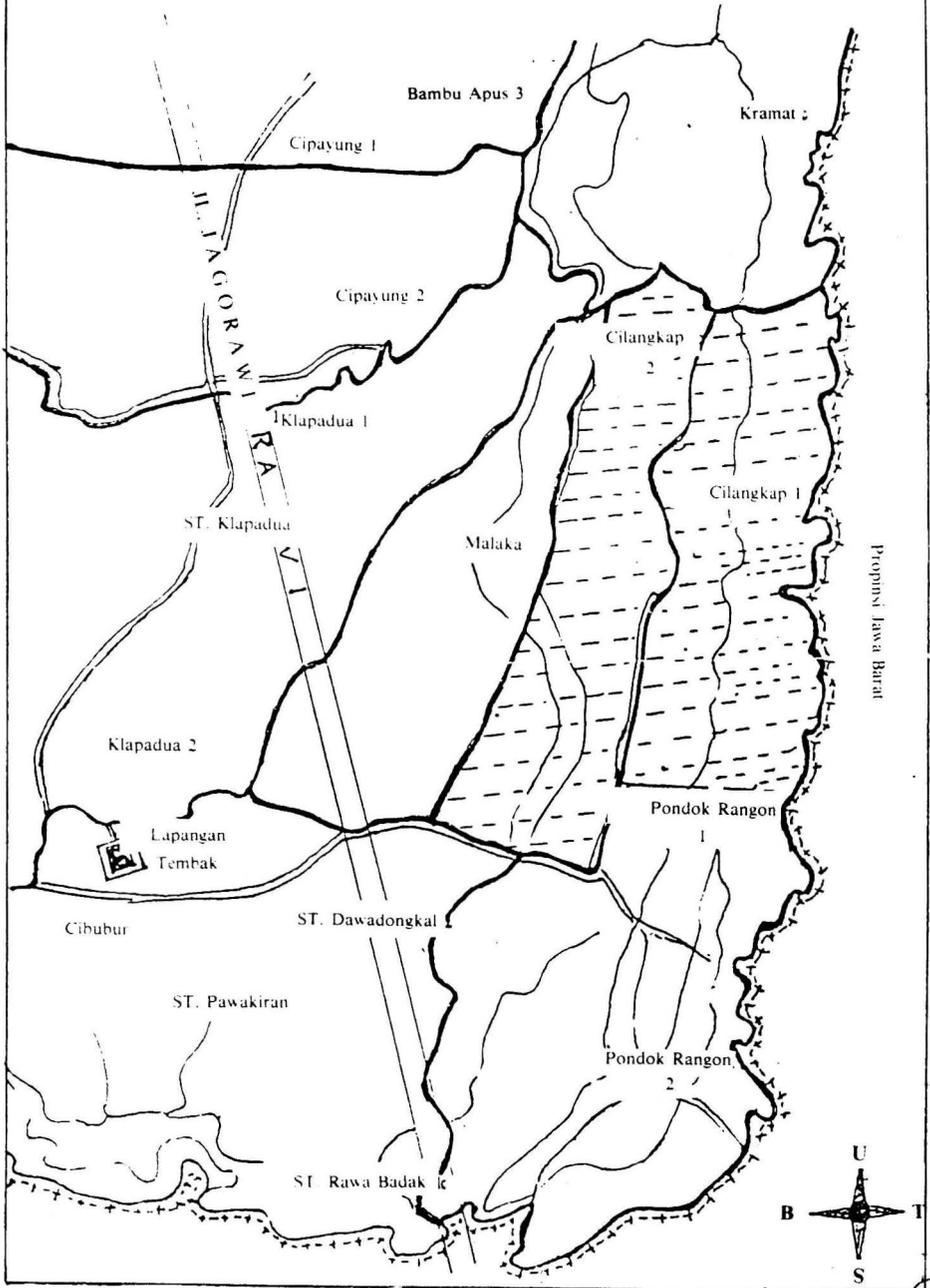
JAKARTA TIMUR

- 1 Kecamatan Marramas
- 2 Kecamatan Pulo Asadung
- 3 Kecamatan Jatinegara
- 4 Kecamatan Kramat Jati
- 5 Kecamatan Pasar Rebo
- 6 Kecamatan Cokung

PETA LOKASI KELURAHAN RAMBUTAN



PETA LOKASI KELURAHAN CILANGKAP



ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA MACAN BETAWI

BAB I : KEANGGOTAAN

Pasal I

- Keanggotaan** : 1. Anggota Biasa, ialah yang berminat olah raga silat.
2. Anggota luar biasa, ialah mereka yang dianggap atau dibutuhkan oleh Organisasi/Pengurus.
3. Anggota kehormatan, ialah mereka yang telah berjasa pada Organisasi/Pengurus.

Pasal II

- Syarat Keanggotaan** : 1. Mengisi formulir
2. Disetujui oleh orang tua/wali

Pasal III

- Kewajiban Anggota** : 1. Membayar Uang pangkal
2. Membayar Uang iuran
3. Taat dan patuh pada peraturan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. Tidak terikat keanggotaan lain, di luar organisasi Macan Betawi
5. Tidak bertindak sendiri-sendiri
6. Diharuskan mempunyai pakaian Khusus yang sudah ditentukan, yakni kemeja kuning dan celana hitam
7. Berlatih dengan sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pelatih
8. Menebus kartu anggota
9. Mengikat rasa persahabatan sesama anggota maupun kepada pihak lain dengan tidak memandang bangsa, suku, agama dan kedudukan
10. Memelihara akhlak yang baik serta nama baik perguruan/organisasi Macan Betawi ke luar maupun ke dalam.

Pasal IV

- Hak Anggota : 1. Bertanya, mengajukan usul, mengeluarkan pendapat, memilih dan dipilih untuk semua jabatan.
2. Apabila dipecat berhak untuk membela diri dalam rapat khusus untuk itu.
 3. Mendapat perlindungan dalam hal kebenaran.

Pasal V

- Hilang hak anggota : A. Dengan hormat :
1. Meninggal Dunia
 2. Permintaan sendiri (tertulis)
- B. Dipecat :
1. Tidak mengindahkan peraturan-peraturan
 2. Karena merugikan nama baik Organisasi/perguruan Macan Betawi
 3. Menjalani hukuman penjara.

BAB II. ORGANISASI

Pasal VI

- Tingkatan dibagi : 1. Tingkat I : Pengurus Besar
2. Tingkat II : Pengurus Cabang
 3. Tingkat III : Pengurus Ranting

Pasal VII

Lepas dan bersih dari Ikatan dan pengaruh Organisasi Ideologi partai-partai politik.

BAB III. SOSIAL

Pasal VIII

- Sosial : 1. Apabila salah seorang anggota/pengurus kawin, meninggal dunia akan diedarkan pungutan sumbangan guna membantu yang bersangkutan.
2. Yang berhak menerima, ialah anggota/pengurus sekurang-kurangnya yang sudah enam bulan masa jabatannya.
 3. Yang berhak menerima sumbangan, diri sendiri, isteri, anak, dan orang tua yang bersangkutan.

BAB IV : PERMUSYAWARATAN

Pasal IX

- Permasyarakatan : 1. Musyawarah dapat dilangsungkan atau dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari anggota yang hadir.
2. Apabila Qorum mencukupi, musyawarah ditunda.
3. Musyawarah Pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
4. Musyawarah anggota diselenggarakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

BAB V : PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal X

- Pemilihan Pengurus : 1. Pengurus dipilih dalam tiga tahun sekali
2. Pengurus lama dapat dipilih kembali.

BAB VI : KEUANGAN

Pasal XI

- Keuangan : 1. Uang Pangkal (ditentukan melihat keadaan)
2. Uang iuran : setiap latihan @ Rp.50,00
(dengan catatan : dapat dirubah apabila keadaan tidak mengizinkan).

BAB VII : KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal XII

- Kewajiban Pengurus : 1. Pengurus mewakili atas nama Pengurus Macan Betawi ke dalam maupun ke luar.
2. Pengurus berkewajiban membimbing anggota ke arah kebenaran.

BAB VIII : PERUBAHAN

Pasal XIII

- Perubahan : Peraturan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah, ditambah dan dikurangi oleh keputusan Musyawarah Pengurus.

Pasal XIV

Tambahan : Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian hari dalam peraturan khusus.

BAB IX : P E N U T U P

Penutup : Peraturan Anggaran Rumah Tangga ini diperbuat dan disyahkan oleh keputusan musyawarah.

Dibuat di : Jakarta

Ketua I

Ketua II

Sekretaris I

ttd.

ttd.

ttd.

(M. YUSUF, BBA)

(SANTRYO)

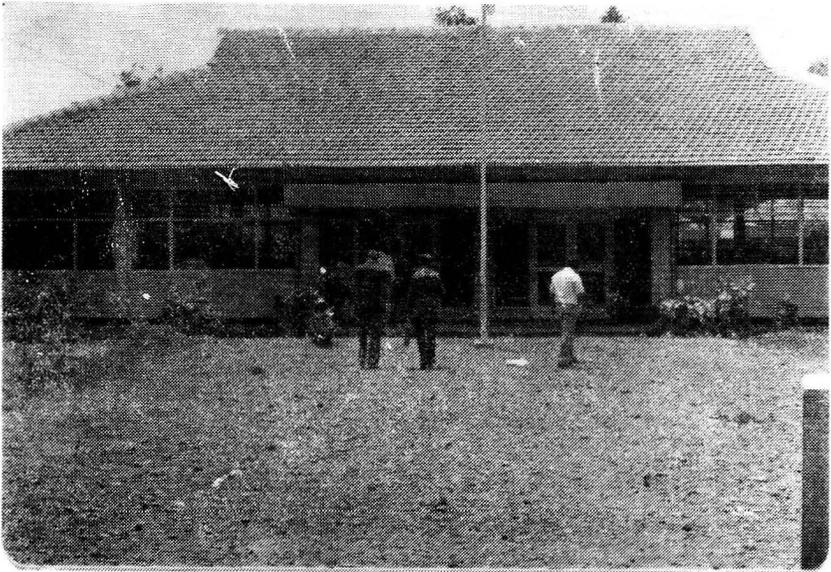
(TATANG SOEMANTRI)



Gb. 1. Lurah Rambutan H. Moh. Natsir sedang diwawancarai oleh Ketua Aspek tentang Sistem Kepemimpinan Masyarakat pedesaan di Kp. Rambutan.



Gb. 2. Foto bersama Lurah beserta Staf Kelurahan Rambutan dengan Anggota Tim peneliti Sistem Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan di Kp. Rambutan.



Gb. 3. Gedung Kelurahan Rambutan yang baru setelah bertahun-tahun menempati gedung Kelurahan lama. Gedung baru ini dilengkapi dengan Ruang Pertemuan untuk Balai Desa.



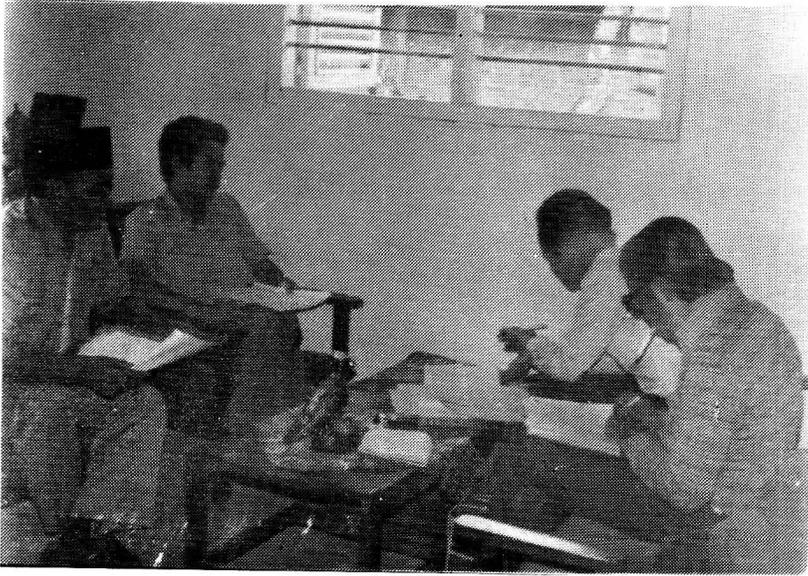
Gb. 4. Wakil Lurah Rambutan (Amirullah Rapei) sedang diwawancarai oleh Ketua Aspek tentang Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan di Kp. Rambutan.



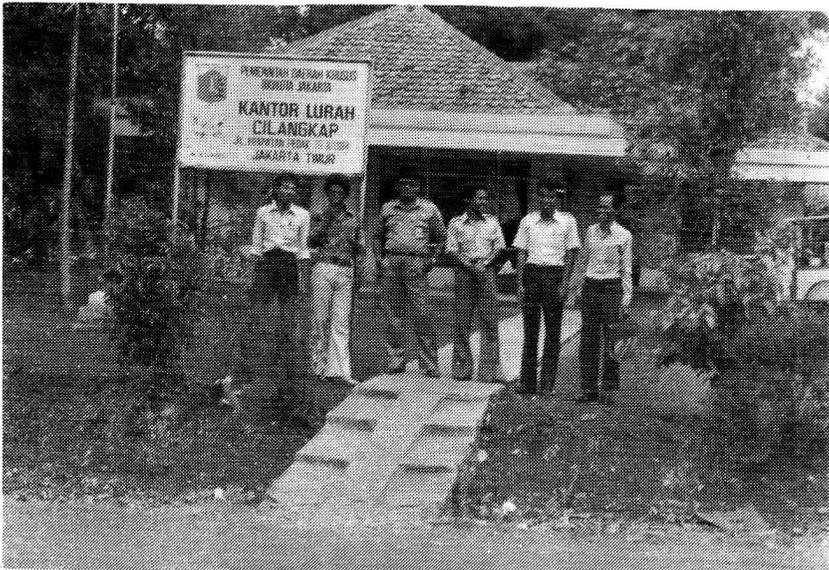
Gb. 5. Salah satu Informan (Ketua Rw.03) Kel. Rambutan, sedang diwawancarai oleh Anggota Tim, tentang Kepemimpinan di bidang sosial masyarakat.



Gb. 6. Tokoh di bidang Agama (Haji Harun) sedang diwawancarai oleh salah satu Anggota Tim tentang Kepemimpinan di bidang agama.



Gb. 7. Wakil Lurah Cilangkap (Bp. Iwan Setiawan) dan Kepala Lingkungan (Bp. Hamdan) sedang memberikan jawaban kepada Tim Aspek Sistem Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan.



Gb. 8. Foto bersama antara Staf Kelurahan Cilangkap dengan Anggota Tim Aspek Sistem Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan.

I N D E K S

A.

Agamis
Agraris
Agri-bisnis
Aliran
Amen
Amil
Ani-ani
Ape
Arak-arakan
Arisan
Asuhan
Atribut
Auwabin

B.

Bandul
Batav
Batavia
Beberitan
Bendera
Berafiliasi
Bercokol
Bersih desa
Betawi
Bisnis
Boan
Bongkat
Bongkep

C.

Colek
Celakak
Centeng
Cilangkap
Condet

D.

Derap
Derepin

Desa
Dinamika
Dinamis
Dinamisme
Drigama
Drill kuning

E.

Enggak
Engkong

F.

Fasilitas
Firtel
Formal

G.

Gang
Gotongan
Guapala
Gun

H.

Habib
Hildebrand
Hirarkhis
Hitam
Hortikultura
Huma

I.

Imbalan
Individu
Internasional
Irigasi

J.

Jagoan
Jawara

Jibun

K.

Kagak
Kampanye
Karel Bulher
Kebal
Ken
Kentjoo
Khalif
Khotbah
Kinan
Kolektiva
Kocokan
Kontestan
Klen
Ku
Kue-kue
Kuning
Kuntau
Kyai

L.

Lambang
Lawan
Lineage
Lis
List
Lo
Lorong
Lurah

M.

Malam
Magis
Menggalau
Mengarak
Meramu
Modern

Modernisasi
Motto
Mutlak

N.

Nanggap
Nangis
Nangkep
Non agamis
Non agraris
Nganterin
Ngikutin
Ngrojeng
Nyak
Nyaum

O.

Okulasi
Onderdistrict
Optimal

P.

Padro
Pajangan
Pamongpraja
Panji
Pasar Minggu
Pasar rebosan

Pat segol
Paturin
Pegi
Pemekoran
Pengulu
Persiletan
Piagam
Potensial
Primitif

R.

Rasional
Regent
Relevan
Religius
Remaja mesjid
Rujukan
Ruwatan

S.

Saban
Sapi
Sarmili
Sematawayang
Serakan
Si
Simbol
Sian

Sityoo
Son
Spesipik betawi
Srah-srahan
Stabil
Statis
Sungkawa
Syuu

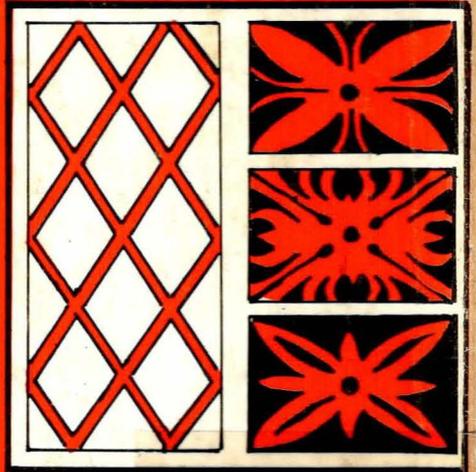
T.

Tahajud
Takabur
Teluh
Tenung
Terbang
Terisolasi
Terisolir
Trang
Tukan
Tradisional

U.

Ujung
Uli
Utang
Uztad





Perpustakaan
Jenderal Keb
303.408
SUD
s